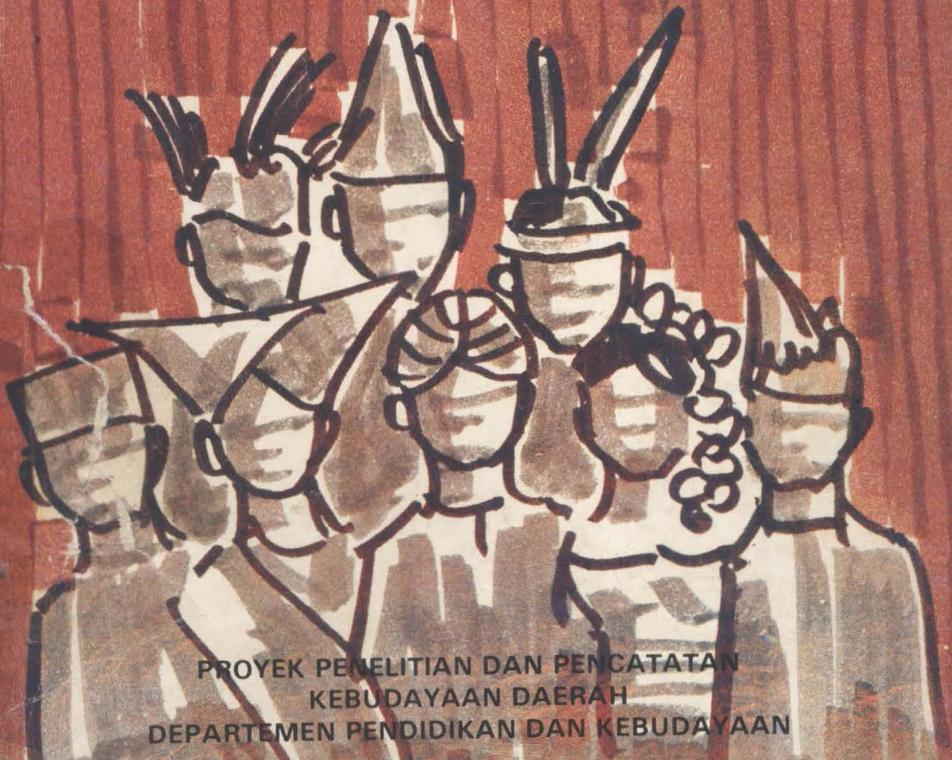


Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
DAERAH SULAWESI UTARA**

DIREKTORAT KESENIAN SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN APREIASI DAN FEESTASI SENI SEKSI DOKUMENTASI	
Klas/Kode	No. Induk : 415/84
F 415 84	Tanggal : 26-7-84
	Paraf : <i>any</i>

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN KEBUDAYAAN
DAERAH SULAWESI UTARA
1978 / 1979**

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1978/1979, meliputi Propinsi :

1. D.I. Aceh
2. Riau
3. Jambi
4. Sumatera Selatan
5. Lampung
6. Bengkulu
7. Kalimantan Barat
8. Kalimantan Tengah
9. Kalimantan Selatan
10. Sulawesi Utara
11. Sulawesi Tengah
12. Sulawesi Tenggara
13. Jawa Barat
14. Nusa Tenggara Barat
15. Nusa Tenggara Timur.

Proyek ini bertujuan :

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional".

Adapun sasaran proyek ini ialah :

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni :

- Sejarah Daerah, dengan Tema : SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
- Adat-Istiadat Daerah, dengan tema : ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema : CERITERA RAKYAT MITOLOGIS DAN LEGENDARIS
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema : PENGARUH MIGRASI TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah

Kegiatan Proyek ini dibagi atas dua, yaitu :

Kegiatan di Pusat, meliputi :

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah, meliputi :

Survei lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1978/1979 proyek ini dapat menghasilkan 75 buah naskah dari 15 Propinsi tersebut di atas.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerjasama antara Proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, KANWIL Departemen P. dan K. di daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah Sejarah Daerah Sulawesi Utara dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL ini kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Kesenian, Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan Departemen P. dan K. Propinsi Sulawesi Utara
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Manado – Sulawesi Utara
3. Pemerintah Daerah Sulawesi Utara.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara.
5. Tim penelitian dan pencatatan kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
6. Tim Penyempurna naskah di Pusat terdiri dari:
 - Konsultan : 1. Prof. Dr. I.B. Mantra
2. Dr. Astrid S. Susanto
3. Abdurachman Surjomihardjo
4. A.B. Lopian
 - Ketua : Sutrisno Kutoyo

- Sekretaris : Soenjata Kartadarmadja
 - Anggota : 1. Anhar Gonggong
2. Mardanas Safwan
3. Masjkuri
4. Surachman
5. Muchtaruddin Ibrahim
6. Sri Sutjiatiningsih
7. Editor yang terdiri : 1. Frans Hitipeuw
2. Sutrisno Kutoyo
8. dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo

NIP 130117589

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. TUJUAN PENELITIAN	10
B. MASALAH	11
C. RUANG LINGKUP	12
D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN	13
E. HASIL AKHIR	17
BAB II : KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD KE-19	18
A. PEMERINTAHAN	18
B. SOSIAL BUDAYA	27
1. <i>Bidang Pendidikan</i>	27
2. <i>Seni Budaya</i>	32
3. <i>Alam pikiran/kepercayaan</i>	41
C. KEHIDUPAN EKONOMI	48
BAB III : KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1900-1928	57
A. PENGARUH POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN DESENTRALISASI DI DAERAH	57
B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN ATAUPUN YANG MERU- PAKAN EMBRIO DARI PROSES ZA-	

MAN KEBANGKITAN NASIONAL DI	
DAERAH	72
1. <i>Akibat pelaksanaan Politik Etika</i>	72
2. <i>Aktivitas masyarakat dalam berorganisasi</i>	79
C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN PARTAI/ORGANISASI	84
1. <i>Politik</i>	84
2. <i>Sosial</i>	90
3. <i>Wanita</i>	93
4. <i>Agama</i>	96
5. <i>Pendidikan</i>	105
6. <i>Seni Budaya</i>	106
7. <i>Kepemudaan dan kepanduan</i>	107
8. <i>Pers</i>	110
9. <i>Koperasi</i>	114
D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914-1918) DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD	118
1. <i>Sikap Pemerintah Hindia Belanda</i>	118
2. <i>Anggota Volksraad yang mewakili Daerah</i>	120
3. <i>Dewan-dewan (Raad) yang berdiri di Daerah</i>	123
E. PERJUANGAN DI DAERAH	124
1. <i>Interaksi dengan pemberontakan tahun 1926/1927.</i>	124
2. <i>Sikap masyarakat terhadap asas non koperasi dan koperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda</i>	125
3. <i>Kegiatan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan lainnya</i>	127
BAB IV : KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928-1942	130

A.	PENGARUH POLITIK PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA PADA TAHUN ± 1930	130
1.	<i>Politik Keras terhadap gerakan non koperasi</i>	130
2.	<i>Undang-Undang Sekolah Swasta (Wildescholen Ordonnantie)</i>	134
B.	DEPRESI EKONOMI DI DAERAH	135
C.	INTERAKSI TERHADAP KEGIATAN PARTAI/ORGANISASI	142
1.	<i>PNI – Baru</i>	144
2.	<i>Partai Indonesia (Partindo)</i>	146
3.	<i>Partai Serikat Islam Indonesia (PS-II)</i>	146
4.	<i>Partai Indonesia Raya (Parindra)</i>	151
5.	<i>Gabungan Politik Indonesia (GAPI)</i>	153
6.	<i>Gerakan Indonesia Berparlemen.</i>	153
D.	KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG	155
1.	<i>Sikap Pemerintah Hindia Belanda</i>	155
2.	<i>Keadaan masyarakat</i>	156
3.	<i>Sikap masyarakat terhadap Pemerintah Hindia Belanda</i>	158
4.	<i>Keadaan Pemerintah Hindia Belanda di daerah pada saat terakhir</i>	160
E.	KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG	162
1.	<i>Propaganda Jepang yang terasa di daerah</i>	162
2.	<i>Waktu kedatangan pasukan Jepang</i>	165
3.	<i>Sikap Jepang terhadap aparatur Pemerintah Hindia Belanda</i>	166
4.	<i>Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia</i>	167

5. *Sikap Bangsa Indonesia terhadap
Jepang*

169

BAB V	:	PENUTUP	172
		DAFTAR KATA	173
		LAMPIRAN (PETA)	188
		DAFTAR KEPUSTAKAAN	182
		DAFTAR INFORMAN	187



B A B I

P E N D A H U L U A N

Wilayah yang menjadi obyek/lokasi Penelitian dan Pencatatan Sejarah Kebangkitan Nasional dari naskah ini meliputi seluruh daerah yang sekarang ini dikenal sebagai Propinsi Tingkat I Sulawesi Utara. Dari segi sejarahnya, daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia sejak diploklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun tersebut tercatat pembentukan Propinsi Sulawesi dengan Gubernur pertama yaitu DR. G.S.S.J. Ratulangi, berkedudukan di Makasar sebagai ibu kota propinsi. Sejalan dengan perkembangan politik ketatanegaraan dalam periode antara tahun 1945-1960, terjadilah proses pembentukan daerah-daerah yang lebih kecil di dalam wilayah Propinsi Sulawesi ini. Mula-mula Propinsi Sulawesi dibagi dalam beberapa Keresidenan antara lain Keresidenan Menado yang dipimpin oleh seorang Residen. Ibu kota Keresidenan ialah Manado yang meliputi wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sekarang ini.

Mulai tahun 1960, wilayah Propinsi Sulawesi dibagi menjadi dua propinsi administratif yaitu Propinsi Sulawesi Selatan/Tenggara dengan ibu kotanya Makasar dan Propinsi Sulawesi Utara/Tengah dengan ibu kotanya Manado. Masing-masing propinsi ini dipimpin oleh seorang Gubernur. Sebagai Gubernur Sulawesi Utara/Tengah yang pertama ialah Mr. A. Baramuli, yang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden No. 122/M tanggal 31 Maret 1961 mulai 1 Juni 1961.

Pembagian wilayah Propinsi Sulawesi menjadi dua Propinsi administratif di atas diatur dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 1960 tanggal 13 Desember 1960. Sesuai Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1960, maka wilayah Propinsi Sulawesi Utara/Tengah meliputi dua kotapraja dan delapan daerah tingkat II sebagai berikut:

1. Kotapraja Manado
2. Kotapraja Gorontalo
3. Daerah Tingkat II Sangir Talaud
4. Daerah Tingkat II Minahasa
5. Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow
6. Daerah Tingkat II Gorontalo
7. Daerah Tingkat II Buol/Tolitoli
8. Daerah Tingkat II Donggala

9. Daerah Tingkat II Poso
10. Daerah Tingkat II Luwuk/Banggai.

Dalam perkembangan selanjutnya, Daerah Tingkat I Sulawesi Utara/Tengah dibagi lagi menjadi dua daerah Tingkat I. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964. Sesuai isi peraturan tersebut terbentuklah daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dengan ibu kotanya Manado, meliputi dua kotapraja dan empat daerah Tingkat II yaitu:

1. Kotapraja Manado
2. Kotapraja Gorontalo
3. Daerah Tingkat II Sangir Talaud
4. Daerah Tingkat II Minahasa
5. Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow
6. Daerah Tingkat II Gorontalo.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah maka sebutan Kotapraja diubah menjadi Kotamadya dan Daerah Tingkat II menjadi Kabupaten. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, sebutan Propinsi menjadi Propinsi Daerah Tingkat I, Kotamadya menjadi Daerah Tingkat II dan Kabupaten menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II.

Sesuai perkembangannya yang terakhir, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara terdiri dari dua Kotamadya, empat Kabupaten dan satu kota Administratif sebagai berikut :

1. Kotamadya Daerah Tingkat II Manado
2. Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo.
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Sangir Talaud dengan ibu kotanya Tahuna
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dengan ibu kotanya Tondano
5. Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow dengan ibu kotanya Kotamobagu
6. Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dengan ibu kotanya Limboto.
7. Kota Administratif Bitung.

Mengenai jumlah Kecamatan dan luasnya masing-masing dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Kecamatan dan luas wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

No.	Wilayah	Ibu kota	Jumlah Kecamatan	Luas
1.	Kotamadya Daerah Tingkat II Manado	Manado	3	117
2.	Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo	Gorontalo	3	66
3.	Kabupaten Daerah Tingkat II Sangir Talaud	Tahuna	16	2.273
4.	Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa	Tondano	27	4.403
5.	Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow	Kotamobago	15	7.600
6.	Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo	Limboto	16	11.030
7.	Kota Administratif Bitung	Bitung	3	297
SULAWESI UTARA		Manado	83.	25.786

Mengenai para Gubernur Kepala Daerah yang pernah bertugas di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Mr. A. Baramuli, mulai 1 Juni 1961 sampai 15 Juni 1962 diangkat dengan Surat Keputusan Presiden No. 122/M tanggal 31 Maret 1961 sebagai Gubernur SULUTTENG;
2. F.J. Tumbelaka, mulai 15 Juni 1962 sampai 19 Maret 1965, dengan Surat Keputusan Presiden No. 284/M tanggal 18 Juni 1962 sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi SULUTTENG.
3. Sunandar Prijosudarmo, Brigadir Jenderal TNI-AD, mulai 19 Maret 1965 sampai 27 April 1966 dengan Surat Keputusan Presiden No. 57/1965 tanggal 19 Maret 1965 sebagai Pe-

jabat Gubernur Kepala Propinsi Sulawesi Utara/tengah:

4. Abdullah Amu, mulai 27 April 1966 sampai 2 Maret 1967 dengan Surat Keputusan Presiden No. 92/1966 tanggal 21 April 1966, sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
5. H.V. Worang, Brigadir Jenderal TNI-AD, mulai 2 Maret 1967 sampai 2 Maret 1972 sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. U.P. 6/1/28 - 212 tanggal 17 Pebruari 1967.
6. H.V. Worang, Mayor Jenderal TNI-AD, mulai 2 Maret 1972 sampai 12 Maret 1973 dengan Surat Keputusan Presiden No. 26/M tanggal 23 Pebruari 1972 sebagai Pejabat;
7. H.V. Worang, Mayor Jenderal TNI-AD (Purnawirawan) mulai 12 Maret 1973 sampai 12 Maret 1977, dengan Surat Keputusan Presiden No. 176/M Tahun 1972 sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
8. H.V. Worang, Mayor Jenderal TNI-AD (Purnawirawan) mulai 12 Maret 1977 sampai 21 Juni 1978 sebagai Pejabat Gubernur;
9. Willy G.A. Lasut, Brigadir Jenderal TNI-AD, mulai 21 Juni 1978 sampai sekarang sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

Mengenai luas per kecamatan, jumlah desa, jumlah penduduk dan produksi utama sampai awal tahun 1978 sebagai berikut :

Tabel 2

Luas per kecamatan, jumlah desa, jumlah penduduk dan produksi utama per kecamatan se Propinsi Dati I Sulawesi Utara menurut keadaan awal 1978

Kotamadya/ Kabupaten	Kecamatan	Luas / Km ²	Jumlah desa	Jumlah pdd	Prod. utama
1	2	3	4	5	6
Kotamadya Dati	Manado Utara	8,55	8	42.414	
II Manado	Mdo. Tengah	6,04	8	49.960	
	Mdo. Selatan	11.04	8	88.143	

Kotamadya Dati II Gorontalo	Kota Utara	15.58	11	22.028		
	Kota Selatan	33.91	17	47.302		
	Kota Barat	16.66	11	17.970		
Kabupaten Dati II Sangir Talaud	Tagulandang	89.99	17	22.385	Kopra	
	Sisas Timur	703.00	14	25.202	Kopra/ pala	
	Siau Barat	371.20	14	21.137	-	
	Tamako	180.00	15	19.376	Kopra	
	Manganitu	125.10	16	22.769	-	
	Tahuna	202.10	12	22.028	-	
	Kendahe	146.00	9	6.662	-	
	Tabukan Utara	245.56	18	22.734	-	
	Tabukan Tengah	120.00	12	10.662	-	
	Tabukan Sel.	240.00	15	14.534	-	
	Lirung	252.00	16	16.532	Kopra	
	Kabaruan	98.00	10	5.723	-	
	B e o	125.00	9	6.630	-	
	Rainis	250.00	13	8.155	-	
	Esang	70.45	15	7.540	-	
	Manusa	70.00	6	4.264	-	
	Kabupaten Dati II Minahasa	Tondano	63.24	29	36.320	padi
		Remboken	24.94	11	9.613	-
		Kakas	157.80	22	17.246	padi/ cengkih
Eris		76.99	12	13.403	-	
Kombi		82.38	10	10.536	cengkih	
Tomohon		208.52	22	53.906	sayuran/ padi	
Pineleng		230.66	14	25.459	Kopra/ padi	
Wori		109.24	19	17.446	Kopra	
Tombariri		170.54	11	15.342	Kopra/ ikanlaut	
Likupang		219.30	29	23.783	-	
Dimembe		206.00	20	28.266	Kopra	
Airmadidi		175.20	17	25.179	Kopra/ pala	
Kauditan		60.70	18	23.176	-	
Bitung		217.10	28	61.097	Industri	
Kawankoan		64.00	10	20.173	padi	
Sonder		52.60	10	14.535	cengkeh	
Tompaso		20.46	11	11.734	Padi/ sayuran	
Langowan		60.02	27	33.270	-	
Tareran		155.65	12	17.204	cengkeh	
Ratahan		160.60	8	17.541	Kopra	
Tombatu		231.00	15	26.358	-	
Belang		168.62	11	17.003	Kopra/ ikanlaut	
Tumpang		369.00	14	13.228	Kopra/ padi	

	Tenga'	235.44	15	22.944	Kopra
	Amurang		17		Kopra
	Tombasian	50.77	17	24.109	-
	Motoling	300.00	23	33.519	Cengkih/ padi
	Tompasobaru			17.477	Padi
	Mondoinding	41.50	8	33.519	Padi/ sayur
Kabupaten Dati II Bolaang Mongon- dow	Kotamobagu	54.20	17	33.101	Padi
	Modayag	49.31	10	15.817	Padi/ kopi
	Kotabunan	58.32	12	14.623	Kopra
	Lolayan	49.32	16	19.640	padi
	Bolaang	28.50	12	14.421	padi
	Lolak	73.46	15	11.993	Kopra
	Bintauna	32.22	10	7.180	-
	Kaidipang	49.32	14	12.354	-
	Sangtombo- bolang	72.60	8	6.350	-
	Bolaang Itang	74.50	16	14.570	-
	Poigar	23.00	8	9.688	Kopra/ padi
	Pinolosian	60.43	12	8.140	Kopra
	Pasi	71.75	17	22.040	Padi/ kopi
	Bolaang Uki	80.95	17	12.259	Kopra
	Dumoga	177.97	19	21.300	padi
	Kabupaten Dati II Gorontalo	Bonepantai	485.00	10	20.608
Suwawa		915.00	14	14.364	padi
Kabila		305.00	18	26.991	Kopra/ padi
Tapa		210.00	13	22.271	-
Paguyaman		950.00	14	27.796	-
Telaga		286.00	25	43.217	Padi/ lkandarar
Batudaa		320.00	21	56.008	Padi
Limboto		153.00	20	38.179	Padi/ jagung
Tibawa		382.00	13	40.766	Kopra
Kwandang		964.00	10	29.884	-
Atinggola		197.00	7	9.917	-
Sumalata		756.00	10	14.549	-
Tilamuta		884.00	15	25.489	-
Paguat		1.018.00	10	17.161	-
Marisa		1.947.00	6	15.161	-
Popayato		1.927.00	7	17.340	-

Sebagai daerah otonom seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5/1974, maka Propinsi Daerah Tingkat I Su-

lawesi Utara, memiliki beberapa dinas horizontal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3
Daftar Dinas horizontal dan alamatnya
di Propinsi Dati I Sulawesi Utara

No.	Nama Dinas horisontal	A l a m a t
1.	Dinas Pekerjaan Umum	Jln. TNI Tikala
2.	Dinas Pertanian Rakyat	Jln. W.R. Soepratman
3.	Dinas Perkebunan	Jln. W.R. Soepratman
4.	Dinas Perikanan	Jln. R.W. Soepratman
5.	Dinas Kehutanan	Jln. W.R. Soepratman
6.	Dinas Peternakan	Jln. Lumimuut
7.	Dinas Perindustrian	Jln. Diponegoro
8.	Dinas PDK	Jln. Diponegoro
9.	Dinas Pajak	Jln. Sam Ratulangi
10.	Dinas Pariwisata	Jln. Martadinata

Di samping itu terdapat Jawatan Vertikal perangkat Pemerintah Pusat di wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara sebagai berikut.

Tabel 4
Daftar Jawatan Vertikal dan alamatnya
di Propinsi Dati I Sulawesi Utara

No.	Nama Jawatan Vertikal	A l a m a t
1.	Lingkungan Dept. Keuangan :	
	a. Kantor Perbendaharaan Negara	Jln. Bethesda
	b. Direktorat Bea & Cukai	Koad. Bitung
	c. Inspeksi Pajak	Jln. Bethesda
	d. Kantor IPEDA	Jln. Bethesda
	e. Dit. Pengawasan Anggaran Negara	Jln. Siswa
2.	Kantor Wilayah Dept. P dan K	Jln. K.H. Dewantoro

3. Lingkungan Dept. Perhubungan :
 - a. Kantor Daerah Pelayaran VII Jln. Sam Ratulangi
 - b. Kantor Pelabuhan Udara Sam Ratulangi Mapanget
 - c. Inspeksi Lalu lintas & Angkutan Jalan Raya Jln. Martadinata
 - d. Jawatan Meteorologi & fisika Mapanget
 - e. Kantor Pos & Giro Manado Jln. Sam Ratulangi
 - f. Kantor Telegrap Jln. K.H. Dewantoro
 - g. Kantor Radio VII/2 Sario
 - h. Kantor Telepon Jln. K.H. Dewantoro
4. Lingkungan Departemen Kesehatan :
 - a. Kantor Wilayah Dept. Kesehatan Teling Atas
 - b. Depot Parmasi Teling Atas
 - c. Komando Pemberantasan Malaria (P4M) Teling Atas
5. Lingkungan Departemen Agama :
 - a. Kantor Wilayah Dept. Agama Jln. Sam Ratulangi
6. Lingkungan Dept. Nakertrans :
 - a. Direktorat Transmigrasi Jln. Sam Ratulangi
 - b. Kantor Daerah Tenaga Kerja Jln. Sam Ratulangi
7. Lingkungan Departemen Kehakiman :
 - a. Kantor Pengadilan Tinggi Jln. Sam Ratulangi
 - b. Lembaga Pemasyarakatan Jln. Sam Ratulangi
 - c. Kantor Kejaksaan Tinggi Jln. Sam Ratulangi
 - d. Kantor Kepala Daerah Imigrasi Jln. W.R. Soepratman
8. Lingkungan Departemen Penerangan :
 - a. Kantor Wilayah Dept. Penerangan Jln. Sam Ratulangi
 - b. Direktorat TV/Radio Jln. Sam Ratulangi
 - c. Percetakan Negara Manado Jln. Lumimuut
9. Lingkungan Dept. Perdagangan & Koperasi :
 - a. Kantor Wilayah Dept. Perdagangan Jln. Diponegoro
 - b. Kantor Metrologi Jln. Sam Ratulangi
 - c. Direktorat Koperasi Jln. K.H. Dewantoro

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 10. | Lingkungan Departemen Sosial : | |
| | a. Kantor Wilayah Dept. Sosial | Jln. Lumimuut Tikala |
| 11. | Lingkungan Dept. Pertamb. Energi : | |
| | a. Kantor Penghubung Daerah Per-
tambangan Ujungpandang | Jln. W.R. Soepratman |
| 12. | Lingkungan Dept. Pertanian : | |
| | a. Lembaga Penelitian Taman
Industri | Jln. Siswa |
| 13. | Lingkungan Dept. Pekerjaan Umum : | |
| | a. Dinas Eksploitasi Alat-Alat
Besar | Jln. TNI Tikala |
| 14. | Lingkungan Dept. Dalam Negeri : | |
| | a. Direktorat Pembangunan Desa | Jln. Sam Ratulangi |
| | b. Direktorat Agraria | Jln. Sam Ratulangi |
| 15. | Lembaga-lembaga Non Departemen : | |
| | a. Kantor Sensus & Statistik | Jln. P.M. Tangkilisan |
| | b. B u l o g | Jln. Diponegoro |
| | c. D o l o g | Jln. Diponegoro |
| 16. | Lingkungan Departemen Hankam : | |
| | a. Markas KODAM XIII/Merdeka | Jln. Sam Ratulangi |
| | b. Markas DAERAL-6 | Jln. Sam Ratulangi |
| | c. Dan LANU Sam Ratulangi | Mapanget |
| | d. KODAK XIX/Sam Ratulangi | Jln. Sam Ratulangi |
| | e. PUSCADNAS | Jln. 14 Pebruari 1946. |

Mengenai struktur pemerintahan di lingkungan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, maka seorang Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Wilayah /Daerah. Sekwilda ini membawahi tiga orang Asisten Sekwilda yaitu Asisten I (Ekonomi dan Keuangan), Asisten II (Pemerintahan) dan Asisten III (Administrasi). Selain itu terdapat empat Biro yaitu Biro Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi/Tata Laksana dan Biro Personalia. Juga terdapat lima direktorat yaitu Direktorat Perekonomian, Direktorat Keuangan, Direktorat Pembangunan, Direktorat Kesejahteraan Rakyat dan Direktorat Ketertiban Umum. Sebagai aparat Gubernur dalam bidang pengawasan ialah Inspektorat Wilayah/Daerah. Sedangkan aparat yang bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan di bidang

perencanaan pembangunan daerah ialah BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Tingkat I Sulawesi Utara.

Adapun tentang para Bupati/Walikota se-Propinsi Sulawesi Utara sejak pembentukannya adalah sebagai berikut :

1. Kotamadya Manado : Letkol. Rauf Moto (1966-1971) M.H.W. Dotulong (Pejabat 1971), Letkol. J.H. Pussung (1971-1975), Mayjen H.V. Worang (Pejabat 1975) dan A.A. Pelealu (1975 – sekarang).
2. Kotamadya Gorontalo : Taki Niode (1965-1969), Taki Niode (1969-1971), Letkol. Drs. Jl. Bilondatu (1971-1978) Drs. H.A. Nusi (1978 – sekarang).
3. Kabupaten Sangir Talaud : Letkol. H. Sutoyo (1966 – 1969) J.M. Laihad (1969-1970 Pejabat), Letkol. Drs. J.. Tindas (1970-1975) dan Letkol. Hadi Sutrisno (1975 – sekarang).
4. Kabupaten Minahasa : Letkol. F. Sumampouw (1966-1969), A.A. Pelealu (Pejabat 1969-1970), Letkol. H. Kourow (1970-1973), Kolonel J.F. Lumentut (1973-1978), Drs. Jl. Rolos (Pejabat 1978), Brigjen W.G.A. Lasut (Pejabat 1978), Letkol. B.C. Lapien BA (1978-sekarang).
5. Kabupaten Bolaang Mongondow : Mayor Oe. N. Mokoagow (Care taker 1966-1967), Mayor Oe. N. Mokoagow (1967-1971), Letkol Oe. N. Mokoagow (1971-1976), Letkol. I. Tangkudung (1976 – sekarang).
6. Kabupaten Gorontalo : Mayor R. Djarwadi (1965-1966) Drs. A. Nadjamuddin (Pejabat 1970-1971), Mayor Kasmat Lahay BA (1971-1972), Drs. H.A. Nusi (Pejabat Sementara 1972). Letkol. Kasmat Lahay BA (1972 – Sekarang).
7. Kota Administratif Bitung : W.A. Worang (1975 – sekarang).

A. TUJUAN PENELITIAN

Yang menjadi tujuan dari penelitian dan pencatatan ini ialah menggali, mengumpulkan, mencatat, meneliti, mengolah sumber sejarah yang terdapat di daerah. Semua sumber sejarah yang terkumpul kemudian disusun berupa penulisan tematis yang judulnya sebagaimana tertera di depan. Diharapkan bahwa semua hasil penelitian dan pencatatan ini merupakan pencerminan dari konsep konsep yang relevan dengan tujuan dan sasaran pola kebijaksanaan

kebudayaan nasional yang digariskan oleh pemerintah.

Dalam penyusunan materi sejarah daerah tematis ini, hasilnya sedapat mungkin disusun menurut petunjuk-petunjuk yang ada dalam "terms of reference" (TOR) yang telah ditetapkan. Namun di balik itu, sebagaimana biasanya tetap ditemui hal-hal yang datanya tidak tersedia di daerah, sehingga usaha pemenuhan tuntutan TOR dapat bersifat pemaksaan. Dalam hal yang demikian maka telah diusahakan pemanfaatan sumber-sumber di daerah sedemikian rupa sehingga tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam TOR.

Hasil yang dicapai melalui penelitian dan pencatatan ini dapatlah dianggap sebagai salah satu cara dalam memelihara dan menyusun sejarah daerah sebagai bagian dari sejarah nasional. Pada kenyataannya, masih banyak warisan sejarah budaya bangsa di daerah ini yang belum diteliti dan dikembangkan. Adalah menjadi tanggung jawab moril yang amat besar dan sangat mendesak untuk dilaksanakan dalam melengkapi dan menyempurnakan buku babon sejarah Nasional yang sekarang ini telah diusahakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bahan untuk melengkapi dan menyempurnakannya merupakan sumbangan yang amat berharga dan justru amat diperlukan. Inilah yang dapat disumbangkan oleh hasil penelitian dan Pencatatan Sejarah Daerah Sulawesi Utara. Dengan demikian diharapkan di masa depan, kita dapat memiliki semua buku babon Sejarah Nasional yang lebih disempurnakan dan dapat diterima oleh semua pihak.

B. MASALAH

Zaman kebangkitan Nasional merupakan sebagian dari proses pergerakan dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai kesejarahan yang penting sekali, karena dasar-dasar dari kenegaraan dan kebudayaan Indonesia sekarang ini antara lain tercermin pada zaman itu. Proses Pergerakan dan Perjuangan Kemerdekaan Nasional itu sendiri terjadi diseluruh Indonesia, termasuk di daerah Sulawesi Utara dengan berbagai corak dan ragamnya. Karena itu perlu diadakan penelitian dan pencatatan serta penulisan tentang Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara secara lebih luas, mendalam dan terperinci untuk lebih mendapatkan pengertian yang mendalam mengenai zaman itu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan dengan sendirinya mempunyai kebhinekaan budaya demikian juga mengenai masalah proses pergerakan dan perjuangan kemerdekaan di daerah-daerah termasuk di daerah Sulawesi Utara. Dari kebhinekaan kegiatan perjuangan di daerah itulah nantinya akan terjangkau ketunggalikaannya. Atas dasar pengertian ini, maka hasil pelaksanaan penelitian dan pencatatan ini dapat memberikan sumbangan yang amat berarti dan amat besar ke arah tercapai dan mantapnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Hal ini merupakan syarat mutlak dalam membina Ketahanan Nasional pada umumnya dan dalam bidang kesejarahan dan Kebudayaan pada khususnya.

Pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam, mengenai Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah Sulawesi Utara dapat merupakan mata rantai untuk membentuk pengertian yang langgeng dan mantap tentang zaman sebelumnya, bahkan tentang zaman sesudahnya. Pengetahuan yang luas dan mendalam ini amat diperlukan untuk menciptakan wawasan yang lebih luas lagi dalam rangka penyusunan Sejarah Nasional, terutama periode 1900-1942 secara lebih lengkap.

C. RUANG LINGKUP

Dalam TOR telah ditentukan lebih dahulu, bahwa ruang lingkup penelitian dan pencatatan tematis Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara harus meliputi semua segi kehidupan. Dengan demikian maka hasil penelitian dan pencatatan ini telah diusahakan sejauh mungkin mencakup semua segi kehidupan pemerintahan, kenegaraan, masyarakat, ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama, kepemudaan dan kepanduan, pers, organisasi profesional, kewanitaan dan koperasi.

Materi yang dikumpulkan dan pembahasannya berpedoman pada asas regiosentrisme dalam arti kata bahwa baik penyusunan maupun pengolahannya diusahakan tetap berfokuskan sifat-sifat kedaerahan dari semua sumber yang ada. Juga telah diusahakan agar bahan-bahan atau sumber-sumber sejarah yang dikumpulkan dan diolah itu telah menjangkau seluruh wilayah administratif yang ditentukan, dalam hal ini menjangkau seluruh Daerah Sulawesi Utara.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

Penandatanganan kontrak kerja antara Pemimpin Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) Sulawesi Utara dengan Ketua Tim ini, dapat dianggap saat dimulainya pekerjaan yaitu pada tanggal 25 Juli 1978. Tim diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) Sulawesi Utara No. 14/P3KD/VII/78/Sulut tertanggal 24 Juli 1978. Pengangkatan ini dilakukan secara kolektif dengan empat tim lainnya yang menggarap aspek adat istiadat, ceritera rakyat, geografi budaya dan ensiklopedi musik & tari daerah. Khusus untuk Tim kami susunannya adalah sebagai berikut :

1. Drs. Laurens Th. Manus sebagai Ketua Tim/Penanggung Jawab merangkap Anggota;
2. Drs. Fendy E.W. Parengkuan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
3. Drs. Anthon Sigarlaki sebagai Anggota; dan
4. Joseph A. Pangkey BA sebagai Anggota.

Yang tersebut 1 s/d 3 masing-masing adalah Staf Dosen pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, sedangkan tersebut 4 adalah Staf Bidang PSK (Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan) pada KANWIL P dan K Propinsi Sulawesi Utara.

Setelah menerima pengangkatan dan menandatangani surat perjanjian kerja dengan Pemimpin Proyek, maka tim kemudian mengadakan serangkaian pertemuan. Dalam pertemuan dibicarakan antara lain mengenai jadwal pelaksanaan pembagian tugas, teknik penelitian dan pencatatan, teknik pengolahan dan sebagainya. Mengenai jadwal pelaksanaan yang dipergunakan adalah jadwal yang sudah tercantum dalam TOR. Sesuai jadwal tersebut, kegiatan pengumpulan data sudah harus dilakukan mulai bulan Juni-Juli. Tetapi karena beberapa kesulitan administrasi, maka kegiatan pengumpulan data ke daerah-daerah baru dapat dilakukan mulai 19 September 1978. Dalam hal ini berarti Tim sudah ketinggalan waktu selama kira-kira dua bulan lamanya.

Sesuai hasil pertemuan Tim, maka diputuskan untuk membagi Daerah Sulawesi Utara atas empat lingkungan sejarah dan

kebudayaan yaitu Sangir Talaud, Minahasa (termasuk Manado dan Bitung), Bolaang Mongondow, dan Gorontalo (Kabupaten dan Kotamadya). Pembagian ini berdasarkan warisan historis dan kultural di mana pada kenyataannya, Daerah Sulawesi Utara memang secara historis dan kultural dapat diperlakukan demikian. Pembagian seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1977 tatkala untuk pertama kalinya P3KD melaksanakan penelitian dan pencatatan di Daerah Sulawesi Utara dan ternyata hasilnya sukses.

Keempat lingkungan historis dan kultural tersebut di atas sekaligus juga menjadi sampel dari tim ini. Para petugas yang ditugaskan ke lokasi-lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Daerah Minahasa (termasuk Kotamadya Manado dan Kota Administratif Bitung) ditugaskan kepada Drs. Laurens Th. Manus;
2. Daerah Bolaang Mongondow ditugaskan kepada Drs. Fendy E.W. Parengkuan;
3. Daerah Sangir Talaud ditugaskan kepada Drs. Anthon Sigarlaki; dan
4. Daerah Gorontalo (Kotamadya dan Kabupaten) ditugaskan kepada Joseph A. Pangkey BA.

Pembagian lokasi di atas tidak menutup kemungkinan saling isi mengisi sumber yang diperoleh masing-masing petugas.

Baik sebelum berangkat ke lokasi maupun selama berada di lokasi masing-masing, para petugas senantiasa mengadakan penelitian kepustakaan setempat. Dengan demikian selain tim mempergunakan sumber dari kepustakaan yang ada di Manado, juga tim mempergunakan sumber lokal. Pengumpulan sumber lokal dilakukan sejalan dengan metode wawancara dengan mempergunakan informan yang dilaksanakan oleh masing-masing petugas. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan sejak 19 September 1978 sampai dengan tibanya anggota tim yang terakhir di Manado yaitu pada tanggal 14 Oktober 1978.

Masing-masing petugas peneliti sejak kembalinya dari lapangan, sudah memulai penggarapan sumber yang berhasil diperoleh dari lokasi di mana ia ditugaskan. Sumber diperoleh baik dari instansi pemerintah daerah maupun swasta dan perorangan. Sumber perorangan dapat berupa pemberian/peminjaman buku dan sebagainya dan dapat pula diperoleh melalui wawancara. Untuk mengadakan wawancara, terlebih dahulu menghubungi para pejabat

pemerintah setempat, para kepala adat, dan sebagainya yang merupakan key informan. Kemudian dari pada key informan ini diperoleh petunjuk mengenai nama dan jumlah orang yang dapat menjadi informan. Dari hasil seleksi seperti ini maka didapatkan sejumlah informan yang keterangan-keterangannya sebagai manusia sumber turut memberi isi naskah ini. Banyak kali terjadi bahwa para informan sebagai manusia sumber keliru dalam memberikan keterangan misalnya mengenai tahun terjadinya suatu peristiwa. Maka untuk memperoleh gambaran yang jelas, dalam pengolahan para peneliti menguji keterangan seperti itu dengan sumber-sumber yang terdapat dalam beberapa reference kesejarahan.

Teknik ini memaksa para peneliti menyusun terlebih dahulu kerangka laporan dari setiap lokasi hanya dari keterangan yang diperoleh dari para informan. Kemudian keterangan yang diperoleh itu diuji dengan fakta-fakta yang sudah diakui keabsahannya. Dalam proses selanjutnya, setiap naskah laporan perdaerah itu diintegrasikan. Untuk memperoleh kebulatan pengertian dalam integrasi tersebut, maka adakalanya suatu pokok atau masalah perlu didahului dengan suatu uraian dapat bersifat regiosentris dalam arti kata yang terjadi meliputi seluruh Daerah Sulawesi Utara, ataupun uraian yang bersifat nasional, terutama dalam hal kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kolonial atau suatu organisasi politik/organisasi sosial yang ada.

Suatu hal yang senantiasa membutuhkan perhatian khusus dari para peneliti ialah soal sumber yang berasal dari pers yang ada di Sulawesi Utara. Diakui bahwa sumber pers sangat minim yang berhasil diperoleh dan digunakan oleh tim kami. Namun karena semua itu merupakan hasil usaha yang maksimal khususnya mengenai pers daerah, maka dapatlah dikatakan bahwa sedikit banyaknya naskah ini juga mengandung sekelumit dari sumber-sumber pers daerah sebagaimana yang tercantum dalam TOR. Seandainya tersedia kesempatan dan biaya dari tim pusat, maka tim kami bersedia untuk mengolah sumber pers daerah koleksi museum pusat Jakarta.

Mengenai tahap-tahap sesuai Rencana Kerja Penelitian yang diajukan oleh tim kami kepada Pemimpin Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) Sulawesi Utara tertanggal 24 Juli 1978, adalah sebagai berikut :

1. Juli s/d-Agustus 1978 :
 - a. Pertemuan, penyelesaian surat-suratan, diskusi antara Pemimpin Proyek dengan para peneliti;
 - b. Diskusi antar anggota, penentuan sampel, seleksi keputakaan, surat-suratan;
 - c. Penyusunan organisasi Penelitian, pembagian tugas lapangan, diskusi, surat-suratan;
 - d. Persiapan ke lokasi :
2. September 1978 :
 - a. Penguasaan ke lapangan dan laporan kepada para pejabat setempat;
 - b. Observasi;
 - c. Wawancara;
 - d. Pengumpulan data;
 - e. Penelitian keputakaan setempat;
3. Oktober 1978 :
 - a. Kembali ke Manado;
 - b. Klasifikasi data/sumber;
 - c. Pengolahan data/sumber per daerah;
 - d. Penelitian keputakaan;
 - e. Diskusi/seminar kecil;
4. Nopember dan Desember 1978:
 - a. Pembagian kerja penulisan naskah;
 - b. Penulisan naskah integrasi;
 - c. Diskusi hasil penelitian sementara;
 - d. Penyusunan dan pengetikan naskah akhir;
5. Januari 1979 :
 - a. Penjilidan naskah :
 - b. Penyerahan naskah;
 - c. Pengiriman naskah;
 - d. Revisi naskah akhir.

Rancangan Kerja Penelitian ini dalam pelaksanaannya telah mengharuskan para peneliti berlomba dengan waktu. Apa lagi pada kenyataannya pencairan biaya sejak tahun 1977 selalu terlambat, menyebabkan tim kurang berhasil memenuhi target waktu yang ada. Misalnya pencarian tahap kedua untuk biaya pengolahan baru dicairkan diakhir Nopember 1978, sehingga barulah para pe-

neliti mulai bekerja lagi awal Desember 1978. Hal ini menyebabkan keterlambatan berhubung untuk mengolah naskah diperlukan waktu dua bulan (Nopember s/d Desember 1978) sesuai Rancangan Kerja di atas, padahal baru dapat dimulai awal Desember 1978. Walaupun begitu tim kami senantiasa berusaha untuk dapat memenuhi target waktu yang disediakan sesuai kemampuan yang ada.

E. HASIL AKHIR

Naskah ini pada akhirnya merupakan hasil kerjasama antara berbagai pihak. Naskahnya yang asli dikerjakan oleh Tim Penyusun di daerah Sulawesi Utara yang penggarapannya mengikuti pola dan kerangka seperti ditentukan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Pusat. Selanjutnya terhadap naskah ini diadakan penyempurnaan dan penilaian bersama oleh Tim dari Pusat (P3KD) dan Tim Penyusun dari Sulawesi Utara. Hasil penilaian dan penyempurnaan itulah yang dijadikan pedoman untuk lebih menyempurnakannya lagi dalam pekerjaan editing.

Pekerjaan editing itu sendiri diarahkan pada beberapa segi yaitu : materi atau bahan, kebahasaan dan pendekatan atau penyajian. Segi Materi didasarkan pada hasil penilaian, kebahasaan diperhatikan hal-hal seperti : ejaan, istilah dan keterbacaan. Pendekatan dan penyajian diukur seberapa jauh asas regiosentris digunakan di dalamnya.

Naskah ini hendaknya dipandang sebagai perintisan ke arah penelitian dan penyusunan sejarah daerah yang lebih baik dan berbagai kemungkinan yang lebih kaya, lebih beragam dan lebih memenuhi sasaran. Bahan yang terdapat di dalam naskah ini dapat digunakan untuk melengkapi penulisan sejarah nasional.

Secara keseluruhan naskah ini sudah sesuai dengan *terms of reference* dan segi-segi materi, kebahasaan dan pendekatan/penyajian sudah pula mencapai hasil yang diinginkan.

BAB II

KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD KE-19

A. PEMERINTAHAN

Pada tahun 1824, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Keresidenan Manado yang meliputi wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sekarang ini. Keresidenan Manado ini merupakan pecahan dari Keresidenan Ternate. Hal ini diatur sesuai Surat Keputusan Pemerintahan Hindia Belanda tanggal 14-6-1824 Nomor 10 (*Staatsblad* 1824 Nomor 28 a). Sejak waktu itu maka wilayah Sulawesi Utara/Tengah tidak lagi di bawah Keresidenan Ternate tapi langsung di bawah Gubernur Maluku. ¹⁾

Kekuasaan Belanda atas daerah Minahasa menurut sumber tersebut di atas, didasarkan atas perjanjian antara para pemimpin rakyat Minahasa yang dibuat pada tahun 1810. Menurut isi perjanjian itu, para pemimpin yang disebut Kepala Balak setiap tahun diwajibkan membayar rekognisi kepada Pemerintah Hindia Belanda berupa beras. Sebagai imbalannya, Pemerintah tidak diperbolehkan menguasai tanah sejenkal pun juga serta tidak akan mendirikan benteng-benteng di daerah pedalaman. Para Kepala Balak dan rakyat Minahasa pada umumnya tidak menyulitkan kedudukan Pemerintah Hindia Belanda. Karena daerah Minahasa tidak menghasilkan rempah-rempah seperti Maluku, maka kurang diperhatikan. Salah satu tindakan untuk memanfaatkan kekuasaan mereka, Pemerintah Hindia Belanda mulai membuka perkebunan-perkebunan kopi di Keresidenan Manado. Ternyata mutu kopinya lebih baik sehingga dengan demikian harganya lebih tinggi dari kopi yang ditanami di Jawa. ²⁾

Pada masa itu para Kepala Balak merupakan penguasa di daerah Minahasa terutama dalam pengurusan tanah. Tapi kekuasaan para Kepala Balak tersebut kemudian dibatasi oleh keluarnya Domein Verklaring (Penetapan Tanah Milik Negara) tahun 1877 (*Staatsblad* No. 55/1877). Sesuai isi peraturan itu maka Pemerin-

1) Arsip Nasional RI, *Laporan politik tahun 1837 (Staatskundige Overzicht van Nederlandsch Indië, 1837)*, Jakarta, 1971, hal. 45, 156, 157.

2) Arsip Nasional RI, *loc. cit.*

tah Hindia Belanda mengambil-alih semua tanah yang dahulunya dikuasai oleh para Kepala Balak itu. Dua puluh tiga Kepala Balak mengajukan keberatan sampai ke Staten Generaal di Negeri Belanda terhadap peraturan tersebut.

Tindakan pemerintah lainnya ialah penghapusan jabatan Kepala Balak (sebagai jabatan adat) menjadi Kepala Distrik (sebagai jabatan administratif). Pada masa penerapannya di tahun 1880, Minahasa terdiri dari wilayah 26 distrik.³⁾ Istilah distrik untuk pertama kali resmi dipergunakan mulai tahun 1856. Mulai tahun itu diadakan reorganisasi wilayah walak-walak di Minahasa (*Staatsblad* No. 28/1856). Pada kenyataannya wilayah setiap walak ada yang terlalu kecil untuk dijadikan distrik. Pasan, Ratahan dan Ponosakan disatukan dalam tahun 1871 dan 1880. Kakas dan Remboken tahun 1879. Tomohon dan Sarongsong tahun 1880. Ares, Negeri Baru dan Kalabat Bawah digabungkan ke distrik Manado tahun 1884. Tahun itu juga Kalabat Atas dan Likupang disatukan dengan Distrik Maumbi. Tahun 1882 dibentuk Distrik Tompaso dan Distrik Rumoong di aliran Selatan sungai Ranoiapo. Di kemudian hari diadakan pemecahan Distrik Kakas-kasen menjadi tiga distrik yaitu Distrik Manado, Tomohon dan Tombariri (tahun 1908). Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahasa dan geografis. Reorganisasi distrik ini berlangsung terus sampai tahun 1927. Pada tahun tersebut hanya tersisa 6 distrik administratif yaitu Manado, Tonsea, Toulour, Kawangkoan, Amurang dan Ratahan.⁴⁾

Sesudah dilepaskan dari Kesultanan Ternate pada tahun 1825, wilayah kepulauan Sangir Talaud dimasukkan ke wilayah Keresidenan Manado yang dibentuk tahun 1824 itu. Mulai saat itu Sangir Talaud berstatus *afdeeling* yaitu *Afdeeling* Sangir Talaud.⁵⁾ Pada akhir abad ke-19 (kurang lebih 1882) oleh Pemerintah Hindia Belanda ditempatkan seorang pejabat dengan pangkat Controleur ialah de Heer van Zenden di ibukota *afdeeling* yakni di Tabukan (yang sekarang disebut Tabukan Lama di Kecamatan Tabukan Utara). Sepuluh tahun kemudian (1892) ibu negeri (ibukota) dipindahkan dari Tabukan Lama ke Tahuna

3) L. Adam, *Pemerintahan di Minahasa*, dengan kata pengantar oleh F.S. Watuseke, Bhratara, Jakarta, 1975, halaman 9.

4) *Ibid.*, hal. 17, 18.

5) Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, Manado, 1977, hal. 105.

akibat letusan gunung api Awu pada tahun 1891; sehingga sampai sekarang Tahuna tetap menjadi ibukota kepulauan Sangir Talaud. ⁶⁾ Dengan demikian pucuk pimpinan pemerintahan dipegang oleh seorang Controleur yang dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh seorang *Gezaghebber* ataupun *Hulpgezaghebber*. ⁷⁾

Di bawah Kontrolur ini terdapatlah pemerintahan oleh raja-raja yang pada masa itu meliputi:

1. Kerajaan Kendhar-Tahuna dengan ibu negerinya Tahuna: mula-mula terdiri dari dua kerajaan yaitu Kerajaan Kendhar dan Kerajaan Tahuna, akan tetapi disatukan tahun 1893 di bawah pemerintahan raja Salmon Tuwa Badai Dumalang. ⁸⁾ Hal ini karena banyak rakyat yang meninggal akibat letusan gunung Awu tersebut di atas, di samping wilayah kekuasaan di Philipina Selatan (Davao) sudah mulai melepaskan diri dari Kerajaan Kendhar. Mula-mula rakyat Kendhar tidak menyetujui penggabungan, hanyalah setelah nama Kendhar ditempatkan di muka (jadi Kerajaan Kendhar - Tahuna) barulah mereka menerimanya. Setelah dipersatukan, wilayahnya meliputi mulai Batuwukara sampai dengan Tukadebatu di pulau Sangir Besar dengan pulau-pulau Dipang, Kawaluso dan Kawio. ⁹⁾ Mengenai siapa yang akan diangkat sebagai raja, ditetapkan secara bergantian dari keluarga kedua kerajaan tersebut. ¹⁰⁾
2. Kerajaan Tabukan dengan wilayahnya mulai dari pulau Sangir Besar sebelah Timur yakni dari Tukadebatu sampai ke Tukademahu di Ngalipai. Rajanya pada waktu itu (akhir abad 19) ialah Raja David Papukule Sarapil dengan gelar Presiden Pengganti Raja (1892 - 1898). Pada masa raja inilah ibukota kerajaan dipindahkan dari Tabukan Lama ke Enemawira (Kecamatan Tabukan Utara sekarang). Dahulu kerajaan ini

6) Wawancara dengan H.E. Yuda, Tahuna, 28-9-1978.

7) Wawancara dengan A. Rompas dan G.A. Buisan, Tahuna, 27-9-1978.

8) E.F. Tatimu, *Kepulauan Sangihe Talaud*, Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sangir Talaud, 1975, hal. 14.

9) Wawancara dengan A. Rompas dan G.A. Buisan, Tahuna, 27-9-1978.

10) Wawancara dengan Th. Makahanap, Tahuna, 27-9-1978.

- mempunyai wilayah sampai ke Philipina yaitu Kotabato. ¹¹⁾
3. Kerajaan Manganitu dengan wilayah mulai dari Lembawua sampai Tanjung Lelapide. Rajanya pada akhir abad 19 adalah Lambert Ponto dengan gelar Presiden Pengganti Raja yaitu sejak 1880 – 1894. ¹²⁾
 4. Kerajaan Siau dengan wilayahnya seluruh pulau Siau, dengan pulau-pulau kecil: Buhias, Makalehi dan Pahepa ditambah Tamako dengan pulau-pulau: Para, Kahakitang, Mahangetang dan Kalama. Rajanya pada akhir abad 19 ialah Lemuel David (1890 – 1895). Raja inilah yang memindahkan ibukota kerajaan dari Ondong (sekarang Kecamatan Siau Barat) ke Ulu (Kecamatan Siau Timur). ¹³⁾
 5. Kerajaan Tagulandang dengan wilayahnya meliputi pulau Tagulandang ditambah pulau Ruang dan Biahe. Rajanya ialah Raja Salmon Bawoleh (1885 – 1901). ¹⁴⁾

Di bawah pemerintahan raja-raja ini terdapat pemerintahan Jogugu-jogugu yang masing-masing membawahi para Kepala Desa yang disebut "Kapiten Laut" atau "Opo Lao".

Di akhir abad ke-19 itu terjadi beberapa sengketa antara raja-raja itu mengenai batas-batas kerajaan terutama antara Raja Manganitu dan Raja Kendahe dengan Raja Tahuna. Hal ini tidak lepas bila dilihat dari Politik kolonial pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yakni politik *Divide et Impera*.

Mengenai peraturan yang berlaku ataupun yang diciptakan baik oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun raja-raja pada waktu itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar (hampir semuanya) hanyalah bersifat lisan saja sebagaimana tersimpul antara lain dari kata-kata: "Raja bertitah, rakyat mendengar." Kecuali kontrak-kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Belanda dengan raja-raja misalnya tentang besarnya belasting (pajak) dan yang terutama pula adalah kepatuhan kepada Pemerintah Hindia Belanda yang sering kali dibuat bilamana terjadi pengangkatan seorang raja baru,

11) Wawancara dengan A. Rompas, Tahuna, 27-9-1978, dan dengan H.E. Yuda, Tahuna 28-9-1978; Ef. Tatimu, *op. cit.*, hal. 13.

12) Wawancara dengan A. Rompas, Tahuna, 27-9-1978 lihat Ef. Tatimu, *Op. cit.*, Hal. 14.

13) *Ibid.*, hal. 13.

14) Ef. Tatimu, *op. cit.*

di mana sering dikatakan antara lain bahwa: "musuh Belanda adalah musuhku sedang sahabat Belanda adalah juga sahabatku." 15)

Di Gorontalo, kekuasaan pemerintahan kolonial dimantapkan sebagai akibat kemenangan mereka dalam Perang Panipi di tahun 1873. Dengan demikian mulai 1886 praktis daerah Gorontalo langsung berada di bawah kekuasaan Belanda. 16) Secara resmi, kekuasaan raja-raja diakhiri dengan beslit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 17 April 1889 (Staatsblad No. 96 dan No. 250 tahun 1889). 17) Mengenai raja-raja yang terakhir memerintah di Gorontalo yakni:

1. Iskandar Ollie dari Kerajaan Limboto Barat;
2. Abdul Rachman dari Kerajaan Limboto Timur;
3. Zainal Abidin dari Kerajaan Gorontalo Barat;
4. Pandjarois dari Kerajaan Gorontalo Timur; dan
5. Wartabone dari Kerajaan Suwawa-Bone. 18)

Sejak tahun 1889 daerah Gorontalo ditetapkan menjadi satu afdeeling di bawah seorang Asisten Residen dalam wilayah Keresidenan Manado. *Afdeeling* Gorontalo itu terdiri atas lima *Onderafdeeling* yaitu:

1. *Onderafdeeling* Gorontalo di Gorontalo,
2. *Onderafdeeling* Bone-Kabila di Kabila;
3. *Onderafdeeling* Limboto di Limboto;
4. *Onderafdeeling* Kwandang di Kwandang; dan
5. *Onderafdeeling* Bualemo di Tilamuta. 19)

Tiap *Onderafdeeling* dipimpin oleh seorang *Controleur*. Selanjutnya Gorontalo dibagi lagi atas 12 distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang *Marsaoleh*. Adapun ke-12 distrik itu yakni:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Distrik Kota | 3. Distrik Kabili |
| 2. Distrik Telaga | 4. Distrik Tapa |

15) Wawancara dengan H.E. Yuda, Tahuna, 28-9-1978.

16) M.H. Liputo, *Sejarah Gorontalo Dua Lima Pahalaa* Jilid XII, Percetakan Rakyat, Gorontalo, hal. 57.

17) B.J. Haga, "De Lima Pahalaa (Gorontalo)", *Volksordering, adatrecht en bestuurs-politiek* dalam *Tijdschrift voor Indische Taal Land en Volkenkunde*, LXXI, 1931, hal. 197.

18) Wawancara dengan J.H. Wantogia, Suwawa, 1-10-1978.

19) M.H. Liputo, *Sejarah Gorontalo Dua Lima Pahalaa*, Percetakan Rakyat, Gorontalo, jilid XIII, hal. 2.

5. Distrik Awandang
6. Distrik Tibawa
7. Distrik Batudaa
8. Distrik Bone

9. Distrik Paguat
10. Distrik Tilamuta
11. Distrik Paguyaman
12. Distrik Atinggola.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Marsaoleh bertanggungjawab kepada Controleur di wilayah bersangkutan. Adapun tugas utama seorang Marsaoleh yaitu tugas penagihan pajak dan tugas pengerahan tenaga untuk pekerjaan rodi.

Selain jabatan raja-raja, jabatan-jabatan lain yang ditiadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu jabatan Jogugu dan Kapitalao (Kapiten Laut). Sebagai pembantu Marsaoleh ialah pejabat-pejabat yang disebut *Walaapulu* dan Taudaa (Kepala Desa) yang tidak turut dihapuskan. Para pejabat tersebut di atas menerima gaji dari pemerintah. Marsaoleh menerima gaji antara f.65,— sampai f.200,— sebulan; *Walaapulu* f.25,— sampai f.50,— sedangkan Taudaa (Kepala Desa) menerima 8% dari hasil pungutan pajak ditambah bantuan tenaga setiap keluarga yang dinilai f.1,50 setahun (pinontol). Karena rakyat Gorontalo seluruhnya beragama Islam maka untuk semua urusan keagamaan diangkat para pegawai syaraah. Pegawai syaraah ini digaji dan diambil dari penghasilan "Weeskamer" (rumah yatim piatu) sebanyak 5%. Para pegawai syaraah yaitu Kadli, Imam, Saradaa, Bilal dan Kasisi.²⁰⁾

Kehakiman sejak tahun 1886 oleh Pemerintah Hindia Belanda diatur dalam enam bagian yaitu:

1. *Majelis Kecil* yang diketuai oleh Kontrolur; anggotanya: Jaksa, Griffir dan Kadli. Lembaga ini berwenang menangani perkara pidana yang terancam dengan hukuman setinggi-tingginya 9 tahun. Putusan boleh diapel kepada Residen Manado.
2. *Majelis Besar* yang diketuai oleh Asisten Residen; anggotanya: Marsaoleh, Jaksa, Griffir dan Kadli. Berwenang mengadili perkara pidana yang diancam hukuman di atas 9 tahun. Putusan dapat diapel kepada Residen Manado.
3. Lembaga Kehakiman yang disebut *Rol*, diketuai oleh Asisten Residen; anggotanya: Marsaoleh, Jaksa, Griffir dan Kadli. Berwenang mengadili perkara yang diancam hukuman di atas 9 tahun. Boleh diapel kepada Residen Manado.

20) M.H. Liputo, *loc. cit.*

4. *Residentie Gerecht* diketuai oleh Asisten Residen; anggotanya: Marsaoleh, Jaksa, Griffir dan Kadli. Berwewenang mengadili perkara orang Belanda, pegawai tinggi, Marsaoleh, Jaksa dan perkara kaum bangsawan pribumi serta anak atau cucu raja yang diancam hukuman di bawah 9 tahun. Dapat diapel kepada Residen Manado.
5. *Landraad* diketuai Asisten Residen; anggotanya: Marsaoleh, Jaksa, Griffir dan Kadli. Sebenarnya lembaga ini diketuai oleh seorang yang berijazah Meester in de Rechten tapi ia berdiam di Ternate dan hanya sekali saja ia datang bertugas di Gorontalo. Berwewenang mengadili perkara orang asing dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun yang dapat diapel kepada Residen Manado.
6. Yustisi yang berkantor di Makasar. Berwewenang menangani perkara orang Belanda atau yang beroleh hak sebagai orang Belanda; juga para pegawai tinggi (misalnya Marsaoleh atau Jaksa) termasuk perkara-perkara kaum bangsawan pribumi atau anak cucu raja yang terancam hukuman di atas 9 tahun. Putusan lembaga ini dapat diapel sampai kepada Gubernur Jenderal. ²¹⁾ Undang-undang yang dipergunakan sebagai dasar pengadilan di atas ialah Undang-undang Hindia Belanda.

Di samping harus takluk ke bawah Undang-undang Hindia Belanda itu, rakyat takluk pula kepada peraturan-peraturan adat istiadat yang mengatur adanya enam pelanggaran sebagai berikut:

1. *Totala lambango*, yaitu kesalahan melanggar wuudu dan adat istiadat sejenisnya;
2. *Totala lumbulo*, yaitu pelanggaran hak-hak raja;
3. *Totala bayalo*, yaitu pelanggaran penghinaan terhadap pemerintah atasan;
4. *Totala huntalo*, yaitu pelanggaran hukum agama misalnya: perzinahan dan lain-lain;
5. *Totala butolo*, yaitu melawan pemerintah;
6. *Totala huta-hutanga*, atau kesalahan "sapu tangan" yaitu kesalahan kecil-kecil yang dapat didenda dengan sapu tangan saja.

21) *Ibid.*, hal. 6.

Denda dari kelima pelanggaran 1 sampai dengan 5 masing-masing setinggi-tingginya 120 real. Jika yang melanggar adalah rakyat biasa atau budak maka dendanya dikurangi, tetapi jika pelanggarnya adalah dari golongan wali-wali atau kaum bangsawan maka didenda lebih tinggi. Hal ini karena rakyat atau dianggap sebagai orang bodoh sedangkan wali-wali atau para mongopulu (kaum bangsawan) terhitung orang pandai. ²²⁾

Untuk kelancaran tugas-tugas Marsaoleh maka ia dibantu oleh seorang Jurutulis (Sekretaris) dan seorang agen polisi yang diangkat oleh pemerintah. Agen polisi ini dibantu oleh seorang *Mayor, Pahlawan* dan seorang Taulio yang masing-masing bertugas sebagai penjaga keamanan dan sebagai pesuruh. Untuk menangani adat istiadat, Marsaoleh didampingi oleh seorang Kepala Adat yang disebut Bate-bate dan atau oleh seorang Wu'u (Kepala Wuudu). Setiap keluarga pada masa itu dikenakan pajak tahunan sebesar f.5,— Kemudian pajak ini dikenakan juga kepada setiap lelaki berumur 21 tahun sebab ia sudah dianggap dewasa dan mampu memikul beban pajak tahunan sebesar f.5,— tersebut. ²³⁾

Di Bolaang Mongondow, pada akhir abad 19 terdapat lima kerajaan yang berpemerintahan sendiri (zelfbestuurendelandschappen). Kelima kerajaan tersebut adalah :

1. Kerajaan Bolaang Mongondow di bawah Raja Riedel Manuel Manoppo (2893 – 1902). Ibukotanya ialah Bolaang yang terletak di pesisir Utara. Penggantinya yaitu Raja Datu Cornelis Manoppo (1901 – 1927) memindahkan ibukota ke Kotobangon di pedalaman. ²⁴⁾
2. Kerajaan Bolaang Uki di bawah Raja Willem van Gobel (1872 – 1901). Ibukota mula-mula ialah Walugu kemudian Sauk, semuanya terletak di pesisir Utara. Penggantinya yakni Hasan Iskandar van Gobel (1901 – 1941) pada tahun 1906 memindahkan ibukota ke Molibagu di pesisir Selatan. ²⁵⁾
3. Kerajaan Bintauna di bawah raja Muhamad Turadju Datun-solang (1895 – 1948). Ibukota selalu berpindah-pindah mulai Fantayo kemudian Minanga akhirnya Pimpi yang semuanya

22) Ibid., halaman 9.

23) Ibid., halaman 3.

24) Wawancara dengan Suit Abram Sugeha, Kotobangon, 23-9-1978.

25) Wawancara dengan bekas Raja Arie Hasan Gobol Kotabangon, 25-9-1978.

terletak di pesisir Utara.²⁶⁾

4. Kerajaan Bolaang Itang di bawah Raja Bondji Ponto (1890-1907). Ibu kota kerajaan ialah Bolaang Itang yang terletak di pesisir Utara. Penggantinya Raja Ram Suit Ponto yang memerintah antara 1907 - 1950.
5. Kerajaan Kaidipang di bawah Raja Antugia Korompot (1897-1910). Ibu koa ialah Boroko yang terletak di pesisir Utara dekat perbatasan dengan bekas Kerajaan Atinggola di daerah Gorontalo.²⁷⁾

Berhubung Onderafdeeling Bolaang Mongondow baru kemudian dibentuk oleh Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901 maka sebelum itu semua penguasa di atas langsung berhubungan dengan Residen Belanda yang berkedudukan di Manado.

Susunan tata pemerintahan khususnya alat-alat perlengkapan dari setiap kerajaan tidaklah seragam. Di Kerajaan Bolaang Mongondow dalam menjalankan tugasnya seorang raja dibantu oleh beberapa pejabat yaitu Sahada Tompunuon, Jogugu, Penghulu dan Mayor Kadato. Di Kerajaan Bolaang Uki: Raja dan Marsaoleh. Di Kerajaan Bintauna: Raja, Jogugu, Kapiten Laut, Marsaoleh, Walaupulu dan Mayor, Walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam jenjang jabatan di setiap kerajaan itu, tapi pada umumnya penguasa tertinggi setiap kerajaan ialah Raja sedangkan pejabat terendah yaitu Kepala Desa yang disebut Sangadi.

Semua kerajaan tersebut di atas diikat dengan apa yang dikenal sebagai "*Korte Verklaring*" atau Piagam Perjanjian Pendek. Setiap terjadi pergantian raja, piagam itu diperbaharui kembali. Semua *Korte Verklaring* isinya didahului dengan janji bahwa raja mengakui pertuanan Kerajaan Belanda dan pemerintahan Hindia Belanda atas rakyat dan wilayah kerajaannya. Raja dan rakyat tidak diperkenankan mengadakan setiap bentuk hubungan dengan bangsa lain atau mengizinkan bangsa lain berdiam di dalam wilayah kerajaan tanpa izin atau sepengetahuan pemerintah kolonial. Juga raja berjanji akan memelihara hubungan baik dengan kerajaan tetangganya. Baik raja maupun para pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah kolonial. Raja tidak berhak mengadili orang yang bukan rakyatnya. Raja

26) Wawancara dengan Abdul Murad Datunsolang, Mogolaing, 20-9-1978

27) Drs. Fendy. E.W. Parengkuan, *Sejarah Daerah Bolaang Mongondow*, Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978, hal. 11.-

wajib memelihara keamanan kerajaan serta dilarang mempersenjatai rakyat tanpa izin atau pemerintah. Raja harus menjaga agar rakyat tidak seenaknya ke luar masuk wilayah kerajaan. Juga raja terutama wajib menyetor emas atau barang-barang sesuai aturan yang ditentukan oleh pemerintah kolonial.

Tapi dapat dikatakan bahwa tidak semua isi Korte Verklaring mengandung hal-hal yang negatif sebagai yang diutamakan di atas. Misalnya raja juga diwajibkan mengintensifkan pertanian, mempersiapkan pembukaan jalan baru atau memperbaiki yang rusak demi kelancaran lalu lintas perekonomian. Perdagangan budak, perompakan laut serta meminjamkan uang dengan bunga tinggi dilarang. Selain itu raja diwajibkan memerintah rakyatnya dengan adil dan bijaksana.²⁸⁾

Pada akhir abad ke-19 itu, pemerintah kolonial mulai mempersiapkan rencana pembentukan Onderafdeeling Bolaang Mongondow. Onderafdeeling baru ini masih merupakan satu *lingkungan wilayah jabatan* atau *ambssort* bagi seorang pamong praja bangsa Belanda atau *Europees Bestuursambtenaar*. Hal ini adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan menurut azas *deconcentratie* berdasarkan *Reglement op het beleid der Regering der Nederlandsch Indie* atau disingkat *Regering reglement 1855 (Staatsblad 1855 No.2)*. Kepala *Onderafdeeling administratief* ini nantinya diberi gelar jabatan *Controleur Binnenlands bestuur* bagi yang pejabatnya lulusan Jurusan Indologi Universitas Leiden dan gelar jabatan *Gezaghebber* bagi yang hanya lulus *Bestuurs-academie*.²⁹⁾

B. SOSIAL BUDAYA

1. Bidang pendidikan

Daerah Minahasa dapat dikatakan sebagai daerah yang mula-mula mengenyam pendidikan Barat, untuk wilayah Sulawesi Utara. Pada tahun 1675 daerah ini didirikan sebuah sekolah dengan murid 25 orang. Mereka diajarkan menulis, membaca dan

28) Lihat misalnya Piagam Perjanjian (*Korte Verklaring*) antara Raja Elijas Datunso- lang dari Kerajaan Bintauna dengan Residen Manado tertanggal 24-9-1857 yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 22-2-1858.

29) Bupati KDH Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow, *Selayang pandang tentang perkembangan tata pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow Propinsi Dati I Sulawesi Utara*, Kotamobagu, 1977, hal. 8-12.

pendidikan agama Kristen. Pendidikan di Minahasa sangat diintensifkan oleh para pendeta Zending. Pada tahun 1845 sudah ada 55 sekolah yang disponsori Zending di samping 11 sekolah pemerintah. Agar diperoleh tenaga guru yang cukup untuk perluasan pendidikan, maka Zending mendirikan sebuah sekolah guru pada tahun 1852 di Soner yang kemudian dipindahkan ke Tanawangko. Sekolah guru ini dipimpin oleh N. Graafland. Pada tahun 1873, pemerintah mendirikan pula sebuah sekolah guru di Tondano yang kemudian ditutup tahun 1885. Sebelum itu yaitu tahun 1865, pemerintah telah mendirikan sebuah sekolah di Tondano yang disebut Hoofdenschool atau lengkapnya *School voor zonen van Inlandsche hoofden en van andere aanzienlijke eilanders*. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak para raja, keluarga bangsawan serta kepala-kepala pribumi lainnya. Karena sekolah ini hanya menerima anak-anak para pemimpin saja, maka sekolah ini lebih dikenal dengan sebutan Sekolah Raja. Pada tahun 1878 Zending membuka lagi sebuah sekolah tempat mendidik para pembantu pendeta. Dengan demikian maka pada akhir abad 19 di Minahasa sudah terdapat tiga sekolah lanjutan pertama yaitu dua milik Zending dan satu milik pemerintah.

Semua sekolah Zending itu milik Badan Pekabaran Injil Protestan. Usaha Misi Katolik dalam bidang pendidikan guru dimulai atas inisiatif dari Pastor P.A. Wintjes di Tomohon. Misi Katolik kemudian mengirimkan lima pemuda Minahasa ke Jawa pada tahun 1896. Tiga di antara mereka yaitu Jan Langitan, Andreas Kalesaran dan Junus Waha kembali tahun 1898 dan segera bekerja sebagai guru di Tomohon, Taratara dan Lemoh. Pada tahun itu juga tiba di Minahasa Pastor A.P.F. van Velsen SJ yang menyimpulkan bahwa dasar kokoh untuk memantapkan pekerjaan Misi harus dimulai dengan pendidikan guru Katolik.³⁰⁾ Dengan demikian di Minahasa pada akhir abad 19 itu ada tiga lembaga yang mengusahakan pendidikan khususnya pendidikan guru yaitu Zending, pemerintah dan Misi Katolik.

Mengenai perkembangan bidang pendidikan di daerah Gorontalo data yang ada sangat terbatas. Untuk itu dapat ditunjuk laporan Inspecteur J.C. Notebaart pada tanggal 17 Januari 1940 yang ditulisnya dalam rangka peringatan 20 tahun berdirinya Perserikatan Normaal School. Laporan itu berjudul "*Kort over-*

30) Vikariat Apostolik Manado, *Buku Peringatan 50 tahun Pendidikan Guru Katolik di Vikariat Manado*, Manado, 1953, hal. 8 dan 12.

zicht van de Geschiedenis van het Inlandsch onderwijs in de Tegenwoordige Residentie Manado". Isi dari laporan itu antara lain mengatakan bahwa pada tahun 1872 pemerintah untuk pertama kalinya mengangkat seorang inspektur pendidikan di Keresidenan Manado bernama Clercq. Laporan itu selanjutnya mengatakan bahwa usaha pendidikan orang Indonesia belumlah begitu mantap, walaupun sejak akhir abad 19 sudah didirikan persekolahan di seluruh wilayah Keresidenan Manado.³¹⁾

Pemerintahan langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda di daerah Gorontalo berlaku mulai tahun 1889 sesuai Staat sbiad No. 96 dan 250 Tahun 1889. Beberapa tahun kemudian yaitu atas anjuran Asisten Residen Scherer, pemerintah mulai mendirikan beberapa sekolah gubernemen di Gorontalo.³²⁾ Berdasarkan laporan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa pada akhir abad 19 sudah dilakukan usaha-usaha pendidikan untuk daerah Gorontalo yang kemudian lebih dimantapkan lagi pada awal abad 20.

3) Sejarah Pendidikan di daerah Sangir Talaud sebenarnya sudah dimulai sejak kedatangan bangsa Belanda (VOC) pada abad ke-17. Menurut H.E. Yuda, bangsa Belanda mula-mula menduduki daerah ini pada tahun 1614/1616.³³⁾ Pada akhir abad ke-19, dengan adanya berbagai kemajuan di daerah ini terutama setelah menetapnya keempat pendeta tukang (Ernst Tronget Steller di Manganitu, Frederik Kelling di Tagulandang, Carl W.L.M. Schroder di Tabukan dan Grohe di Siau), yang di samping usahanya di bidang keagamaan juga aktif di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah Zending yang ditangani langsung oleh para pendeta Zending tersebut.³⁴⁾

Menurut laporan Ds.v.d. Velde van Capellen (1855) di kepulauan Sangir Talaud terdapat 24 sekolah yang tersebar di enam kerajaan yaitu:

- a. Di Kerajaan Tagulandang tiga buah masing-masing di Tagulandang, Haasi dan Minanga;
- b. Di Kerajaan Siau sembilan buah antara lain di Ondong, Ulu, Sawang, Makalehi, Kahakitang, Para;

31) I.C. Notebaart, *Boekoe Peringatan 20 tahoen Peringatan Normaal School (PNS), Kort overzicht van de Geschiedenis van het Inlandsche onderwijs in de Tegenwoordige Residentie Manado*, Buitenzorgsche Drukkerij, 1940, hal. 139, 140.

32) B.J. Haga, *op.cit.*, hal. 197.

33) P.3.K.D. Sulawesi Utara, *op.cit.*, hal. 81

34) Wawancara dengan H.E. Yuda, Tahuna, 28-9-1978.

- c. Di Kerajaan Manganitu dua buah yaitu di Manganitu dan di Lapango;
- d. Di Kerajaan Tahuna tiga buah yaitu di Tahuna, Kolongan, dan Sawang;
- e. Di Kerajaan Kendahe (Kendhar) satu buah yaitu di Kendahe;
- f. Di Kerajaan Tabukan enam buah yaitu di Tabukan, Tariang, Kuma, Kulur, Manalu dan di Salurang.³⁵⁾

Umumnya sekolah-sekolah yang ditangani oleh Zending termasuk pada sekolah yang dinamakan *Volkschool* (Sekolah Rakyat) dengan jangka waktu pendidikan selama tiga tahun yaitu kelas 1, 2 dan 3 dengan bahasa Melayu (bahasa Indonesia) sebagai bahasa pengantar.

Di samping itu pemerintah kolonial juga membuka sekolah-sekolah yang disebut sekolah Gubernemen (Sekolah Pemerintah) yang umumnya termasuk (merupakan) lanjutan dari *Volkschool* dan disebut *Vervogkschool* dengan jangka waktu pendidikan selama dua tahun. Selain itu pemerintah Belanda mendirikan pula HIS (Hollands Inlandsche School) khusus untuk anak-anak bangsa Belanda dan orang Indonesia yang mampu ataupun yang dikatakan berdarah Belanda. Di samping itu dikenal pula sejenis sekolah yang disebut *Schakelschool* dengan ijazah tersendiri dan merupakan perantara bila seorang tamatan *Vervogkschool* mau mengambil ijazah sekolah yang berbahasa Belanda. Mengenai HIS, sekolah ini mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dengan masa pendidikan selama tujuh tahun (kelas 1 s/d kelas 7). Di Sangir Talaud sekolah ini hanya terdapat di Siau dan di Tahuna.³⁶⁾

Kegiatan Zending di Sangir Talaud ini, sebagaimana juga dilakukan di tempat-tempat lainnya di Indonesia, dilakukan sejalan dengan kegiatan pendidikan, di samping kegiatan atau usaha-usaha sosial. Selain menyelenggarakan pendidikan umum, Zending juga menyelenggarakan pendidikan Guru Injil. Sekolah seperti ini dimulai oleh Kelling tahun 1891 di Siau dan oleh Schroder di Kaluwatu (Sangir Besar).³⁷⁾ Para lulusan Sekolah Guru Injil ini

35) P3KD Sulawesi Utara, *op. cit.*, hal. 137-138

36) Wawancara dengan Th. Y. Makahanap, Tahuna, 27-9-1978.

37) Dr. Th. Muller Kruger, *Sedjarah Geredja di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, 1959, hal. 108-109.

kemudian bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah di samping tugasnya untuk mengabarkan Injil ke tengah masyarakat.

Dalam bidang pendidikan di daerah Bolaang Mongondow dapat dikatakan bahwa rata-rata anggota masyarakat pada waktu itu tidak tahu membaca dan menulis. Pada akhir abad ke-19 ini, pemerintah sama sekali tidak menaruh perhatian mendirikan lembaga pendidikan di sana. Memang sebelumnya yaitu di masa pemerintahan Raja Jacobus Manuel Manoppo (1830-1858) ada sebuah sekolah di ibu kota Bokota Bolaang. Tapi sekolah itu kemudian ditutup berhubung gurunya yaitu Jacobus Bastian meninggal dunia dan tidak segera dikirimkan Penggantinya. Selain itu memang kurang sekali minat rakyat di sana untuk memanfaatkan sekolah yang ada.

Dengan demikian maka yang memegang peranan dalam lingkungan pendidikan keluarga ialah kepala keluarga bersangkutan. Di setiap keluarga, selalu ada yang berlaku, baik dalam lingkungan keluarga itu sendiri juga di lingkungan yang lebih luas.³⁸⁾ Ialah yang bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anaknya pendidikan akhlak dan ketrampilan sebagai bekal bagi anak-anaknya di masa depan.

Barulah pada masa pemerintahan Raja Riedel Manual Manoppo (1893-1902) mulai timbul adanya perhatian dalam soal pendidikan di kota ini. Raja ini mengirimkan dua anaknya yaitu Jacobus Riedel Manoppo dan adiknya Johannis Manual Manoppo, untuk pergi menempuh pendidikan formal di *Hoofdenschool* Tondano (Minahasa), antara tahun 1897-1902. Meskipun raja ini dikenal sebagai anti Belanda, namun ia yang pertama menyadari pentingnya pendidikan bagi rakyat demi kemajuan kerajaannya. Sebagaimana sudah diketahui, karena sekolah ini hanya menerima anak-anak para raja, kaum bangsawan serta para pemimpin rakyat lainnya yang mampu, maka sekolah ini disebut sebagai "Sekolah Raja". Dalam periode lima tahun yaitu antara 1897-1902 itu, hanya ada empat murid sekolah Raja ini yang berasal dari daerah Bolaang Mongondow. Dua murid lainnya yaitu Herman Manoppo (kemenakan raja Riedel Manuel Manoppo) dan Phillip Ponto, anak Raja Ram Suit Ponto dari Kerajaan Bolaang Itang.³⁹⁾

38) Wawancara dengan A.M. Datunsolang, 20-9-1978.

39) Drs. Fendy E.W. Parengkuan, op cit., hal. 10-11.

2. Seni Budaya

Untuk daerah Minahasa, yang paling terkenal dalam bidang seni musik ialah kolintang kayu. Menurut ceritera rakyat Minahasa yang hidup sampai sekarang ini, alat musik kolintang diketemukan oleh seorang pria anonim, yang karena kecewa, pergi mengembara meninggalkan rumahnya lalu berdiam di hutan. Untuk mengusir kesunyian di hutan, ia mengumpulkan kayu-kayuan seperti kayu welesi atau wanderan. Jenis kayu ini apabila sudah kering menimbulkan bunyi-bunyian tertentu kalau terjatuh atau sengaja dipukul-pukul. Pria anonim itu berhasil mengkombinasikan bunyi-bunyian tersebut sehingga membentuk tangga nada yang merdu. Ketika ia kembali ke masyarakat ramai, penemuannya ini memikat banyak penggemar di antaranya seorang gadis bernama Lintang. Sebagai lambang cinta kasih sang pria itu terhadap Lintang maka ia menamakan lagu yang keluar dari alat musiknya *niko Lintang*. Sejak saat itu alat musik tersebut dinamakan kolintang. Kebenaran ceritera rakyat ini mungkin sekali meragukan namun suatu hal dapat dipastikan bahwa alat musik kolintang merupakan khas Minahasa, jauh sebelum adanya pengaruh kesenian dari luar terutama pengaruh Barat mulai abad ke-15/16.

Selain kolintang terdapat pula alat musik suling yang terbuat dari bahan bambu kecil. Suling kecil ini berfungsi sebagai alat hiburan terutama bagi para petani yang sedang menjaga kebun juga merupakan hiburan senja di kala petani itu berada di rumahnya. Termasuk alat musik terbuat dari bahan bambu ialah alat-alat musik bambu, baik bambu melulu, bambu seng maupun bambu klarinet. Ketiga musik terakhir ini perkembangannya nyata sekali mulai awal abad ke-20.

Mengenai seni tari, yang paling terkenal di daerah Minahasa ialah:

- a. Tari maengket, merupakan tari pengucapan syukur selesai panen, mendirikan rumah baru dan juga termasuk tarian pergaulan muda mudi Minahasa. Tari maengket terdiri dari tiga babak yaitu babakan pertama tari makamberu, babakan kedua tari rumambak dan babakan ketiga tari lalayaan. Dalam makamberu ditarikan tarian pemujaan dan pengucapan syukur berhubung diperkenankan menggunakan lokasi serta sukses mendirikan rumah di situ. Dalam tari lalayaan dianggap merupakan rangkaian sukses di bidang pertanian

dan mendirikan rumah, sehingga sudah tibalah saatnya bagi muda mudi keluarga itu untuk mencari jodohnya masing-masing lalu hidup bersama.

- b. Tari cakalele atau mahasakan atau masasan, yang merupakan tari perang suku Minahasa. Sebagai tari perang maka yang dipergunakan ialah alat-alat tombak (*sagu-sagu*), pedang (*ko-wit*) dan perisai (kelung). Para penari melompat-lompat dan berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan pedang, tombak dan perisai yang dipegang Pemimpin mereka yang sudah kemasukan roh leluhur meminta restu untuk mengayau (*mahasasan*) dalam peperangan dengan musuh. Para penari hanya memakai cawat terbuat dari kulit kayu (*karaimoomo*) dan selendang/selempang dari kulit ular yang dipasang di pundak bersilangan di dada. Kepala mereka diikat dengan kulit ular pula. Sering pedang, perisai dan tombak mereka menjurai rambut manusia hasil kayauan atau rambut binatang.
- c. Tari Kabasaran, suatu tarian penjemput tetamu agung dari orang Minahasa. Seluruh gerakan dilakukan atas aba-aba pemimpin yang disebut kepala. Aba-aba yang dipergunakan yaitu: *copat* (kaki kanan maju ke depan), *tumbal* (tombak pada posisi samping kaki kanan), *kumuru* (hormat membungkuk), *tumoor* (tegap kembali), *wareng* (siap), *tiboyan* (perang tombak), *ipala* (gerakkan tombak ke samping dan siap lontarkan), *wangunen* (Ulangi semua gerakan tadi) disusul pekikan-pekikan, *rambun* (mundur tiga langkah), *pakasape* (ulangi gerakan terakhir), *masaru* (berhadap-hadapan), *melengkawit* (saling membelakangi), *tumondong* (barisan berbanjar), *wangunan matura* (pujian untuk barisan yang harus diiringi gerakan menombak/menusuk sambil memekik-mekik), *sumiri* (kaki kanan mundur selangkah membungkuk hormat sambil menggoyang-goyangkan tombak atau pedang di tangan), *tumambang* (perintah membantu kawan, beberapa penari melompat berkumpul sambil memekik-mekik), *kipitan* (letakkan perisai di bawah lengan), *tumambak* (menghentikan kaki ke tanah), *tumamor* (pukul tambur atau bunyi-bunyian sejenisnya).

Dahulu pakaian penari sama dengan penari cakalele, tapi sekarang pakaian bebas asalkan berwarna merah.

- d. Sejenis dengan tari kebesaran yang dilakukan oleh suku Bantik Minahasa ialah yang disebut tari maupesa. Tarian ini ditarikan oleh pria dewasa, terdiri dari dua babak yang disebut *sumau*, dan *nopadangsa*. Babakan *sumau* mirip dengan kabasaran yang juga dimulai dan diakhiri dengan gerakan penghormatan tamu. Babakan *nopadangsa* sebenarnya tidak dimaksudkan untuk disuguhkan bagi tamu kecuali jika diminta. *Nopadangsa* dilakukan oleh dua barisan penari yang berdiri saling berhadapan dan menari dengan gerakan bebas yang menunjukkan kegembiraan. Tarian upesa ini dipimpin oleh pemimpin yang disebut *kepala upas*. Aba-aba diberikan dalam bahasa Bantik; *Upesa tintudonang* (barisan upesa siap), *pabei tanai'* (hadap ke Selatan), *pabe tanao'* (hadap Utara), *kotou makampona* (lompat ke depan), *kapasakin* (gerakan diulangi), *kotou mukulikudu* (lompat ke belakang), *painawang* (memencar), *pamuku* (berlutut), *pamunakulung* (pegang perisai), *posou bada'* (lepaskan pedang), *tengede'* (berdiri), *pancaruane* (berhadap-hadapan), *pahidapaeng* (berdekatan kembali), *maporadong* (saling berpegangan tangan), *tamoho'* (pukulkan tambur), diakhiri dengan aba-aba *nopadangsa* (menarilah).

Para penari menggunakan selendang/selempang (*bakata*), topi atau tutup kepala dari bulu-bulu ayam *Papodong*) sejenis kutang atau blouse pendek (*lamasi*), cawat atau sekarang celana pendek dan baju merah (*kapena*), ikat pinggang (*bileda*) dilengkapi dengan pedang (*bada'*) atau sejenis tombak (*gorlo'*) dan semuanya memakai perisai (*kulung*).

Mengenai seni sastra Minahasa dapat diberikan penjelasan bahwa hal itu mengiringi seni musik dan seni tari yang ada atau dapat juga berupa nyanyian, pantun dan sebagainya. Beberapa contoh seni sastra misalnya dalam:

- a. Upacara memohon pimpinan:
Oh Opo Walilan/Tembone se mangale-ngalei/Turu'anni lalan karondoran/Wo pakatu'an wo pakalawiren.

Artinya:

Ya Tuhan Allah yang Mahatinggi/Tiliklah kami yang berseru memohon kepadaMu/Tunjukkanlah bagi kami jalan yang lurus dan benar/Peliharakanlah kami dengan berkat sampai di hari tua dan panjangkanlah umur kami.

- b. Upacara memohon panen yang baik:
*Muntu-untu, Lingkan bene, Sawur wene, se wenen Manaroin-
ingsong/sumambu reirei e wene/owey.*

Artinya:

Wahai Muntu-untu, Lingkan, Sawur dan Manaroin-
song (para dewa perantara berkat panen) pemberi padi/saat ini kain
sudah teralasi rapi, biarlah jatuhkan padi ke situ/Sekian per-
mintaan ini.

- c. Upacara naik rumah baru:

*Watu lanei naria tinuliran umbale weru e royor / watu lanei
naria palesokan ing koro ne tou e royor / Wasian rimondori
wana kentur rambu-rambunan e royor / Winanti moni endo,
totolanou im bale weru e royor / Temboan simendangan
wana kentur rambu-rambunan e royor / Winanti moni endo
kerenanou im bale were e royor / Kayu talapan siou wana
kentur rambu-rambunan e royor / Winanti mo ni endo sela
rendai im bale weru e royor / Raripungu naria wana kentur
rambu-rambunan e royor / Winanti mo ni endo kewu lanut
im bale weru e royor / Wilangitang e kalo wana kentur ram-
bu-rambunan e royor / Winanti mo ni endo kendir lanei im
bale weru e royor / Karombasang e kalo wana kentur rambu-
rambunan e royor / Winanti mo ni endo kontoyanou im bale
weru e royor.*

Artinya:

Batu licin pilihan yang menumpu rumah baru ini / Batu licin
yang menggelincirkan niat jahat orang / Kayu wasian lurus
yang tumbuh di dataran tinggi diliputi embun / Kayu yang ke-
ras dan liat karena tempaan sinar matahari / Tumbuh di se-
belah Barat dataran tinggi berembun / Diperkeras oleh tem-
paan sinar matahari dan menjadi sokoguru rumah yang baru /
Sembilan kayu tala pan yang tumbuh di dataran tinggi dili-
puti embun / Ditempa sinar matahari untuk memperkokoh
rumah yang baru / Kayu raripungu di puncak dataran berse-
limutkan embun / ditempa sinar matahari agar rumah tak
mungkin goyah / Kayu walangitang di puncak dataran tinggi
diliputi embun / Ditempa sinar matahari untuk dinding rumah
yang kokoh / Kayu karombasang di dataran berselimutkan
embun / Ditempa sinar matahari untuk tangga rumah yang
baru dan siap dihuni orang.

d. Upacara perkawinan:

Minurut e un sinsim waki lalan ne Paempungan e royor / Tembone'la ya tele'u ne makanaramen e royor / Sinsim wulawan lumo'or se maloyan weru e royor / Wulawan winatuan u raung kerap ne sumesena' e royor.

Artinya:

Dipungut sebentuk cincin di jalan ke tempat para dewa / Cincin pusaka peninggalan nenek moyang tercinta / Terben-
tut dari emas murni, sebagai penjodohkan pemuda-pemudi / Cincin bertatahkan intan permata, cemerlang bagaikan kelip-nya bintang di langit.

Mengenai seni kriya Minahasa dapat diutarakan sebagai berikut:

- a. Manenun: sebelum orang Minahasa mengenal jenis-jenis kain bahan pakaian maka mereka membuat pakaiannya dari bahan kulit kayu yang disebut *karaimo'omo'*. Kulit kayu yang dipilih adalah kulit kayu tayapu. Sekarang ini tidak diketahui lagi tentang bentuk, warna maupun motifnya.⁴⁰⁾
- b. Menganyam: untuk keperluan rumah tangga misalnya untuk pengalas tempat tidur, menjemur padi dan sebagainya di-nyamlah tikar yang disebut *тино'orong*. Bahan bakunya ialah sejenis rumput berdaun panjang-panjang yang biasanya tum-
buh dekat rawa atau sawah yang disebut *na'ayamen*.⁴¹⁾
- c. Mengukir: umumnya kuburan-kuburan tua orang Minahasa purba yang disebut waruga ada ukir-ukiran manusia, bina-
tang dan sebagainya dengan berbagai posisi. Selain itu rumah-
rumah adat Minahasa mempunyai tiang jendela/tingkap yang dikerjakan begitu rupa dengan cara mengukirnya. Di Batu Pinawetengan terdapat lukisan-lukisan piktografis berupa kepala manusia, badan manusia, gunung, burung, pagar, lobang-lobang, bulan, pegunungan, segi tiga dan lain-lain, yang menurut dugaan adalah hasil pekerjaan tangan manu-

40). Drs. Fendy. E.W. Parengkuan, "Mengenal Pertanian Tradisional Orang Minahasa" dalam majalah tak berkala *Duta Budaya*, Lembaga Penelitian Sastra Fakultas Sas-
tra Universitas Sam Ratulangi, Manado, Juli 1978, Tahun VIII, No.03, hal.50.

41) *Ibid*, hal. 41

sia.⁴²⁾ Sampai sekarang belum ada orang yang berhasil membuka tudung rahasia di Batu pinawetengan itu.

- d. Kerajinan tembikar: terbuat dari bahan tanah liat dan damar yang dibentuk menjadi alat-alat keperluan rumah tangga seperti tempat menanak nasi (*kure'*) belanga goreng (*rum-ping*) dan sebagainya.
- e. Alat-alat berburu, menangkap ikan dan sebagainya yang terbuat dari bambu seperti berjenis-jenis perangkap (*palom-pit*, *pitik*), bubu (*tetenemen*), sejenis pagar bambu untuk menangkap ikan di sungai (*roreng*) dan sebagainya.
- f. Alat-alat perang seperti tombak (*wengkou*), tombak bercagak kedua ujungnya (*tangkowit*), *perisai* (kelung) pedang (*kowit*) dan lain-lain.
- g. Alat-alat pertanian, penyimpanan dan pengolahan hasil-hasil pertanian seperti sejenis sekop (*wai'*) terbuat dari batang enau, cangkul (bewingkung), bakul (*lo'olo*), lesung (*tenged*, *tenger*), penampi (*niu*) dan semacam lumbung dari kulit kenanga yang biasanya ditempatkan di loteng (*pumpun*).⁴³⁾

Di daerah Sangir Talaud di bidang seni budaya pada masa ini telah terdapat bermacam-macam cabang kesenian seperti:

- a. Seni tari antara lain tari *gunde* di mana dipakai berjenis-jenis irama atau lagu yang diiringi oleh nyanyian yang disebut *sasambo*. Tari *gunde* ini adalah tari pemujaan yang dipergunakan dalam upacara-upacara adat. Di dalam suatu upacara adat biasanya diperdengarkan berjenis-jenis irama tambur yang masing-masing dibunyikan sesuai fungsinya. Jenis-jenis irama tambur itu antara lain:

- 1) *mangala kapita* (menyongsong pimpinan)
- 2) *maneking mamate* (pengaturan tempat duduk)
- 3) *bahema* (irama tari bendera)
- 4) *makimambaru* (irama isyarat bahwa meja telah siap)

yang kesemua irama isyarat ini dilakukan dengan alat musik tambur.

Selain itu ada juga tari *alabadiri* yaitu suatu tari para pe-

42). Inspeksi Daerah Kebudayaan Sulawesi Utara *Brosur tentang Minahasa*, Manado, hal.9.

43). Wawancara dengan S.Parengkuan, Manado, 14 - 10 - 1978.

ngawal istana dan merupakan tari kepahlawanan. Tari ini dimulai dengan gerakan penghormatan disusul gerakan-gerakan alat-alat senjata/perisai yang mengandung pengertian tertentu. Tarian ini mulai berkembang di abad ke-18 dalam masa pemerintahan Raja Pandialang dari Kerajaan *Tabukan*.

Juga ada tarian yang disebut tari *ampa wayer*, *kakalumpang*, *lide*, *ransa sahabe*, *salo* dan sebagainya.

- b. Seni musik khususnya seni musik vokalia yang terdiri dari:
- 1) *Sasambo* yaitu nyanyian pada waktu tari gunde;
 - 2) *Bawowo* pada waktu menidurkan anak-anak;
 - 3) *Laele* yaitu lagu pergaulan muda-mudi sambil berden-dang
 - 4) *Kakumbaede* yaitu nyanyian puji-pujian;
 - 5) *Kakalonto* yaitu nyanyian berupa lagu doa;
 - 6) *Kakalumpang* yaitu lagu berpantun yang menggambarkan kegotongroyongan.⁴⁴⁾

Seni musik dan seni sastra tidak dapat dipisahkan dari seni tari. Mengenai seni tari, dalam perkembangan selanjutnya, tarian asli seperti tari salai (tari *gunde*) dan tari *salo* (tari perang) makin berkembang dari fungsinya yang mula-mula sebagai upacara penyembahan berhala menjadi alat penghibur ataupun sarana rekreasi di kalangan istana maupun untuk rakyat biasa.

Kemudian muncullah pula tari *upase*, *alabadi* dan *ransa sahabe* yang telah kena pengaruh Barat, antara lain dalam istilah-istilah yang berasal dari bahasa Belanda seperti *upase* (dari kata *opas*), *alabadi* (dari kata *Helebardir*) dan *ransa sahabe* (*ransa* dari kata *dans* sedangkan *sahabe* adalah nama tempat di mana tarian itu mula-mula terkenal). Di samping itu dalam tari *upase*, ada penari-penari yang diberi nama jabatan (pangkat) seperti: *Sariang* (dari kata *sersan*) *lutanani* (dari kata *Luitenant*), *kapita* (dari kata *kapitein*), dan lain-lain.⁴⁵⁾

Mengenai seni kriya di daerah Sangir Talaud dapat diutarakan sebagai berikut:

44). P3KD Sulawesi Utara, *op.cit.*, hal. 147 – 148; selanjutnya lihat hal. 185 – 186; juga hal. 50 – 51 dan 84.

45) Wawancara dengan Z.M.Lahindo, 1–10–1978.

- a. Menganyam: adanya kerajinan anyam-anyaman seperti pembuatan tikar daun pandan dan tikar rotan;
- b. Menenun: membuat bahan pakaian dari serat manila hennep yang dikenal dengan kain kofo. Termasuk kerajinan menenun ialah merajut jala dan tali;
- c. Menyulam: kerajinan kerawang untuk membuat baju pria dan wanita;
- d. Mengukir: seperti membuat hiasan-hiasan dari bahan kayu hitam;
- e. Membuat alat-alat rumah tangga dari bahan tanah liat seperti periuk, belanga, jambangan bunga dan lain-lain;
- f. Membuat alat-alat pertanian seperti parang, kapak, pacul, pisau dan sebagainya.

Bentuk, perkembangan serta jenis seni budaya di Gorontalo pada akhir abad ke-19 adalah merupakan kelanjutan dari seni budaya masa sebelumnya. Seni budaya tersebut adalah bercorak Islam dan merupakan bagian perkembangan kebudayaan Islam di Gorontalo selama kira-kira tiga abad. Seorang tokoh yang berjasa dalam memupuk dan memajukan kehidupan dan kesenian Islam di Gorontalo ialah Raja Mohammad Iskandar Pui Monoarfa yang bergelar "*Tai Loo Tolimo*". Ia adalah seorang alim ulama yang berjasa dalam mengembangkan kecakapan seni membaca al-Qur'an sekaligus kemahiran berbahasa Arab. Ia juga berjasa mengembangkan kesenian Islam Gorontalo khususnya kesenian suruh nyanyi, mengaji, zikir dan syair, tepuk rebana dan lagu-lagu.⁴⁶⁾

Mengenai jenis-jenis kesenian di daerah Gorontalo dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Seni tari: *danadana* atau *zamrah*, *dayango*, *elengge*, *langga*, *linte*, *mohuyula*, *mongotolo*, *polopalo*, *saronde*, *tidilo bitu'o*, *tidi lo rante*, *tihu'o* dan sebagainya;
- b. Seni musik: *alababu*, *antungo*, *gambus*, *polopalo*, *rabana*, *buruda*, *rabana sulunani*, *rabana tinilo huntingo*, *tulali lo binte* atau *tulali lo huidu*, dan sebagainya;
- c. Seni sastra: *bungga*, *tuja'i*, *di'kili*, *lohidu*, *patungi sulunani*, *tanggomo*, *tinilo*, dan sebagainya.

46) M.H. Liputo, *op.cit.*, djilid VIII, 1949, hal. 33

u. Seni Kriya:

- 1) kerajinan rakyat: kursi rotan, tikar, kopiah rotan dan sebagainya;
- 2) alat-alat rumah tangga: *totalu'o, o'ahu, bilenga, popaluwa, buawu, bulonggo*, dan sebagainya;
- 3) alat-alat pertanian: *popade'o, hugegidu, popati*;
- 4) alat-alat perburuan dan penangkapan ikan: *totobu'o, tuhiyango, talele, popotilo, titi'apo, o'ayilo, budoyahu, eyambu, olate, tapilo, tobongo* dan sebagainya.

Mengenai kehidupan seni budaya di daerah Bolaang Mongondow, sama halnya dengan di daerah-daerah lainnya, adalah merupakan kelanjutan dari abad sebelumnya, dengan memperoleh pengaruh agama dan kebudayaan dari luar. Tentang hal ini dapat diutarakan dengan pembagian jenis-jenis kesenian sebagai berikut:

- a. Seni tari: terdiri dari beberapa jenis lagi yaitu tari perang (*dangisah, joke, saurongko, mosau, tuitan, husaro*), tari pemujaan (ki koyog dan mohuyut), tari penjemputan/penghormatan tamu agung (*kabela* dan *pomanaan*), dan tari adat (*uella, tayok* dan *giomu*), dan tari pergaulan, hiburan dan sebagainya (*kalibombang, mohosambe, monugal*);
- b. Seni musik: terdiri dari seni musik vokal (*tolibag, lolibag, logantod, totampit, bondit, yungkagi, dondong, dende, odenon, pantun* dan *dete-dete*), dan seni musik instrumental (*kantun, oli-oli, dadalo, bansi, rambabo, tantabua, bandingo, safuwa, kulintango* dan sebagainya).
- c. Seni sastra: nama-namanya sama dengan seni musik vokal yang masing-masing memiliki syair lagunya sendiri-sendiri; termasuk dalam seni sastra ialah ceritera-ceritera yang berbentuk puisi maupun prosa tentang mite, legende dan dongeng;
- d. Seni kriya:
 - 1) pembuatan alat-alat keperluan rumah tangga: *luwit, ginapa, tandai, potolo, pitow, tosilat* dan lain-lain;
 - 2) kerajinan tembikar: *kuyon im bumbe, kuyon gogolutan, kuyon lologaan, padingki, pot im bungang, potondongan ing kopi, dodongoian ing koito, kuyon pinugungan, biko, sinompansi* dan sebagainya;

- 3) pembuatan alat-alat seni musik;
- 4) Alat-alat pertanian: *tugal, sabel, lolapa, kuyon im bumbe, pajeko, kuyon gogolutan* dan sebagainya;
- 5) Alat-alat perburuan dan penangkapan ikan: *pandong im boke, ginibat, giman, pole, singkop, tomoing, kalenda, bobolit* dan sebagainya.

Dapatlah dikemukakan bahwa kehidupan seni budaya di daerah Bolaang Mongondow akhir abad ke-19 di atas, hampir tidak pernah mengalami perobahan dan berlangsung terus sampai masa pendudukan Jepang bahkan sampai sekarang ini. Kesemua hal di atas Terat sekali hubungannya dengan alam pikiran/kepercayaan baik di Bolaang Mongondow maupun di daerah-daerah lainnya.

3. Alam pikiran/kepercayaan

Alam pikiran dan kepercayaan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Dr. N. Adriani dikatakan bahwa kehidupan kerohanian itu terjalin erat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Begitu eratnya sehingga orang tidak dapat membicarakannya secara terpisah-pisah.⁴⁷⁾ Alam pikiran/kepercayaan itu amat bervariasi mulai dari kepercayaan tentang alam sekitar, tentang asal usul manusia, dunia gaib dan sebagainya. Koentjaraningrat mengatakan bahwa paham animistis termasuk ilmu gaib selalu tersangkut erat dalam masyarakat.⁴⁸⁾

Dengan datangnya para penginjil ke daerah Minahasa maka secara berangsur-angsur orang Minahasa mulai memeluk agama Kristen. Menurut laporan, berita Injil untuk pertama kalinya berkumandang di Minahasa tahun 1563, di mana terdapat 1500 orang Minahasa yang masuk agama Kristen. Tapi sampai tahun 1831, baru 2% penduduk Minahasa yang telah memeluk agama Kristen. Kira-kira lima puluh tahun kemudian sekitar 80.000 penduduk Minahasa yang sudah Kristen yaitu pada akhir abad ke 19.⁴⁹⁾ Masuknya agama Islam ke Minahasa adalah sejalan dengan rentetan tindakan pembangunan oleh pemerintah kolonial terhadap para pejuang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia

47) Dr.N.Andriani "De landbouw in het heidendom der Indonesische volken" artikel dalam *Verzamelde Geschriften* deel I, Erven F.Bohn NV, Haarlem, 1932, hal. 288.

48) Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1974, hal. 219.

49) Dr. Th. Muller Kruger, *op. cit.*, hal. 94.

mulai akhir abad ke-18 yang antara lain dari Banten, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Aceh. 50

Walaupun masing-masing sudah memeluk agamanya sendiri-sendiri, orang Minahasa masih mempercayai adanya makhluk-makhluk halus yang mendiami alam raya ini, kekuatan-kekuatan gaib dan kekuatan-kekuatan sakti dalam kehidupannya sehari-hari, yakni:

- a. Kepercayaan kepada makhluk halus (*opo-opo*) yang terdiri dari:
 - 1) Nenek moyang, yang disebutnya *dotu-dotu*, yang arwah mereka disebut *opo*, seperti *Opo To'ar*, *Opo Karema*, *Opo Lumimu'ut* dan sebagainya;
 - 2) Cikal bakal kerabat seperti *Opo Supit*, *Opo Tololiu*, *Opo Mamarimbing* dan sebagainya;
 - 3) Penghuni gunung, sungai, mata air, hutan dan lain-lain seperti *Opo Lokon*, *Opo Kalabat*, *Opo Kumelembuai*, *Opo Lelendongan*, *Opo Siowkurur*, *Opo Benteng*, *Opo Pulisan*, *Opo Pisok*, *Opo Lour* dan sebagainya;
 - 4) Penjaga mata angin seperti *Opo Amian*, *Opo Timu*, *Opo Talikuran*, *Opo Sendangan*;
 - 5) Jin, setan-setan, kuntilanak, hantu, penunggu seperti *panunggu*, *pontianak*, *setang*, *mukur*, *lulu*, *momonginde*, *ngek-ngek* dan sebagainya.

Walaupun terdapat begitu banyak *Opo* serta makhluk halus lainnya di jagat raya ini, namun orang Minahasa menganggap bahwa ada satu yang menguasai segala-galanya baik yang hidup maupun yang mati yang disebutnya *Opo Empung Wangko* atau *Opo Walian Wangko*, *Opo Empung*, yang berada di luar jangkauan akal budi manusia. Ketika masuknya agama Kristen, *Opo Empung* itu diidentifisir sebagai Tuhan Allah yang Mahakuasa. Sampai sekarang ini orang Minahasa menyapa Tuhan dengan berbagai variasi misalnya *Opo Mana Natas*, *Empung Renga-renga*, umpamanya nyanyian rohani sebagai berikut:

Opo Mana Natas / Empung Rengarenga / Ka'akasan nite mi-

50) Drs. P.H. Koagouw dan Drs. Fendy E.W. Parengkuan, *Lotak Pineleng Sebagai Tempat Pemakaman Pahlawan Tuanku Imam Bonjol*, Hasil Penelitian Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen P dan K, Manado 1978, hal.14.

pekekelangan / Patombo-tombolen pakendi-kendiren / Pateru-terungan Nu mingkelangan / Sungku-sungkuleni mbayan nyaman / dungan / Tambe-tamberani wo kama-kamangen ampit pekelawiren / Pakatu'an pekelawiren.

Artinya:

Allah yang di Surga / Tuhan yang Rahmani / Lapangkanlah jalan hidup umatMu / Jadilah sandaran jadilah perisai hidup / Berilah perlindungan jalan hidup kami / Kabulkanlah semua keperluan kami / Anugerahkan dan berkati hingga berumur lanjut / Bahagiakan di hari tua.

Nyanyian Kristen ini amat populer akhir abad ke-19 sampai di awal abad ke-20 terutama di daerah Tondano Minahasa. Apabila ditinjau lebih lanjut maka nyatalah bahwa alam pikiran / kepercayaan lama di Minahasa jelas mengalami perubahan besar dengan masuknya agama Kristen di sana.

- b. Kepercayaan kepada kekuatan gaib.
Orang Minahasa percaya bahwa beberapa benda tertentu memiliki kekuatan gaib baik batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, air maupun angin dan sebagainya. Ada batu yang dianggap dapat mengusir akibat buruk yang mungkin akan menimpa seseorang, mengobati penyakit, kebal terhadap benda tajam, dan lain-lain. Akar bahar untuk menolak bala penyakit, jeruk untuk mengusir roh jahat dan lain-lain.
- c. Kepercayaan kepada kekuatan sakti
Air, beberapa jenis tumbuhan dan benda, apabila dibacakan mantra-mantra tertentu, dapat menyembuhkan penyakit atau mencelakai orang lain.
- d. Kepercayaan kepada tanda-tanda binatang
Beberapa binatang tertentu seperti ular, burung dan sebagainya seringkali memberikan tanda-tanda, baik tanda yang baik maupun alamat buruk bagi manusia. Ular hitam misalnya memberikan tanda yang tidak baik. Burung hantu dapat memberikan tanda baik maupun buruk. Cecak juga memberikan tanda-tanda tertentu kepada manusia. Juga apabila hendak membuka kebun ladang baru, mendirikan rumah, hendak bepergian, merayakan perkawinan, pemilihan pemimpin kelompok dan sebagainya, sering menunggu petunjuk binatang.

Di daerah Sangir Talaud, pada akhir abad ke-19 masih ada kepercayaan rakyat terhadap animisme yaitu kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang biasanya bersemayam di hutan-hutan sehingga terdapatlah tempat-tempat penyembahan pada tiap-tiap daerah kerajaan misalnya Kerajaan Manganitu di Kumui, Kerajaan Tabukan di Toadusura dan lain-lain. Pada tempat-tempat itu biasanya terdapat batu-batu besar atau kuburan para pahlawan (orang-orang pemberani) yang dipandang mempunyai kekuatan gaib.⁵¹⁾

Di bidang keagamaan pada waktu itu (bahkan jauh sebelumnya) sudah masuk juga agama-agama yaitu mula-mula agama Islam (\pm abad 15) kemudian agama Kristen Katolik (\pm abad 16) dan agama Kristen Protestan (\pm abad 17).⁵²⁾ Namun agama-agama ini khususnya agama Kristen (baik Katolik maupun Protestan) belum begitu meresap karena pemimpin-pemimpinnya terutama *Zandeling-zandeling* mula-mula hanya berkunjung sewaktu-waktu saja, baik dari Ambon maupun dari Manado.⁵³⁾

Nanti pada tahun 1857 dikirimlah *Zendeling-zendeling* ke daerah Sangir Talaud yang terkenal sebagai empat pendeta tukang (karena mereka dipersiapkan di Negeri Belanda sebagai pendeta dan tukang, walaupun mereka sendiri berasal dari Jerman). Selanjutnya mereka mulai menetap di daerah ini dan bermukim masing-masing:

- a. Ernst Tronget Steller di Manganitu;
- b. Frederik Kelling di Tagulandang;
- c. Carl W.L.M. Schroder di Tabukan; dan
- d. Grohe di Siau.⁵⁴⁾

Di daerah Gorontalo pada akhir abad 19 boleh dikatakan penduduk 100% telah beragama Islam. Agama ini sudah dianut sejak tahun 1563 dan di tahun 1566 agama ini diresmikan sebagai agama kerajaan.⁵⁵⁾ Tokoh yang mula-mula mengembang-

51) Wawancara dengan H.E. Yuda, 23-9-1978.

52) P3KD Sulawesi Utara, op cit., hal. 86. 89.

53) Ibid., hal. 88; Wawancara dengan H.E. Yuda, 28-9-1978.

54) P3KD Sulawesi Utara, op. cit., hal. 155-158.

55) H.M. Taula, *Sejarah Ringkas Masuknya Agama Islam di Sulawesi Utara dengan perkembangan dalam Ikatan Kebudayaan dan Hukum adat Daerah terutama Minahasa (1525-1977)*, Yayasan Manguni Rondor, Manado, 1977.

kan agama Islam di sana ialah Raja Motolodulahu dari Gorontalo. Dari tempat itu agama ini disebarkan ke pedalaman yaitu ke Limboto oleh dua ulama bernama Tutu dan Tomito. Disamping itu Raja Hunggiludaa I dari Kerajaan Limboto. Ia jadi pemeluk agama Islam sewaktu pergi ke Ternate dan kembalinya mulai menyebarkan agama itu di kerajaannya. Dari situ agama ini menyebar ke Paguyaman. Nanti pada tahun 1752 barulah Kerajaan Bolango dan Atinggola memeluk agama Islam dibawa oleh Raja Abram Duwawulu (*Hubulo*). Di Suwawa dibawa oleh Raja Mooluodu dan dikembangkan oleh Raja Lahai.

Gubernur Maluku R. Padtbrugge mengunjungi Gorontalo di tahun 1723 untuk menjalin hubungan dengan raja-raja setempat. Empat tahun kemudian ia mengangkat Kocku sebagai wakil pemerintah kolonial di sana. Kocku mulai berusaha menyebarkan agama Kristen tetapi usahanya itu ditolak oleh raja-raja setempat, dengan alasan bahwa mereka dan rakyatnya telah memeluk agama Islam. Raja-raja Gorontalo itu mengatakan bahwa mereka hanya bersedia berhubungan dalam bidang perdagangan saja dengan VOC. ⁵⁶).

Tahun 1678 pendeta-pendeta Kristen meminta izin kepada Raja Iskandar Bija dari Kerajaan Gorontalo dan Jogugu Isnain dari Kerajaan Limboto supaya rakyat menerima agama Kristen. Permohonan ini tidak dikabulkan sehingga para pemimpin itu ditangkap. Raja Iskandar Bija dibuang ke Sri Lanka sedangkan Jogugu Isnain dibuang ke Tanjung Pengharapan Afrika. Namun dengan gagalnya usaha pengkristenan ini maka akhirnya pemerintah Belanda mengalihkan perhatian pada segi perekonomian dan perdagangan saja.

Meskipun pada kenyataannya orang Gorontalo semuanya adalah pemeluk agama Islam, namun mereka masih mempercayai adanya makhluk-makhluk halus yang menghuni alam raya ini dan juga adanya kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib dan sakti sebagai berikut :

a. Kepercayaan kepada makhluk halus (*motoluhuta*)

Mereka percaya bahwa makhluk-makhluk halus seperti setan, jin dan sebagainya, seringkali mengganggu ketenteraman hidup manusia. Untuk mengusir atau mencegah agar jangan sampai makhluk-makhluk itu lebih merugikan

56). M.H. Liputo, *op. cit.*, jilid X, 1949, hal. 4.

manusia maka diadakan beberapa upacara tertentu yaitu untuk mengobati penyakit, mengusir roh jahat dan membuat penangkal bahaya. Untuk itu sering diadakan upacara yang disebut upacara mopo alati atau mohilihu. Yang menjadi pemimpin upacara-upacara itu disebut talenga atau panggoba. Para dukun itu memberikan sajian-sajian disertai membaca mantera-mantera tertentu. Panggoba atau talenga juga mempunyai peranan dalam bidang pertanian dan sebagainya.

- b. Kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan sakti.
Orang Gorontalo percaya bahwa ada empat unsur di alam ini yang memiliki kekuatan sakti yaitu tanah, air, angin, dan api atau *huta*, *taluhu*, *dupoto* dan *tulu*. Ke empat unsur itulah yang menjamin kelangsungan hidup manusia tapi di balik itu dapat mendatangkan pula malapetaka.
- c. Kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib (*hulobalangi*)
Orang Gorontalo percaya bahwa keris, akar bahar, jeruk besi putih, sejenis kayu tumontangita, batu-batuan tertentu, memiliki kekuatan gaib tertentu pula. Umumnya dianggap memiliki kekuatan gaib untuk menolak mara-bahaya, penyakit dan sebagainya yang mengancam kehidupan manusia di alam ini. Banyak di antara benda-benda itu misalnya : akar bahar, batu-batuan, keris dan lain yang senantiasa dikenakan di badan siang maupun malam hari.

Menurut catatan sejarah, agama Islam masuk ke Bolaang Mongondow sejak tahun 1660, di masa pemerintahan Raja Lolda Mokoagow yang bergelar Datu Binangkang. Karena raja merupakan pemeluk pertama maka agama ini disebut agama in datu atau agama raja. Agama Katolik masuk kira-kira sekitar tahun 1689 di mana raja pertama yang dianggap sebagai pemeluk agama ini ialah Raja Jacobus Manoppo atau Jacobus I. Di wilayah Kerajaan Bintauna, agama Katolik dibawa masuk oleh seorang paderi asal Ambon bernama Talhatu. Agama Kristen Protestan baru diizinkan masuk oleh pemerintah kolonial sekitar awal abad ke-20.

Walaupun rakyat Bolaang Mongondow dapat dikatakan seluruhnya sudah dipengaruhi oleh aliran-aliran keagamaan namun dalam beberapa hal mereka masih mempertahankan tradisinya. Karena itu sampai pada akhir abad ke-19 bahkan lebih jauh

lagi, terlihatlah adanya pelaksanaan adat kebiasaan lama khususnya alam pikiran/kepercayaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai gambaran dapat dikemukakan mengenai pelaksanaan praktek-praktek alam pikiran/kepercayaan lama sebagai berikut:

- a. *Momalinga* ialah praktek-praktek untuk memperoleh petunjuk-petunjuk kekuatan gaib melalui bunyi burung hantu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui misalnya apakah suatu peperangan akan beroleh kemenangan atau sebaliknya akan kalah; apakah rencana bepergian segera dijalankan atau perlu dibatalkan saja; apakah diizinkan leluhur untuk mendirikan rumah atau tidak; apakah roh leluhur mengizinkan usaha perombakan hutan di suatu tempat tertentu atau tidak; dan sebagainya.
- b. *Medeangoungou* ialah praktek-praktek untuk mengetahui jenis obat yang mujarab bagi sesuatu penyakit.
- c. *Motayok* ialah praktek pengobatan penyakit melalui suatu upacara tarian adat yaitu tari tayok.
- d. *Tengkiuna menilen* ialah upacara sesajen untuk memperoleh perkenan merombak hutan.

Selain itu orang Bolaang Mongondow percaya pula bahwa akar bahar atau komansilan merupakan benda yang mempunyai kekuatan gaib untuk menolak bala penyakit. Benda ini sering dibentuk menjadi gelang tangan dan dikenakan oleh kaum lelaki. Selain itu ada jimat yang jika dipakai oleh seseorang akan membebaskannya dari ancaman serangan ilmu hitam dari orang lain atau musuhnya.

Dapat dikemukakan bahwa alam pikiran/kepercayaan lama seperti di atas masih kuat diyakini orang sampai sekarang, apalagi di akhir abad ke-19 itu. Wilayah pengaruhnya luas merata di seluruh wilayah kelima kerajaan yang ada di daerah Bolaang Mongondow. Namun sekarang ini khususnya untuk upacara motayok hanya ada di desa Bilalang Kecamatan Pasi. Dengan demikian walaupun agama sudah menyebar masuk ke semua lapisan masyarakat di sana, namun alam pikiran/kepercayaan lama masih belum seluruhnya terkikis.

Sejak zaman dahulu, orang Bolaang Mongondow yakin bahwa masyarakatnya tersusun berdasarkan stratifikasi sosial

tertentu. Pada mulanya hanya terdiri dari dua golongan saja yaitu golongan *Kinalang* dan golongan *Paroko*, kemudian berkembang menjadi tiga golongan yaitu golongan *mododatu* (raja dan keluarganya), golongan *kohongian* (kaum bangsawan) dan golongan *simpal* (rakyat jelata). Selanjutnya muncullah golongan *tahig* atau golongan *yobuat* yaitu golongan budak dan hamba sahaya, sebagai lapisan masyarakat terbawah. Golongan budak ini terdiri dari:

- a. mereka yang berhutang dan tidak sanggup membayar lalu dijadikan budak oleh orang tempat ia berhutang;
- b. mereka yang melanggar kehormatan raja misalnya melihat atau mengintip raja yang sedang mandi, atau menyentuh peralatan sirih pinang milik raja di istana;
- c. mereka yang tertawan dalam peperangan.

Stratifikasi sosial ini berlaku terus hingga pada tahun 1903. Pada waktu itu Raja Datu Cornelis Manoppo mengeluarkan peraturan pemberantasan perbudakan di seluruh kerajaan Bolaang Mongondow. Semua budak dibebaskan dengan memperoleh tanda pembebasan dari raja. Larangan melakukan perbudakan terdapat pula dalam pasal 10 Piagam Perjanjian (*Korte Verklaring*) antara Kerajaan Bintauna dengan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1857/1858. Mengenai hal itu lihat kembali halaman 30 di depan, di mana perbudakan merupakan salah satu hal terlarang di Kerajaan di samping meminjamkan uang dengan bunga tinggi dan perompakan laut.

C. KEHIDUPAN EKONOMI

Di bidang perekonomian pada akhir abad ke-19 ini di daerah Sangir Talaud mulailah diadakan perniagaan kopra yaitu pada tahun 1870 yang menggantikan perdagangan minyak kelapa yang sebelumnya dikirim ke Manado dan Ternate.⁵⁷⁾ Sehubungan dengan itu maka penanaman kelapa diperluas dan mulailah juga penanaman pohon pala dan coklat yakni tahun 1890. Pada tahun itu juga penduduk diperkenalkan dengan ternak kuda dan lembu. Sedangkan untuk pengangkutan hasil kopra, dibukalah perhubungan dengan kapal api yaitu pada tahun 1893. Pada masa ini juga rakyat sudah mulai mengenal penanaman padi ladang akibat adanya perhubungan dengan kepulauan Phi-

57) Wawancara dengan H.E. Yuda, 28 - 9 - 1978 dan dengan D. Madonsa, 28 - 9 - 1978.

lipina. Kemudian karena rakyat telah mempunyai penghasilan yang lebih baik, maka ditetapkanlah pajak dalam lingkungan daerah kepulauan Sangir Talaud pada tahun 1899 yaitu sebesar seringgit di kepulauan Sangir dan serupiah di kepulauan Talaud. Demikianlah sejak 1897, kepada para pegawai yaitu raja-raja dan Jogugu-Jogugu diadakan pemberian gaji oleh pemerintah Belanda.

Dalam hal kerajinan rakyat, hasil penenunan kain kofo yang sudah ada sebelumnya, dipamerkanlah ke luar daerah yaitu ke Manado pada tahun 1899. Dalam tahun itu juga terjadilah suatu peristiwa yang penting di daerah Sangir Talaud yaitu penghapusan perbudakan. Di samping itu terjadilah pula suatu bencana alam yang sangat merugikan rakyat di daerah ini yaitu dengan meletusnya gunung api Awu pada tahun 1892 yang mengakibatkan sebagian rakyat terpaksa mengungsi (berpindah tempat) mencari daerah lain yang lebih aman sebagaimana telah dikemukakan di depan.

Mengenai alat-alat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di daerah Sangir Talaud adalah sebagai berikut :

1. Alat transport/pengangkutan di laut misalnya assana atau sakaeng pelang yaitu perahu bercadik, yang dipergunakan untuk mengail; sakaeng untuk perahu ukuran lebih besar.
2. Alat penangkap ikan jenis perangkap (bubu) yaitu *tumpina, ula, bebbihe, tumbekka, somba, pahato*
Jenis-jenis jala seperti landra, kalasey dan sasile;
Jenis-jenis panah ikan seperti *papiti* dan jenis tombak ikan seperti *sahempang*, dan *tatou*;
Termasuk alat-alat perikanan yakni alat pengangkut atau penyimpan ikan seperti *kurungan* dan *patanga*.
3. Kerajinan misalnya untuk pembuatan alat-alat pertanian, mengukir perabot, membuat alat-alat rumah tangga dari tanah liat, menganyam tikar daun pandan dan tikar rotan, menenun kain, merajut jala, membuat tali ijuk, kerajinan karawang untuk hiasan bahan baju dan sulam-menyulam.

Perekonomian masyarakat Gorontalo sejak sebelum datangnya bangsa Barat sampai dengan abad ke-19 sebagian besar adalah bertani atau bercocok tanam. Jenis-jenis tanaman yang biasanya ditanam ialah umbi-umbian, kacang-kacangan dan terutama serta sayur-sayuran. Cara berkebun terutama di ladang

yaitu selesai ditebang semua pohon yang ada, dikeringkan kemudian dibakar. Setelah dibersihkan dari rumput-rumput lainnya, ladang itu sudah siap untuk ditanami terutama pada permulaan musim hujan. Selain itu orang Gorontalo sudah lebih dahulu mengerjakan sawah jauh sebelum adanya usaha-usaha serupa dari pemerintah Belanda atau perkebunan swasta di sana. Sebelum mereka mengerjakan tanah pertaniannya, terlebih dahulu mereka pergi meminta petunjuk dari dukun yang disebut panggoba atau talenga. Dengan perantaraan dukun-dukun mereka dapat mengetahui adanya petunjuk melalui bunyi dari burung hantu. Selain itu dukun memiliki kepandaian pula untuk melihat tanda-tanda peredaran bulan serta bintang-bintang. Apabila tanda-tanda yang muncul bersesuaian maka sudah tibalah waktunya untuk mulai persemaian, mulanya dilakukan oleh raja kemudian diikuti oleh rakyat. ⁵⁸⁾

Adapun jenis-jenis padi yang biasanya ditanam di ladang ialah: *lamba suka* (6 bulan), *paledaa* (8 bulan) *lobubulia* (5 bulan) dan *bongo* (6 bulan). Sedangkan jenis padi sawah ialah *baro* (7 bulan), *bintulahe* (6 bulan), *buntina* (5 bulan), *bohulo* (5 bulan), *meme* (4 bulan) dan sebagainya. Sawah yang terletak di ketinggian sering setelah ditanami padi, diganti dengan jagung; Cara disebut *halabolu*. Jenis jagung yang biasa ditanam yaitu *Hungalaa* (70 hari) dan *putungo* (90 hari). ⁵⁹⁾

Hasil hutan dan hasil perkebunan tahun 1872 dan tahun 1886 yang dikirim ke luar Gorontalo beserta harganya pertahun adalah sebagai berikut:

Nama hasil hutan/ Perkebunan	Tahun 1872		Tahun 1886	
	Jumlah pikul	Harga	Jumlah pikul	Harga
1. Damar	13.765	f.68.825	35.979	f.303.701
2. Rotan	5.900	f.32.450	9.055	f. 45.279
3. Coklat	2.117	f.105.850	1.185	f. 47.400
4. Kopi	630	f.18.900	203	f. 3.460

Penanaman tanaman industri berupa coklat dan kopi kemudian kelapa itu mulai diusahakan di Gorontalo tahun 1864 dan 1865 yaitu pada masa Asisten Residen Jhr. van der Wijck. ⁶⁰⁾

Tentang alat-alat pemenuhan kebutuhan primer di daerah

58) M.H. Liputo, *op. cit.*, Jilid XIII, 1950, hal. 21-24.

59) *Ibid*, hal. 25.

60) B.J. Haga, *op. cit.*, hal. 233-235.

gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Alat-alat rumah tangga:
Totalu'o, o'ahu, bilenga, bobo, popalua, buawu, bulonggo, porono, ulongo.
2. Alat-alat pertanian:
Sejenis bajak kayu (*popade'o*), garu (*huhegidu*), cangkul (*popati*), sekop (*sikopu*), kuda-kuda kayu (*i'i*).
3. Alat-alat perburuan:
Sejenis tombak dari bambu (*totobu'o*), lobang tanah tanah yang beranjau bambu runcing (*tuhiango*), pagar bambu berkelok (*talele*), sejenis perangkap dari tali (*popotilo*).
4. Alat-alat penangkap ikan:
Sejenis kurungan ikan dari bambu (*titi'apo*), jala (*budoyahu*), kail (*o'ayilo*), lukah (*eputo*), sejenis sero (*eyambu*), sejenis pagar bambu di danau (*olate*), tombak dari bambu (*tobongo*), untaian kail (*tapilo*).
5. Wadah penyimpanan hasil pertanian:
Lumbung padi (*ibungo*), bakul (*loto*), gudang (*hudungu*), loteng (*pahu*), kotak atau peti (*buluwa*), karung (*kado*).
6. Alat-alat transpor darat dan laut:
Pedati (*roda*), kuda (*wadala*), penarik kayu (*kokohinga*), perahu kayu (*bulotu*), rakit bambu (*heyita*).

Hasil-hasil kerajinan rakyat yang terkenal kursi rotan, kopiah rotan, keranjang, bakul, menenun, kerawang dan sebagainya.

Mengenai kehidupan ekonomi di daerah Minahasa dapat dikemukakan bahwa sejak diadakannya kontrak-kontrak baik dengan Belanda maupun dengan Inggris, orang Minahasa menyerahkan padi atau beras sebagai gantinya memperoleh kain alam berbagai mutu dan jenis. Kopi yang ditanam sejak 1796 dalam awal abad ke-19 menghasilkan mulai 200 pikul tahun 1818 hingga 600 pikul tahun 1822, menanjak 16.000 pikul di tahun 1853. Hasil kopi Minahasa ini mendahului penanaman kopi di Jawa dan Sumatera dalam rangka Tanam Paksa. Selain kopi juga diusahakan penanaman coklat dan kemudian pala.

Tentang penanaman padi yang terutama ialah padi ladang sedangkan padi sawah penanamannya baru dimulai akhir abad ke-19. Jenis-jenis padi ladang yang biasa ditanam orang antara lain *kan tolok, kan mepanga, kan ke, kan ku re'beng, kan cina, kan*

pulut, kan kembut, kan kutu, kan pispis dan sebagainya. Teknik penanaman padi di ladang disebut *kumeror*. Pekerjaan ini dimulai dengan membuka hutan (*rumombek*). Setelah ladang siap ditanam maka ditanamlah padi dengan cara *masiboy, tumengkik, dan malare'*. Padi dipelihara dengan baik dari semua gangguan hama terutama babi dan tikus, sampai tiba masa panen. Pekerjaan panen itu disebut *maupu'*, baik dikerjakan dengan ani-ani *maupun dengan sabit atau pisau. Untuk melepaskan padi mayangnya dilakukan dengan cara yang disebut kumusu, pape' epes, pawewen, ghumo'ogho'* dan *koan*. Untuk memisahkan gabah dan sekam dilakukan bantuan angin yang disebut *perar* dan *wa'awaren* serta *ta'apen*. Setelah dijemur maka padi siap untuk ditumbuk menjadi beras.⁶¹⁾ Teknik ini dipergunakan daerah Remboken, Kakas, Langowan dan terutama di Tondano, dengan istilah menurut bahasa/dialek masing-masing daerah yang bersangkutan. Istilah-istilah teknik pertanian tradisional di atas dipergunakan di daerah Tondano.

Alat-alat yang dipergunakan untuk memperoleh kebutuhan hidup primer dari orang Minahasa adalah sebagai berikut:

1. Alat-alat pertanian:

Sejenis sekop dari batang enau (*wai' atau bai'*), cangkuk (*bewingkung, pacol*), golok (*pepatil*), sejenis linggis kayu (*wewawi'*), ani-ani (*ne'iting*), sabit (*sesampur*), kayu pemukul (*wewewe*), bakul (*lo'olo', wakul*), tabung besar dari anyaman bambu (*sori*), semacam kere dari anyaman bambu (*reghi*), tikar daun rumput (*tino'orong*), nyiru dari anyaman bambu (*niu*), lesung (*tenged, tenger*), semacam lumbung bulat dari kulit kayu kenanga (*pumpun*). Termasuk alat-alat pertanian ialah alat-alat yang dipergunakan untuk menyadap dan mengolah nira sampai menjadi gula merah dan sejenis minuman beralkohol (cap tikus): Pisau sadap (*kekehet*), tangga (*naran*), jenis-jenis alat penampung/pengangkut/penyimpan dari tabung bambu (*tenai, potung, na'aweyen*), dan sebagainya.

2. Alat-alat rumah tangga:

Sebagian dari alat-alat pertanian ditambah alat-alat lainnya seperti: belanga dari tembikar (*kure'*), belanga goreng (*rum-ping*), tempat masak (*ramporan, dodika*) tempat air dari bambu (*na'asu*), dan sebagainya.

61) Drs. Fendy E.W. Parengkuan, 'Mengenal Pertanian Tradisional orang Minahasa', *op. cit.*, hal. 41-46.

Selanjutnya mengenai alat-alat berburu dan menangkap ikan dapat dilihat di halaman 42.

Sebelum orang Minahasa mengenal beras maka yang menjadi makanan pokok ialah sagu dan berjenis umbi-umbian. Setelah diperkenalkan tanaman padi, mereka menanamnya untuk dijual, namun berangsur-angsur makanan pokok sagu diubahnya lalu memilih beras sebagai makanan utama, di samping jagung. Akhir abad ke-19 tidak ada lagi orang Minahasa yang menjadikan sagu sebagai makanan utama. Untuk menjual hasil-hasil pertanian terutama padi ke luar daerah, diangkut dengan perahu yang dilakukan oleh perahu jung orang-orang Cina dan kora-kora oleh orang-orang dari Maluku. Menurut Brower di sekitar abad ke-15 sudah ada perahu-perahu jung Cina yang datang di Indonesia membeli beras. ⁶²⁾ Jenis yang mereka beli adalah beras dari padi ladang karena orang Minahasa pada masa itu belum mengenal tanaman padi sawah. Padi sawah menurut Molsbergen nanti dikenal orang Minahasa pada pertengahan abad ke-19 melalui kaum buangan dari Jawa yaitu Kiyai Mojo dan para pengikutnya yang ditempatkan di Tondano. ⁶³⁾

Kegiatan ekonomi di Bolaang Mongondow pada akhir abad ke-19 berkisar pada pertanian, penangkapan ikan, berburu dan meramu hasil hutan. Dalam bidang pertanian maka areal yang ditanami ialah ladang dan kemudian sawah. Jenis-jenis tanaman yang ditanam antara lain padi, jagung, umbi-umbian, pisang dan sayur-sayuran. Yang menjadi makanan utama pada masa itu ialah sagu kemudian beras. Kalau untuk memperoleh hasil tanaman-tanaman di atas jelas memerlukan usaha-usaha pertanian maka tidak demikian halnya dengan sagu. Pohon sagu atau enau tidak ditanam berada di mana-mana di hutan. Untuk memperoleh sagu maka dipilihlah batang pohon enau yang diperkirakan banyak mengandung sagu. Pohon itu ditebang dan dibelah dua, bagian tengahnya dihancurkan, lalu dilumatkan. Dengan bantuan air maka mengalirlah cairan yang bersagu lalu ditampung di sebuah wadah. Sagu akan mengendap sedangkan air yang ada dibuang. Setelah dibersihkan, kemudian dijemur dan setelah kering sudah siap untuk dijadikan bahan makanan pokok.

62) M. Bronwer, *Bestuurstelsel en bestuursvormen in de Minahasa*, H. Voenan & Zinen, Wageningen, 1936, hal. 2.

63) Godee F.C. Molsbergen, *Geschiedenis van de Minahasa tot 1829*, landsdrukkerij, Weltevreden, 1928, hal. 7.

Mengenai alat-alat kebutuhan hidup primer orang Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

1. Alat-alat keperluan rumah tangga:
Mengenai keperluan rumah tangga lihat di depan.
2. Alat-alat pertanian seperti:
 - a. *Tugal*, sejenis linggis dari batang enau untuk melobangi tanah untuk ditanami padi atau jagung;
 - b. *Sabel*, alat memotong rumput dan untuk memanen;
 - c. *lolapa*, alat penyang padi dari besi;
 - d. *Pajeko*, bajak atau luku;
 - e. *Pitow*, sejenis parang;
 - f. *Kedang*, sejenis parang besar untuk menebang kayu;
 - g. *Tosilat*, pisau;
3. Alat-alat untuk menyimpan hasil produksi dan keperluan sehari-hari:
 - a. *Luwit*, wadah dari kulit kayu untuk menyimpan padi;
 - b. *Ginapa*, sejenis kuwit tapi terbuat dari bambu;
 - c. *Tandai*, tempat menyimpan air;
 - d. *Potolo*, tempat menyimpan garam di dapur.
4. Alat-alat untuk berburu dan menangkap ikan:
 - a. *Ginibat*, tombak;
 - b. *Pandong im boke*, tombak khusus untuk berburu babi;
 - c. *Giman*, sejenis jerat untuk menangkap burung;
 - d. *Pole*, sejenis bubu atau lukah;
 - e. *Singkop*, sejenis penangkap ikan terbuat dari bambu;
 - f. *Tomoing*, Kalenda, yaitu jenis-jenis jala;
 - g. *Bobolit*, sejenis panah ikan yang dipergunakan sambil menyelam.

Sarana komunikasi terdiri dari sarana komunikasi laut dan sarana komunikasi darat. Untuk sarana komunikasi di laut yang memegang peranan ialah perahu dan perahu layar. Hasil-hasil pertanian dan pertambangan, baik berupa upeti maupun berupa barang dagang diangkut dengan perahu atau perahu layar dengan tujuan ke Manado. Sarana komunikasi darat yang memegang peranan penting yaitu kuda dan gerobak. Jalur komunikasi darat, sangat sukar ditempuh sehingga sering kali hanya ditempuh dengan jalan kaki saja. Sejak akhir abad ke-19 dan berlanjut di abad ke-20, banyak orang Minahasa yang pergi membawa gerobak-gerobak ke

Bolaang Mongondow dengan tujuan untuk menjual hasil-hasil pertanian ke pelabuhan laut Bolaang. Gerobak-gerobak itu memberikan jasanya pula dalam bidang transport dengan mengangkut barang-barang dagangan terutama milik orang-orang Cina dari pelabuhan Bolaang ke pedalaman ke ibukota Kotamobagu yang membuka toko-toko mereka di sana. Pelabuhan Bolaang telah menjadi tempat persinggahan tetap dari kapal-kapal KPM milik Belanda.

Kalau di daerah Indonesia lainnya, praktek Tanam Paksa dapat dikatakan secara formal berakhir 1870-an, maka tidak demikian halnya untuk daerah Bolaang Mongondow, di mana hal itu terus diberlakukan. Belanda memperkenalkan tanaman-tanaman baru yang sebelumnya tidak dikenal misalnya kopi sebagai tanaman industri/perdagangan. Rakyat diwajibkan menanam kopi di areal yang cocok misalnya di Modayag. Selain itu terdapat pula praktek-praktek perpajakan dan rodi yang sangat memberatkan tanggungan rakyat waktu itu di sana.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN ± 1900 - 1928

A. PENGARUH POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN DESENTRALISASI DI DAERAH

Wilayah keresidenan Manado sejak pembentukannya di tahun 1824, tidak pernah mengalami perubahan wilayah sampai awal abad ke - 20 bahkan sampai runtuhnya kekuasaan kolonial sebagai akibat pendudukan Jepang mulai tahun 1942. Wilayah ini terdiri dari empat *Afdeeling* (Manado, Gorontalo, Donggala, Poso) yang masih dibagi lagi atas 10 *Onderafdeeling* serta lebih dari 20 kerajaan berstatus *landschap*. *Afdeeling* Manado meliputi Manado dan Minahasa, *Afdeeling* Gorontalo meliputi seluruh daerah Gorontalo, *Afdeeling* Donggala meliputi Buol, Tolitoli, Donggala, Palu dan Parigi, sedangkan *Afdeeling* Poso meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonedale,. Setiap *Afdeeling* ini dipimpin oleh seorang Asisten Residen.

Setiap *Onderafdeeling* dipimpin oleh seorang *Controleur* yang membawahi kerajaan-kerajaan sebagai berikut:

1. *Onderafdeeling* Sangir Talaud, terdiri dari Kerajaan-kerajaan Tagulandang, Siau, Tabukan, Manganitu/Tamako, Kendahe/Tahuna dan Talaud,
2. *Onderafdeeling* Bolaang Mongondow terdiri dari kerajaan-kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna, Kaidipang dan Bolaang Itang,
3. *Onderafdeeling* Buol dengan Kerajaan Buol;
4. *Onderafdeeling* Tolitoli dengan Kerajaan Tolitoli;
5. *Onderafdeeling* Donggala dengan Kerajaan Banawa dan Tawaeli,
6. *Onderafdeeling* Palu dengan Kerajaan-kerajaan Sigidolo, Kulawi dan Palu;
7. *Onderafdeeling* Parigi dengan Kerajaan Parigi;
8. *Onderafdeeling* Poso dengan Kerajaan-kerajaan Lore, Tojo, Poso dan Uanauna;
9. *Onderafdeeling* Banggai dengan Kerajaan-kerajaan Banggai, dan Moutong;

10. *Onderafdeeling* Kolonedale dengan Kerajaan-kerajaan Bungku dan Mori.⁶⁴).

Demikianlah keadaan pemerintahan di Keresidenan Manado di awal abad ke - 20 ini. Uraian selanjutnya hanya akan membahas mengenai situasi/keadaan di dua *Afdeeling* yaitu Manado dan Gorontalo serta dua *Onderafdeeling* yaitu Sangir Talaud dan Bolaang Mongondow, karena *Afdeeling* dan *Onderafdeeling* lainnya sekarang ini tidak termasuk dalam wilayah Sulawesi Utara tetapi termasuk wilayah Sulawesi Tengah. Banyak perubahan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk memantapkan pemerintahan demi kepentingan mereka sendiri misalnya: peningkatan *Onderafdeeling* menjadi *Afdeeling*, pemecahan sebuah *afdeeling* menjadi dua *Afdeeling*, penggabungan dua kerajaan menjadi satu kerajaan, penggabungan wilayah-wilayah kecil menjadi satu kerajaan dan sebagainya, yang semuanya dilaksanakan dalam periode antara 1900 sampai saat datangnya pasukan Jepang ke Sulawesi Utara.

Sebelum meninjau pengaruh politik kolonial Belanda dan desentralisasi di daerah Sangir Talaud, maka perlulah dikemukakan lebih dahulu keadaan pemerintahan Belanda di daerah ini karena justru di bidang pemerintahan inilah pengaruh politik itu sangat terasa. Jelas bahwa pada masa ini daerah Sangir Talaud berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang diperintah oleh seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Tanukan Lama pada tahun 1903. Setelah ditingkatkan menjadi *Afdeeling* maka pada tahun 1911, *Afdeeling* Sangir Talaud dibagi menjadi dua *Onderafdeeling* yaitu:

1. *Onderafdeeling* Kepulauan Sanggir dengan ibu kotanya Tahu na: dan
2. *Onderafdeeling* Kepulauan Talaud dengan ibu kotanya Beo.

Di kepulauan Talaud sendiri terdapat 17 *Kejoguguan* (daerah yang dikepalai oleh *Jogugu*) tetapi kemudian pada tahun 1916 ditertibkan menjadi tiga *Kejoguguan* yaitu:

1. *Kejoguguan* Manusa dengan ibu kota Karatung:

64). M. van Rhijn, *Memorie van overgave het bestuur van den aftredenden Resident van Manado*, 1941, hal. 267

2. Kejoguguan Karakelang dengan ibu kota Beo; dan
3. Kejoguguan Kabaruan Salibabu dengan ibu kota Lirung.

Sesudah datangnya Fiezer, Kejoguguan diubah menjadi 5 distrik yaitu:

1. Distrik Salibabu berpusat di Lirung di bawah Jogugu C. Tamawiwu;
2. Distrik Kabaruan berpusat di Mangaran di bawah Jogugu N. Gamansalangi;
3. Distrik Karakelang Selatan berpusat di Beo di bawah Jogugu J. Tamawiwu;
4. Distrik Karakelang Utara berpusat di Arangkaa di bawah Jogugu C. Lampah; dan
5. Distrik pulau-pulau Manusa berpusat di Karatung di bawah Jogugu P.T. Bambulu.⁶⁵).

Pada tahun 1921 pemerintahan di Talaud diubah menjadi Kerajaan dan pada tahun 1922 ditetapkan Jogugu J. Tamawiwu menjadi Raja kepulauan Talaud yang pertama dan berkedudukan di Beo. Ia dibantu oleh keempat Jogugu lainnya tersebut di atas. Mulai waktu itu diadakan penertiban wilayah. Wilayah yang dahulunya dikuasai oleh Raja-raja Sangir dilepaskan dan dikembalikan kepada Kerajaan Talaud. Wilayah Singkil di Manado Utara yang dahulunya Kerajaan Siau diserahkan kepada Asisten Residen Manado, yaitu sekitar 1908 - 1913 pada masa pemerintahan Raja Siau A.J. Mohede.⁶⁶).

Demikianlah sejak tahun 1921 di kepulauan Sangir Talaud enam kerajaan sebagai berikut:

1. Kerajaan Talaud dengan ibu kota Beo, terdiri dari 33 kampung;
2. Kerajaan Tabukan dengan ibu kota Enemawira, terdiri dari 44 kampung;

65). Wawancara dengan H.E. Yuda, 28 - 9 - 1978; lihat E.F. Tatimu. *op cit.*, hal. 12; P3KD Sulawesi Utara, *op. cit.* hal 166 - 167.

66). P3KD Sulawesi Utara, *loc. cit.*, lihat H.B. Elias, *Sejarah Pergerakan Kemerdekaan di pulau Siau*, Markas cabang Legiun Veteran Ri Kotamadya Manado, Manado, 1973 hal. 115.

3. Kerajaan Kendahe-Tahuna dengan ibu kota Tahuna, terdiri dari 19 kampung;
4. Kerajaan Manganitu dengan ibu kota Tamako, terdiri dari 31 kampung;
5. Kerajaan Siau dengan ibu kota Ulu terdiri dari 28 kampung;
6. Kerajaan Tagulandang dengan ibu kota Buhias, terdiri dari 16 kampung.

Tiap-tiap raja dibantu oleh Jogugu-jogugu yang jumlahnya tergantung dari luas daerah/wilayahnya, seperti;

1. Pulau-pulau Talaud oleh seorang Jogugu yang berkedudukan di Nanusa;
2. Tabukan oleh dua Jogugu, di bagian Utara berkedudukan di Petta dan bagian Selatan berkedudukan di Manalu;
3. Kendahe-Tahuna oleh seorang Jogugu berkedudukan di Kendahe;
4. Manganitu oleh dua Jogugu berkedudukan di Manganitu dan di Tamako;
5. Siau oleh dua Jogugu yang berkedudukan di Ondong dan Ulu
6. Tagulandang hanya seorang Jogugu yang berkedudukan di ibu kota Bahias.⁶⁷⁾

Pada tahun 1922 ditandatangani *Korte Verklaring* oleh raja-raja Sangir Talaud, sehingga kerajaan statusnya menjadi *landschap* (swapraja) dan raja menjadi *Zelfbestuurder*. Keenam *landschap* itu adalah:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. <i>Landschap</i> Tagulandang | 4. <i>Landschap</i> Kandahe - Tahuna |
| 2. <i>Landschap</i> Siau | 5. <i>Landschap</i> Tabukan |
| 3. <i>Landschap</i> Manganitu | 6. <i>Landschap</i> Talaud. |

Lima tahun kemudian yakni pada tahun 1927 di Talaud ditempatkan seorang Asisten Residen sebagai *Proefontvooding* tanah Minahasa, sedangkan di Siau ditempatkan seorang Adspirant Kontrolur yakni pada tahun 1929.

67). Ef. Tatimu, *Himpunan Cerita Rakyat Daerah Sanginge Talaud*, naskah ketikan, tahun, 1977, hal. 24.

Pada tahun itu juga (1927) kepulauan Sangir Talaud mendapat kunjungan dari Gubernur Jenderal van Limburg Stirum yang berkedudukan di Batavia (Jakarta). Ia disambut dengan upacara adat kebesaran di Tahuna. Maksud perkunjungannya itu ialah datang meninjau daerah yang terserang hama sexava (belalang yang merusak tanaman kelapa) yang sedang merajalela di pulau Talaud, Tahuna, Tabukan dan Manganitu. Dalam masa ini juga pulau Miangas yang terletak di perbatasan dengan Philipina menjadi pangkal sengketa antara Pemerintah kolonial Belanda dengan Amerika Serikat. Untuk penyelesaian sengketa itu dikirimkan kapal perang *De Zeven Provinciën* yang membawa serta *Adspirant Controleur* Tahuna Lomans Stuyter, Jogugu Willem Sarapil dan Z.M. Adipati pada tahun 1914⁶⁸).

Ternyata sengketa ini berlangsung terus sampai tahun 1928 dan setelah di selidiki menurut sejarah, kebangsaan, bahasa dan lain-lain, pada kenyataannya penduduk pulau itu masuk daerah Hindia Belanda (kini Indonesia). Hal ini sesuai keputusan Mahkamah Internasional tanggal 4 April 1928 yang diketuai oleh Dr. Max Huber. Pada 7 Mei 1929 oleh Raja Talaud dan Residen Manado ditempatkan di sana lambang bendera Belanda dan *Je maintiendrai*. Kemudian hari dalam masa Republik Indonesia yaitu pada tanggal 9 Mei 1954 oleh Residen Manado dan Kepala Daerah Sangir Talaud, lambang Belanda itu diganti dengan lambang Bhinneka Tunggal Ika dan bendera Sang Saka Merah Putih.⁶⁹).

Mengenai pengaruh politik desentralisasi dari pemerintah Hindia Belanda di daerah Sangir Talaud pada masa itu dapat disebutkan antara lain adalah diberikannya kekuasaan-kekuasaan yang lebih luas kepada raja-raja dengan memberikan kedudukan kepada mereka sebagai *Zelfbestuurder*, yaitu suatu kedudukan dan wewenang/kekuasaan untuk memerintah sendiri sebagai

68). P3KD Sulawesi Utara, *op. cit.*, hal. 167 - 168, wawancara dengan H.E. Yuda, 28 - 9 - 1978, lihat juga Ef. Tatimu, Kepulauan Sangihe Talaud, *op. cit.*, hal 12.

69). Bagian Bahasa Djawatan Keb, Kem PPK, *Medan Bahasa memuat hal ihwal Bahasa Indonesia*, No. 9 tahun VI Djakarta, 1956, hal. 20 - 22, lebih jauh lihat Theodorus Salilo *Suatu tinjauan tentang hak sejarah Indonesia atas pulau Miangas, skripsi sarjana, Fak. Sosial Politik UNSRAT, Manado, 1974.*

suatu daerah swapraja.⁷⁰⁾

Politik etis yang juga sudah mulai dijalankan pemerintah Belanda pada masa ini pengaruhnya terutama terasa dalam bidang pendidikan (edukasi) yaitu dengan dibukanya sekolah-sekolah sampai ke desa-desa, baik oleh Zending, Misi maupun oleh pemerintah Belanda sendiri. Namun untuk sekolah lanjutan hanya dibuka sebuah saja yaitu Sekolah Pendidikan Guru (*Kweek-school*) di Kalawatu (Kecamatan Tamako) tahun 1908. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah pada waktu itu disebut Sekolah Gubernemen dengan masa pendidikan selama lima tahun dan biasanya hanya terbatas di ibu kota seperti di Tahuna Manganitu, Enemawira dan lain-lain.

Sekolah Gubernemen itu dibedakan atas Sekolah Kelas I untuk anak-anak golongan tinggi di mana diajarkan bahasa Belanda dan Sekolah Kelas II untuk rakyat biasa di mana tidak diajarkan bahasa Belanda. Di samping itu pemerintah Belanda mendirikan pula HIS yang berbahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dengan masa pendidikan selama tujuh tahun. Sekolah ini hanya dua buah yaitu satu di Tahuna yang didirikan tahun 1918 mula-mula di Manganitu kemudian pindah ke Tahuna tahun 1919 dan satu lagi di Siau. Sekolah-sekolah ini hanya bertahan sampai tahun 1933 dan sesudah itu diserahkan kepada Zending karena datangnya masa sulit yang disebut sebagai masa maleise. Nanti sesudah kemerdekaan, barulah dibuka lagi sekolah-sekolah pemerintah yang disebut Sekolah Negeri (Sekolah Rakyat)⁷¹⁾.

Di samping itu pada masa ini pemerintah Belanda telah mulai mengirimkan pemuda-pemuda ke luar daerah untuk belajar melayat di sana misalnya ke Sekolah Tukang di Kakaskasen atau ke Sekolah Modeste di Manado atau Tondano. Walaupun hal ini tentu tidak lepas dari keperluan pemerintah Belanda sendiri akan tenaga-tenaga yang terdidik/trampil, namun bagaimanapun juga dengan adanya kesempatan ini maka terbukalah mata rakyat Indonesia di daerah ini khususnya para pemudanya untuk melihat keadaan yang lebih luas di luar daerahnya sendiri. Bahkan ada

70). Wawancara dengan H.E. Yuda, 5 - 10 - 1978.

71). Wawancara dengan H.E. Yuda, 5 - 10 - 1978 dan dengan Nahor Mandik, 6 - 10 - 1978.

yang sampai dikirim ke luar negeri misalnya ke Negeri Belanda sendiri untuk belajar di sana, antara lain Willem Sarapil (anak Raja Tabukah D.P. Sarapil) yang kemudian menggantikan kedudukan ayahnya setelah raja itu meninggal dunia, yaitu di tahun 1922⁷²⁾.

Di bidang transmigrasi, sebagai akibat masalah kepadatan penduduk yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang lagi dengan hasil-hasil produksi seperti pala, fuli, kopra, dan lain-lain; di samping berkurangnya tanah garapan untuk tanaman palawija, menimbulkan kesadaran kepada penduduk untuk berusaha pindah ke luar daerahnya baik secara perorangan maupun secara berkelompok yang biasanya ditanggung sendiri. Perpindahan ini kemudian diikuti oleh keluarga-keluarga mereka dengan maksud tidak lain untuk merantau dan menetap di tempat lain. Tempat-tempat yang menjadi tujuan mereka antara lain di pesisir Utara Minahasa, Bolaang Mongondow dan lain-lain.

Sejalan dengan politik etis yang dijalankan oleh Pemerintah Belanda khususnya di bidang transmigrasi ini, maka inisiatif penduduk di atas kemudian diikuti dengan kebijaksanaan pemerintah untuk memerintahkan penduduk (transmigrasi) secara koloni ke daerah-daerah perkebunan (*onderneming*) kelapa di Minahasa, dan di Bolaang Mongondow yaitu ke Ambang Poigar kemudian ke Longangon di Tanjung Flesko, ke Ayong, Buntalo, Komus, Batutajam, Mokodidek dan Bohabak yang semuanya di Bolaang Mongondow. Ada juga yang ke daerah Gorontalo yaitu ke Marisa (*Popayato*⁷³⁾.

Pengaruh politik pemerintah kolonial Belanda di daerah Bolaang Mongondow sangat terasa terutama dalam campur tangannya dalam urusan-urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada. Sebagaimana sudah disampaikan di depan yaitu di halaman 28 - 29, daerah Bolaang Mongondow terdiri dari lima kerajaan yaitu Kerajaan Bolaang Mongondow, Bintauna, Bolaang Uki, Kaidipang dan Bolaang Itang. Untuk memantapkan kekuasaan mereka atas daerah ini, maka pemerintah kolonial pada tahun 1901 membentuk *Onderafdeeling* Bolaang Mongondow

72) Wawancara dengan H.E. Yuda, 5 - 10 - 1978; lihat juga D.B. Adriaan, *Renungan Kisah Kepulauan Sangihe Talaud* djilid I, Tabukan, 1968, hal. 47 - 48.

73) Wawancara dengan H.E. Yuda, 5 - 10 - 1978, lihat P3KD Sulawesi Utara, *op.cit* hal. 181 - 182.

dengan Kontrolur yang pertama yaitu Anthon Cornelis Veenhuyzen. Raja Bolaang Mongondow Riedel Manuel Manoppo (1893–1902) tidak sudi menempatkan pejabat Belanda itu di ibukota Bolaang karena mengingat pengalaman pahit yang diderita leluhurnya yaitu Raja Salmon Manoppo yang dibuang ke Tanjung Penghaapan Afrika tahun 1748–1754 akibat mau berhubungan dengan Belanda.

Sebenarnya Kontrolur itu sudah menduduki posnya yaitu di Bolaang namun karena raja dan rakyat menunjukkan sikap bermusuhan maka ia kembali lagi ke Manado. Karena raja ini tidak mau bekerja sama dengan mereka, maka Belanda melaksanakan politik adu domba. Tanpa membatalkan kontraknya dengan raja itu maka Belanda membeslitkan Datu Cornelis Manoppo saudara raja sebagai Raja Bolaang Mongondow yang baru tahun 1901 itu juga. Dengan demikian di tahun itu Kerajaan Bolaang Mongondow memiliki dua raja, satu yang dianggap Belanda dan yang satu masih menduduki takhta. Raja Datu Cornelis Manoppo dengan disertai Kontrolur Veenhuyzen dan staf dikawal sepasukan polisi kembali Bolaang Mongondow. Untuk menghindari bentrokan dengan raja di Bolaang maka mereka mendarat di tempat lain lalu masuk ke pedalaman. Raja Datu Cornelis Manoppo lalu menentukan Kotobangon sebagai ibukota kerajaan yang baru. Wilayah kekuasaan Raja Riedel Manuel Manoppo sebagian besar diambil alih dengan cara damai oleh Raja Datu Cornelis Manoppo. Untunglah tidak pernah terlaksana politik adu domba Belanda itu yaitu sampai mengakibatkan pertumpahan darah. Ketika Raja Riedel Manuel Manoppo meninggal dunia tahun 1902, praktis seluruh kerajaan Bolaang Mongondow kembali memiliki seorang raja saja. Hanya ibu kota tidak kembali ke Bolaang di pesisir, melainkan tetap di Kotobangon di dataran tinggi Mongondow di daerah pedalaman. Kontrolur sendiri tidak berkedudukan di Kotobangon tetapi di Kotabaru di kaki gunung Siak dekat Kotobangon. Beberapa tahun kemudian pemerintah Belanda mendirikan ibukota baru yaitu Kotamobagu di tanah Togop tepat berdampingan dengan ibukota Kotobangon.

Sampai pada masa pemerintahan Raja Riedel Manuel Manoppo, dalam menjalankan pemerintahan seorang raja dibantu oleh seorang Perdana Menteri yang disebut Sahada Tompunuon. Perdana Menteri atau Sahada Tompunuon yang terakhir ialah Angki Lasabuda. Setelah jabatan itu dihapuskan maka pejabat kerajaan

tertinggi sesudah raja ialah Jogugu. Tugas pengamanan di laut menjadi tanggung jawab dari Kapitan Laut sedangkan di darat menjadi tanggung jawab Mayor Kadato. Dalam masa pemerintahan Raja Datu Cornelis Manoppo ini wilayah kerajaan Bolaang Mongondow terdiri dari beberapa distrik yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Distrik yang disebut Penghulu. Sejak pusat kerajaan pindah ke pedalaman maka jabatan Kapitan Laut turut dihapuskan pula. Dengan demikian maka jabatan Mayor Kadato semakin penting sebagai pejabat yang mendampingi Penghulu di tingkat distrik. Mulai ditempatkannya seorang pejabat kolonial yaitu Kontrolur di *Onderafdeeling* Bolaang Mongondow, maka tepatnya mulai tahun 1904, semua pejabat termasuk raja diberikan gaji yang tetap oleh pemerintah kolonial, kecuali kepala desa (Sangadi). Juga cara berpakaian diatur sesuai tingkat jabatan yang dipegang seseorang mulai raja sampai kepala desa.

Kerajaan Bolaang Mongondow dibawah Raja Datu Cornelis Manoppo dibagi atas tiga distrik masing-masing dipimpin oleh seorang Penghulu dibantu lima Mayor Kadato yang turut menjalankan pemerintahan sebagai berikut:

Pengulu Pasi	Mamuda Mokoginta
Penghulu Kotabunan	Samer Abraham Sugeha
Penghulu Bolaang	A.P.Mokoginta, merangkap sebagai Kepala Kantor Kerajaan
Mayor Kadato Pasi	Kui Mokoginta
Mayor Kadato Lolayan	Johanis Manuel Manoppo
Mayor Kadato Bolaang	Jan Abraham Mokoginta
Mayor Kadato Kotabunan	Karel J.C. Manoppo
Mayor Kadato Dumoga	Darwa Cornelis Manoppo.

Pada masa pemerintahan Kontrolur F.Junius (1908–1912), terjadi dua kali perobahan pemerintahan. Perobahan pertama antara 1908–akhir 1909 yaitu: Penghulu Pasi, Lolayan, Kotabunan dan Bolaang berturut-turut dijabat oleh Johanis Manuel Manoppo, Mahebat Kadengkang, Sainun Mokodompit dan Pandis Mokoagow. Mayor Kadato Pasi, Lolayan, Bolaang dan Dumoga berturut-turut ialah Kui Mokoginta, Jan Abraham Mokoginta, Herman Cornelis Manoppo dan Samuel Domopolii.

Selanjutnya untuk periode 1909–1912, Jogugu P.A.Sugeha diganti oleh Jogugu A.P. Mokoginta. Penghulu Pasi, Lolayan, Kotabunan dan Bolaang yakni, Johanis Manuel Manoppo, Jacobus

Riedel Manoppo, Sainun Mokodompit dan Herman Cornelis Manoppo. Mayor Kadato Pasi, Lolayan, Bolaang dan Dumoga yakni Karel Jansen Cornelis Manoppo. Jan Abraham Mokoginta, Zulhadji Mokoagow dan Samuel Damopolii. Dalam tahun 1912 terjadi beberapa pergeseran saja dengan pejabat-pejabat yang sama. Tahun 1913, Penghulu Bolaang Herman Cornelis Manoppo, diganti oleh Jan Abraham Mokoginta. Mayor Kadato Dumoga Samuel Domopolii merangkap tugas Mayor Kadato Lolayan. Mayor Kadato Kotabunan Sainun Mokodompit diganti oleh Kinompol Walang yang berasal dari Belang Minahasa.

Kontrolur F. Junius (1909–1915) diganti oleh F.A. Kock (1915–1920). Di tahun 1915 tidak terjadi perubahan berarti. Penghulu Pasi Johanis Manuel Manoppo diganti Samuel Mokodompit yang kedudukannya saling bertukar. Tahun 1916, wilayah distrik Pasi dan Lolayan disatukan di bawah Penghulunya Jan Abraham Mokoginta menjadi Penghulu Mongondow. Penghulu Bolaang yang dijabatnya diserahkan kepada Herman Cornelis Manoppo. Pejabat-pejabat lainnya ialah Penghulu Kotabunan Johanis Manuel Manoppo, Mayor Kadato Pasi, Lolayan, Bolaang dan Dumoga berturut-turut: Hendrik Abraham Sugeha, Laurens Cornelis Manoppo (anak raja), Hasan Ponto (yang kemudian jadi Jogugu di Kerajaan Kaidipang Besar) dan Lamoyon Mokodompit.

Tahun 1916 Penghulu Bolaang Herman Cornelis Manoppo diganti oleh Lamoyon Mokodompit. Penghulu Kotabunan dari Johanis Manuel Manoppo kepada Jacobus Riedel Manoppo, Jabatan Mayor Kadato Dumoga dari Lamoyon Mokodompit kepada B.G. Manoppo. Berhubung kepindahan Hasan Ponto menjadi Jogugu di Boroko (ibu kota Kerajaan Kaidipang Besar) jabatan Mayor Kadato Bolaang dipegang oleh Willem Buntuan Lendeon. Distrik Mongondow dihapuskan dan langsung dipegang oleh Jogugu A.P. Mokoginta.

Kontrolur F.A. Kock diganti oleh G.A. Bosselaar (1920–1924). Tidak ada perubahan sampai tiba saatnya ia diganti oleh G.L. 't Sas (1924–1927). Mayor Kadato Pasi Hendrik Abraham Sugeha diganti oleh Regen Christoffel Manoppo. Mayor Kadato Dumoga dari B.G. Manoppo kepada Hendrik Abraham Sugeha. Distrik Mongondow dibentuk kembali dengan Penghulunya Max Mokodompit. Penghulu Kotabunan ialah Jacobus Riedel Manoppo. Mayor Kadato Pasi, Lolayan, Bolaang dan Dumoga berturut-turut: Regen Christoffel Manoppo, Laurens Cornelis Manoppo

(merangkap wakil Raja berhubung raja sudah lanjut usia). Gerrit Mokoagow dan A.W.A. van Gobel (anggota keluarga Kerajaan Bolaang Uki). Jogugu A.P.Mokoginta pada tahun 1926 berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan pamong praja di *Bestuurschool* (1926-1927, tapi tidak kembali lagi). Sejak keberangkatannya itu jabatan Jogugu dihapuskan dari struktur pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow.

Kontrolur Sas diganti oleh Kontrolur de Boer (1927-1928). Susunan pemerintahan kerajaan Bolaang Mongondow lengkapnya adalah sebagai berikut:

R a j a

Wakil Raja

Datu Cornelis Manoppo

Laurens Cornelis Manoppo

Penghulu Mongondow, Bolaang, Kotabunan berturut-turut ialah Max Mokodompit, Willem Buntuan Lendeon dan Jacobus Riedel Manoppo. Mayor Kadato Pasi, Lolayan, Bolaang dan Dumoga ialah O.H. Dilapanga, J.W.Manoppo, A.C. Manoppo dan B.G.Manoppo. Raja mangkat beradu pada tanggal 12 Pebruari 1927, Anaknya yaitu Laurens Cornelis Manoppo memegang pemerintahan terus sebagai Wakil Raja sampai dilantik sebagai Raja tanggal 28 Juni 1928. Pada masa itu jabatan Kontrolur untuk sementara dirangkap oleh Asisten Residen Gorontalo yaitu Mr. M.Allaart. Jabatan ini dipegangnya sampai tahun 1930. Pada tanggal 23 April 1930 diangkatlah Kontrolur Ochtman sebagai Kontrolur yang definitif untuk *Onderafeeling* Bolaang Mongondow.⁷⁴)

Untuk kerajaan-kerajaan lainnya, pengaruh politik kolonial menyatakan diri dengan ikut campur tangannya Belanda dalam masalah takhta Kerajaan Kaidipang. Raja Kaidipang yang terakhir yaitu Raja Antugia Korompot meninggal dunia di tahun 1910. Tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaan yang cakap menggantinya. Anak-anaknya terlalu muda usia sedangkan golongan tua merasa tidak sanggup menduduki jabatan itu. Berhubung keluarga Korompot masih kerabat dengan keluarga Ponto di bawah Raja Ram Suit Ponto dari Kerajaan Bolaang Itang, maka masalah itu meluas pula ke kerajaani itu. Terjadilah perbedaan pendapat antara

74) Mengenai susunan pemerintahan seluruhnya adalah keterangan Suit A.Sugeha, 80 tahun, Kotobangon, 25-9-1978; selanjutnya lihat W.Dunnebieer, *Pemberitaan pendek atau beberapa tanggal tentang pekerjaan Kerapatan atau Genotskap di Bolaang Mongondow*, Den Haag, 1954, hal.V-VI.

kedua keluarga tersebut mengenai siapa yang berhak menggantikan Raja Antugia Korompot yang telah mangkat itu. Untuk menengahi perbedaan pendapat tersebut. Residen Manado turun tangan dan datang ke Boroko ibu kota Kerajaan Kaidipang. Diselenggarakan sidang gabungan antara majelis kedua kerajaan untuk menyelesaikan hal tersebut, dipimpin oleh Residen.

Dalam sidang tersebut akhirnya dicapai kata sepakat di mana mulai saat itu (1911), diadakan penggabungan dua kerajaan yaitu Kerajaan Bolaang Itang digabungkan dengan Kerajaan Kaidipang menjadi Kerajaan Kaidipang Besar. Sebagai raja yang pertama ialah Raja Ram Suit Ponto dari Kerajaan Bolaang Itang dan berkedudukan di Boroko (bekas ibu kota kerajaan Kaidipang). Juga disetujui bahwa apabila Raja Ram Suit Ponto mangkat atau turun takhta, maka penggantinya ialah dari keluarga Korompot sebagai Raja Kaidipang Besar, begitulah seterusnya yakni akan dijabat berganti-ganti.⁷⁵⁾ Namun ternyata di kemudian hari hal itu tidak pernah terlaksana berhubung Raja Ram Suit Ponto mangkat pada tahun 1950, pada saat mana dihapuskannya landschap di wilayah Keresidenen Manado.

Selanjutnya pemerintah kolonial menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengadakan penertiban batas dan wilayah kerajaan-kerajaan yang ada di Bolaang Mongondow. Suatu hal yang perlu dikemukakan setiap kerajaan memiliki daerah-daerah tertentu di wilayah kerajaan lainnya (*enclave*). Misalnya Kerajaan Bintauna memiliki sebuah wilayah di dataran tinggi Doloduo dalam wilayah Kerajaan Bolaang Mongondow dan sebaliknya Kerajaan Bolaang Mongondow memiliki wilayah di pesisir Utara Kerajaan Bintauna. Bahkan Kerajaan Bintauna pernah memiliki wilayah di daerah Gorontalo dalam wilayah Kerajaan Suwawa-Bone. Demikian pula Kerajaan Kaidipang sebelum digabungkan dengan Bolaang Itang menjadi Kerajaan Kaidipang Besar, memiliki wilayah di daerah Gorontalo yaitu di Imana dan Gentuma. Wilayah Kerajaan Bolaang Uki yang sebelumnya berpusat di pantai Utara (ibu kotanya Sauk), ditukar dengan wilayah Bolaang Mongondow di pesisir Selatan di mana Kerajaan Bolaang Uki kemudian mendirikan ibukota di sana yaitu Molibagu. Setelah diadakan penertiban, maka mulai tahun 1913, jelaslah sudah batas-batas semua kerajaan itu di mana pada tahun itu Kerajaan Kaidipang

75) Wawancara dengan Lau Donggala Korompot, 29 - 9 - 1978.

menyerahkan daerah Imana dan Gentuma kepada daerah Gorontalo.⁷⁶⁾

Dalam rangka politik desentralisasi, kepada para Raja diberikan empat macam hak pemerintah kolonial yaitu:

1. *Zelfwetgeving*, yaitu hak untuk membuat peraturan-peraturan sendiri;
2. *Zelfuitvoering*, yaitu hak menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat raja;
3. *Zelfrechtspraak*, yaitu hak melakukan peradilan sendiri.
4. *Zelfpolitie*, yaitu hak membentuk polisi sendiri.⁷⁷⁾

Selain itu semua raja diberikan pula hak untuk memiliki kas kerajaan sendiri-sendiri, di luar urusan *Controleur* yang mengurus kas *Onderafdeeling* Bolaang Mongondow.

Dalam menjalankan hak-hak tersebut di atas, para raja harus tetap berpedoman pada hukum adat masing-masing dan di dalam hal-hal tertentu berpedoman pada *Korte Verklaring* yang mereka tanda tangani dengan pemerintah kolonial. Kedudukan raja dan kerajaan yang menandatangani *Korte Verklaring* itu diatur oleh tiga *Zelfbestuursregelen* yaitu *Zelfbestuursregelen* 1919 (*Staatsblad* 1919 No. 822). *Zelfbestuursregelen* 1927 (*Staatsblad* 1927 No.190) dan *Zelfbestuursregelen* 1938 (*Staatsblad* 1938 No.529). *Zelfbestuursregelen* 1938 ini sampai sekarang masih berlaku bagi daerah Bolaang Mongondow sepanjang mengenai hal-hal yang menyangkut urusan rumah tangga daerah (*vide* Undang-undang No.29 Tahun 1959 pasal 4 ayat 2).⁷⁸⁾

Peraturan-peraturan di atas terdapat kekurangan misalnya tidak dikenal adanya lembaga yudikatif di samping raja sehingga raja sendirilah yang harus memutuskannya. Untuk menjamin kepastian hukum terutama hukum adat, maka Kerajaan Bolaang Mongondow mengadakan suatu rapat Adat. Rapat Adat itu diadakan bulan Nopember – Desember 1925 di Kotobangon.

76) Wawancara dengan Abdul Murad Datunsolang, 22-9-1978 dan dengan Lau Donggala Korompot, 29-9-1978.

77) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, *Esensi Laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Utara pada kunjungan Pertama di Kabupaten Bolaang Mongondow 1 Agustus 1978*, Kotamobagu, 1978, hal.8

78) *Ibid.*, hal.9.

Di daerah Gorontalo, Pemerintahan raja-raja dengan resmi diakhiri oleh beslit Gubernur Jenderal Hindia-Belanda 17 April 1889 (Staatsblad Nomor 96 dan 250 Tahun 1889). Mulai tahun tersebut dibentuklah *Afdeeling* Gorontalo di bawah pemerintahan seorang Asisten Residen. Di bawah *Afdeeling* ini dibentuk lima *Onderafdeeling* yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Controleur*. Selanjutnya pemerintah kolonial masih tetap mempertahankan pemerintahan pribumi dengan membentuk dua belas distrik yang masing-masing dipimpin oleh seorang Marsaoleh. Keadaan ini berlangsung terus hingga awal abad ke-20.

Pada tahun 1921, Asisten Residen P.E. Moolenburg mengadakan perubahan lagi dalam struktur pemerintahan di mana jabatan Marsaoleh diganti dengan Jogugu dan jumlah distrik diperkecil dari dua belas menjadi lima distrik saja. Kelima Distrik atau Kejojuguan itu yaitu Suwawa, Gorontalo, Limboto Kwandang dan Poalemo. ⁷⁹⁾ Demikian pula *Onderafdeeling* diperkecil dari lima menjadi tiga dengan tiga orang *Controleur* yaitu di Gorontalo, Kwandang dan Boalemo. Namun akhirnya jabatan *Controleur* ditetapkan satu orang saja, berkedudukan di Gorontalo. Sebagai pembantunya diangkat *Adspirant Controleur*. ⁸⁰⁾ Dalam bidang peradilan maka lembaga Majelis Kecil dan Majelis Besar yang berlaku dan tidak pernah diubah atau dicabut sampai saatnya Belanda mengakhiri pemerintahannya di Gorontalo tahun 1942. ⁸¹⁾ Untuk memperoleh tenaga-tenaga terdidik maka pemerintah kolonial mengizinkan beberapa pemuda untuk pergi sekolah di *Hoofdenschool* Tondano Minahasa.

Di daerah Minahasa akhir abad XIX terdiri dari dua puluh enam distrik, kemudian diperkecil menjadi delapan belas distrik yakni Manado, Bantik, Kakaskasen, Tombariri, Tonsea, Maumbi, Tondano-Toulimambot, Tondano-Touliang, Kakas-Remboken, Tomohon-Sarongsong, Langowan, Sonder, Kawangoan, Tombasian, Rumoong, Tompasso, Pasan-Ratahan-Pinosakan, dan Ton-sawang. Di tahun 1908 distrik Kakaskasen dihapuskan; distrik Rumoong dan Tombasian digabungkan menjadi distrik Rumoong-Tombasian. Hal ini dipertahankan terus sampai pada tahun 1920. Pada tahun tersebut jumlah distrik diperkecil lagi dari enam belas

79) M.H. Liputo, op-cit., jilid XIII, 1950, halaman 48.

80) M.H. Liputo *loc. cit.*

81) Panitia Seminar Adat Istiadat Daerah Gorontalo *Himpunan Bahan-Bahan Seminar Adat Daerah Gorontalo*, Limboto September 1971, halaman 43.

menjadi tujuh distrik yaitu Manado, Tomohon, Tõnsea, Toulour, Kawangkoan, Amurang, dan Ratahan. Tahun 1927 diperkecil lagi di mana distrik Tomohon digabungkan ke distrik Manado. Reorganisasi ini dilakukan antara lain dengan maksud untuk mengusahakan perimbangan jumlah penduduk. Sebelum reorganisasi-reorganisasi di atas dijalankan, ada distrik yang penduduknya hanya sekitar lima ribu sembilan ratus saja. Setelah reorganisasi distrik maka setiap distrik penduduknya adalah sekitar dua puluh lima ribu orang.⁸²⁾

Dahulunya distrik disebut *walak* dan kepalanya disebut *Kepala Walak* atau *Kepala Balak*. Setiap Kepala Balak adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala adat dari kumuniti yang dipimpinnya. Mulai 1881, fungsi Kepala Balak sebagai kepala adat dengan sendirinya hapus karena setiap Kepala Balak mulai saat itu diangkat sebagai pejabat pemerintah. Dan dengan sendirinya otonomi dari setiap walak atau paksaan dibatasi dan harus taat kepada politik kolonial yang menjalankan semua penggabungan/reorganisasi di atas. Dengan beslit pemerintah, setiap Kepala Balak memimpin sebuah distrik dengan jabatan Kepala Distrik atau *Hukum Besar*. Hukum Besar yang dianggap berjasa kepada Pemerintah Kolonial diberi gelar kehormatan Mayor. Kepala Distrik atau Hukum Besar membawahi Distrik Bawahan yang dikepalai oleh Kepala Distrik Bawahan yang disebut *Hukum Kedua*. Jabatan Hukum Kedua sekarang ini adalah setingkat dengan Camat sedangkan Hukum Besar kira-kira setingkat dengan Kepala Kantor Penghubung Bupati Kepala Daerah.

Sejak 1880-an para pejabat Hukum Besar dan Hukum Kedua di atas rata-rata pernah mengikuti pendidikan di Tondano yaitu di *Hoofdenschool* dan mulai sekitar 1914 ada yang dikirim ke Osvia di Makasar, untuk mengikuti pendidikan kepomongprajaan di sana. Pejabat setingkat di bawah Hukum Kedua ialah Kepala Desa atau Hukum Tua. Para Hukum Tua ini memegang jabatannya melalui pemilihan warga desanya. Mulai 1880 semua Kepala Distrik (Hukum Besar) dan Kepala Distrik Bawahan (Hukum Kedua) digaji oleh pemerintah. Hukum Tua atau Kepala Desa tidak diberi gaji, hanya memperoleh prosentase dari penagihan pajak. Selain itu Hukum Tua berhak mengerahkan tenaga rakyat untuk

82) P3KD Sulawesi Utara, *op.cit.*, halaman 200; selanjutnya lihat L. Adam, *op. cit.*, halaman 3.

membantunya tanpa bayaran misalnya untuk mengerjakan sawah ladang miliknya. Pengerahan tenaga bantuan secara cuma-cuma ini disebut sawang pinontol.

Penugasan dan penempatan *Controleur* serta pembentukan *Onderafdeeling* di Minahasa dilakukan sejalan dengan politik kolonial untuk memperoleh hasil-hasil perkebunan. Untuk maksud itu maka Minahasa dibagi dalam lima *Onderafdeeling* yang dipimpin oleh seorang *Controleur*, yaitu di Manado, Tondano, Kema, Amurang, dan Belang. Karena dihapuskannya kewajiban menanam kopi maka jumlah *Onderafdeeling* dikurangi dari lima menjadi tiga yaitu *Onderafdeeling* Manado, Tondano, dan Amurang. Sejak tahun 1911 *Onderafdeeling* Manado ditingkatkan menjadi *Afdeeling* yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen Belanda. Asisten Residen Manado ini wilayahnya meliputi seluruh Minahasa dan dengan sendirinya mengepalai para *Controleur* yang ada.

Di daerah Minahasa, para Kepala Distrik atau Hukum Besar dikepalai oleh *Controleur*. Keadaan ini berubah di tahun 1926 pada tahun mana diadakan penghapusan *Onderafdeeling* itu. Dengan demikian oleh hapusnya jabatan *Controleur* maka mulai saat itu para Hukum Besar langsung di bawah pimpinan Asisten Residen yang berkedudukan di Manado. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai saat masuknya Jepang.⁸³⁾

Dalam rangka pelaksanaan politik desentralisasi maka di daerah Minahasa dibentuk dewan-dewan lokal (*locare raden*) oleh Pemerintah Kolonial. Dewan-dewan tersebut dibentuk masing-masing di Manado dan Minahasa, yakni pada tahun 1919. Pada tahun itu di Manado dibentuk dewan kota yang disebut *Gementeraad* dan Minahasa dibentuk *Minahasaraad*. Dewan Minahasa sebanyak tiga puluh enam anggotanya pribumi, empat anggota orang Eropah dan satu Timur Asing. Pada hakekatnya mereka tidak menjadi anggota karena hasil pemilihan melainkan diangkat, sebab peraturan pembentukannya tidak dengan tegas menyebutkan bahwa para anggota harus diangkat melalui pemilihan melainkan melalui penunjukan/pengangkatan saja. Mengenai syarat-syarat pembentukan dewan dan soal keanggotaan dapat dilihat dalam *Staatsblad* 1919 Nomor 65.

Berdasarkan peraturan itu pula dibentuklah *Gementeraad* untuk kota Manado sebagai tempat kedudukan Residen. Tugas

83) P3KD Sulawesi Utara, op.cit., halaman 202.

utama dewan ini ialah memikirkan langkah-langkah yang perlu untuk meningkatkan pembangunan kota. Para anggota seluruhnya melalui pengangkatan. Baik Dewan Minahasa maupun Dewan Kota, ketuanya adalah orang Belanda. Dewan Minahasa dapatlah dianggap sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat, sedangkan Dewan Kota Manado tugasnya semata-mata soal pembangunan kota. Dewan ini menguasai dana yang diperoleh dari uang-uang pajak pasar dan lain-lain sumber, yang dipergunakan antara lain untuk penerangan jalan, pembangunan bioskop dan sebagainya.

B. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN DENGAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN EMBRIO DARI PROSES ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH SULAWESI UTARA

1. Akibat pelaksanaan politik etika

Sehubungan dengan pelaksanaan politik etika di daerah Gorontalo dapat dikemukakan bahwa sejak akhir abad XIX hanya memiliki dua buah sekolah rendah, sejak permulaan abad ini yaitu tahun 1907 didirikan lagi tujuh buah Sekolah Gubernemen dan beberapa tahun kemudian didirikan juga:

- a. Sekolah Desa (*Volkschool*) di hampir semua desa;
- b. *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) tahun 1916;
- c. *Meisjeskopschool*;
- d. *Vervolgschool*;
- e. *Schakelschool*;
- f. *Hollandsch Chineze School*, dan lain-lain. ⁸⁴⁾

Dengan adanya sekolah-sekolah tersebut, di daerah ini muncullah golongan-golongan terpelajar yang menyadari akan penderitaan/kemunduran masyarakat akibat adanya penjajahan Belanda.

Ketujuh buah sekolah yang didirikan tahun 1907 yaitu di Telaga, Potanga, Kabila, Tapa, Suwawa, Batudaa dan Tilamuta. Sekolah Desa (*Volkschool*) yang didirikan tahun 1920 antara lain di Telaga, Tenggela, Pentadio, Hutadaa, Isimu, Kwandang, dan tempat-tempat lainnya. ⁸⁵⁾ Setiap sekolah menampung ratusan murid seperti di Telaga enam ratus murid, dengan kepala sekolah-

84) B.J. Haga, *op. cit* halaman 197.

85) Wawancara dengan Hippy, 5-10-1978.

nya ialah Kandou. Penilik Sekolah atau School Opziener untuk Sekolah Gubernemen ialah Warouw sedangkan untuk Sekolah Desa ialah Saleke Moha. Mata pelajaran yang diberikan hanya empat buah yaitu pelajaran membaca, menulis, berhitung, dan menggambar.

Tahun 1923 jumlah Sekolah Desa ditingkatkan lagi selain itu mutunya juga ditingkatkan menjadi Sekolah Desa tiga kelas, sedangkan Sekolah Gubernemen ditingkatkan pula menjadi lima kelas a/b (ditambah dua tahun). Pada tahun itu juga Gorontalo dibagi dalam dua wilayah persekolahan yakni wilayah I meliputi kota Gorontalo, Tapa, Suwawa, dan Batudaa, sebagai *Schoolopziener* ialah L. Dunggio. Wilayah II meliputi Limboto, Kwandang, dan Tilamuta; sebagai *Schoolopziener* ialah Tamalae. ⁸⁶⁾

Perkembangan sekolah-sekolah demikian pesat di mana pada tahun 1931 terdapat seratus satu buah terdiri dari Sekolah Desa tujuh puluh delapan buah, Sekolah Gubernemen tiga belas, *Vervolgschool* dua, *Schakelschool* dua, HIS 2, *Meisjeskopschool* bersama-sama *Hollandsch Chineze School*, *Europesche Lagere School*, dan *Particuliere Chineze School* masing-masing satu buah. ⁸⁷⁾ Dengan pesatnya kemajuan pendidikan itu maka banyak di antara mereka yang menyelesaikan studi melanjutkan ke luar daerah. Antara lain ada yang ke *Hoofdenschool* di Tondano dan *Kweekschool* di Tomohon (keduanya terdapat di Minahasa), bahkan ada juga yang melanjutkan pelajarannya ke Jawa. ⁸⁸⁾

Golongan terpelajar yang dihasilkan oleh kegiatan persekolahan di atas banyak di antara mereka yang mengisi lowongan jabatan/pekerjaan baik sebagai pamong praja maupun sebagai guru atau jabatan-jabatan lainnya. Suatu hal yang perlu pula dikemukakan bahwa kebanyakan di antara yang beroleh kesempatan seperti itu adalah dari golongan bangsawan. Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk kelak turut memperhatikan keadaan masyarakat sebagai akibat politik penjajahan yang dilakukan pemerintah Kolonial.

Jauh sebelum dilaksanakan politik etika oleh Pemerintah Kolonial, khususnya dalam bidang pendidikan rakyat di daerah Minahasa telah terdapat begitu banyak sekolah yang sampai ta-

86) Wawancara dengan Hippy, 5-10-1978.

87) B.J. Haga, *op. cit.*, halaman 198.

88) Wawancara dengan Hippy, 5-10-1978.

hun 1934 diperkirakan berjumlah seratus tujuh puluh buah yang khusus diasuh oleh Zending saja.⁸⁹⁾ Bahkan ada yang menyebutkan jumlah yang lebih besar lagi yaitu seratus delapan puluh empat buah pada tahun 1918. Sekolah-sekolah yang diasuh Zending itu adalah Sekolah Rakyat tiga kelas, sama dengan yang diasuh Misi Katolik yang jumlahnya tiga puluh satu buah di tahun 1918 itu. Sekolah setingkat Sekolah Rendah yang diasuh pemerintah terdiri dari Sekolah Distrik sebanyak dua puluh tiga buah dan Sekolah Gubernemen sebanyak tiga puluh delapan buah. Semua sekolah itu adalah Sekolah Rendah berbahasa Melayu (Indonesia). Selain itu ada juga sekolah yang berbahasa Belanda yakni antara lain *Europesche Lagere School* (ELS) enam tahun di Manado, Tondano dan Amurang; *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) tujuh tahun di Manado (1901) dan di Tondano, Langowan, Airmadidi, Amurang (1911), yang diperluas lagi oleh Zending dan Misi di Manado, Tomohon dan Sonder.⁹⁰⁾

Selesai mengikuti pendidikan tingkat Sekolah Dasar itu maka secara selektif anak-anak dapat melanjutkan sekolahnya ke Hoofdschool di Tondano. Sekolah ini didirikan pada tahun 1865, ditutup tahun 1872, dibuka lagi tahun 1878 lalu sama sekali ditutup pada tahun 1914. Sebagai gantinya dibukalah sekolah lanjutan lain yaitu MULO di Tondano oleh Pemerintah Kolonial. Pada tahun 1921 Zending dan Misi mengikuti jejak pemerintah mendirikan MULO yaitu masing-masing di Tomohon dan di Manado. Di samping itu masih terdapat lagi sekolah yang didirikan pemerintah yaitu Sekolah Guru untuk mendidik tenaga guru bagi Sekolah Dasar pemerintah yang ada di Minahasa. Sekolah Guru ini mula-mula didirikan di Manado lalu dipindahkan ke Tondano. Zending dan Misi juga turut berusaha mendirikan sekolah guru; Zending mendirikannya di Tomohon dan Misi di Woloan lalu pindah pula ke Tomohon.

Para petugas Zending itu pada kenyataannya sejak mereka ditempatkan selain sebagai penyiar agama Kristen Protestan, merangkap pula sebagai guru, tukang bahkan dalam hal-hal tertentu sebagai penolong orang sakit. Penganut agama Kristen Protestan sampai akhir abad XIX hampir mencapai seratus ribu orang, yang

89) Dr. Th. Muller Kruger, *op.cit.*, halaman 102.

90) P3KD Sulawesi Utara, *op.cit.*, 204-205.

merupakan pekerjaan amat berat bagi Zending untuk melayani baik dalam soal-soal kerohanian maupun dalam soal-soal pendidikan. Karena itu Zending mendirikan Lembaga Pendidikan Guru Injil sejak 1886 yang dinamakan STOVIL.⁹¹⁾ Peranan mereka bersama para guru Sekolah Zending amatlah besar dalam rangka menuntut adanya Gereja yang berdiri sendiri lepas dari gereja yang diasuh pemerintah untuk daerah Minahasa terutama sejak tahun 1914.

Dalam rangka pelaksanaan politik etika, maka selain diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan dasar, maka pemerintah Kolonial menjalankan pula program-program transmigrasi di daerah Minahasa. Program seperti ini sejak tahun 1920-an menjadi salah satu acara perdebatan dalam sidang-sidang *Minahasaraad*. Pada tahun 1922 pemerintah mulai melaksanakan program transmigrasi itu. Para penduduk distrik-distrik sekitar Danau Tondano terutama dari Kakas, Paso, Remboken, dan Tondano mulai dipindahkan ke daerah Minahasa Selatan. Daerah di sekitar Danau Tondano itu terutama terdiri dari persawahan yang semakin lama semakin kurang kesanggupannya untuk menampung kegiatan masyarakat di sektor pertanian. Karena itu mereka dipindahkan ke daerah lain di Minahasa Selatan terutama di Tompaso Baru dan sekitarnya. Daerah itu terkenal dengan sebutan daerah Kolonisasi. Ratusan kepala keluarga mengambil bagian dalam program ini. Setelah terhenti sejenak di tahun 1927, pada tahun 1929 kembali digalakkan penyelenggaraannya. Ketika daerah Tompaso Baru sudah jenuh, maka pada tahun 1933 dibukalah daerah transmigrasi baru yaitu di Modinding. Di tempat lain yaitu di daerah Tonsea, terjadi pula perpindahan penduduk ke sekitar Gunung Kelabat.

Menurut catatan program transmigrasi penduduk Minahasa tersebut di atas diusulkan oleh DR. G.S.S.J. Ratulangi, ketika ia menjadi anggota *Minahasaraad* di Manado dan kemudian menjadi Sekertaris dewan itu (1924-1928). Di dalam fungsinya itu ia mengusulkan gagasan memindahkan sebagian penduduk Minahasa Tengah ke Minahasa Selatan. Usulnya itu diterima dengan baik lalu mulailah pemerintah menjalankan program transmigrasi di atas. Selain transmigrasi, ia juga mengusulkan dihapusnya semua bentuk

91) Dr. Th. Muller Kruger, *op.cit.*, halaman 100.

herendiensten yakni kerja rodi tanpa upah di Minahasa. ⁹²⁾

Sebelum dilaksanakan program transmigrasi tersebut di atas, sebenarnya pemerintah telah lebih dahulu memindahkan sebagian penduduk ke daerah Gorontalo. Dari mereka khususnya hanyalah orang-orang Jawa Tondano yang dipindahkan melalui tiga tahap. Tahap pertama tahun 1904 sebanyak empat puluh kepala rumah-tangga yang mendirikan kampung Yosonegoro di dekat Limboto. Tahap Kedua tahun 1910 sebanyak sepuluh keluarga mendirikan kampung Kaliyoso (Bongomeme). Tahap ketiga yaitu yang terbesar, sebanyak seratus dua puluh lima kepala keluarga yang mendirikan kampung Reksonegoro (Isimu), dilakukan tahun 1925. Selain asal Jawa Tondano itu, dilakukan pula pemindahan penduduk asal orang Sangir Talaud sebanyak lima puluh rumah-tangga ke Marisa di tahun 1938, tetapi tidak bertahan lama di sana berhubung tanahnya kurang subur menyebabkan mereka meninggalkan tempat itu (gagal). ⁹³⁾

Selanjutnya mengenai usaha-usaha lainnya, pemerintah kolonial mengusahakan juga program irigasi (pengairan) untuk daerah Gorontalo. Di sana didirikan tiga irigasi yaitu irigasi Molowahu, Padengo dan Dolomobongo. Molowahu untuk mengairi sawah-sawah di Onderdistrik Tapa dan Kabila, Padengo untuk Onderdistrik Suwawa, Kabila, dan Telaga, Limboto, Kwandang, dan Boalemo, sedangkan Dolomobongo untuk Onderdistrik Tapa dan kota Gorontalo. ⁹⁴⁾

Pelaksanaan politik etika oleh Pemerintah Kolonial di daerah Bolaang Mongondow dilakukan sejalan dengan pembukaan daerah itu sebagai daerah pekabaran Injil bagi Zending atau NZG. Sebelumnya daerah itu dinyatakan sebagai daerah tertutup di mana tidak boleh seorang pun pekabar Injil bekerja di sana. Ketika Controleur Anthon C. Veenhuyzen ditempatkan untuk pertama kalinya di sana, ia meminta agar dikirimkan dua orang pendeta untuk membantunya. Bertepatan dengan itu Raja Datu Cornelis Manoppo meminta agar pemerintah mengirimkan guru-guru ke sana berhubung Bolaang Mongondow sejak tahun 1830 tidak pernah me-

92) W.S.T. Pondaag, *Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputera DR. G.S.S.J. Ratu Langie riwayat hidup dan perjuangannya*, Yayasan Penerbitan DR. G.S.S.J. Ratu Langie, Surabaya, 1966, halaman 55-56.

93) M.H Liputo, op-cit, Jilid XIII, 9150, halaman 29.

94) *Ibid.*, halaman 21.

miliki sekolah. Dengan demikian atas permintaan para pejabat pemerintah serta pejabat kerajaan, dan bertepatan pula dengan pelaksanaan politik etika, maka dikirimlah seorang Pendeta ke daerah Bolaang Mongondow untuk mempelajari situasi. ⁹⁵⁾

Sebenarnya sesuai politik etika, pemerintah Belandalah yang sewajarnya menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat Indonesia khususnya di daerah Bolaang Mongondow. Tetapi nyata di sini ketidak sanggupannya pemerintah Kolonial untuk melaksanakannya sendiri sehingga mempergunakan tangan Zending untuk melaksanakannya. Untunglah program Zending tidak hanya terbatas dalam bidang keagamaan saja melainkan terutama juga bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian permintaan pemerintah untuk menangani pendidikan rakyat Bolaang Mongondow disambut dengan tangan terbuka dan dilaksanakan Zending sejalan dengan penyiaran agama yaitu mulai tahun 1905, pada tahun mana Pendeta W. Dunnebier bertugas di daerah Bolaang Mongondow.

Setahun kemudian (1906) didatangkanlah tiga puluh orang guru oleh Zending dari Minahasa untuk mulai membuka persekolahan di daerah Bolaang Mongondow. ⁹⁶⁾ Dalam tahun itu mereka serentak mendirikan sekolah-sekolah di empat belas tempat yaitu di Nanasi, Poopo Nonapan, Mariri Lama, Kotobangon, Moyag, Pontodon, Pasi, Poopo Mongondow, Otam, Motoboi Besar, Pobundayan, Kopandakan, Poyowa Kecil, dan di Mongkonai. ⁹⁷⁾ Semua tempat itu terletak dalam wilayah Kerajaan Bolaang Mongondow. Zending sesuai kemampuannya dalam bidang pembiayaan, belum dapat mendirikan sekolah-sekolah di empat kerajaan lainnya yaitu di Kerajaan Bintauna, Bolang Uki, Kaidipang dan di Bolaang Itang. ⁹⁸⁾ Lima tahun kemudian (1911) Zending mendirikan HIS di Kotamobagu dimulai dengan dua puluh enam murid yang gedung sekolahnya disumbangkan Raja Datu Cornelis Manoppo. ⁹⁹⁾

95) Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow, *Pandangan beberapa waktu secara chronologies dari Sejarah Gereja di Bolaang Mongondow*, Kotamobagu, 1967 (?), halaman 1 lihat W. Dunnebier, *op.cit.*, halaman I dan V.

96) Wawancara dengan Marthin Jacobus Manoppo dan Suit Abraham Sugeha, 23-9-1978; dan dengan Arie Hasan Gobol, 25-9-1978; lihat Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow, *op.cit.*, halaman 1.

97) W. Dunnebier, *op.cit.*, halaman II

98) M. van Rhijn, *op.cit.*, halaman 11.

99) W. Dunnebier, *op.cit.*, halaman II dan III.

Usaha-usaha pendidikan yang dijalankan Zending sangat menggembirakan hati Raja Datu Cornelis Monoppo. Selain membantu memberikan gedung sekolah bagi HIS milik Zending itu raja juga menunjukkan toleransinya yang amat besar terhadap agama Kristen. Hari pasar di Kotamobagu jatuh pada hari Minggu. Dengan peraturan raja, maka hari pasar dipindahkan ke hari Sabtu mulai 1 Juli 1911 dan itu ditaati oleh rakyat Bolaang Mongondow yang hampir seluruhnya memeluk agama Islam. ¹⁰⁰⁾

Dalam kontrak-kontrak politik (Korte Verklaring) yang dibuat antara Pemerintah Kolonial dengan raja-raja di Bolaang Mongondow misalnya dengan Raja Elijas Datunsolang dari Kerajaan Bintauna tahun 1857, disebutkan tentang kewajiban raja untuk memajukan usaha-usaha pertanian khususnya pembangunan kebun-kebun sawah. Tetapi Pemerintah Kolonial sendiri tidak pernah turun tangan membantu terlaksananya kewajiban seperti itu misalnya dengan membangun bendungan-bendungan, saluran-saluran air maupun usaha-usaha pengeringan rawa-rawa untuk dijadikan areal persawahan. Barulah di awal abad XX dalam rangka pelaksanaan politik etika khususnya di bidang irigasi, Pemerintah Kolonial mulai mengusahakan pengeringan rawa. Program itu mulai dilaksanakan di tahun 1920-an, yaitu dengan dimulainya usaha pengeringan rawa-rawa di daerah Dumoga. Pengeringan itu selesai sekitar tahun 1930. ¹⁰¹⁾

Pengaruh pelaksanaan politik etika untuk daerah Bolaang Mongondow baru terlihat mulai tahun 1929. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1924 penduduk Bolaang Mongondow seluruhnya berjumlah sekitar 58.000 jiwa dan di tahun 1930 menurun jadi 47.344 jiwa (di antaranya 6.398 orang Kristen). ¹⁰²⁾ Dibandingkan dengan luas daerah antara 7600-9090 kilometer persegi, ¹⁰³⁾ maka kepadatan penduduk rata-rata setiap kilometer hanya dihuni antara lima sampai tujuh orang saja yang berarti jarang sekali penduduk di daerah Bolaang Mongondow. Karena itu maka daerah ini menjadi daerah tujuan dari program transmigrasi oleh pemerintah Belanda selain daerah Gorontalo.

100) *Ibid.*, halaman III

101) Wawancara dengan A.M. Datunsolang, 20-9-1978.

102) Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow, *op. cit.*, halaman 3.

103) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bolang Mongondow, *Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Bolang Mongondow*, Kotamubagu, Juni, 1978, halaman 1-3.

Dengan demikian mulailah pemerintah Kolonial memindahkan sebagian penduduk asal Sangir Talaud. Gelombang pertama dilakukan pada tahun 1929. Mereka ditempatkan dalam wilayah Kerajaan Kaidipang Besar dan membangun kampung Sokoputa. Di tahun 1936/1937, para penduduk asal Sangir Talaud itu ditempatkan di wilayah Kerajaan Bolaang-Mongondow yaitu di Lolak dan membangun kampung Buntalo. Selanjutnya menjelang Perang Dunia II masuk lagi gelombang ketiga. Kali ini ditempatkan di Kotabunan dan membangun kampung Dodap I. Program transmigrasi di masa Jepang dilanjutkan lagi dengan istilah kolonisasi. Jepang memindahkan sebagian penduduk Siau, Sangir Talaud tahun 1943 ke Kerajaan Bintauna dan membangun kampung Mome, Nono, dan Bintauna Pante. Tahun itu juga pemerintah pendudukan Jepang memindahkan penduduk asal daerah Sangir Talaud (Siau) ke wilayah Kerajaan Kaidipang Besar dan membangun kampung-kampung Mokoditek, Komus I, Komus II, dan kampung Batutajam.¹⁰⁴⁾

Dengan dilaksanakannya politik etika di daerah Bolaang Mongondow sejak permulaan abad ini, khususnya program pendidikan, menimbulkan akibat-akibat yang sama dengan di daerah-daerah lain yaitu terbentuk dan meningkatkan jumlah kaum terpelajar.

2. Aktivitas masyarakat dalam berorganisasi

Aktivitas masyarakat dalam berorganisasi di daerah Minahasa dimulai oleh kegiatan-kegiatan perorangan khususnya dalam soal-soal keagamaan (Kristen). Kegiatan-kegiatan seperti tercatat mulai muncul tahun 1858 di saat tibanya Ds. L. Mangindaan setelah selesai mengikuti sekolah pendeta di Eropa. Ia ditempatkan oleh *Indische Kerk* di Tikala Manado dan mulai menyadarkan jemaat Kristen yang dipimpinnnya tentang arti kemerdekaan menurut ajaran Kristen sesuai paham-paham yang sementara itu mulai hidup di Eropa. Pemerintah Kolonial tidak menyenangi kegiatannya itu dan karena itu ia diberhentikan sebagai pendeta lalu ditugaskan sebagai guru di *Kweekschool* Tondano tahun 1865. Tindakan seperti ini dengan leluasa dilakukan pemerintah karena *Indische Kerk* adalah organ pemerintah dalam soal-soal keagamaan khususnya agama Kristen di mana semua pendeta dan pembantu-pembantunya digaji

oleh pemerintah. Pandangannya mengenai gereja yang terpisah dari urusan pemerintah mendapat banyak simpati bukan saja dari orang Minahasa tetapi juga dari beberapa pendeta Belanda seperti Dr. Schiwarz di Sonder (1860-1905), O. Schaafsma di Langowan (1860-1871) dan C.J. van Liefde di Amurang (1861-1898). Seorang pengikutnya yaitu R. Mangindaan seorang guru lulusan *Kweekschool* Ambon malah dipecat dari jabatan guru.

Usaha Ds. L. Mangindaan ini dilanjutkan oleh Joel Walintukan, bekerja-sama dengan Sumampouw. Kedua mereka juga dipecat dari jabatan guru sedangkan teman mereka yang lain yaitu Gerungan dipindahkan ke daerah Sangir Talaud. Seorang pendeta Perancis Dr. H.C. Kruiyt yang menyokong usaha mereka dipindahkan ke Batak Karo di Sumatera. Walaupun demikian benih-benih yang menuntut pemisahan gereja dari pemerintah tetap bersemi, dan dilanjutkan dengan berbagai cara di tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya sekitar tahun 1930-an.

Pada tahun 1914, suatu organisasi lokal yaitu Gerakan Majelis Gereja Indische Kerk Kota Manado pimpinan Jaksa J. Jacobus mengulangi kembali tuntutan pemisahan Gereja dari Pemerintah khususnya menuntut didirikannya gereja yang berdiri sendiri lepas dari *Indische Kerk* dan dari Pemerintah di Minahasa. Tuntutan itu ditandatangani oleh pimpinan organisasi yang semuanya masih menduduki jabatan-jabatan pemerintahan yaitu Mayor Manado F. Rotinsulu, Hukum Besar Bantik L. Ticoalu, Hukum Besar Manado L. Wakari, Hukum Besar Maumbi P. Ratulangi, Hukum Tua Tikala P. Lomban, Hukum Tua Singkil A. Kapugu dan dua orang guru yaitu S. Abuthan dan J. Sahelangi.¹⁰⁵⁾

Tuntutan yang sama diajukan lagi oleh suatu organisasi lokal lainnya yaitu Pangkal Setia yang berdiri di kota Tomohon pada tahun 1915. Pimpinan organisasi itu antara lain A.M. Pangkey, J.U. Mangowal, A. Pandelaki, L. Undap, dan N. Potu, kemudian D. Lumunon, E. Karundeng, G. Rompas, dan B.W. Lapien. Organisasi ini merupakan wadah yang menampung guru-guru Zending di Minahasa. Tahun 1925, atas nama empat ratus anggotanya. Pangkal Setia mengirim kawat kepada Kerkbestuur di Jakarta,

105) E.W. Parengkuan BA, "Suatu Tinjauan Sejarah Tentang Peranan KGPM Dalam Sejarah Pergerakan Nasional di Minahasa" artikel dalam majalah *Duta Budaya* Nomor 01 Tahun I, Lembaga Penelitian Sastra Fakultas Sastra UNSRAT, Manado, 1971, halaman 23-24.

mendesak agar Minahasa diperbolehkan mengatur urusan gerejanya sendiri, lepas dari *Indische Kerk*. Permohonan ini diperkuat oleh tiga orang pejabat Zending bangsa Eropa yaitu G.B. Tiekstra (Beheerder Sekolah-sekolah), B. Berendsten Kate (Direktur Kweekschool Tomohon) dan Ds. J.F. Stap (Guru Kweekschool). Mereka mengatakan bahwa Pangkal Setia dengan Serikat Guru Zendingnya sanggup memikul bebar itu.¹⁰⁶⁾ Pada sekitar tahun 1930, sebuah organisasi lainnya yaitu Serikat Pensiunan Pendeta *Indische Kerk* yang didirikan di Manado pada tahun 1928, menyokong tuntutan Pangkal Setia itu. Ketika tahun 1933 didirikan gereja yang lepas dari *Indische Kerk* yaitu Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) maka banyak di antara mereka itu yang menjadi anggota-anggota pertamanya.

Pada tahun 1912 berdirilah Perserikatan Minahasa di Semarang (Jawa Tengah) yang kemudian terbagi menjadi dua yaitu sebagian tetap menggunakan nama Perserikatan Minahasa sebagai organisasi sosial) dan sebagian lagi menjadi Persatuan Minahasa (yang memperjuangkan program-program politik). Persatuan Minahasa kemudian mempunyai wakil-wakilnya di dalam *Volksraad* antara lain DR. G.S.S.J. Ratulangi. Ia sebelumnya pernah menjabat Sekertaris *Minahasaraad* antara tahun 1924-1928. Semua usaha dan tuntutan untuk memperjuangkan berdirinya gereja yang lepas dari *Indische Kerk* untuk orang Minahasa diikutinya dengan cermat dan turut dilontarkannya dalam sidang-sidang *Volkraad*. Akhirnya tahun 1934 pemerintah dalam hal ini *Indische Kerk* mengabulkan tuntutan di atas dengan berdirinya Gereja Masehi Injili Minahasa disingkat GMIM, walaupun pada kenyataannya masih tetap bernaung di bawah *Indische Kerk*. Muller Kruger mengatakan bahwa sebenarnya gereja belum memiliki kebebasan untuk mengurus soal-soal sendiri, tetapi dorongan dari orang-orang Kristen di Minahasa demikian hebatnya, sehingga dengan penetapan raja yang istimewa, berdirilah GMIM tahun 1934.¹⁰⁷⁾

Tuntutan dan usaha untuk mendirikan gereja yang berdiri sendiri di atas menunjukkan telah timbulnya kesadaran di kalangan orang Minahasa bahwa hanya dengan melalui saluran-saluran organisasi saja, barulah tuntutan mereka dapat tercapai. Usaha-usaha perorangan yang sebelumnya pernah dijalankan semuanya

106) E.W. Parengkuan BA, *loc. cit*

107) Dr. Th. Muller Kruger, *op.cit.*, halaman 101.

kandas di tengah jalan.

Selain para tokoh kegerajaan di atas, ada pula tokoh-tokoh kepomongprajaan yang turut aktif terutama dalam menentang kebijaksanaan politik pemerintah Kolonial khususnya di Minahasa. Dapat disebutkan antara lain bekas Kepala Distrik Sonder A.L. Waworuntu yang pernah memperoleh tanda jasa dari pemerintah Kolonial sehingga lebih dikenal dengan gelar Mayor Bintang. Beberapa Kepala Distrik (Hukum Besar) di Minahasa di bawah pimpinan A.L. Waworuntu ini menuntut dihapuskannya peraturan-peraturan yang sangat menekan rakyat. Keluhan-keluhan mereka disampaikan kepada Parlemen Belanda, menyebabkan ada seorang anggota parlemen itu yang datang ke Minahasa untuk melihat dari dekat keadaan yang sebenarnya. Yang menyokong perjuangan A.L. Waworuntu itu antara lain ialah Kepala Distrik Sonder Waworuntu (adik A.L. Waworuntu), dan Kepala Distrik Tondano-Touliang Mayor E.A. Gerungan.

Selanjutnya A.L. Waworuntu mulai memperdengarkan pandangan-pandangannya tentang kemungkinan Minahasa berdiri sendiri lepas dari pemerintahan Kolonial. Ini dapat dianggap sebagai pandangan yang radikal ditinjau dari kenyataan amat kokohnya cengkeraman kuku kolonialisme di Indonesia. Pandangan dan perjuangannya di tahun 1900 itu tidak ada yang berhasil antara lain karena tidak dilakukan melalui saluran-saluran organisasi. Sebagai salah seorang cendekiawan Minahasa maka ia merupakan anggota-Minahasa yang pertama di Dewan Rakyat (*Volksraad*) yang diangkat pemerintah. ¹⁰⁸⁾

Mengenai kegiatan masyarakat yang relevan dengan ataupun yang merupakan embrio dari proses zaman kebangkitan nasional di daerah Sangir Talaud, dapat dibedakan dalam dua faktor. Pertama yaitu faktor dalam negeri ataupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kedua ialah faktor luar negeri ataupun dari luar daerah itu sendiri.

Mengenai faktor yang pertama, di atas sudah dikemukakan bahwa sampai pada masa ini (bahkan jauh sebelumnya) di daerah Sangir Talaud terdapat enam kerajaan yaitu: Kerajaan Talaud, Tabukan, Kendahe-Tahuna, Manganitu, Siau, dan Tagulandang. (lihat halaman 67). Kerajaan-kerajaan ini walaupun kemudian dapat dikuasai dan dijajah oleh Belanda untuk menindas rakyat

108) P3KD Sulawesi Utara, *op.cit.*, halaman 203.

(segi negatifnya), namun bagaimanapun tidak dapat disangkal bahwa melalui kerajaan-kerajaan ini pulalah rakyat belajar mengatur pemerintahannya sendiri, belajar mencintai raja/pemerintahannya, dan yang tidak kurang penting yaitu belajar mencintai kerajaan atau tanah airnya/tempat tumpah-darahnya sendiri, dalam arti yang kecil yaitu daerahnya sendiri. Kecintaan terhadap tanah airnya sendiri ini pulalah yang mendorong mereka untuk bangkit berjuang sekalipun dalam perang tanpa memikirkan jiwa-raga, baik melawan ancaman tetangga (seperti halnya peperangan melawan Mindanao) maupun melawan kekuasaan bangsa asing (Spahyol, Portugis, maupun Belanda). Sesungguhnya sebelum semua kerajaan di atas dikuasai oleh bangsa-bangsa asing, semuanya merupakan kerajaan yang merdeka dan berdaulat.

Tentang hal itu dapat disebutkan di sini antara lain peperangan dengan Mindanao pada tahun 1590-1591 pada masa pemerintahan Raja Wuisang dan penggantinya Raja Winsulangi di Kerajaan Siau. Peperangan itu mengakibatkan musnahnya ibukota Pehe (ibukota Kerajaan Siau dahulu) bahkan turut musnah rumah gereja bersama pengunjungnya yang pada waktu itu sementara mengadakan kebaktian bersama-sama. Untunglah Raja Winsulangi berhasil melepaskan diri dan pergi ke Ternate. Setahun kemudian (1592) ia kembali ke Siau dengan membawa paderi Antonio Pareyra sebagai penasihatnya. Mulai pada waktu itu Raja Winsulangi menyusun rencana-rencana pertahanan. Ia membentuk pasukan Angkatan Darat (Kompania, upase, dan Alabadiri) dan Angkatan Laut (Bininta Konteng dan Kora-kora) lengkap dengan persenjataan dan komando-komandonya.

Dapat dibayangkan betapa sukarnya mengadakan reorganisasi angkatan perang yang baru saja diporak-porandakan musuh di samping harus mengatur pemerintahan meningkatkan wibawa pemerintah dan mengembalikan kepercayaan rakyat sambil meyakinkan rakyat agar tidak gentar melawan musuh. Semua hal itu menunjukkan adanya kemampuan berorganisasi yang luar biasa menurut ukuran zaman itu bahkan kemampuan mana masih meninggalkan bekas-bekasnya dan lebih diperhebat dalam masa perjuangan melawan pemerintah Kolonial Belanda.

Faktor yang kedua yaitu faktor luar negeri erat hubungannya dengan kedatangan bangsa-bangsa Barat terutama Belanda ke Indonesia khususnya ke daerah Sangir Talaud. Kedatangan bangsa asing ini walaupun pada mulanya diterima dengan baik, lama-kela-

maan keinginan menjajah memuncak yang menimbulkan penderitaan bertahun-tahun lamanya. Sebagai akibatnya timbullah rentetan perlawanan rakyat di sana-sini di bawah pimpinan rajanya masing-masing. Antara lain dapat dikemukakan perlawanan dari para pemimpin rakyat yaitu:

- a. perlawanan oleh pahlawan Larenggam Raja Arangka antara tahun 1891-1893);
- b. perlawanan oleh pahlawan Santiago Raja Manganitu antara tahun 1670-1675;
- c. perlawanan oleh Raja Jacob Ponto Raja Siau yaitu antara tahun 1850-1889. ¹⁰⁹⁾

Baik kemampuan berorganisasi maupun semangat perlawanan di atas, keduanya dapat dianggap merupakan embrio dari proses zaman kebangkitan nasional di daerah itu. Dapat ditambahkan pula bahwa walaupun ratusan tahun lamanya rakyat di daerah Sangir Talaud berada di bawah tapak kaki penjajahan Belanda, kecintaan mereka terhadap tanah airnya tidak pernah luntur bahkan merupakan cita-cita mereka untuk berjuang mengusir penjajah tanah air mereka itu.

C. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN PARTAI/ ORGANISASI

1. Politik

Sejak berkembangnya organisasi-organisasi yang bertendens politik di Jawa maka beberapa organisasi itu ada yang melebarkan sayapnya sampai ke daerah Minahasa. Serikat Islam masuk sekitar tahun 1912 dengan tokohnya Miden Towidjojo. Selain di Manado, SI juga membuka cabang-cabangnya di Bolaang-Mongondow, Tolitoli bahkan ke Halmahera Maluku Utara. SI melakukan banyak usaha di Sulawesi Utara khususnya untuk menentang Belanda. ¹¹⁰⁾

Selain SI, pada tahun 1925 PKI membuka cabangnya dipim-

109) Ef. Tatimu, *op. cit.*, halaman 19 dan 20.

110) R.E.S. Bujung BA, *Peristiwa 14 Pebruari 1946 dalam rangka Revolusi Kemerdekaan di Sulawesi Utara*, Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Utara, Manado, 1971, halaman 8.

pin oleh Thomas Najoran serta beberapa pengikut lainnya yakni Kamu, Wentuk, dan Waworuntu. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan tahun 1927, masuk ke Minahasa tahun 1929. Partai ini dibawa masuk oleh G.E. Dauhan dan Max Linuh. Persatuan Minahasa sebagai suatu organisasi politik yang didirikan di luar Minahasa tanggal 16 Agustus 1927. ¹¹¹⁾ Masuk ke Minahasa sekitar akhir tahun tersebut.

Dari Manado, Serikat Islam melebarkan sayapnya antara lain ke Sangir Talaud. Pada tahun 1917/1918, terbentuklah Serikat Islam Ranting Tidore di bawah pimpinan Haji Abubakar Daeng Salasa sebagai bagian dari SI Cabang Manado. Anggota-anggotanya tersebar di beberapa tempat antara lain di Petta, Kendhar, dan terutama di Sangir Besar. ¹¹²⁾ Di tempat lainnya yaitu di Siau, SI didirikan di bawah pimpinan E.G. Yanis. Pada sekitar tahun 1928, PNI mendirikan cabangnya Siau di bawah pimpinan L.M. Kansil. ¹¹³⁾ Di samping itu pada tahun 1917-1918 para pemuda Islam di Petta telah membentuk organisasi Pemuda Islam di bawah pimpinan A.R. Makuraga. Dan pada tahun 1920 SI di Petta dikunjungi oleh Abdul Muis yaitu salah seorang wakil Serikat Islam di *Volksraad*. Kemudian pada tahun 1927, juga di Petta, didirikanlah Cabang Muhammadiyah dengan maksud supaya dapat mendirikan sebuah sekolah Islam di sana. ¹¹⁴⁾

Organisasi politik yang pertama masuk ke Bolaang Mongondow ialah Serikat Islam yaitu pada tahun 1920. Yang membawanya ke sana ialah Makmur Lubis salah seorang tokoh dari Cabang Manado. Sebagai Ketua SI Bolaang Mongondow yang pertama ialah Unta Mokodongan, seorang yang ada hubungannya dengan pimpinan pusat SI di Jawa. SI Bolaang Mongondow berpusat di Molinow suatu tempat yang jaraknya kira-kira dua kilometer dari Kotamobagu (ibukota Onderafdeeling). Tiga tahun kemudian (1923), ia diganti oleh Adampe Dolot, yang memegang jabatan itu sampai ditangkap Belanda menjelang masuknya tentara Jepang. ¹¹⁵⁾

Di tingkat nasional, Tjokroaminoto sebagai pimpinan SI me-

111) A.K. Pringgodigdo, SH, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1967, halaman 66.

112) Wawancara dengan Ahmad Tompo, 6-10-1978.

113) Rekaman wawancara dengan H.E. Yuda, 5-10-1978

114) Wawancara dengan H.E. Yuda, 5-10-1978

115) Wawancara dengan Husen Raupu, 24-9-1978.

nyusun dua program perjuangan. Pertama yaitu program aksi mempersatukan semua golongan penduduk luar Jawa untuk menentang politik penjajahan. Program kedua ialah program anti peme-rasan terhadap rakyat. Pimpinan pusat juga melihat, bahwa SI cabang Manado sudah mulai kurang bersemangat untuk memperjuangan kepentingan organisasi dan rakyat setempat.¹¹⁶⁾ Oleh karena itu SI mengadakan Kongres SI se-Sulawesi di Manado tahun 1923.

SI Cabang Bolaang Mongondow mengutus dua anggotanya ke Kongres se-Sulawesi 1923 di Manado itu. Mereka ialah Adampe Dolot dan P. Imban. Kongres itu antara lain memutuskan agar semua cabang/ranting mengintensifkan pendidikan dan perekonomian. Program pendidikan untuk menyiapkan tenaga-tenaga terdidik di masa depan bagi kepentingan organisasi dan rakyat sedangkan program perekonomian untuk mengusahakan adanya dukungan biaya bagi organisasi maupun untuk kesejahteraan anggota bahkan seluruh masyarakat. Sepulangnya menghadiri Kongres, maka Adampe Dolot sebagai Ketua Cabang dan Husen Raupu sebagai Komisaris, mengirim surat meminta izin kepada Controleur agar SI diperbolehkan mendirikan sekolah rendah dua kelas untuk anak-anak Bolaang Mongondow.¹¹⁷⁾ Permohonan itu ditolak oleh Kontrolur dengan alasan bahwa izin mendirikan persekolahan sudah lebih dahulu diberikan kepada Zending.¹¹⁸⁾ Nyata bahwa penolakan itu bertentangan dengan politik etika di bidang pendidikan rakyat yang menghendaki diadakannya pendidikan yang merata bagi rakyat Indonesia.

Untuk sementara program pendidikan gagal dan karena itu mereka mengusahakan program perekonomian khususnya program petanian untuk mempersiapkan dana organisasi. Karena menurut hukum adat yang disebut totabuan, tanah adalah milik raja, maka mereka meminta bantuan raja untuk memberikan sebidang tanah untuk usaha penanaman kopi. Raja Datu Cornelis Manoppo dan Jogugu A.P. Mokoginta dari Kerajaan Bolaang Mongondow berkenan membantu SI dengan memberikan sebidang tanah luasnya kira kira sepuluh hektar di daerah Lunguyon/Ulu Ongkad. Usaha pertanian SI itu dimulai tahun 1924 dan kopi mulai berbuah tahun

116) A.K. Pringgodigdo, SH, *op.cit.*, halaman 35.

117) Wawancara dengan Husen Raupu, 24-9-1978.

118) Wawancara dengan Samin Imban, 25-9-1978.

1929/1930. ¹¹⁹⁾

Secara kebetulan ada seorang guru bernama Nendu berasal dari Minahasa yang mendengar penolakan Controleur bagi SI untuk mendirikan sekolah. Ia menyarankan kepada pimpinan SI bahwa kalau ditolak Kontrolur, ajukan kepada Residen Manado kalau perlu sampai kepada Pemerintah pusat di Jakarta. Saran itu diikuti oleh pimpinan SI Bolaang Mongondow. Ternyata Residen Manado menolak mendirikan sekolah yang dimaksudkan sehingga Ketua Cabang Adampe Dolot tahun 1925 langsung berangkat ke Jakarta untuk mengajukan permohonan partai kepada pemerintah pusat di sana. Departement van Onderwijs en Eeredienst menyetujui permohonan itu dan mengatakan kepada Adampe Dolot untuk kembali saja ke Bolaang Mongondow dan menunggu surat izin dikirimkan melalui Kontrolur.

Dari Jakarta Adampe Dolot langsung kembali ke Bolaang Mongondow dan tidak lama kemudian Kontrolur memanggil pimpinan SI untuk menerima surat izin pemerintah itu. Sambil menyerahkan surat izin, dengan nada kesal Controleur mengatakan bahwa kalian seperti anak-anak kecil yang tidak mengerti apa yang diminta. Selesai menerima surat izin mendirikan persekolahan tersebut, Adampe Dolot dan Husen Raupu kembali ke Monilow untuk mulai menyusun rencana selanjutnya dan pada tahun 1926, berdirilah sekolah yang pertama milik SI di Molinow daerah Bolaang Mongondow. ¹²⁰⁾

Untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah, SI Bolaang Mongondow mendirikan suatu lembaga yang dinamakan Balai Pendidikan dan Pengajaran Islamiyah disingkat BPPI. Sekolah yang didirikan semuanya bernaung di bawah badan itu sehingga lebih dikenal sebagai Sekolah Rendah Islamiyah atau sekolah BPPI. ¹²¹⁾ Statusnya sama dengan Sekolah Zending yaitu Sekolah Rendah tiga kelas.

Tentang tenaga guru sudah sejak tahun 1925 dipersiapkan dengan mengirimkan surat permintaan kepada pengurus pusat di Yogyakarta. Pengurus pusat SI mengirimkan beberapa guru antara lain Moh. Safii Wirakusumah, Sarwoko, R. Ahmad Hardjodiwirjo,

119) Wawancara dengan Husen Raupu, 24-9-1978 dengan Samin Imban, 25-9-1978.

120) Wawancara dengan Husen Raupu, 24-9-1978.

121) Wawancara dengan Muhammad Djazuli Kartawinata, 23-10-1978:

Sukirman, Sumarjo Surjopranoto, Moh. Subari, Saldan Martosiswojo, Masugut, Sukardi, dan lain-lain. Di kemudian hari ditambah beberapa tenaga antara lain yaitu Harsono Tjokroaminoto (anak H.O.S. Tjokroaminoto sendiri) dan Muhamad Djazuli Kartawinata.¹²²⁾ Guru-guru dari pusat semuanya berjumlah tujuh belas orang ditambah yang berasal dari daerah Sulawesi Utara antara lain Manado: Ali Bachmid, dari Gorontalo: Usman Hadju, dan dari Sangir Talaud: Moh. Tahir. Ada juga beberapa orang guru asal Bolaang Mongondow antara lain Johan Damopolii dan Habo Amparodo.¹²³⁾

Murid yang diterima tahun 1926 untuk pertama kalinya itu berjumlah ratusan orang anak. Pimpinan partai bersama-sama anggota dan para guru yang ada bekerja keras untuk dapat menyediakan gedung yang dapat menampung hasrat belajar anak-anak Molinow yang ingin bersekolah di situ. Selanjutnya untuk mempersiapkan tenaga-tenaga guru asal Bolaang Mongondow yang cakap, pada tahun 1926 dikirimlah beberapa pemuda untuk belajar di Sekolah Guru milik SI di Yogyakarta. Mereka yang dikirim berjumlah dua orang yaitu Haruna Dolot dan Zakaria Imban. Haruna Dolot meninggal dan sebagai gantinya dikirim Jahja Moko-bombang yang juga meninggal di sana. Hanya Zakaria Imban yang menyelesaikan studinya dan kembali tahun 1931.¹²⁴⁾

Munculnya organisasi politik di daerah Gorontalo ada hubungannya dengan kegiatan politik di Pulau Jawa. Sebagaimana diketahui, kota Gorontalo memiliki pelabuhan yang sering disinggahi kapal-kapal sehingga dengan lancarnya perhubungan itu menyebabkan lancarnya pula arus berita peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lain khususnya di Jawa. Dengan diilhami berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 maka beberapa orang Gorontalo yang baru kembali dari Jawa mendirikan organisasi Sinar Budi tahun 1912.

Organisasi Sinar Budi ini bergerak di lapangan sosial dengan berusaha memperbaiki kehidupan dan penghidupan dari masyarakat. Sinar Budi bertujuan untuk:

- a. Memperjuangkan persamaan hak dengan bangsa-bangsa lain;

122) Wawancara dengan Muhammad Djazuli Kartawinata, 23-10-1978; Husen Raupu, 24-9-1978; Samin Imban, 25-9-1978.

123) Wawancara dengan Husen Raupu, 24-9-1978 dan dengan Samin Imban, 25-9-1978.

124) Wawancara dengan Husen Raupu, 24-9-1978 dan Samin Imban 25-9-1978.

- b. Dalam pergaulan diusahakan harus lancar berbahasa Melayu (Bahasa Indonesia);
- c. Mengusahakan mendirikan perkumpulan Loria yaitu perkumpulan uang sebagai tempat mendidik cara-cara berorganisasi;
- d. Demikian juga dalam cara berpakaian, cara bergaul dan kesuisilaan. ¹²⁵⁾

Melalui usaha-usaha yang dijalankannya maka rakyat Gorontalo menemukan kembali martabatnya sebagai manusia yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain Sinar Budi berusaha memodernisasikan kehidupan masyarakat Gorontalo. ¹²⁶⁾

Berkat usaha-usahanya itu maka dalam waktu yang singkat Sinar Budi mendapat tempat di hati rakyat sehingga anggotanya sudah mencapai ribuan orang. Pesatnya kemajuan yang dicapai oleh Sinar Budi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pemerintah Kolonial yang membangkitkan rasa curiga pemerintah Kolonial. Dengan satu dan lain cara pemerintah Kolonial mendekati para pemimpin Sinar Budi yang kebanyakan terdiri dari tokoh-tokoh kaum bangsawan setempat dengan maksud agar mereka menghentikan kegiatan-kegiatannya. Namun terdorong oleh kesadaran nasional yang tinggi untuk memperbaiki nasib rakyat, pendekatan pemerintah Kolonial itu gagal. Malahan mulai berdirinya organisasi Sinar Budi ini mulai pulalah rakyat Gorontalo mengenal dan mengerti cara-cara berorganisasi dan berkumpul. ¹²⁷⁾

Pada tahun 1916 H.O.S. Tjokroaminoto selaku pemimpin SI datang ke Gorontalo bersama-sama dengan Mohamad Djafar, yang kebetulan baru kembali dari Yogya untuk mengobati matanya yang sakit di sana. Ia mengadakan rapat dengan maksud untuk membentuk cabang SI di Gorontalo. Rapat diadakan di kampung Ipilo (di kota Gorontalo) yaitu di rumahnya Kadli Husin Pou. Begitu banyaknya pengunjung waktu itu menyebabkan rumah tempat rapat itu roboh akibat orang yang berdesak-desak di atas rumah. Rapat SI yang dipimpin Tjokroaminoto waktu itu berhasil membentuk pimpinan yaitu Bouti pakaja sebagai Ketua dengan gelar Ti Presiden, dibantu dua orang lainnya yaitu Bahu Panigoro (Kepala Kampung Molosipat B) dan Zakaria Saleh Lama (Kepala

125) Brosur "Peringatan 35 Tahun Peristiwa Patriotisme 23 Januari 1942 di Gorontalo dan Dua Tahun Yayasan 23 Januari 1942". Jakarta, 1977.

126) Wawancara dengan Nani Wartabone, 10-10-1978.

127) Wawancara dengan Ali Umar, 2-10-1978.

Kampung Kayubulan di Pohe). Daerah Gorontalo penduduknya 100% beragama Islam menyebabkan SI cepat sekali meluas sampai ke pedalaman. Lelaki wanita yang sudah berumur di atas delapan belas tahun berduyun-duyun mendaftarkan diri sebagai anggota. Program politik dari SI yaitu berjuang melawan penjajah Belanda dan mencita-citakan kemerdekaan, ¹²⁸⁾ cepat sekali mendapat tempat di hati rakyat Gorontalo pada waktu itu.

2. Sosial

Tumbuhnya organisasi sosial di daerah Gorontalo antara lain karena adanya interaksi dengan organisasi sosial di daerah lain dan juga atas inisiatif dari tokoh-tokoh masyarakat setempat sesuai adat-istiadat yang berlaku.

Tahun 1929 di Gorontalo didirikan suatu organisasi sosial yaitu Muhammadiyah dibentuk oleh Hadji Sudjah dari Yogyakarta bersama Guru Raden Himam. Para pengurus yang terpilih waktu itu ialah Tom Ollie, I. Baga, U.H. Buluati, H. Akase, Muhamad Dunggio, Hadji Jusuf Abas, dan Muchsin Muhamad. Tujuan dari organisasi ini di lapangan pendidikan hendak mendirikan sekolah-sekolah taman kanak-kanak dan sekolah rendah dan sekolah lanjutannya. Di lapangan sosial yaitu mendirikan rumah-rumah yatim-piatu menampung dan mendidik anak-anak yatim-piatu agar menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri. Di lapangan keagamaan didirikan sekolah-sekolah guru agama dan taman-taman pengajian.

Daerah Gorontalo sendiri terkenal adanya organisasi sosial yang sifatnya organisasi gotong-royong. Gotong-royong di lingkungan keluarga batih disebut *ngala'a* sedangkan untuk keluarga luas (*extended family*) disebut *ungala*. Juga di antara keluarga-keluarga yang masih mempunyai hubungan darah terdapat kegotong-royongan yang erat sekali yang disebut *mohuyula*. Kegiatan-kegiatan sosial dari *ngala'a*, *ungala'a*, dan *mohuyula* antara lain dalam hal perkawinan, kematian, sunatan, dalam suka, dan duka.

Di daerah Bolaang Mongondow dalam periode ini belum ada pengaruh dari organisasi sosial dari lain daerah, sehingga dengan demikian organisasi sosial lokal memegang peranan yang amat penting, terutama bentuk-bentuk kerja-sama baik dalam lingkungan keluarga (kinred) maupun di lingkungan yang lebih luas. Dalam lingkungan keluarga terkenal hubungan darah yang disebut mo-

128) Wawancara dengan Ali Umar, 2-10-1778.

touadi yang meliputi saudara sekandung, saudara sepupu pihak ayah dan pihak ibu dan seterusnya yang dalam kehidupan sehari-hari, terikat erat misalnya dalam sistem pengerahan tenaga dan tolong-menolong, bahkan dalam soal-soal pemerintahan khususnya pengerahan tenaga untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Apabila seorang pejabat desa hendak memerlukan tenaga kerja bakti misalnya maka ia akan gagal kalau hanya menghubungi per kepala keluarga/rumah-tangga begitu saja. Untuk pengerahan tenaga seperti itu maka yang perlu dihubungi ialah pemimpin *motouadi* yang akan meneruskannya kepada para anggota keluarga lainnya. Dalam satu desa terdiri dari puluhan kelompok seperti itu. Juga seringkali pamong desa menyerahkan penyelesaian persengketaan yang terjadi dalam desa untuk diselesaikan antar kepada kelompok *motouadi* tersebut. Dalam peristiwa itu biasanya segera tercapai kerukunan seperti semula.

Di dalam masyarakat Bolaang Mongondow terkenal adanya sistem kerja-sama tolong-menolong yang disebut *pogogutat* dan *posad*. *Pogogugat* sifatnya terbatas dalam suatu keluarga besar dalam arti kata tolong-menolong dalam soal-soal perkawinan, kedukaan dan sebagainya baik dalam duka maupun dalam suka, di mana semua anggota terikat dengan kewajiban untuk membantu moral maupun materil, karena merasa bahwa suksesnya pelaksanaan kegiatan tertentu merupakan tanggung-jawab keluarga serta nama baik mereka sendiri. Sedangkan *posad* ialah adat kebiasaan tolong-menolong anggota masyarakat dalam desa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan misalnya untuk mendirikan rumah membersihkan kebun, dan sebagainya.

Kegiatan sosial di daerah Minahasa terutama terjadi di dalam lingkungan keluarga, baik keluarga batih maupun keluarga luas, bahkan yang menyangkut seluruh anggota masyarakat. Setiap keluarga merupakan kelompok kerja-sama tolong-menolong dan selanjutnya dikembangkan di lingkungan masyarakat desa. Bentuk kerja-sama sosial dalam keluarga yaitu misalnya yang disebut *merur* dan *kumawus*. *Merur* ialah bentuk kerja-sama tolong-menolong di lingkungan keluarga dalam soal perkawinan, kedukaan dan sebagainya. Dalam melakukan *Merur* itu biasanya semua keluarga yang masih ada hubungan darah dengan keluarga yang tertimpa musibah kematian atau yang akan mengawinkan anaknya, mengumpulkan bahan-bahan makanan, yang akan dimakan sehidangan dengan maksud untuk sekedar turut meringankan beban

keluarga yang bersangkutan. Kalau merur hanya khusus di lingkungan suatu keluarga maka dalam hal yang sama untuk masyarakat desa disebut *maeru-erur*. Dengan *maeru-erur* dimaksudkan merasa wajibnya setiap warga desa dalam peristiwa musibah kematian yang menimpa suatu keluarga dalam desanya. Suatu bentuk kerja-sama tolong-menolong lainnya khusus untuk lingkungan keluarga disebut *kumawus*. Dalam *kumawus* yang hadir biasanya hanya yang masih ada hubungan dengan keluarga yang beberapa waktu yang lalu ditimpa musibah kematian untuk makan bersama di mana masing-masing yang pergi *kumawus* membawa makanannya sendiri-sendiri.

Selain dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat terdapat bermacam-macam organisasi sosial yang memperlihatkan adanya bentuk-bentuk kerja-sama tolong-menolong misalnya yang disebut *mapalus*. Dalam *Adatrechtbundels III*, tahun 1911 halaman 53 dikatakan bahwa *mapalus* artinya bekerja dengan berkawan beberapa orang serta pun bekerja dengan bergantiganti. Dalam *Pandecten van het Adatrecht IX*, tahun 1931 halaman 615-627 tersimpul suatu pengertian bahwa *mapalus* adalah suatu kerja-sama (*samenwerking*) yang dilakukan oleh beberapa orang untuk saling tolong-menolong (*wederkerig hulpbetoon*) maupun dilakukan oleh sejumlah warga desa (*gemeenschappelijk*) untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum yang dilakukan oleh orang-orang Minahasa dalam hal tolong-menolong sekitar pekerjaan rumah-tangga, pertanian, kematian, perkawinan, dan kerja bakti.¹²⁹⁾

Di daerah Sangir Talaud sudah sejak lama ada organisasi-organisasi sosial yang sifatnya bentuk kerja-sama tolong-menolong misalnya dalam lingkungan keluarga yang disebut *ruanganna*. *Ruanganna* sebagai suatu kelompok kekerabatan yang dahulunya berfungsi untuk memegang hak atas tanah milik komunal, mengatur perkawinan dengan adat eksogami, mengatur aktivitas bersama dalam lapangan kehidupan dan merupakan suatu kesatuan hidup setempat terutama di Talaud. Suatu hal yang patut disebutkan bahwa bentuk-bentuk kerja-sama yang ada di Sangir Talaud misalnya dalam soal kematian, perkawinan, pertanian, dan

129) Drs. Maulud Tumenggung Sis, "Beberapa analisa perbandingan *mapalus* dan *gotong-royong*" artikel dalam majalah *Duta Budaya* Nomor 02 Tahun III, Lembaga Penelitian Sastra Fakultas Sastra UNSRA, Manado, 1973, halaman 16.

sebagainya, semuanya menekankan pentingnya sifat bergotongroyong yang diminta secara sukarela membantu anggota keluarga masing-masing maupun warga desa di mana ia berada. Dapat disebutkan misalnya Perkumpulan Budi Kematian di Kendhar yang beranggotakan siapa saja tanpa memandang golongan dan lain-lain.¹³⁰⁾

3. Wanita

Di daerah Minahasa sudah sejak sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat kaum wanita dipandang sederajat dengan kaum lelaki. Di semua sekolah yang diselenggarakan Zending maupun oleh pemerintah, terdapat murid-murid wanita bercampur-gaul dengan murid-murid lelaki bersama-sama. Untuk lebih meningkatkan lagi peranan wanita terutama dalam bidang pendidikan maka pada tahun 1917, berdirilah suatu organisasi lokal bernama PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anaknya Turun-temurun). Organisasi PIKAT berdiri pada tanggal 8 Juli 1917 oleh Ny. Maria Walanda Maramis (1874-1924) yang pada tahun itu juga membuka Sekolah Rumah-Tangga (Sekolah Kepandaian Putri) lengkap dengan asramanya. Ny. Maria Walanda Maramis atas jasa-jasanya di bidang sosial khususnya dalam usaha meningkatkan derajat kaum wanita, oleh Presiden Republik Indonesia diangkat sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sesuai Surat Keputusan Nomor 012/TK/TH. '69 Tanggal 20 Mei 1969.¹³¹⁾ Adapun kriteria pengangkatan para pahlawan kemerdekaan nasional sesuai Pedoman Pelaksanaan Penulisan Biografi Pahlawan Nasional yang disusun oleh Proyek Biografi Pahlawan Nasional Pusat 17 Juni 1975 adalah:

- a. Dengan tindakan nyata melakukan atau melakukan perjuangan fisik mempersatukan rakyat Indonesia menentang penjajahan bangsa asing;
- b. Cita-cita perjuangannya betul-betul untuk kemajuan dan kemuliaan serta persatuan dan kemerdekaan bangsa;
- c. Rela berkorban dan bersedia menanggung akibat daripada cita-cita perjuangannya memajukan dan memuliakan serta mempersatukan dan memerdekakan bangsanya;

130) Wawancara dengan H.E. Yuda, 5-10-1978 dan dengan A. Rompas, 27-9-1978.

131) Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Utara, *Mengenal Pahlawan-pahlawan/Kesuma Bangsa Indonesia*, Manado, 1976, halaman 11.

- d. Sikap dan segala sepak-terjangnya bersifat memajukan dan meningkatkan derajat bangsa serta merintis persatuan dan kemerdekaan Indonesia, sikap dan tindakannya itu mempunyai sifat suri-tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- e. Sikap dan sepak-terjangnya dari awal sampai akhir menunjukkan garis lurus yang konsekwen (tidak pernah menyimpang) dari cita-cita perjuangannya, yakni untuk kemajuan kemuliaan persatuan serta kemerdekaan nusa dan bangsa. ¹³²⁾

Kriteria bagi para pejuang kemerdekaan nasional di atas menambahkan juga bahwa yang dapat diangkat sebagai pahlawan tersebut di atas ialah seorang yang sangat berjasa kepada nusa dan bangsa Indonesia karena dengan hasil karyanya atau hasil pemikirannya mempengaruhi banyak orang sehingga orang-orang itu bergerak dalam rangka mencapai persatuan dan kemerdekaan Indonesia.

Selain perkumpulan wanita PIKAT, ada juga organisasi wanita yang bergerak di lapangan politik. Organisasi tersebut bernama Putri Setia didirikan pada tahun 1927 dan diketuai oleh Ny. S.K. Pandean. Sekarang ini Ny. S.K. Pandean diakui sebagai Veteran Perintis Kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia. Ia adalah putri dari N.B. Pandean seorang bekas Inlands Leerar yang turut mendirikan KGPM tahun 1933 sebagai suatu gereja yang lepas dari gereja pemerintah Indische Kerk. Sekitar tahun 1971 menjabat sebagai Ketua Umum Pucuk Pimpinan KGPM di Minahasa. ¹³³⁾

Banyak wanita Minahasa yang telah menempuh tingkat pendidikan tinggi jauh sebelum hal serupa dicapai oleh wanita Indonesia dari daerah-daerah lainnya. Di antaranya antara lain tercatat nama Nona Marie Thomas yang lulus di STOVIA Jakarta tahun 1922 merupakan wanita Indonesia pertama yang mendapat gelar *Indische Arts* (Dokter Hindia). ¹³⁴⁾ Nona Dokter Marie Thomas dan rekannya Nona Dokter Anna Warouw pernah diasuh oleh PIKAT. Dokter-dokter lainnya ialah Nona E.E.M. Lumentut lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam sekitar tahun 1930, dokter Nona A. Sakul lulusan dari NIAS Surabaya tahun 1937, dokter Nona J. Gerungan juga lulusan NIAS Surabaya tahun

132) *Ibid.*, halaman 3 dan 4

133) E.W. Parengkuan BA, *op.cit.*, halaman 20.

1937, dr. Nona R.V.F. Kaunang NIAS Surabaya 1938, dr. Nona Tjia Tjæ Giok ¹³⁵⁾ NIAS Surabaya 1940, kelahiran Manado tahun 1913.

Wanita Minahasa lainnya ialah antara lain Marie Doodoh sebagai wanita Indonesia yang pertama memegang ijazah *Europeesche Hoofd Acte*. Nona A.M. Waworuntu tahun 1917 wanita Indonesia yang pertama memegang ijazah bahasa Perancis bagi orang-orang asing. Kemudian antara 1950-1951 sebagai Walikota Manado, Walikota wanita Indonesia yang pertama. Sekarang sebagai dosen bahasa Perancis pada IKIP Negeri dan Universitas Sam Ratulangi Manado. Para guru wanita yang berijazah *Hoofd Acte* lainnya antara lain ialah H.A. Kaligis, Manin Sumayku, G.L. Kandou Fietje Richter dan Nona E.C.C. Winter. ¹³⁶⁾

Di daerah Sangir Talaud, kumpulan-kumpulan wanita yang sudah mulai berbentuk organisasi antara lain dapat disebutkan Kumpulan Wanita Maria Martha di Tahuna. Kegiatan kumpulan ini hanya terbatas pada soal-soal sosial. Keanggotaannya khusus untuk kaum wanita sesuai nama Maria-Martha dan terutama tertuju kepada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pelayanan rohani, kebaktian dan sebagainya. ¹³⁷⁾

Di daerah Gorontalo, kegiatan kaum wanita tidak pernah terdengar sampai saatnya Serikat Islam masuk ke sana tahun 1920-an. Ketika pengurus cabang SI Bolaang Mongondow dapat dibentuk maka dilengkapi dengan seksi wanita yang dinamakan Onder Departemen Pengerahan Wanita. Ketua Majelis itu ialah Hatidah Mokobombang istri dari Komisaris Husen Raupu. Hatidah Mokobombang dibantu oleh Jamila Dolot dan Aida Mustafa ¹³⁸⁾ Serikat Islam di Bolaang Mongondow waktu itu sudah memiliki tiga puluh satu ranting yang tersebar di seluruh daerah. Kesemua ranting itu dikunjungi oleh Hatidah Mokobombang dan para pembantunya untuk menyebarluaskan Pengaruh SI, mengadakan usaha-usaha pemberantasan buta huruf serta kerajinan wanita. ¹³⁹⁾ Ia menganjur-anjurkan kepada kaum wanita untuk turut berpartisipasi dengan kaum lelaki memperjuangkan cita-cita melawan Kolonial

135) *Ibid.*, halaman 32-35.

136) ?

137) *Ibid.*, halaman 68, 69, 76.

138) Wawancara dengan Husen Raupu, 24-9-1978.

139) Wawancara dengan M.D. Kartawinata, 2-10-1978.

Belanda menuju kemerdekaan Indonesia. Ketika ia meninggal tahun 1972, Bupati Kepala Daerah Bolaang Mongondow Letnan Kolonel CPM Oe. N. Mokoagow mengatakan dalam upacara pemakamannya bahwa daerah Bolaang Mongondow telah kehilangan seorang Srikandi dengan meninggalnya Hatidah Mokobombang. Upacara itu turut dihadiri pula oleh bekas Ketua DPRD-GR Bolaang Mongondow Samin Imban (1961-1971).¹⁴⁰⁾

4. Agama

Agama yang pertama masuk ke Sulawesi Utara khususnya ke Sangir Talaud ialah agama Islam dari Mindanao (Philipina Selatan), yaitu sekitar akhir abad XV, didasarkan atas perhitungan tahun 1622 tewasnya Raja Samansialang (Raja Masyelihe) yang telah memeluk agama Islam, akibat meletusnya Gunung Awu di tahun itu.¹⁴¹⁾ Dari Mindanao agama Islam dibawa masuk ke Kendahe dan Talawid oleh Sarib Mansjur, seorang bangsawan Mindanao, Kulano dari Kerajaan Kendahe. Ada yang mengatakan bahwa dibawa masuk oleh seorang Arab yang datang ke Tabukan Utara dan meng-Islamkan Raja Lumasage dari kerajaan itu. Selain itu Imam Masade menyebarkan agama Islam di Kepulauan Sangir Talaud. Agama Islam yang disebarkan itu disebut agama Islam tua yang terdiri dari tiga jenis yaitu *Islam Hadung* (penganut-penganutnya di Kalukube dan Lenganeng), *Islam Makung* (penganut-penganutnya di Enggohe dan Tariangbaru) dan *Islam Biangkati* (penganut-penganutnya di Sawang). Agama Islam yang sekarang masuk dari Ternate abad XVII dan kini berkembang di kampung Tidore Kecamatan Tahuna.¹⁴²⁾

Agama kedua yang masuk ialah agama Katolik dibawa oleh para paderi Portugis dan Spanyol pada abad XVI/XVII. Pada tahun 1563 dua kapal perang Portugis dipimpin Panglima Henrique de Sa dengan membawa serta paderi Diogo de Magelhaes berangkat ke Sulawesi Utara untuk menggagalkan maksud Sultan Chairun dari Ternate yang mengirimkan anaknya Baabullah ke Sulawesi Utara lengkap dengan kapal perang untuk meng-Islamkan rakyat di kawasan itu. Pada masa itu Portugis telah membawa Misi Katolik ke pulau-pulau Maluku, Bacan, Halmahera, Ternate, Tidore terus ke Sulawesi Utara (1563-1610) yaitu ke Manado, Minahasa,

140) Wawancara dengan Samin Imban, 25-9-1978.

141) P3KD Sulawesi Utara, op.cit., halaman 86.

142) *Ibid.*, halaman 86, 87.

Kaidipang sampai ke Buol (1610-1677).¹⁴³⁾

Ketika Belanda masuk ke Sulawesi Utara, agama Katolik dan Islam terdesak dengan pengaruh penyebaran agama Kristen yang disebarkan oleh pendeta-pendetanya. Para pendeta yang terkenal di Sangir Talaud antara lain Ds. Fransiscus Dronosius, Ds. Huise-man, Ds. Montanus, Ds. Paregrinus, Ds. Cornelis de Leeuw, Ds. Valentijn dan Ds. Brons yaitu antara tahun 1674-1705. Di Minahasa antara antara lain Ds. Montanus, Ds. Werndly, Ds. J.Kam (diberi gelar Rasul Maluku), Ds. D. Muller, Ds. L. Lammers, Ds. Helendoorn, Ds. J.G.F. Riedel, Ds. Schwarz, Ds. Hermann yaitu antara tahun 1675 sampai 1875.¹⁴⁴⁾ Beberapa pendeta pernah meninjau keadaan di Bolaang Mongondow antara lain Ds. Wilken dan Ds. J.A.T. Schwarz antara tahun 1866 dan 1875, tetapi mereka tidak diizinkan oleh pemerintah Belanda untuk mengabarkan Injil di sana.¹⁴⁵⁾ Sekarang ini daerah Minahasa dan Sangir Talaud mayoritas penduduknya beragama Kristen; Gorontalo, dan Bolaang Mongondow mayoritas dari jumlah penduduk kedua daerah itu memeluk agama Islam.

Uraian tentang perkembangan agama Islam di daerah Gorontalo di depan menyebutkan nama Raja Hunggiludaa I yang mengembangkan agama Islam sepulangnya dari kunjungan ke Ternate. Sumber lainnya menyebutkan bahwa agama Islam sudah diakui sebagai agama kerajaan oleh Raja Matolodula pada abad XVI (kira-kira tahun 1566). Mulai saat itu orang Gorontalo sudah merasa dirinya sebagai seorang Islam dan menganut agama itu dengan kuat. Kemudian di abad XVII barulah agama ini berkembang dengan pesat pada masa pemerintahan Raja Eyato yang bergelar Tato Selongi.¹⁴⁶⁾ Pada masa itu daerah Gorontalo terdiri dari enam kerajaan yaitu Kerajaan Gorontalo, Limboto, Bone-Suwawa, Bolango, Atinggola dan Boalemo, yang dikuatkan pula dengan beslit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 41 Tanggal 12 Desember 1859 tentang adat-istiadat Gorontalo,¹⁴⁷⁾ karenanya ten-

143) P3KD Sulawesi Utara, *op.cit.*, halaman 87-88; lihat bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, Jilid I, Jakarta, 1974.

144) P3KD Sulawesi Utara, *op.cit.*, halaman 88, 89; lihat Dr. Th. Muller Kruger, *op.cit.*, halaman 93-95.

145) W. Dunnebier, *op.cit.*, halaman I; lihat Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow, *op.cit.*, halaman 1.

146) Panitia Seminar Adat Daerah Gorontalo, *op.cit.*, halaman 33.

147) *Ibid.*, halaman 34-35.

tang tata-cara penyambutan raja-raja Gorontalo. Karena kuatnya agama Islam di Gorontalo maka orang-orang Portugis dan Belanda gagal menyebarkan agama Katolik dan Kristen di sana pada abad XVI-XVII. Di abad XX, nanti mulai tahun 1936, daerah Gorontalo bersama-sama daerah Donggala di Sulawesi Tengah, dinyatakan sebagai daerah pekabaran Injil oleh GMIM. Tapi ketika para pekabar Injil memasuki daerah Gorontalo, mereka menemui banyak kesukaran bekerja di sana antara lain karena daerah itu sangat kuat memeluk agama Islam. Dengan demikian maka maksud utama untuk mengabarkan Injil berubah hanya melayani orang-orang pendatang yang sebelumnya telah memeluk agama Kristen. ¹⁴⁸⁾

Pada sekitar tahun 1650, daerah Bolaang Mongondow masih belum memeluk suatu agama di mana yang dianut penduduknya yaitu animisme dan dinamisme, yaitu di mana pemerintahan Raja Tadohe dari Kerajaan Bolaang Mongondow. Raja ini diganti oleh Raja Loloda Mokoagow kira-kira tahun 1653, didasarkan bahwa ia memerintah lebih-kurang tiga puluh lima tahun ¹⁴⁹⁾ sebelum ia diganti oleh Jacobus Manoppo pada tanggal 3 Oktober 1689. ¹⁵⁰⁾ Pada masa pemerintahan Raja Loloda Mokoagow ini dianggap sebagai saat masuknya agama Islam; raja ini yang pertama menganut agama Islam sehingga agama Islam disebut agama in datu atau *agama raja*. Sampai sekitar tahun 1650, orang-orang Spanyol sering datang berdagang ke Bolaang Mongondow membawa piring-piring, kain-kain berkembang yang baik, barang-barang katun lainnya, alat-alat dari besi termasuk menjual helm-helm dari tembaga/kuningan untuk keperluan pengawal kerajaan. ¹⁵¹⁾

Kedatangan orang-orang Spanyol dan Portugis senantiasa membawa motif-motif menyebarkan agama Katolik di samping untuk berdagang. Dengan pengaruh orang-orang Spanyol maka Manoppo (anak Raja Loloda Mokoagow dari istri kedua orang Minahasa asal Amurang) dibaptiskan menjadi orang Katolik di Amurang dengan nama Jacobus sehingga lengkapnya menjadi Jacobus Mannoppo. ¹⁵²⁾ Jacobus Manoppo inilah yang menggantikan

148) Dr. Th. Muller Kruger, *op.cit.*, halaman 102.

149) W. Dunnebier, *Mengenal Raja-raja dari Bolaang Mongondow*, tulisan tangan, tanpa tahun, halaman 26.

150) H.C. Manoppo, *Toetoeeran Bangsa Raja Kerajaan Bolaang Mongondow*, naskah ketikan, Lolan, tanpa tahun, halaman 11.

151) *Ibid.*, halaman 26.

152) *Ibid.*, halaman 34.

Loloda Mokoagow sebagai Raja Kerajaan Bolaang Mongondow, di tahun 1689. Tapi rupanya agama Katolik maupun agama Islam hanyalah merupakan agama di lingkungan istana saja di waktu itu. Rakyat seluruhnya masih tetap menganut kepercayaan lama mereka.

Pengganti Raja Jacobus Manoppo yang juga beragama Katolik ialah Fransiscus Mannoppo (1731-1734), Salamon Manoppo (dua kali diangkat jadi raja 1734-1764 di antara masa pembuangan ke Tanjung Pengharapan di Afrika), Eugenius Manoppo (1764-1770), Christoffel Manoppo (1770-1779), Manuel Manoppo (1779-1811), Cornelis Manoppo (1811-1829), dan Ismail Manoppo (1829-1833).¹⁵³⁾

Pada masa pemerintahan Raja Eugenius Manoppo, datanglah perahu-perahu pelaut/pedagang Bugis yang disebut Pandekawang ke perairan Bolaang Mongondow antaranya yang dipimpin seorang bangsawan Bugis (Islam) yang bernama Andi Latai. Ia dan armada pandekawangnya terlibat pertempuran di laut lalu mendarat di dekat muara Sungai Sumoit dalam wilayah Kerajaan Bolaang Mongondow. Bersama seorang pengikutnya yang bernama Lasalasa ia menghadap raja untuk minta perlindungan di Bolaang dan memperoleh izin itu. Di istana raja ia melihat putri Hontinimbang, lalu dipinangnya, untuk kawin menurut agama Islam. Pinangan diterima asalkan Andi Latai mau membayar denda besar berhubung putri akan pindah dari agama Katolik masuk Islam. Setelah denda dibayarkan, maka perkawinan secara Islam dilaksanakan. Kini masuklah agama Islam dalam lingkungan istana setelah hampir seratus tahun lamanya sejak Raja Loloda Mokoagow. Andi Latai ini merasa heran setelah melihat bahwa Kerajaan Bolaang Mongondow yang rajanya beragama Katolik, tidak pernah melihat sebuah gereja pun di kampung-kampung. Ia berkesimpulan bahwa agama Katolik hanya agama di lingkungan istana saja sedangkan rakyat tidak seorang pun yang menganut agama itu.¹⁵⁴⁾

Pengganti Raja Ismail Manoppo ialah Raja Jacobus Manuel Manoppo (1833-1858) yang juga disebut Jacobus II. Dalam masa pemerintahannya itu sudah ada sekelompok orang penganut Islam di Motoboi Kecil (dataran tinggi Mongondow) yang inti-

153) W. Dunnebie, *op.cit.*, halaman 74; untuk sanak-keluarga raja-raja itu lihat H.C. Manoppo, *op.cit.* halaman 11-12.

154) P3KD Sulawesi Utara, *op.cit.*, halaman 148-151.

nya mungkin sekali adalah orang-orang yang berasal dari Gorontalo, lalu datang berdiam di pedalaman Mongondow itu. Mereka dikabarkan dipimpin oleh seorang yang bernama Damopolii dengan hakim agama yaitu bernama Tuoko yang berasal dari Gorontalo. Hakim Tuoko mempunyai seorang anak perempuan bernama Kiling atau Kilingo. Ketika kelompok itu mengadakan pesta perkawinan secara Islam, mereka mengundang Raja Jacobus Manuel Manoppo untuk berkenan hadir.

Raja Jacobus Manuel Manoppo berkesempatan hadir di dalam acara perkawinan yang diselenggarakan kelompok rakyat yang beragama Islam di Motoboi Kecil. Dalam acara tersebut ada acara kesenian Islam antara lain dinyanyikan lagu-lagu kasidah serta pengajian al Qur'an. Kemerduan suaranya Kiling, serta keahliannya membaca al-Qur'an, sangat menarik hati raja yang lalu memintangnya untuk dijadikan istri. Hakim Tuoko tidak berkeberatan asalkan raja bersedia masuk Islam. Raja menjawab bahwa ia bersedia masuk dan kawin secara Islam dengan Kiling. Keputusannya itu sangat menggemparkan seluruh pejabat dan rakyatnya, bahkan lingkungan keluarga istana sangat menentang maksud raja itu. Tapi dengan caranya sendiri, semua kehebohan dan tantangan dapat diatasi dengan baik. Selesai menikah maka raja pergi menghadap Residen di Manado memberitahukan hal itu. Residen ternyata tidak keberatan dan mengatakan bahwa Jacobus Manuel Manoppo harus memakai gelar Sultan, sama dengan para Raja Islam dari Ternate, Bacan, Tidore dan lain-lain. Karena itu maka Raja Jacobus Manuel Manoppo atau Jacobus II terkenal pula sebagai Sultan Jacobus.

Sampai tahun 1845, semua keluarga raja sudah mulai masuk Islam kecuali seorang bangsawan wanita bernama Bua Oki Manoppo seorang diri yang tetap bertahan. Ia meninggal dunia sambil memegang Kitab Injil di tangannya. Sementara itu rakyat Bolaang Mongondow berduyun-duyun masuk Islam. Anehnya bagi masyarakat Bolaang Mongondow itu, anak-anak merekalah yang lebih dulu masuk, sedangkan para orang tua kadang-kadang hingga meninggal tidak pernah memeluk agama apa pun. Ada juga di antara orang tua bersama-sama anaknya turut masuk Islam. ¹⁵⁵⁾

Pada tahun 1860, seorang ulama Islam mengunjungi daerah Bolaang Mongondow yang dalam pada itu sebagian besar dari

155) *Ibid*, halaman 154-155.

penduduknya sudah memeluk agama ini. Menurut sebuah sumber pada tahun 1866 penduduk daerah ini sudah lebih 50% memeluk agama Islam sedangkan sisanya masih animisme.¹⁵⁶⁾ Ulama Islam itu bernama Syekh Abdul Latief Rezik Makki, Imam Mashab Sya-fii jabatan Uztad dari Mekkah. Ia adalah Uztad yang dijanjikan oleh Residen Manado atas permintaan dari Raja Jacobus Manuel Manoppo yang digelar Sultan, ketika ia menghadap Residen selesai perkawinannya dengan Kiling.

Pada waktu Uztad itu tiba, yang menjadi Raja di Bolaang Mongondow ialah Adrianus Cornelis Manoppo yang memerintah mulai September 1858 sampai Agustus 1862.¹⁵⁷⁾ Oleh Raja maka Syekh ini dikawinkan dengan Boki Besar Bua Mulawan Manoppo tapi tidak punya keturunan. Kemudian Syekh Rezik Makki ini kawin dengan Bai Edong Mokoagow yang berasal dari Moyag. Lahir-lah anak-anak lelaki bernama Mohammad Rezik Makki, Mahadi Rezik Makki dan Madani Rezik Makki serta seorang anak perempuan bernama Hania.¹⁵⁸⁾

Andi Latai dengan putri Hontinimbang menghasilkan enam orang anak yang semuanya memeluk agama Islam. Anak ketiga dinamakan Andi Panungkelan yang lahir pada malam Nuzulul Qur'an sehingga orang meramalkan bahwa peruntungan besar sekali di masa depan. Umur empat tahun dibawa ayahnya ke tanah Bugis untuk belajar agama dan umur sekitar empat belas tahun kembali ke Bolaang Mongondow. Karena ia amat mahir dalam agama Islam maka ia diangkat raja untuk menjadi seorang pemimpin agama dengan jabatan Khatib Besar. Atas usahanya berdirilah di Bolaang sebuah mesjid darurat yang banyak sekali dikunjungi orang-orang perantauan dari Bugis, Gorontalo, Bolango, Bintauna, Bolaang Itang, Kaidipang, dan lain-lain untuk sholat Jum'at. Gelombang besar orang Bolaang Mongondow masuk Islam semakin hebat berkat usaha-usaha Andi Panungkelan itu.

Pada masa itu yang menjadi raja ialah Johanis Manuel Manoppo (September 1862-1880). Ketika ia mangkat, tidak ada seorang pun dari dinasti Manoppo yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi penggantinya. Berkat kemasyhuran namanya maka Andi Panungkelan terpilih untuk menduduki jabatan raja itu. Ia memilih nama Abraham Sugeha yang memerintah Bolaang Mongondow

156) Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow, *op.cit.*, halaman 1.

157) W. Dunnebier, *op.cit.*, halaman 54.

158) P3KD Sulawesi Utara, *op.cit.*, halaman 187.

mulai 1880-1893. Ada yang mengatakan bahwa nama Sugeha itu dipilih oleh Andi Penungkelan sesuai nama dari leluhur ayahnya Andi Latai di tanah Bugis yang bernama La Sugeha. Keterangan ini meragukan karena dalam sejarah Bolaang Mongondow sendiri, muncul dua nama Sugeha. Sugeha pertama menurut legende adalah anak dari tokoh legenda Tumotoibokol dengan istrinya Tumotoibokat; Sugeha pertama ini kawin dengan putri Dinondong anak dari Gumalangit dan Teneduata, di mana keturunan Sugeha dan putri Dinondong ini dianggap yang menurunkan seluruh orang Bolaang Mongondow.¹⁵⁹⁾ Tentang Sugeha yang kedua, tercatat bahwa ia adalah anak dari seorang wanita bernama Bulamboki yang dikawini oleh Tumbol di mana perkawinan itu hanya mendapat dua anak, Sugeha dan kakaknya yang bernama Ainag.¹⁶⁰⁾ Ada kemungkinan besar bahwa Andi Panungkelan ini memilih nama Sugeha sebagai nama besarnya mengingat nama itu ada dalam sejarah dan silsilah di Bolaang Mongondow, kecuali di daerah Bugis yang seluruh penduduknya beragama Islam itu, ada yang memang bernama La Sugeha itu, yang dikatakan sebagai nenek-moyang Andi Latai.

Bagaimanapun juga di masa itu agama Islam semakin kokoh dianut oleh rakyat Bolaang Mongondow, apa lagi pemerintah Belanda sama sekali tidak mengizinkan para pekabar Injil untuk bekerja di daerah tersebut. Hal ini dengan alasan bahwa karena di sana belum ditempatkan seorang pejabat Belanda. Dan benar barulah setelah ada seorang Kontrolur Belanda yaitu Anthon Cornelis Veenhuyzen tahun 1901 ditempatkan, dapatlah para pendeta Kristen mulai tahun 1905 menyebarkan agama di daerah itu.

Pendeta Kristen yang pertama ditugaskan Zending untuk bekerja di Bolaang Mongondow ialah Pendeta W. Dunnebier. Sebelum itu atas usaha Kontrolur Veenhuyzen sendiri, ada dua orang pekabar Injil asal Minahasa tahun 1904 memulakan pekerjaan itu yaitu Th. Pangkey dan rekannya bernama Tumewu. Th. Pangkey tanggal 25 Desember 1904 berhasil membaptiskan seratus empat puluh delapan orang di desa Poepo Mongondow yang letaknya kira-kira sepuluh kilometer dari Kotamobagu. Jumlah orang yang masuk Kristen dari tahun ke tahun sampai 1942 yaitu tahun 1904, seratus empat puluh delapan orang, 1909, sembilan

159) W. Dunnebier, *op.cit.*, halaman 3.4.

160) H.C. Manoppo, *op.cit.*, halaman 4.

ratus delapan orang, 1910, seribu dua ratus enam orang, 1913, dua ribu seratus sembilan puluh delapan orang, 1914, tiga ribu dua ratus tiga puluh dua orang, 1917, empat ribu dua ratus sembilan puluh dua orang, 1924 lima ribu lima orang, 1927, enam ribu satu orang, 1930, enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan orang, 1932, tujuh ribu lima ratus dua belas orang, 1933, tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima orang, 1939, sepuluh ribu tiga ratus lima puluh orang, dan di tahun 1942 tercatat enam belas ribu orang. Dari jumlah enam belas ribu orang di tahun 1942 itu, terdiri dari tujuh ribu orang Minahasa, lima ribu orang Sangir Talaud, dan empat ribu orang Bolaang Mongondow asli; banyak di antara orang-orang Minahasa dan Sangir Talaud itu yang selang beberapa generasi sudah berdiam di sana.

Usaha pertama memasukkan agama Kristen di Bolaang Mongondow itu adalah dengan membuka persekolahan Zending yaitu dengan mengirinkan tiga puluh orang guru dari Minahasa yang berhasil mendirikan sekolah di empat belas tempat, dengan murid pertama tercatat berjumlah seribu enam ratus lima orang. Para pendeta dan guru bangsa kulit putih yang pernah ditugaskan Zending ke sana antara lain ialah A. van der Endt, Ds. Loeff, Johana van der Endt, G. ten Broek, Ds. Nijenhuis, Ny. Nijenhuis, C.v.d. Kraft, Piet Hein, Fr. M. Staudt, Langeveld, dan lain-lain.

Mengenai agama-agama lainnya dapat disebutkan antaranya agama Katolik. Dalam tahun 1934 tercatat umat Katolik berjumlah seratus sepuluh orang dan sudah memiliki sebuah gereja di Kotamobagu, tahun 1937 ada beberapa orang Kristen asuhan Zending yang pindah masuk suatu aliran Pantekosta. Menjelang Perang Dunia II yaitu tahun 1940 masuklah aliran Advent ke Bolaang Mongondow; pada tahun itu banyak anggota asuhan Zending yang pindah ke Advent dan Pantekosta, tetapi sebagian di antara mereka kembali lagi jadi anggota Zending.

Perkembangan Agama Kristen di Bolaang Mongondow bukannya tidak mengalami banyak halangan dan kesulitan. Interaksi Kristen dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam acap kali menampakkan diri dalam bentuk hujatan, ancaman, dan sebagainya. Ketika penyakit kolera berkecamuk tahun 1907, maka banyak penduduk mempersalahkan itu kepada orang-orang Kristen yang dikatakan penyebab penyakit itu. Dengan bantuan vaksinasi dari Pendeta W. Dunnebier sendiri, maka penyakit itu lenyap. Hal yang sama ketika penyakit cacar melanda daerah ini di tahun

1908-1909. Tetapi karena berkat pertolongan orang-orang Kristen penyakit itu terberantas maka simpati masyarakat Islam di sana bertambah besar. Sekali lagi di tahun 1918 berjangkit penyakit influenza. Ada desa-desa yang lebih sepuluh persen penduduknya meninggal dunia, karena terserang penyakit ini. Di antara yang meninggal tercatat nama guru Jesaja Tumurang, dan istri guru Wilar. Pendeta G. ten Broek yang mewakili Pendeta W. Dunnebier untuk membaptiskan orang di sana, juga terserang penyakit itu dan meninggal dunia di Sangir Talaud menjelang Tahun Baru 1919. Tantangan lainnya yaitu pada tahun 1925 tepatnya pada tanggal 26 Oktober, terjadi pembakaran rumah guru Zending yang bertugas di Otam. ¹⁶¹⁾

Gedung gereja Kristen yang pertama didirikan adalah di Goropai yang ditahbiskan pada tanggal 1 Oktober 1916. Menyusul gedung gereja di Poopo Mongondow tanggal 17 Desember 1916. Tanggal 25 Pebruari 1923 ditasbihkan gedung gereja baru di kota Kotamobagu. Penunjuk angin di mana tertera angka tahun 1923 disumbangkan oleh jemaat Kristen Goropai. Gedung gereja Mariri Lama ditahbiskan 4 Agustus 1929. Bulan Juli 1932, Ds. Crommelin selaku Direktur Zending mengunjungi Bolaang Mongondow. Gedung gereja di Modayang ditahbiskan pada tanggal 30 April dan di Pangian 24 Desember 1933. Antara 19 sampai 21 Agustus 1934 Dr. Slotemaker de Bruine yang menjabat sebagai Ketua *Indische Kerk* datang berkunjung ke Bolaang Mongondow. Orang Bolaang Mongondow asli yang pertama menjadi pendeta yaitu Luther Kolopita ditahbiskan sebagai Penolong Pendeta di gereja Kopandakan pada 9 Desember tahun 1934. Tanggal 22 Desember 1935, ditahbiskan gedung gereja baru di Bolaang (bekas ibukota Kerajaan Bolaang Mongondow). Tanggal 27 Pebruari 1936 diadakan perayaan 25 tahun HIS milik Zending di Kotamobagu. ¹⁶²⁾ Kalau di Minahasa, sinode GMIM terbentuk tahun 1934, untuk daerah Bolaang Mongondow di tahun 1940. ¹⁶³⁾

Salah satu kesulitan dalam pelaksanaan pengabaran Injil di daerah Bolaang Mongondow ialah soal bahasa sebagai alat komunikasi. Orang-orang perantau Minahasa sudah terbiasa mempergunakan bahasa Indonesia di dalam kebaktian-kebaktian menurut

161) W. Dunnebier, *op.cit.*, Halaman II dan V; lihat Gereja Masehi Injil Bolaang Mongondow, *op.cit.*, halaman 2.

162) W. Dunnebier, *op.cit.*, halaman III - VIII.

163) Dr. Th. Muller Kruger, *op.cit.*, halaman 11.

kebiasaan Gereja Protestan di seluruh Indonesia. Pada pihak lain orang-orang Bolaang Mongondow masih tetap berpegang pada bahasa daerahnya sehingga Injil juga disampaikan dalam bahasa itu. Perbedaan suku kadang-kadang menimbulkan kesulitan pula soal-soal tanah, adat istiadat dan sebagainya senantiasa mempersulit kesatuan dan perkembangan gereja di sana.¹⁶⁴⁾

Di pihak lainnya orang Minahasa pada umumnya mempergunakan bahasa Melayu Manado sebagai bahasa pengantar di dalam setiap percakapan. Sebagaimana diketahui di Minahasa terdapat setidaknya delapan bahasa daerah: Tonsea, Tombulu, Toulour (Tondano), Tontemboan (Tompakewa), Tonsawang, Ratahan, Ponosakan dan bahasa Bantik,¹⁶⁵⁾ di samping adanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado. Bahasa Melayu Manado akibat tersebarnya guru-guru Minahasa ke seluruh penjuru Sulawesi Utara bahkan sampai ke Sulawesi Tengah semakin lama semakin dianggap/dipakai sebagai bahasa pengantar dalam berkomunikasi/berinteraksi.

Padahal pada mulanya ada yang mengatakan bahwa bahasa Melayu Manado terutama dipergunakan di Manado, Bitung dan daerah Minahasa dan pada beberapa kota di Sulawesi Utara¹⁶⁶⁾

Di daerah Bolaang Mongondow, pada kenyataannya guru-guru Minahasalah yang menyebarluaskan pemakaian bahasa ini dengan demikian menembus kesulitan-kesulitan gereja untuk bekerja di sana. Sampai sekarang ini bahasa Melayu Manado dijadikan bahasa *lingua franca* dalam berkomunikasi di samping menguasai bahasa daerah.

5. Pendidikan

Di daerah Sulawesi Utara terutama di Minahasa, jauh sebelum timbulnya politik etika sudah ada lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar (sekolah-sekolah Zending pemerintah dan Misi) maupun sekolah lanjutan. Guru-guru Minahasa banyak yang dikirimkan Zending ke luar daerah untuk mendi-

164) Dr. Th. Muller Kruger, *loc.cit.*

165) Tim Peneliti Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Manado, *Struktur Bahasa Minahasa (Tombulu, Tonsea, Tondano)*, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dari Daerah Sulawesi Utara, Manado, 1977/1978, hal. 1-2

166) Kanwil P dan K Propinsi Sulawesi Utara, Fak. Sastra Unsrat, FKSS IKIP Manado, *Struktur Bahasa Melayu Manado*, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sulawesi Utara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Manado 1976/1977, hal. 4.

rikan sekolah-sekolah. Mengenai perkembangan pendidikan baik di Minahasa maupun di daerah Sangir Talaud, Bolaang Mongondow dan Gorontalo, sudah cukup diuraikan mengenai kegiatan masyarakat yang merupakan embrio dari proses zaman kebangkitan nasional di daerah Sulawesi Utara. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa melalui pendidikan timbulnya aktivitas masyarakat yang merupakan embrio bangkitnya kesadaran memperjuangkan kemerdekaan melawan kebathilan kolonialis Belanda.

Di daerah Sangir Talaud, terdapat suatu perkumpulan yang bernama Tuwokona, yang kegiatannya antara lain memberikan beasiswa kepada para pemuda yang berbakat untuk melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Antara lain yang dikirimkan ialah J.E. Tatengkeng ke Bandung untuk belajar pada HKS di sana. Ia terkenal pula sebagai penyair Indonesia. Pernah menjadi Perdana Menteri dalam pemerintahan NIT (Negara Indonesia Timur). Golongan Islam mendirikan sekolah yang dinamakan *Neutral Volkschool*. Sangihe en Talaud Committe mendirikan banyak sekolah dasar yang terdapat di hampir semua kampung di kepulauan Sangir Talaud antara lain *Kweekschool* di Kaluwatu tahun 1097, HIS di Tahuna tahun 1919 dan HIS di Ulu Siau tahun 1930.¹⁶⁷⁾ Dua pemuda pemuda Sangir Talaud lainnya yaitu Onesimus Manossoh dan seorang temannya diberi kesempatan oleh Zending untuk belajar di *Ambachtschool* Kakas pada tahun 1928. Tapi karena sekolah teknik di Minahasa itu muridnya sudah penuh, maka keduanya berangkat ke Tapanuli (Sumatera Utara) untuk belajar di *Ambachtschool* Tapanuli antara tahun 1930-1933 dan berhasil menyelesaikan studinya itu.¹⁶⁸⁾

6. Seni Budaya

Dalam kurun waktu antara 1900 sampai 1928, perkembangan seni budaya di Minahasa, Sangir Talaud, Bolaang Mongondow dan Gorontalo dapat dikatakan tidak mengalami perobahan yang fundamental, dalam arti kata hanya merupakan peningkatan saja dari seni budaya yang sudah lebih dahulu ada di masing-masing daerah. Berikut ini akan diberikan gambaran sedikit tentang perkembangan seni budaya daerah terutama seni musik dan seni tari menurut jenis-jenisnya se Sulawesi Utara.

167) D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, djilid I, PN Pradjna Paramita, Djakarta, 1960. hal. 46.

168) Wawancara dengan A.M. Datunsolang, 22-9-1978.

Musik bambu mulai dikenal di Minahasa pada 31 Agustus 1923, pada waktu perayaan Ratu Wilhelmina 25 tahun sebagai Raja Belanda. Dalam perayaan itu untuk pertama kalinya muncul orkes bambu melulu dari daerah Ratahan. Ada yang mengatakan bahwa seniman musiknya bernama Angok Pogada seorang pensiunan tentara dari Ambon yang kemudian menjadi guru di Wioi di Ratahan (Minahasa). Ia mendirikan orkes yang dinamakan *Oranje Wioi*. Mulai tahun 1925, bermunculanlah orkes-orkes bambu di seluruh Minahasa. Musik bambu di daerah Sangir Talaud menurut dugaan adalah pengaruh dari Minahasa. Setelah setengah abad perkembangannya, maka pada Lokakarya musik bambu yang diadakan di Jakarta antara tanggal 6-19 Pebruari 1974, musik bambu ditetapkan sebagai alat pendidikan.

Tentang musik kolintang, sudah diuraikan di depan khususnya kolintang kayu Minahasa. Ada pula yang disebut kolintang besi (di Bolaang Mongondow, juga hanya disebut *kulintango* di Bintauna) dan kolintang tembaga (di daerah Minahasa). Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat bahkan sesudahnya, para raja di Bolaang Mongondow pengesahannya dilakukan di istana Kesultanan Ternate. Raja yang pertama disahkan diberikan seperangkat alat musik dari bahan logam yang menyerupai gamelan yang disebut kulintang besi atau kulintango. Kemungkinan besar alat musik ini ada di Ternate didatangkan dari Jawa; di Jawa sendiri, alat musik gamelan dipergunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang dan seni tari.¹⁶⁷⁾ Para raja Bolaang Mongondow yang dilantik di Ternate itu, selain diberikan gamelan (yang disebut kulintango atau kulintang besi) juga dianugerahkan payung kebesaran raja yang di Bintauna disebut *paungo*, di mana untuk Kerajaan Bintauna dianugerahkan kepada Raja Pattilima Datunsolang yang memerintah mulai kira-kira awal abad ke-18.¹⁶⁸⁾ Selain diberikan *paungo* (terbuat dari kain antalas), dan diberikan kulintango itu, juga dianugerahkan tambur (*safuwa*) dan gong (*bandingo*). Gamelan atau kulintango untuk Kerajaan Bintauna terdiri dari enam nada sedangkan untuk kerajaan-kerajaan lainnya hanya lima nada saja.¹⁶⁹⁾ Sekarang ini dapat dikatakan tidak ada lagi yang dapat memainkan kolintang

167) D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, jilid I, PN Pradjna Paramita, Djakarta, 1960. hal. 46.

168) Wawancara dengan A.M. Datunsolang, 22-9-1978.

169) Wawancara dengan A.M. Datunsolang, 22-9-1978.

besi atau kulintang itu.

Alat musik yang khas Gorontalo dapat disebutkan antara lain *polopalo*, *alababu*, *antungo*, *gambus*, *rabana buburuda*, *kantung*, *tulali lo binte*, Daerah Bolaang Mongondow antara lain *gambus*, *marwas*, *rababo*, *gimbal*, *ganding*, *bansi*, *tantabua*, Daerah Sangir Talaud antara lain bambu melulu, *arababu*, *sasa-saheng*, *bansi*, *solude*, *oli*.

Alat-alat musik maupun orkes di Minahasa banyak dipengaruhi oleh Barat. Untuk alat musik dapat disebutkan antara lain saksafon, klarinet, overton, tuba, bas, tambor, rofol, harmonika, hawayen gitar, viol. Orkes Minahasa yang juga dipengaruhi Barat antara lain orkes bambu klarinet, orkes bambu seng, orkes hawayen, orkes viol, orkes viol floit.

Mengenai seni tari sudah cukup pula diuraikan di depan hanya yang akan diuraikan ialah khusus mengenai adanya pengaruh-pengaruh dari luar terutama dari Barat.

Di daerah Sangir Talaud dikenal adanya tari yang disebut alabadi, yang memiliki variasi gerakan sampai sembilan macam. Sebenarnya tidak ada sama sekali pengaruh Barat dalam gerakan-gerakannya. Hanya namanya yang dikatakan berasal dari Bahasa Belanda *Helle baardier* hingga dalam bahasa Sangir Talaud dikatakan alabadi. Di Minahasa ada tari kebesaran yang merupakan penyederhanaan dan penghalusan dari tari cakalele, karena tari cakalele adalah tari perang sekaligus pemujaan leluhur (berbau animisme). Tujuan tari cakalele dirasakan kurang ramah menyambut tamu-tamu Belanda, karena gerakan-gerakannya yang kasar dan liar. Dengan menggunakan gerakan-gerakan *quadrille* yang diperkenalkan Spanyol maka diciptakanlah tari kabasaran sebagai tari untuk menyambut tamu-tamu Belanda.

Selain *kabasaran* maka ada pula tari *katrili*. Nama tari ini berasal dari bahasa Perancis Quadrille, yang merupakan pula nama tarian yang dibawa oleh bangsa Spanyol ke mana saja mereka pergi di Indonesia. Tari ini dahulunya diiringi dengan kulintang tembaga tapi karena hilangnya alat musik kulintang tembaga karena ketiadaan penggemarnya, maka telah diganti dengan kolintang kayu, viol-floit dan lain-lain. Selain katrili ada pula tari kolcis atau akolcis. Tari kolcis sejenis dengan tari polka dengan irama yang lebih lambat. Tari polineis yang merupakan peninggalan Spanyol dan Belanda. Merupakan pembukaan dari acara dansa (melantai) bagi orang Minahasa dan Maluku. Tari polka pening-

galan Spanyol yang gerakan-gerakannya berirama cepat.

Semua jenis tari pengaruh Barat di Minahasa di atas dapat menimbulkan kesan bahwa sejak zaman dahulu, mudah sekali bagi orang Minahasa untuk menerima serta memelihara kebudayaan dari luar khususnya dari Barat. Hal ini berbeda dengan di daerah-daerah lainnya, khususnya di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Bolaang Mongondow dan di Gorontalo. Pengaruh yang masuk ke sana hanya pengaruh Arab sejalan dengan agama Islam, misalnya tari danadana atau zamrah.

7. Kepemudaan dan Kepanduan

Organisasi serta kegiatan kepemudaan dan kepanduan di daerah Sulawesi Utara dalam periode ini kurang begitu menonjol. Di daerah Sangir Talaud misalnya, kegiatan kepemudaan hanya terbatas dalam lapangan olah raga dan kesenian. Dalam lapangan olah raga misalnya kegiatan olah raga bola kaki. Dalam lapangan kesenian misalnya kegiatan kesenian musik bambu dan seni suara (Sang Koor).

Organisasi kepemudaan dan kepanduan di daerah Bolaang Mongondow tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan organisasi politik di sana, yang dalam hal ini PSI lah yang memegang peranan penting. Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, SI turut memperjuangkan pendidikan anak-anak di Bolaang Mongondow, mengimbangi kegiatan-kegiatan Zending dan kemudian pemerintah. Selain menyelenggarakan pendidikan, PSI juga berusaha membina para pemuda khususnya melalui organisasi kepanduan yang dinamakan SIAP. Di tingkat nasional, SIAP singkatan dari Serikat Islam Afdeling Pandu¹⁷⁰⁾ sedangkan di daerah Bolaang Mongondow terkenal dengan singkatan Serikat Islam Angkatan Pandu.¹⁷¹⁾

Sebagai pimpinan Pandu SIAP ialah Ibrahim Tungkagi dibantu oleh Musa Dolot, Husen Imban, Hadjir Imban, sebagai pembina ialah Makmur Lubis, pimpinan cabang PSI Minahasa.¹⁷²⁾

Untuk pembinaan pemuda pada umumnya, PSI cabang Bolaang Mongondow membinanya melalui seksi yang disebut Majelis Onder Departemen Pergerakan Pemuda. Ketua Majelis

170) A.K. Pringgodigdo SH, op.cit., hal. 103.

171) Wawancara dengan Husen Raupu, 24-9-1978, serta Samin Imban, 25-9-1978.

172) Wawancara dengan Samin Imban, 25-9-1978.

tersebut ialah Ligawa Imam, Wakil Ketua Kinompol Imban dan Sekertaris Abdul Razak Mamonto. Pimpinan Majelis ini aktif mengadakan pembinaan politik bagi para pemuda PSI dan berusaha menanamkan semangat nasionalisme menentang penjajahan. Rupanya kegiatan mereka dianggap berbahaya oleh Belanda sehingga dalam setiap pertemuan, selalu diamat-amati oleh polisi. 173)

8. Pers

Sejarah perkembangan pers di daerah Sulawesi Utara tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan revolusi industri di Eropa abad 17/18 terutama dengan ditemuinya mesin cetak. Dengan demikian maka perkembangan pers di wilayah ini akan dibicarakan sejalan dengan masuknya mesin cetak serta diterbitkannya sejumlah surat kabar dan majalah.

Percetakan yang pertama masuk adalah percetakan milik Zending (NZG) dibawa oleh Pendeta Adam Mattern pada tahun 1835 yang ditetapkan di Amurang, lalu pindah ke Tomohon untuk mencetak buku-buku agama Kristen dalam bahasa daerah Tomtemboan dan Tombulu. Yang kedua masuk tahun 1869 dan ditempatkan di Tanawangko. Mula-mula dipimpin oleh N. Bettink kemudian oleh A. de Lange. Percetakan ini juga milik Zending untuk mencetak buku-buku bacaan sekolah dasar dalam bahasa Tomtemboan, buku-buku Agama termasuk majalah bulanan Tjahaja Sijang mulai 1868/1869. Tahun 1880 percetakan ini pindah ke Manado dipimpin oleh C.van de Roest sampai tahun 1916. Percetakan ini kemudian dibeli oleh Liem Oei Tiong lalu disempurnakannya dengan snelpres pakai motor, dan bekerja terus hingga tahun 1944.

Tahun 1900 K.D. Que mendatangkan sebuah mesin cetak dan mendirikan perusahaan percetakan Manadosche Drukkerij Sekitar tahun 1925 dibeli oleh Oei Pek Jong dan namanya dirobah menjadi Drukkerij Tionghoa. Kemudian pada tahun 1955 dibeli oleh PT. Crescendo (Wijdemuler). Tahun 1923 berdirilah percetakan Liem di mana pada tahun 1956 dibeli oleh PT Djantra yang dipimpin oleh G.E. Dauhan yang merobah nama percetakan dengan nama Djantra. NV Lie Boen Jat & Co mendatangkan sebuah mesin cetak tenaga listrik yang bekerja sampai tahun 1944. Pada tahun 1930 sebuah perusahaan bernama NV Fikiran

173) Wawancara dengan Samin Imban, 25-9-1978.

Wijdemuler mendirikan usaha percetakan yang bekerja sampai saat pecahnya Perang Dunia Kedua. Untuk mencetak harian Matahari Terbit maka Jepang mendatangkan mesin cetak Rotary-pers yang dihancurkan oleh pemboman Sekutu atas kota Manado. Selesai perang Dunia kedua, Pemerintah Indonesia mendirikan Percetakan Negara dengan mesin lynotype dan lain-lain. Dalam tahun 1957 telah ada delapan buah mesin intertype, tetapi di waktu pergolakan Permesta, mesin-mesin ini turut diungsikan ke pedalaman Minahasa dan akhirnya rusak semuanya. ¹⁷⁴⁾

Dengan adanya mesin-mesin cetak yang masuk maka dapat dikatakan bahwa mulailah kegiatan cetak mencetak pada umumnya dan kegiatan pers pada khususnya di daerah Sulawesi Utara. Gagasan untuk menerbitkan sebuah surat kabar di Minahasa timbul sekitar 1860-an dan barulah pada bulan Januari 1869 mulai diterbitkan nomor pertama. Sebelumnya yaitu pada bulan September 1868 telah diterbitkan nomor perkenalan. Surat kabar ini terbit sekali sebulan namun pada bulan berikutnya diterbitkan nomor tambahan sehingga dapat dikatakan bahwa mulai Pebruari 1869 terbit dua kali sebulan. Surat kabar ini dengan segala perkembangan baik perkembangan di dalam maupun di luar organisasi kepengurusannya, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mulai terbit 1869 sampai saatnya edisi terakhir yang terbit yaitu pada tahun 1927. ¹⁷⁵⁾

Setelah Tjahaja Sijang 1869, berturut-turut muncullah sejumlah surat kabar dan majalah yang nama-nama, para pemimpin redaksi serta jangka waktu terbitnya adalah sebagai berikut :

1. Geredja Katholik (bulanan) tahun 1906;
2. *Manado Courant* (1909-1910) oleh A.L. Waworuntu;
3. Minahasa Permataku (bulanan 1912-1913) oleh J.A. Wotikan;
4. *Pewartu Manado* (bulanan 1919) oleh A.A. Maramis;
5. *Mimbar Agama dan Umum* (1923-1934) oleh Bode dan H.M. Taulu;
6. *Pangkal Setia di Tomohon* (1923-1935) oleh J.U. Mango-

174) *Lembaga Pers & Pendapat Umum (LPPU) Cabang Manado, Sejarah Pers di Daerah Sulawesi Utara, 1977, hal. 1-2.*

175) A.B. Lapain, *Tjahaja Sijang - Surat Kabar Minahasa Yang Pertama, Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial dan Pengabdian Masyarakat 14-20 Nopember 1977, Manado, 1977, hal. 2.*

- wal, D. Lumunon, A. Pandelaki, K.E.P.C. Rumokoi;
7. *Saior Maintjat* (1923–1927) oleh Makmur Lubis, A. van Gobel dan Korompis;
 8. *Keng Hwa Poo* (mingguan 1923–1941) oleh Liem Hermanses;
 9. Utusan Minahasa (1924) oleh A. van Gobel, Korompis;
 10. Fikiran (mingguan, 1924–1930) oleh Wijdemuler;
 11. Pedoman Tani (bulanan 1925–1941) oleh Ch. Manaroinson;
 12. Suara Pikat (bulanan 1925–1942) oleh Ny. Loing Kalangi, Nn. Waworuntu, Ny. Pelengkahu, Ny. Wenas, Ny. Winter-Denga, Nn. Sumolang, Ny. Moningka-Singal;
 13. Indonesia (bulanan 1926) oleh L.H. Motulo;
 14. Selebes (majalah pendidikan 1926–1927) oleh Lesar dan Frederik;
 15. Madjelis Umum (1928) oleh L.H. Motulo;
 16. Bintang Minahasa (bulanan 1928–1930) oleh H.M. Taulu, A.B. Najoan;
 17. *Maupu Upusan* (majalah suara wanita 1928–1933) oleh Ny. Loing-Kalangi;
 18. Mimbar Dunia (1928) oleh G.E. Dauhan, Makmur Lubis, Ch. Sumesey;
 19. *Omhoog* (majalah pemuda berbahasa Belanda 1928–1941) oleh E. Katoppo;
 20. Sopan (majalah pendidikan dan umum 1929) oleh B. Warouw;
 21. Suara Kaum (1929) oleh Max Linuh dan G.E. Dauhan;
 22. *Pewartar Manado* (mingguan umum 1929–1933) oleh Yoan Yang;
 23. *Vini Vidi Vici* (majalah suara guru 1930) oleh Tangau;
 24. *Pertimbangan* (mingguan 1930–1938) oleh Mr. Isqack dan A. Durant;
 25. *Pembela Kaum* (1931) oleh G.E. Dauhan, Max Linuh;
 26. *Aldibra* (1933–1935) oleh D. Pantouw, Ch. Salainti dan M. Lubis;
 27. *Menara* (mingguan umum 1934–1941) oleh Dr. Ratulangi, Ch. Pantouw;
 28. *Samerot* (1935) oleh R.R. Paath dan W. Kandou;
 29. *Berita Geredja* (1935–1955) oleh Synode GMIM;
 30. *Waraney* (majalah umum 1936) oleh C.R. Pantouw;
 31. *Suluh Penghidupan* (1937–1940) oleh J.S. Dotulong;

32. *Pewarta Umum* (1937) oleh S.T. Kojongian, di Langowan;
33. *Alhambra* (1937–1939) oleh Makmur Lubis;
34. *Taman Ibu* (majalah suara Kaum Ibu Kristen Minahasa – 1937–1941) oleh Ny. Wenas, Ny. Miningka dan lainnya ;
35. *Weekblad Manguni* (mingguan 1939–1941) oleh Dr. Ch. Singal;
36. *Utusan* (bulanan 1940–1941) oleh W. Kandou;
37. *Sinar Baru* (1941–1956) oleh Henk Lumanauw, Jan Torar;
38. *Matahari Terbit* (harian 1942–1943) oleh Suara Pemerintah Djepang;
39. *Pelita* (harian 1945–1949) di Tomohon oleh Kantor Penerangan NIT, J.E. Sondakh;
40. *Persatuan* (mingguan 1946–1951) oleh C.F. Pua, H.M. Taulu;
41. *Menara* (harian 1946–1954) oleh G.E. Dauhan, J. Sariowan, A. Madjid, J.I. Permata;
42. *Singa Minahasa* (majalah Suara Twapro 1946–1949) oleh J. Mawikere;
43. *Pemakat* (mingguan 1946–1958) oleh Ch. Dimpudus;
44. *Rangkaian Pemuda* (majalah Katolik 1946–1958) oleh Ny. Qoman;
45. *Gerakan* (bulanan 1947–1958) oleh D.A. Kumenit, F.J. Gerungan, A.B.H. Waworuntu;
46. *Guru* (majalah pendidikan 1948) oleh A. Matulandi;
47. *Suara Minahasa* (mingguan KKM 1948–1949) oleh H.A. Saerang;
48. *Dasar* (mingguan 1950) oleh H. Pantouw;
49. *Pantja Sila* (harian 1950–1951) oleh G.A. Muntu;
50. *Pikiran Rakjat* (harian 1950–1958) oleh Wolter Saerang, C.P. Hermanses, S. Goni, J. Tairas, S.E. Panggey;
51. *Sikap Rakjat* (mingguan 1952-1953) oleh J. Sariowan;
52. *Pelopor* (mingguan 1953–1958) oleh W. A. Umboh;
53. *Teratai Mekar* (bulanan budaya 1953–1954) oleh H. Mamoto dan H.M. Taulu;
54. *Gaja Pergolakan* (mingguan 1954–1958) oleh J. Malonda;
55. *Budaja* (bulanan 1955) oleh F. Tumbel;
56. *Gelora Maesa* (1955–1958) oleh Utu Sondey;
57. *Sibuk* (majalah suara buruh 1955–1958) oleh F.Th. Kambey;
58. *Suara Revolusi* (mingguan 1956–1958) oleh H.L. Lumanauw dan Jan Torar;

59. Sadar (harian 1958) oleh Bakri Husain, Max Maramis;
60. Warta Amurang (mingguan 1958) di Amurang oleh A.Ch. A. Rondonuwu. ¹⁷⁶⁾

Selain yang dikemukakan oleh LPPU di atas masih ada lagi beberapa penerbitan lainnya. Antara lain yang diterbitkan oleh *Inlandsch Leeraarsbond* di Manado sekitar tahun 1918 yang bernama Suara Pemimpin. Juga bulanan Lontjeng Geredja sebagai suara KGPM sekitar tahun 1935 dengan pemimpin redaksi A.H.S. Lengkong di Kawangkoan Minahasa, yang dicetak oleh Handelsdrukkerij Tiong Hoa Manado. Dalam nomornya yang keempat Tahun I Oktober 1935 dicantumkan harga langganannya f.0,10 per eksemplar dan f.1,20 per tahun, serta tarip iklan f.0,50 per mm kolom sekali muat. Yang paling menonjol yang dibuat ialah Hoofdbestuur KGPM yang terdiri dari Ketua B.W. Lopian, Wakil Ketua B. Warouw, Sekertaris A. Kandou dilengkapi dengan 10 anggota yaitu : E. Sumampouw, J.L. Tambajong, P.A. Ratulangie, A.E. Tumbel, Z. Talumepa, H. Sinaulan, N.B. Pandean, N. Anes, J.F. Tanod dan H. Dengah.

Khusus tentang luasnya peredaran semua majalah dan surat kabar sebelum pendudukan Jepang dapat dikatakan kurang sekali datanya. Hanya tercatat bahwa surat kabar Tjahaja Sijang memiliki langganan di Kotamobagu, bersama sama surat kabar Pikiran rakjat, keduanya dari Minahasa/Manado. Selain itu ada pula orang di Bolaang Mongondow yang berlangganan majalah/surat kabar yang terbit di pulau Jawa misalnya Fadjar Asia, Mustika, Persatuan, Pertanian dan sebagainya. ¹⁷⁷⁾

9. Koperasi

Di tingkat nasional, gerakan koperasi dimulai pada tahun 1896 di saat lahirnya *Hulp en Spaarbank* di Purwokerto, yaitu suatu usaha untuk melepaskan para pegawai dari cengkraman rentenir. Koperasi ini kemudian memperluas usahanya selain para pegawai juga menolong kaum petani sehingga namanya diubah menjadi Poerwokertosche *Hulp, Spaar en Landbouwcrediet Bank*, yang meluas di tahun 1898 ke 250 desa di sana. Koperasi di awal abad ke-20 diperkenalkan oleh Budi Utomo dalam ben-

¹⁷⁶⁾ Lembaga Pers dan Pendapat Umum (LPPU) Cabang Manado, *op.cit.*, hal. 3 - 6.

¹⁷⁷⁾ Wawancara dengan Husen Raupu 24-9-1978 dan Samin Imban 25-9-1978.

tuk koperasi rumah tangga untuk menyediakan barang-barang konsumsi (koperasi – konsumen). Serikat Dagang Islam memperkenalkan jenis koperasi produsen/ pengusaha. *Indonesische Studieclub* Surabaya pimpinan Sutomo tahun 1927 mulai menggiatkan usaha-usaha koperasi untuk memajukan sarana ekonomi rakyat. PNI di tahun 1929 mengadakan Kongres Koperasi di Jakarta. Tahun 1932 PBI menerima usul untuk mendirikan rukun tani. Sampai tahun 1932 itu, tercatat 1540 koperasi yang belum memiliki badan hukum dan 172 yang sudah. ¹⁷⁸⁾

Mengenai perundang-undangan tentang koperasi di Indonesia secara kronologis. Tahun 1915 lahirlah perundang-undangan koperasi pertama yang disebut *Verordening op de Cooperatieve Vereniging* tanggal 7 April 1915 (*Staatsblad* tahun 1915 No. 431). Kemudian *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigen* (*Staatsblad* 1927 No. 91). *Algemene Regeling op de Co-operatieve Verenigen Ordonnantie* 11 Maret 1933 (*Staatsblad* 1933 No. 108). *Regeling Co-operatieve Vereniging* 7 Juli 1949 (*Staatsblad* 1949 No. 179). Kemudian keluarlah peraturan perundang-undangan Pemerintah RI dimulai dengan UU No. 79, tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian. Terakhir yaitu UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Hari Koperasi di Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 12 Juli merupakan keputusan Kongres Koperasi Indonesia yang pertama yang diadakan di Tasikmalaya 11–15 Juli 1947. ¹⁷⁹⁾

Departemen-departemen dan kementerian-kementerian yang membina gerakan koperasi sejak zaman penjajahan Belanda sampai dalam alam Republik Indonesia berturut-turut ialah :

- a. *Departement van Binnenlands Bestuur* (Departemen Dalam Negeri);
- b. *Departement van Landbouw, en Binnenlandse Handel* (Departemen Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan Dalam Negeri);
- c. *Departement Economische Zaken* (Departemen Perekono-

178) Wahyu Sukotjo, Sejarah Perkembangan Permasalahan dan Peranan Koperasi” dalam majalah *Prisma* No. 6 tahun VII, Jakarta, Juli 1978 hal. 31 – 32.

179) *Ibid.*, hal. 33.

- mian);
- d. Kementerian Kemakmuran (mulai zaman RI);
 - e. Kementerian Perekonomian;
 - f. Kementerian Perdagangan;
 - g. Departemen Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa;
 - h. Kementerian Perdagangan;
 - i. Departemen Dalam Negeri;
 - j. Departemen Transmigrasi dan Koperasi;
 - k. Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi;
 - l. Departemen Perdagangan dan Koperasi.

Di daerah Sulawesi Utara khususnya di Minahasa, gerakan koperasi dianggap mulai tahun 1914 pada saat mana Hukum Besar Tonsea Wenas mendirikan *Voksbank Tonsea*. Badan usaha ini didirikan dengan maksud untuk melepaskan para pedagang kecil Indonesia dari cengkeraman kaum tengkulak terutama orang-orang Cina.¹⁸⁰⁾ Meskipun memakai nama Bank Rakyat Tonsea tetapi pada permulaannya jelas ia berdasarkan asas self-help yaitu asas koperasi yang sejati sebagaimana diperkenalkan di kota Rochdale Inggris tahun 1844. Walaupun dikemudian hari Bank Rakyat Tonsea benar-benar dapat dikatakan murni lembaga perbankan, namun motivasi pendiriannya bercirikan asas-asas koperasi tersebut di atas. Demikian jugalah halnya dengan Bank Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan di Sonder yang bubar tahun 1945 akibat perubahan mata uang.

Mulai saat itu bermunculanlah koperasi-koperasi di seluruh Minahasa yaitu di hampir semua desa dengan berbagai jenis usaha, nama dan tipenya. Antara lain disebutkan Koperasi Makadoodan di Talawaan. Samagenang di Tatelu dan Sawangan, Merur di Kaima dan Tanggari, Maema-emanan di Batu Likupang, Setia di Paslaten, Muung di Leilem dan Tomohon, termasuk pula yang didirikan di Ta Pete, Kamasi, Kayawu, Sarongsong, Pineleng, Wailan dan sebagainya.¹⁸¹⁾

Mengenai perkembangan gerakan koperasi di Minahasa dapat dikemukakan sebagai gambaran ialah koperasi yang didirikan di desa Paslaten Tomohon tahun 1926. Koperasi itu dina-

180) H.M. Taulu, *Sedjarah Minahasa*, Badan Penerbit dan Penjian Buku Membangun, Tomohon, 1950, hal. 65.

181) *Ibid.*, hal. 65, 66.

makan Perserikatan Koperasi Bank Bumiputera Paslaten disingkat KOBAR. Diketengahkan sebagai gambaran karena koperasi KOBAR ini satu-satunya koperasi yang didirikan zaman Belanda yang tidak pernah bubar sampai sekarang ini yang karenanya diberikan tanda penghargaan oleh pemerintah.

Koperasi KOBAR ketika didirikan tahun 1926, dipimpin oleh Thomas Tuerah (Guru Gubernemen Kelas II), Daniel Ngantung (Kepala Desa/Hukum Tua Paslaten) dan Lambert Pange-manan (Jurutulis Negeri Paslaten). Anggota pertamanya berjumlah 123 orang khusus untuk warga desa itu. Ketika terbentuk koperasi ini tidak memiliki modal sama sekali, karena para anggotanya belum memiliki kemampuan untuk menyetorkan uang alasan sebagai modal. Untuk mengumpulkan modal, para anggota menyelenggarakan aksi-aksi amal. Uang yang terkumpul terlalu sedikit untuk memulainya usaha mereka sehingga diambil keputusan untuk memperbungakannya dahulu. Setelah tiga tahun diperbungakan maka pada tahun 1929 dibagikan kepada para anggota, masing-masing berhak sebanyak f.10,- Uang itu langsung disetor ke kas koperasi sebagai modalnya yang pertama yaitu kira-kira f.1.230,- Mereka memilih usaha simpan pinjam sebagai bidang usaha koperasi itu; yang meminjam dikenakan bunga 5% sedangkan simpanan anggota sebesar 2%.¹⁸²⁾

Dalam perkembangan selanjutnya, koperasi ini mengalami perubahan nama. Hal ini karena sesuai *Regeling Cooperatieve Vereniging Ordonnantie* 7 Juli 1949 (*Staatsblad* 1949 No. 179) maka koperasi tidak boleh menggunakan istilah bank lagi. Mulai pada saat itu maka namanya ialah Koperasi Simpan Pinjam KOBAR. Walaupun nama KOBAR masih mengandung istilah bank, namun mereka tidak bermaksud menghilangkan begitu saja karena singkatan itu mengandung nilai kesejarahan.

Selama koperasi ini didirikan, telah tiga kali memperoleh/mengalami perubahan sebagai badan hukum sesuai Akte tahun 1929 No. 32/30/8/29, tahun 1960 No. 32a/18/3/60 dan tahun 1967 No. 32a/12/67 dari pemerintah. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KOBAR Paslaten Tomohon yang sekarang ini terdiri dari Ketua H.P. Wowiling, Sekertaris L. Poluan, Bendahara A.M. Kalesaran dan Anggota-anggota E. Wowiling dan Ngantung Kaunang. Jumlah anggota sebanyak 350 orang dengan kekayaan

182) Wawancara dengan L. Poluan, 25-9-1978.

Koperasi sekitar 27 Juta Rupiah. ¹⁸³⁾

D. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914–1918) DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD

(1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda

Jumlah *Afdeeling* dalam wilayah Keresidenan Manado ini di akhir abad 19 berjumlah 10 buah. Sulawesi Utara terdiri dari dua *Afdeeling* dan lima *Onderafdeeling* yaitu *Afdeeling* Manado dan Gorontalo serta *Onderafdeeling* Manado, Tondano, Amurang, Bolaang Mongondow dan Sangir Talaud. Suatu *Afdeeling* dikepalai oleh seorang Asisten Residen sedangkan *Onderafdeeling* dikepalai oleh seorang Kontrolur. ¹⁸⁴⁾

Sementara itu Perang Dunia I pecah di Eropah ketika Pangeran Franz Ferdinand selaku pewaris takhta Austria–Hongaria dibunuh orang pada tanggal 28 Juni 1914 di Serajevo. Jerman dan sekutu-sekutunya memulakan perang melawan Perancis. Kerajaan Belanda bersikap netral dalam perang yang mulai berkecamuk itu, dan dengan demikian berhasil mengambil keuntungan-keuntungan ekonomis terutama dari hasil-hasil yang didatangkannya dari Indonesia. Hal ini semakin mendorong kaum kapitalis Belanda untuk menanamkan modal memperluas usahanya di Indonesia yang pada gilirannya semakin memelaratkan rakyat di daerah-daerah. ¹⁸⁵⁾ Untuk menghindarkan meluasnya kekecewaan di kalangan rakyat di daerah Sulawesi Utara maka pemerintah kolonial menjalankan beberapa kebijaksanaan tertentu.

Di daerah Sangir Talaud pada masa ini pemerintah pada umumnya banyak mendekati rakyat dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan seperti penertiban distrik/kjoguguan di Talaud, penyelesaian sengketa atas pulau Miangas, pembukaan sekolah-sekolah yang berbahasa Melayu dan Belanda dan sebagainya, yang kesemuanya menunjukkan adanya perubahan sikap pemerintah untuk mengambil hati rakyat. ¹⁸⁶⁾

Demikian pula dengan tindakan pemerintah kolonial atas kerajaan Siau pada masa pemerintahn Raja A.J.K. Bogar (1913–1918). Ia dijanji bahwa akan diangkat jadi Sultan, apabila usaha

183) Wawancara dengan L. Poluan, 25–9–1978.

184) Dr. M. Broer, *op cit.*, hal. 59, 65.

185) Muhammad Dimiyati, *Sedjarah Perdjjuangan Indonesia*, Widjaja, Djakarta, 1951, hal. 17.

186) Rekaman wawancara dengan H.E. Yuda, 5–10–1978.

Belanda untuk menyatukan kepulauan Sangir Talaud dalam satu kendali pemerintahan rakyat yang berwibawa. Ternyata berhasil, tambahan pula mengingat bahwa ketiga saudara perempuan Raja sudah jadi Boki dari tiga raja lainnya di pulau Sangir Besar. Dengan janji seperti itu maka pada tahun 1915 Raja bersedia menandatangani *Korte Verklaring* dengan pemerintah kolonial yang diwakili oleh *Regeeringscommissaris van Lith*. Atas dasar kontrak itu maka Kerajaan Siau mendapat subsidi dari pemerintah kolonial untuk memperindah kota Ulu Siau. Sekolah-sekolah diperbanyak yang mengakibatkan kemajuan di segala bidang kehidupan. Begitu pula Raja diperkenankan pemerintah kolonial untuk menghidupkan kembali pasukan Angkatan Darat (kerajaan Siau) yaitu Kompania, Upase, dan Alabadi yang sudah lama tidak terpelihara lagi.

Maksud pemerintah apabila Perang Dunia I itu meluas, maka pasukan-pasukan tersebut sewaktu-waktu dapat dipergunakan bagi pertahanan seperlunya. Juga ada beberapa kora-kora milik kerajaan yang diizinkan mengibarkan Panji Kerajaan Siau, suatu pertanda bagaimana langkah-langkah kebijaksanaan politik Belanda pada waktu itu. Mereka memperlunak sedikit praktek-praktek kolonialismenya dengan memberi angin baru kepada raja-raja yang nampaknya setia.

Di lain pihak memang semasa pemerintahan Raja A.J.K. Bogar, agak terlihat adanya gejala-gejala untuk menghidupkan kembali sistem pengendalian pemerintahan yang pernah berlaku zaman dahulu. Terlebih-lebih sesudah ditandatanganinya *Korte Verklaring*, di mana menurut tafsiran Raja, maka kedudukannya dengan kedudukan Raja Belanda adalah sejajar bersahabat, sehingga dengan demikian maka atribut-atribut kebesaran kerajaan harus dipelihara dan dikembangkan lagi. Demikian pula pembawaan pribadi Raja Bogar yang menimbulkan keseganan terhadap aparat pemerintah kolonial karena ia tahu menempatkan diri dengan penuh keagungan di hadapan rakyatnya.

Tentang sikap pembawaan raja ini laporannya sampai juga ke Bogor tempat kediaman Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum. Oleh karena itu dalam rencana perjalanan dari Gubernur Jenderal itu ke Indonesia bagian Timur tahun 1918, ia merasa perlu untuk mengunjungi Siau agar dapat bertemu dengan Raja A.J.K. Bogar. Sayang sekali pertemuan itu tidak pernah terlaksana berhubung semasih Gubernur Jenderal dalam

perjalanan, Raja menderita sakit terserang influenza menyebabkan ia mangkat di bulan Oktober 1918. Meskipun demikian, perjalanan itu dilanjutkan juga sesuai rencana yang sudah ditetapkan terlebih dahulu walaupun tidak mungkin dapat bertemu muka dengan Raja Bogar lagi. Dengan demikian maka pelantikan raja Siau A.J.K. Bogar menjadi Sultan, tidak dapat dilaksanakan.

2. Anggota Volksraad yang mewakili Daerah

Sejak didirikannya Volksraad tahun 1918, ada beberapa anggotanya yang berasal dari Sulawesi Utara. Dari Minahasa antara lain A.L. Waworuntu. Ia adalah lulusan dari *Hoofden School* Tondano sebelum akhir abad ke-19 dan pernah diangkat sebagai Hukum Besar (Kepala Distrik) Sonder. Tahun 1900 pernah pertama kalinya mengemukakan pendapat mengenai perlunya dipikirkan suatu bentuk pemerintahan sendiri untuk Minahasa yang lepas dari Belanda. Sebelum itu yaitu semasih menjabat Hukum Besar, ia mengadakan kritik terbuka ke alamat pemerintah kolonial tentang politik kolonial yang sangat membebankan beban rakyat.

Pernyataan tidak setuju terhadap politik kolonial itu disokong oleh beberapa Kepala Distrik lainnya, yang mereka teruskan sampai ke Parlemen Belanda. Ada seorang anggota Parlemen itu yang datang ke Minahasa untuk melihat dari dekat masalah yang sebenarnya. Oleh rakyat bekas Kepala Distrik itu dikenal sebagai Mayor Bintang. Di antara Hukum Besar yang menyokong pendapat-pendapatnya antara lain adiknya sendiri yang menjabat Hukum Belas Sonder dan Mayor E.A. Gerungan yang menjabat Hukum Besar Tondano - Touliang. Ketika *Volksraad* dibentuk, ia diangkat menjadi anggota Minahasa yang pertama.

Setelah A.L. Waworuntu berturut-turut ada beberapa Wakil rakyat Minahasa yang duduk di *Volksraad*. Petrus Mandagi seorang lulusan dari *Hoofden School* Tondano. Jabatan terakhir sebelum jadi anggota ialah Kepala Distrik (Hukum Besar) Manado Bantik dengan gelar Mayor. Mogot juga lulusan dari *Hoofden School* dengan jabatan terakhir sebagai Hukum Besar Rataan dengan gelar Mayor. B.W. Lopian asal dari Kawangkoan berpendidikan HIS. Mulai terjun ke politik tahun 1926 dan pernah duduk sebagai anggota *Minahasaraad* sebelum ia jadi anggota *Volksraad*. Ia adalah tokoh pejuang peristiwa patriotik 14 Pe-

bruari 1946 di Manado dalam mana ia ditunjuk sebagai Kepala Pemerintahan Sipil Sulawesi Utara. Pada tahun 1952 selaku pejabat Gubernur Sulawesi. Bertahun-tahun lamanya menjabat sebagai Ketua Umum Pucuk Pimpinan dari KGPM sebagai gereja nasional yang pertama yang didirikan mulai tahun 1933 di Manado.

Antara tahun 1927-1937 DR. G.S.S.J. Ratulangi diangkat sebagai anggota Volksraad mewakili organisasi politik persatuan Minahasa. Lahir di Tondano 5 Nopember 1890 dan meninggal dunia 30 Juni 1949 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan kembali di Tondano tahun 1950. Berpendidikan *Europesche Lagere School* dan *Hoofden School* di Tondano, *Königin Wilhelmina School* (KWS) di Jakarta, ijazah Guru dan ijazah *Middelbaar Wiskunde en Paedagogiek* di Amsterdam, kuliah di Universitas Amsterdam dan Swiss. Tahun 1919 mencapai gelar Doktor Ilmu Alam dan Ilmu Pasti di Universitas Zurich Swiss.

Kegiatan politiknya antara lain:

- a. Ketua *Indische Vereniging* 1914-1915 di Nederland;
- b. Ketua *Assocation d'Etudiants Asiatiques* di Zurich;
- c. Ketua organisasi Persatuan Minahasa;
- d. Ketua *Vereniging van Indonesische Academicie* (VIA);
- e. Sekertaris *Minahasaraad* 1924-1928;
- f. Anggota Dewan Rakyat 1927-1937;
- g. Anggota mingguan politik Peninjauan 1934;
- h. Anggota Pengurus GAPI 1939;
- i. Penanggung-jawab majalah politik *Nationale Commentaren* 1938-1942;
- j. Pendiri dan Ketua organisasi Sumber Darah Rakyat (SUDARA) suatu organisasi nasionalis di Ujungpandang masa Jepang;
- k. Gubernur Sulawesi yang pertama 1945-1949;
- l. Penasihat delegasi Republik Indonesia ke meja perundingan dengan Belanda.

Kegiatan lainnya di luar kegiatan politik:

- a. Guru sekolah teknik menengah di Yogyakarta 1919-1922;
- b. Direktur Maskapai Asuransi INDONESIA Bandung 1922-1924;
- c. Ketua *Vereniging van Onder Officieren bij de KPM*;
- d. Ketua *Studiebeurs Minahasa*;
- e. Pengurus Persatuan Radio Ketimuran 1939;

- f. Perserikatan Penanaman Kelapa Indonesia 1939;
- g. Mendirikan organisasi Ibunda di Yapen Irian Jaya;
- h. Turut menyumbangkan buah pikirannya untuk memperjuangkan berdirinya KGPM 1933;
- i. Bersama empat pemimpin Islam yaitu (R.A.A. Djajadiningrat, H. Agus Salim, H.M. Sudja, dan R. Muljadi Djojomartono) turut memperjuangkan kepentingan umat Islam khususnya dalam hal penyelenggaraan perjalanan haji ke Saudi Arabia 1923.

Atas jasa-jasanya dalam perjuangan baik sebelum maupun dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, oleh Pemerintah diberikan penghargaan berupa:

- a. Bintang Gerilya tahun 1958;
- b. Bintang Mahaputra Tingkat II tahun 1960;
- c. Bintang Satya Lencana tahun 1961.

Dalam uraian ini dapat pula dikemukakan tentang orang Minahasa yang pernah duduk sebagai Anggota Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*). Ia adalah L.N. Palar yang lahir tahun 1900 di Tomohon. Menempuh pendidikan di *Christelijke HIS* dan MULO di Tondano, AMS di Yogyakarta, *Technische Hoge School* di Bandung. Meneruskan pelajarannya di Nederland kemudian ia terjun di bidang politik masuk *Sociaal Democratisch Arbeiders Partij* lalu mewakili organisasi itu di *Tweede Kamer*. Antara tahun 1945-1946 mati-matian memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam perdebatan-perdebatan di PBB. Pernah diangkat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di India dan Wakil Tetap Republik Indonesia di PBB. Setelah mengajar sebagai Guru Besar di Amerika Serikat, ia kembali ke Indonesia.

Dalam hubungan dengan keanggotaan *Volksraad*, dari daerah Sangir Talaud ada juga yang pernah menjadi anggota *Volksraad* yaitu Raja Christian Ponto dari Kerajaan Kendahe-Tahuna antara tahun 1919-1928. Ia adalah anak Raja R.S. Ponto dari Kerajaan Tahuna sebelum kerajaan itu dipersatukan dengan Kerajaan Kendahe tahun 1893. Ia dinobatkan tahun 1917. Tahun 1928 diasingkan ke Luwuk (Sulawesi Tengah) dan kembali ke Sangir Talaud tahun 1933. Akibat kekejaman pemerintah Jepang, beliau wafat tanggal 19 Januari 1945 sesudah mengalami penahanan oleh *Kempetai* sejak triwulan II tahun 1944. Jenazahnya dimakamkan di Bungalawang (Tahuna) di tempat mana juga dimakamkan raja-

raja dan orang-orang terkemuka lainnya yang menjadi korban keganasan pemerintah Jepang.

Tokoh masyarakat Bolaang Mongondow yang pernah menjadi anggota di Volksraad ialah A.P. Mokoginta yang diangkat tahun 1927. Ia memulainya karir ke pamongprajaan tahun 1901, ketika diangkat sebagai Kepala Distrik (Penghulu) Bolaang dan merangkap sebagai Kepala Kantor Kerajaan Bolaang Mongondow. Kemudian ia belajar di sekolah pertanian di Bogor, kembali sekitar tahun 1908/1909 dan diangkat menjadi Mantri Cultures. Mulai tahun 1909 diangkat sebagai Jogugu menggantikan P.A. Sugeha. Duduk sebagai anggota Panitia Pembangunan Kotamobagu untuk mendirikan ibukota *Onderafdeeling* 1909-1911. Antara tahun 1926-1927 dikirim ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan di *Bestuurschool*. Tidak kembali lagi ke Bolaang Mongondow dan mulai tahun 1927 diangkat sebagai anggota *Volksraad*. Anak dari A.P. Mokoginta, adalah Letnan Jenderal TNI A.J. Mokoginta yang pernah menjabat PANGKOWILHAN I Sumatera. Seorang putra lainnya yaitu Bua Lena Mokoginta kawin dengan Jenderal Polisi R.M.S. Soekanto yang pernah menjabat sebagai anggota DPA.

3. Dewan-dewan (Raad) yang berdiri di Daerah

Di daerah Sulawesi Utara tercatat hanya dibentuk dua dewan yaitu:

- a. *Minahasaraad* yang dibentuk sesuai *Staatsblad* tahun 1919 Nomor 64, berkedudukan di Manado;
- b. *Gemeenteraad* yaitu Dewan Kota Manado yang dibentuk dengan *Staatsblad* Tahun 1919 Nomor 205.

Keanggotaan Dewan terdiri dari:

- 1). Anggota yang diangkat oleh Gubernur Jenderal;
- 2). Anggota yang duduk karena pangkat/jabatannya, antara lain para Hukum Besar (Kepala Distrik);
- 3). Anggota yang dipilih (sesuai *Staatsblad* 1921 Nomor 158 dan Tahun 1925 Nomor 674.¹⁸⁷)

Dengan bertugas mengurus masalah-masalah lokal yang diserahkan kepadanya sebagai konsekwensi pelaksanaan politik desentralisasi yang ditugaskan kepadanya. Di Minahasa tugas-tugas Dewan antara lain menyelenggarakan peraturan-peraturan untuk me-

187) Dr. M. Brower, op.cit., halaman 88, 95.

ngelola sumber-sumber keuangan sebagai berikut:

- a. Pendirian pasanggrahan-pasanggrahan;
- b. Pasar-pasar;
- c. Penagihan pajak-pajak: pajak jalan, pajak pacuan kuda, pajak kekayaan, pajak petasan, pajak sepeda, pajak bendi, pajak meja bola, dan lain-lain.

Dari hasil pelaksanaannya, Dewan mengatur penggunaan anggaran belanja daerah untuk:

- a. Pemeliharaan dan pembuatan jalan;
- b. Pembersihan jalan dan alun-alun;
- c. Penerangan jalan negeri;
- d. Pemadam api;
- e. Pekuburan-pekuhuran;
- f. Memberi bantuan penyelenggaraan usaha-usaha pasanggrahan; dan
- g. Kesehatan rakyat desa. ¹⁸⁸⁾

Ketika dibentuk, anggota *Minahasaraad* berjumlah empat puluh satu orang di antaranya tiga puluh enam orang Indonesia, sisanya adalah orang Belanda dan Timur Asing. Pada waktu itu Minahasa dibagi dalam enam belas distrik pemilihan yaitu Manado, Bantik, Tomohon-Sarongsong, Tombariri, Tondano-Toulimambot, Tondano-Tauliang, Kakas-Remboken, Tonsea, Maumbi, Langoan, Pasan-Ratahan-Ponosakan, Sonder, Kawangkoan, Rumoong-Tombasian, Tampaso, dan Tonsawang.

Di antara mereka yang pernah jadi anggota Minahasaraad antara lain yaitu A.H.D. Supit antara tahun 1919-1938 mewakili distrik pemilihan Tondano-Toulimambot. Kemudian J.U. Mangowal antara tahun 1919-1942 yang mewakili distrik pemilihan Sonder. Untuk *Gemeenteraad* (Dewan kota Manado) anggotanya antara lain E.D. Dengah antara tahun 1933-1935.

E. PERJUANGAN DI DAERAH

1. Interaksi dengan Pemberontakan tahun 1926/1927

Di daerah Gorontalo, pada tahun 1926 hampir terlaksana

188) Prof. Mr. Ph. Kleintjes, *Wetten en verordingen betreffende de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie*, J.H. de Bussy, Amsterdam, 1927, halaman 243-246.

suatu pemberontakan rakyat. Yang memelopori pemberontakan terhadap Belanda itu ialah para tokoh Serikat Islam, yang kemungkinan dipengaruhi oleh mereka mengadakan pemberontakan di Banten antara 1926-1927.

Para pemimpin pemberontakan itu antara lain ialah Hadjuh alias Ti Ka Tju, Abudi Junus alias Ti Opo, dan Abdullah Tumu.¹⁸⁹⁾ Sebagaimana diketahui, Serikat Islam menganut asas non-koperasi, yang di daerah Gorontalo mencapai puncaknya di sekitar tahun 1926. Pada waktu itu para pemimpin mempersiapkan suatu pemberontakan rakyat terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Pemberontakan ini disiapkan di kota Gorontalo yang dikenal dengan nama Syariika.

Rupanya pemberontakan ini tercium oleh pemerintah. Dengan segera mereka mengerahkan tentara dan polisi untuk menggagalkannya. Belum sempat dilaksanakan sudah diketahui dengan tindakan penangkapan terhadap para pemimpinnya.

2. Sikap masyarakat terhadap asas non koperasi dan koperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda

Mengenai sikap masyarakat terhadap asas non koperasi dalam periode ini sudah banyak diulas di depan. Sikap rakyat dijelmakan dalam pertumbuhan yang pesat dari organisasi yang menganut asas non koperasi terutama Serikat Islam.

Tentang hal ini misalnya dapat diketengahkan sikap Masyarakat Bolaang Mongondow terutama di Molinow yang tidak mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah pemerintah maupun sekolah-sekolah Zending. Program Serikat Islam cabang Bolaang Mongondow untuk mendirikan sekolah mereka sendiri disokong dengan gigih oleh rakyat di sana. Permohonan pimpinan SI untuk mendirikan sekolah pada mulanya tidak diluluskan yang makin memperkuat ketidak simpatian mereka terhadap pemerintah kolonial. Ketika Pemerintah Pusat di Jakarta mengeluarkan izin mendirikan sekolah maka berduyun-duyunlah anak-anak mereka di sekolahkan di sekolah milik SI yang mendirikan BPPI (Balai Pendidikan dan Pengajaran Islamiyah) untuk mengelola persekolahan di sana.

Sejalan dengan sikap non koperasi maka di daerah Sangir Talaud hal itu dilakukan oleh sebuah organisasi yang tidak resmi

189) Wawancara dengan Umar Ali, 2-10-1978.

yang didirikan sebelum masuknya PNI di sana. Organisasi itu dinamakan Leter P di bawah pimpinan G.E. Dauhan dan Kawan-kawannya. Kegiatannya antara lain menentang pengaruh kebudayaan asing/Barat misalnya dansa dansi. Bilamana diadakan pesta dansa dansi maka mereka sering mengadakan aksi lempar batu. Di samping itu mereka seringkali mengadakan rapat gelap di kompleks pekuburan, maksudnya yaitu agar jangan sampai ketahuan pemerintah Belanda dan pemerintah kerajaan.

Di daerah Minahasa, jauh sebelumnya telah banyak muncul sikap-sikap yang menentang pemerintah Belanda, di abad ke 20 dikenal dengan sikap atau asas non koperasi? Misalnya dapat disebutkan sikap permusuhan rakyat di Tondano yang tidak menghendaki masuknya aparat pemerintah Belanda di sana sehingga menimbulkan pemberontakan yang disebut Perang Tondano, yang melahirkan pahlawan Korenkeng dan Sarapung, pahlawan-pahlawan yang dikagumi rakyat karena sikapnya yang tidak mau menerima masuknya penjajah Belanda begitu saja. Kemudian dapat disebutkan sikap Mayor Paul Fredrik Parengkuan yang mengagumi Tauanku Imam Bonjol karena perjuangannya melawan Belanda, mengangkatnya sebagai Raranggang ne Lotak Amian artinya Panglima Perang Wilayah Lotak Utara, ketika ia dibuang Belanda ke sana. Kemudian sikap A.L. Warorunto yang menghendaki pemerintahan sendiri bagi rakyat Minahasa, mendapat sokongan baik dari beberapa pejabat pemerintah bumiputera maupun dari rakyat Minahasa sendiri.

Di pihak lain, beberapa guru di *Kweekschool* Kuranga di Tomohon minta berhenti karena perlakuan yang tidak wajar dari pimpinan sekolah itu kepada mereka. Guru-guru tersebut mendirikan organisasi Pangkal Setia yang mengusahakan beberapa persekolahan di Minahasa. Sikap masyarakat terhadap sikap mereka yang tidak mau bekerja lagi untuk pemerintah menyatakan bentuknya dengan banyaknya anak-anak Minahasa yang disekolahkan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi tersebut. Ketika timbul gerakan untuk mengusahakan dilepaskannya urusan Gereja dari tangan pemerintah yang sudah akhir abad ke 19 menimbulkan ketidakpuasan dari orang Kristen Minahasa, maka organisasi Pangkal Setia bersama-sama rakyat dan disokong oleh beberapa tokoh politik antaranya DR. G.S.S.J. Ratulangi, turut berpartisipasi sampai tuntutan itu terwujud/terjelma yaitu dengan berdiri-

nya KGPM (yang sama sekali lepas dari campur tangan pemerintah tahun 1933) dan GMIM (mulanya masih diatur oleh pemerintah di tahun 1934).

Di daerah Bolaang Mongondow, menyatakan bentuknya dengan penolakan rakyat untuk melakukan pekerjaan rodi. Anjuran Serikat Islam kepada rakyat khususnya kepada para anggotanya untuk tidak melaksanakan rodi menyebabkan banyak anggota organisasi itu yang harus berurusan dengan pemerintah kolonial. Kewajiban rodi mengharuskan rakyat untuk bekerja tanpa upah bagi kepentingan pemerintah. Apabila tidak dapat menjalankan kewajiban itu maka dapat menebusnya dengan sejumlah uang. Namun hal-hal tertentu di mana diperlukan tenaga kerja yang banyak, tebusan uang tidak diperkenankan sehingga yang terkena rodi harus mencari orang lain yang mau menanggung tugas itu. Para anggota Serikat Islam dengan keras menolak rodi ataupun membayar urang tebusan sehingga dilakukan penangkapan-penangkapan oleh pemerintah kolonial terhadap mereka yang menolak rodi. Tapi karena anjuran itu dikeluarkan secara diam-diam oleh SI, maka pemerintah tidak punya cukup alasan untuk melarang kegiatan dari organisasi itu.

Sehubungan dengan sikap masyarakat terhadap asas non koperasi ialah kegiatan dari beberapa pemuka masyarakat di Bolaang Mongondow antara lain M.A. Sugeha dan A.C. Manoppo. Dengan teliti keduanya mengikuti penyelenggaraan pemerintahan kolonial terhadap rakyat di daerah itu. Apabila mereka melihat adanya ketidakberesan misalnya perlakuan yang tidak wajar terhadap rakyat yang menolak kewajiban rodi, mereka segera mengirimkan berita itu kepada pers. Antara lain berita-berita dikirimkan ke Minahasa/Manado untuk dimuat dalam surat kabar Pikiran Rakyat dan Cahaya Siang. A.C. Manoppo pernah dipanggil Kontrolur untuk ditawarkan jabatan dalam pemerintahan di daerah itu. Tetapi tawaran itu ditolaknya sehingga terjadi pertengkaran di ruang kerja pejabat Belanda itu.

3. Kegiatan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan lainnya

Dalam bidang perekonomian, sebuah laporan menyebutkan bahwa pada waktu itu pelabuhan Manado dan Amurang merupakan tempat-tempat yang paling ramai dikunjungi oleh kapal-kapal yang membawa masuk barang-barang dari luar. Di antara komoditi

yang dimasukkan melalui kedua pelabuhan itu antara lain: kain-kain, barang pecah belah, arak, garam, beras, bir, teh, Gula, barang-barang dari karet, semen, kapur, makanan kaleng, seng, ikan asin, kulit sepatu, korek api, pisau dan barang-barang dari logam lainnya, sabun, tepung terigu, susu, kertas dan alat tulis menulis, rokok dan sebagainya.¹⁹⁰⁾ Hal yang kurang menguntungkan bagi rakyat Sulawesi Utara pada waktu itu ialah mulainya ketergantungan kepada para pedagang Cina dan Arab yang berada di hampir semua pelosok. Untuk melepaskan rakyat dari ketergantungan itu antara lain mendirikan usaha-usaha yang bermotifkan gerakan koperasi seperti halnya didirikan oleh Hukum Besar Tonsea Mayor Wenas yang pada tahun 1914 mendirikan pula Volksbank Tonsea.¹⁹¹⁾

Pada waktu ini daerah Sangir Talaud dijuluki sebagai daerah ringgit karena hasil kelapanya yang banyak. Kopra dijual dengan harga F. 25,— sepikul yang dibeli oleh pedagang-pedagang antaranya oleh pedagang-pedagang Jepang yang mulai masuk ke sana kira-kira tahun 1919. Selain kopra, mereka juga membeli pala terutama dari pulau Siau, dan ayam yang dipasaran harganya sekitar 15 sen, dibeli orang Jepang dengan harga sampai f. 2,50 seekor. Ada juga orang Jepang mengusahakan penangkapan ikan. Dari mereka orang Sangir Talaud mengetahui teknik penangkapan ikan dengan alat sejenis panah ikan yang disebut jubi. Orang-orang Jepang yang mengusahakan penangkapan ikan di sana dipimpin oleh Fukiage.¹⁹²⁾ Selanjutnya setelah selesai perang Dunia I maka mulai timbul pasar-pasar tempat rakyat berjual beli serta warung-warung yang menjual bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Namun yang tetap memegang peranan dalam perdagangan kopra, pala, fuli, sirip ikan dan sebagainya ialah kaum pedagang asing terutama Jepang dan Cina.¹⁹³⁾

Dalam bidang perekonomian, peranan orang-orang Cina besar sekali. Mulanya mereka digunakan oleh VOC untuk melakukan pembelian beras di Sulawesi Utara (pedagang-pedagang) dan untuk membangun benteng Amsterdam di Manado (tukang-tukang), sekitar tahun 1703. Mulai saat itu ada orang-orang Cina menetap

190) Ir. V.J. van Marle, *Verslag Spoorwegonderzoek Manado*, Weltevreden 1922, hal. 67, 143.

191) H.M. Taulu, *op. cit.*, hal. 65.

192) Wawancara dengan H.E. Yuda, 5 - 10 - 1978.

193) Wawancara dengan H.E. Yuda, 5 - 10 - 1978.

tanpa melakukan dinas VOC lagi. Menurut Molsbergen pada tahun 1809 terdapat kira-kira 30 kepala keluarga Cina yang kaya di Manado. ¹⁹⁴⁾ hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Cina-lah yang sejak dahulunya memegang urat nadi perekonomian di daerah ini menyusul orang Arab, India dan Jepang. Dalam bidang-bidang lainnya sudah cukup diuraikan di depan.

1. Politik keras terhadap gerakan non-koperasi.
Alam politik pergerakan nasional Indonesia untuk menentang penjajahan Belanda memperhatikan adanya gerakan non-koperasi dan gerakan berkoperasi dengan pemerintahan kolonial. Yang dimaksudkan dengan gerakan non-koperasi ialah sikap organisasi-organisasi pergerakan yang dalam menentang politik pemerintahan kolonial tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan Belanda, sedangkan gerakan berkoperasi ialah suatu sikap dari beberapa organisasi pergerakan yang mau bekerjasama dengan pemerintahan kolonial untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi itu. Kedua sikap ini sebenarnya sudah nampak ketika pemerintahan mendirikan lembaga *Wakwat*. Organisasi yang mengangkut asas non-koperasi sama sekali tidak mau mengabdikan waklatnya untuk duduk di kan yang mengangkut asas koperasi menandatangani waklatnya duduk di *Wakwat* dengan maksud mempergunakan lembaga itu untuk kepentingan perjuangannya.
Organisasi yang mengangkut asas non-koperasi terdiri dari organisasi yang sama sekali tidak mau diwakili baik dalam *Wakwat* atau badan dalam lembaga-lembaga perwakilan di daerah-daerah serta tidak mau bekerjasama dengan pemerintah sebagai pegawai pemerintah misalnya *PSI* serta organisasi yang walaupun tidak mau diwakili di semua lembaga perwakilan namun tidak melangkah anggotanya bekerja pada pemerintah (misalnya *PSI*) dan melangkah menandatangani anggotanya untuk bekerja pada pemerintah dengan tujuan agar anggotanya itu dapat memiliki pengalaman pemerintahan (misalnya *PARINDRA*).
Kegagalan-kegagalan politik dari organisasi-organisasi yang mengangkut asas non-koperasi ini sejak semula diantisipasi oleh pemerintah kolonial. Setiap kejadian yang menumbuhkan kekecewaan di kalangan masyarakat sudah ditinjau-hubungkannya dengan organisasi-organisasi itu. Dapat dikemukakan misalnya peristiwa pemberontakan rakyat di tahun 1919 di Lottien (daerah Sulawesi Tengah). Dalam peristiwa tersebut pemerintah kolonial Belanda

194) Godee E.C. Molsbergen *op. cit.*, hal. 171.

BAB IV

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 – 1942

A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN ± 1930

1. Politik keras terhadap gerakan non-koperasi.

Alam politik pergerakan nasional Indonesia untuk menentang penjajahan Belanda memperlihatkan adanya gerakan non koperasi dan gerakan berkoperasi dengan pemerintah kolonial. Yang dimaksudkan dengan gerakan non koperasi ialah sikap organisasi-organisasi pergerakan yang karena menentang politik pemerintah kolonial tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Belanda, sedangkan gerakan berkoperasi ialah suatu sikap dari beberapa organisasi pergerakan yang mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi itu. Kedua sikap ini sebenarnya mulai nampak ketika pemerintah mendirikan lembaga *Volksraad*. Organisasi yang menganut asas non koperasi sama sekali tidak mau mengirimkan wakilnya untuk duduk sedangkan yang menganut asas koperasi mengirimkan wakilnya duduk di *Volksraad* dengan maksud mempergunakan lembaga itu untuk kepentingan perjuangan.

Organisasi yang menganut asas non koperasi terdiri dari organisasi yang sama sekali tidak mau diwakili baik dalam *Volksraad* maupun dalam lembaga-lembaga perwakilan di daerah-daerah serta tidak memperkenankan anggotanya bekerja sebagai pegawai pemerintah (misalnya PNI) serta organisasi yang walaupun tidak mau diwakili di semua lembaga perwakilan namun tidak melarang anggotanya bekerja pada pemerintah (misalnya PSII) atau malah-an menganjurkan anggotanya untuk bekerja pada pemerintah dengan tujuan agar anggotanya itu dapat memiliki pengalaman pemerintah (misalnya PARINDRA).

Kegiatan-kegiatan politik dari organisasi-organisasi yang menganut asas non koperasi itu sejak semula diamat-amati oleh pemerintah kolonial. Setiap kejadian yang menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat selalu dihubung-hubungkannya dengan organisasi-organisasi itu. Dapat dikemukakan misalnya peristiwa pemberontakan rakyat 5 Juni 1919 di Tolitoli (daerah Sulawesi Tengah). Dalam peristiwa tersebut pejabat Belanda (*Controleur*)

yang ditempatkan di daerah itu terbunuh bersama beberapa pegawai lainnya. Karena kejadian itu berlaku setelah kunjungan tokoh SI Abdul Muis ke daerah Gorontalo untuk berpropaganda, maka peristiwa tersebut dikatakan ada hubungannya dengan SI; propaganda tokoh SI Abdul Muis itu dianggap sebagai penyebab pemberontakan rakyat.¹⁹⁵ Demikian pula dengan peristiwa pemberontakan di Cimareme, Jawa Barat.

Partai Nasional Indonesia disingkat PNI didirikan oleh Ir. Sukarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Ishak, Mr. Sunarjo, Mr. Budiarto dan Dr. Samsi pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. PNI menyusun program partai di lapangan politik, ekonomi dan sosial selalu menyelenggarakan rapat-rapat umum di mana-mana yang sifatnya mengajak rakyat agar menentang pemerintah kolonial. Gubernur Jenderal dalam pidatonya di depan *Volksraad* 15 Mei 1928 memperingatkan agar PNI menahan diri di dalam ucapan maupun dalam mengadakan rapat-rapat. Karena semua peringatan tidak diindahkan, tambahan lagi terdengar desas-desus bahwa PNI akan mengadakan Pemberontakan maka akhir 1929 para pemimpinnya mulai ditangkap dan diadili. Mereka dijatuhkan hukum penjara berdasarkan pelanggaran pasal-pasal dari KUHP yang dipakai sebagai senjata ampuh untuk menindas kaum pergerakan nasional Indonesia.

Di Minahasa ada sekelompok pemuda nasionalis yang dipimpin oleh Johanis Waworuntu dan Cornelis Wentuk merencanakan suatu gerakan menentang pemerintah kolonial. Tapi karena rencana mereka diketahui oleh polisi, maka keduanya ditangkap lalu dibuang ke *Boven Digul*.¹⁹⁶)

Di daerah Gorontalo suasana politik amat hangat yaitu sekitar tahun 1930 sampai 1932 yang hampir-hampir saja menjadi pemberontakan terbuka. Hal itu terjadi ketika ada seorang tokoh PARTINDO yaitu Mr. Ishak yang datang dari Jawa untuk berpropaganda di sana. Diaturilah suatu rapat raksasa untuk mendengarkan pidato dari Ishak yang menjelaskan tentang soal *poenale sanctie*. Mengenai hal ini dijelaskannya bahwa akibat pelaksanaan *poenalesanctie* maka rakyat Indonesia menderita yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Mendengar isi pidato yang menjelek-

195) Drs. Susanto Tirtoprodjo SH, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1970, hal. 33 - 34.

196) S.U. Marunduh, *Pendaratan Jepang di Minahasa*, tesis sarjana, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978, hal. 42.

jelekkan pemerintah itu, maka Inspektur Polisi yang ditugaskan mengawasi rapat raksasa itu naik ke atas panggung memerintahkan rapat bubarkan. Dari mimbar pidato, Mr. Ishak langsung dibawanya ke rumah Asisten Residen. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan rakyat tetapi berhasil diatasi oleh panitia penyelenggara rapat tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Peristiwa berikutnya terjadi tahun 1932. Pada waktu itu diadakan rapat raksasa bertempat di halaman Mesjid Jami Gorontalo sekaligus merayakan hari Idul Adha. Ribuan massa memenuhi halaman mesjid untuk mendengarkan khotbah dan pidato-pidato. Sebagai pemimpin acara tersebut ialah Tom Alii yaitu seorang bangsawan berpengaruh di kalangan rakyat bekerjasama dengan pimpinan Muhammadiyah. Pembicara waktu itu antara lain seorang guru sekolah Muhammadiyah yang bernama M. Himam. Dalam pidatonya M. Himam menggambarkan kisah perjalanan umat Islam Indonesia yang diumpamakannya sebagai seorang yang sedang berjalan dalam sebuah hutan rimba yang penuh dengan binatang buas yang sewaktu-waktu dapat menerkam. Belum selesai M. Himam menyampaikan pidatonya, Inspektur Polisi bernama Baker yang mengawasi rapat itu memerintahkan agar Himam menghentikan pidatonya lalu turun dari atas mimbar. Perintahnya itu dilakukan dengan kasar sambil menghunus pedang dan mengayun-ayunkannya. Tindakan dari Inspektur Belanda ini sangat menyinggung hati rakyat.

Seorang ahli pencak silat bernama Hadji Jusuf Abas menyerang dan menangkap Inspektur itu. Tindakan itu dengan segera diikuti oleh massa rakyat yang menyerang *Hoofd Agent* Polisi Kooper bersama selusin pembantunya. Kepala Distrik Gorontalo R. Monoarfa dan Tom Olii dengan susah payah turun tangan melelai dan meredakan kemarahan rakyat. Sore itu juga Tom Olii menuliskan surat protes kepada Kejaksaan Agung di Jakarta mengenai tindakan Inspektur Belanda di atas. Seminggu kemudian ia dipanggil oleh Asisten Residen Gorontalo untuk menerima pemberitahuan pernyataan maaf atas nama Pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan insiden yang ditimbulkan akibat tindakan polisi. Sebagai realisasi pernyataan maaf itu maka Inspektur Baker dipindahkan ke luar daerah Gorontalo.

Di daerah lain, pemerintah kolonial tidak henti-hentinya mengawasi sepak terjang PNI Cabang IV Ulu Siau yang sudah berdiri sejak tahun 1927 di sana. Sehubungan dengan penangkapan

terhadap para tokoh PNI di seluruh Indonesia maka para tokoh itu antara lain yang ditangkap yaitu G.E. Dauhan (Gustaaf Erenst Dauhan Alias Tona alias Takaseheng), A.N. Bawengan, J.B. Dauhan (adik kandung G.E. Dauhan), F. Hermanses, A. David, G. Paparang, H.B. Elias dan lain-lain. Semua tangkapan itu dipenjarakan bahkan ada yang sampai meninggal dunia dalam penjara yaitu J.B. Dauhan. Sebab-sebab kematiannya tidak diketahui, oleh pemerintah dikatakan membunuh diri tetapi ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukannya senekad itu.¹⁹⁷⁾

Tindakan pemerintah yang sekeras itu terhadap para pemimpin PNI serta melarang kegiatannya, mengakibatkan partai itu terdesak hebat. Sebagian di antara tokoh-tokohnya pindah ke daerah lain seperti yang dilakukan oleh G.E. Dauhan, selepasnya dari penjara pergi ke Manado dan menerbitkan *Harian Perjuangan Menara* sebagai surat kabar suara nasionalis. Selain Dauhan, juga A.T. Gandaria pada tahun 1931 berangkat ke Surabaya lalu mendirikan dan memimpin "*Harian Tjatur*" yang juga berhaluan nasionalis.¹⁹⁸⁾

Di Minahasa pada tanggal 21 April 1933 diselenggarakan musyawarah pembentukan organisasi gereja yang berdiri sendiri yang lepas dari *Indische Kerk*. Musyawarah tersebut diadakan di Manado mengambil tempat di *Gomeente Bioscoop* yang sekarang ini terletak di jalan Pierre Tendean. Musyawarah itu diselenggarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang hendak membentuk Kerapatan Gereja Protestan Minahasa disingkat KPGM. Dalam musyawarah itu, para pelaksana mengundang sejumlah organisasi politik dan organisasi massa antara lain yaitu: Persatuan Minahasa, Partai Indonesia, Partai Nasional Indonesia, serta beberapa organisasi sosial seperti Pangkal Setia, *Inlandsch Leeraarsbond*, PIKAT, Mangangkungnusa dan Persatuan Pakasaan. Menurut laporan yang hadir waktu itu jumlahnya 12 organisasi. Pimpinan *Indische Kerk* diwakili oleh Ds. de Vrede.

Ketika musyawarah pembentukan organisasi KPGM itu selesai, maka para pemimpin dari semua organisasi yang menghadirinya dipanggil oleh pemerintah kolonial. Sebagaimana diketahui KPGM merupakan organisasi gereja yang memisahkan diri dari

197). H.B. Alias, op. cit., hal. 131 - 142.

198). *Ibid.*, hal. 133.

Indische Kerk yang dipandang membahayakan persatuan gereja dan serta kepemimpinan pemerintahan terhadap organisasi dan kegiatan kegerejaan di Minahasa. Atas dasar ini maka satu persatu organisasi yang menghadiri acara tersebut diperiksa termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing. Ternyata hanya satu organisasi saja yaitu Pangkal Setia yang diperbolehkan menunjang kegiatan-kegiatan KGPM sedangkan yang lainnya dilarang. Hal ini karena hanya Pangkal Setia yang jelas-jelas mencantumkan peraturan-peraturan keagamaan Kristen sedangkan yang lainnya tidak. Walaupun larangan itu formalnya menyebabkan KGPM kehilangan pendukung di bidang politik namun akhirnya tidak bisa dibubarkan begitu saja mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pangkal Setia memberikannya hak hidup. Karenanya pada masa itu KGPM dianggap sebagai anak organisasi Pangkal Setia yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan di Minahasa. ¹⁹⁹⁾

2. Undang-undang Sekolah Swasta (*Wilde Scholen Ordonnantie*)

Sejak Zending memulakan usaha-usaha pendidikan di daerah Sulawesi Utara, maka bermunculanlah sekolah-sekolah di mana-mana terbanyak di Minahasa. Di samping itu pemerintah kemudian mendirikan sejumlah sekolah, menyusul Misi Katolik serta organisasi-organisasi partikular lainnya termasuk yang diusahakan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jumlah seluruh sekolah di wilayah Keresidenan Manado khususnya sekolah swasta lebih dari 300 buah di tahun 1930-an. Menurut peraturan dalam *Wilde Scholen Ordonnantie* dan kemudian juga peraturan pengawasan yaitu *Toezichtordonnantie Particulier Onderwijs*, maka semua sekolah swasta harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu antara lain persyaratan gedung, kurikulum, tenaga guru dan sebagainya. Sekolah yang tidak dapat memenuhi semua persyaratan yang ditentukan harus ditutup.

Di daerah Sulawesi Utara sepanjang yang diketahui hanya satu sekolah yang nyaris ditutup karena terkena peraturan pemerintah kolonial di atas. Sekolah tersebut yaitu sekolah Rakyat Milik PSII yang terletak di Molinow di daerah Bolaang Mongondow. PSII Cabang Bolaang Mongondow sebelumnya telah membentuk suatu lembaga untuk mengelola persekolahan, yaitu yang

199) E.W. Parengkuan BA, *op. cit.*, hal. 28.

disebut Balai Pendidikan dan Pengajaran Islamiyah disingkat BPPI. Sekolah Rakyat yang bernaung di bawah BPPI itu disebut Sekolah Islamiyah atau sekolah BPPI. ²⁰⁰⁾

Sekolah BPPI yang pertama, didirikan di desa Molinow lalu meluas di hampir setiap desa di daerah Bolaang Mongondow. Sekolah BPPI Molinow ini dibuka mulai tahun ajaran 1926 dengan murid pertama sekitar 500 orang. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut di atas maka Kontrolur melakukan inspeksi di sekolah itu untuk mengetahui dari dekat keadaan di situ. Ia menyimpulkan bahwa sekolah itu harus ditutup berhubung gedungnya terlalu kecil untuk dapat menampung ratusan murid dalamnya. Pengurus BPPI menentang perintah Kontrolur untuk menutup sekolah itu sehingga terjadi perdebatan sengit. Akhirnya Kontrolur menarik kembali perintah tadi dengan syarat bahwa dalam waktu satu bulan sudah harus didirikan gedung yang memenuhi syarat yang disanggupi mereka. Setelah bekerja keras siang malam maka selesailah gedungnya sehingga tidak terkena peraturan pemerintah.

B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH

Wilayah Sulawesi Utara sejak permulaan abad ini ramai dikunjungi oleh kapal-kapal asing antara lain milik *Koninklijke Pakketvaart Maatschappij* (KPM), *Nederlandse Maatschappij*, *Rotterdamse Lloyd*, *Java China Japan Lijn*, *Java Pacificlijn*, *Sanyo Boyeki Kaisha*, *Yokohama Fisch Oil Compagnie*, *Nippon Boyeki Kaisha* dan lain-lain. Untuk menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian terdapat sejumlah bank yakni *De Javasche Bank*, *Nederlandsch Indische Handels Bank*, *Nederlandsch Escompto Maatschappij*, *Nederlandsch Handels Maatschappij* serta beberapa cabang bank luar negeri untuk membeli kopra dan komoditi ekspor lainnya antara lain dari Inggris, Jerman, Denmark, Berlia, Perancis, Jepang, Italia, Norwegia dan sebagainya. Selain itu terdapat beberapa balai dagang *handelschuiizen* antaranya yakni *Manadosche Handels Vereniging*, *Moluksche Handels Genootschap*, *NV W.B. Ledeboer & Co*, *NV Handels Compagnie Dirks & Co.*, *NV H. My Tokò van Essen*, *Elias & Co. Handels Compagnie* dan lain-lain Belum termasuk firma-firma yang diusahakan oleh orang-orang Cina, Arab dan Eropah. Sedangkan usaha-usaha dagang

200) Wawancara dengan Huse Raupu, 24 - 9 - 1978.

kecil-kecilan dilakukan oleh orang-orang pribumi, misalnya di Minahasa yaitu yang dilakukan oleh orang asal Sonder, Kawangkoan, Langowan, Tompaso, Tomohon, Tondano, dan sebagainya.²⁰¹⁾

Peranan orang Cina dalam bidang perdagangan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam periode ini khususnya di Manado sebagai ibukota Keresidenan, peranan mana sejalan dengan jumlah mereka yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir abad ke 19 jumlahnya 2.252 jiwa,²⁰²⁾ tahun 1905 meningkat 3.650 jiwa²⁰³⁾ dan di tahun 1939, jumlah di kota Manado saja menanjak pesat sampai 9.856 jiwa.²⁰⁴⁾

Tentang jumlah penduduk Keresidenan Manado seluruhnya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5
KEADAAN PENDUDUK MENURUT KEBANGSAAN DI
KERESIDENAN MANADO SEKITAR TAHUN 1940

D a e r a h	Jumlah			
	Eropah	Cina	Timur asing lainnya	Indonesia
Sangir Talaud	84	2.418	2.016	160.984
Bolaang Mongondow	119	835	387	80.573
Buol	4	547	169	25.738
Tolitoli	23	800	300	30.500
Donggala	30	788	552	60.354
Palu	60	600	300	67.000
Parigi	15	250	225	50.000
Poso	37	600	199	60.268
Banggai	81	1.836	421	93.627
Kolonedale	28	281	27	40.103
Minahasa	2.740	11.875	1.237	357.446
Gorontalo	220	2.400	1.100	222.000
Keresidenan Manado	3.441	33.230	6.933	1.248.593

Sumber: M. van Rhijn, op. cit, hal. 1

201) Ir. V.J. van Marle, *op. cit.*, hal. 105, 111.

202) N. Graafland, *op. cit.*, hal. 115.

203) J.E. de Meijer, *de Minahasa en Noord Celebes Indische Gids 1908*, J.H. de Bussy Amsterdam, 1909, hal. 107.

204) Dr. M. Brouwer, *op. cit.*, hal 10.

Hasil utama dalam wilayah Keresidenan Manado ialah kopra, pala, fuli, cengkeh dan kopi. Kelapa ditanam di semua daerah, pala merupakan penghasil utama di pulau Siau dan ada juga sedikit ditanam di Sangir Besar dan distrik Tonsea, cengkeh merupakan tanaman utama di Sonder dan Kombi Tondano sedangkan kopi kebanyakan ditanam di daerah bergunung-gunung di Minahasa misalnya di Minahasa Selatan, pedalaman Bolaang Mongondow dan dataran tinggi Poso. Dalam masa depresi ekonomi yang menimpa seluruh dunia, terjadi fluktuasi harga luar biasa yang sangat merugikan para petani. Walaupun pada kenyataannya para petani sangat berusaha untuk meningkatkan produksi untuk mempertahankan penghasilannya, namun harga terus bergerak turun, sehingga ongkos yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Mengenai jumlah produksi serta harga pasaran dari lima komoditi ekspor utama tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 6

**HASIL DAN HARGA LIMA KOMODITI EKSPOR UTAMA
DI KERESIDENAN MANADO ANTARA TAHUN 1937 – 1940**

Tahun/Jenis Komoditi	Hasih / Kg	Nilai / Harga (f)
Tahun 1937		
Kopra	71.900.556,	f. 8.846.967,—
Pala	1.805.282	498.643,—
Fuli	115.125	153.862,—
Cengkeh	72.877	42.921,—
Kopi	82.502	22.656,—
Tahun 1938		
Kopra	84.700.241	5.598.579,—
Pala	1.439.709	461.318,—
Fuli	72.915	96.102,—
Kopi	490.006	139.984,—
Tahun 1939		
Kopra	214.692.622	10.304.203,—
Pala	2.109.074	546.161,—
Fuli	289.489	321.087,—
Cengkeh	185.305	105.260,—

Kopi	651.303	107.849,—
Tahun 1940		
Kopra	117.857.041	6.129.304,—
Pala	1.282.641	340.239,—
Fuli	268.793	263.287,—
Cengkeh	241.480	140.296,—
Kopi	372.031	56.173,—

Sumber : diolah dari M. van Rhijn, *op. cit.*, hal. 35.

Karena kopra adalah hasil utama rakyat maka perkembangan harganya sangat memprihatinkan terutama bagi petani di seluruh wilayah Keresidenan Manado. Pembelian kopra rakyat baik oleh pemerintah maupun pedagang diberikan harga per kwintal (per 100 Kg). Hasil kopra per daerah yakni Kepulauan Sangir Talaud dibulatkan sekitar 35.000 ton, Minahasa dan Bolaang Mongondow sekitar 63.000 ton, Gorontalo hasilnya sekitar 12.000 ton, Teluk Tomini dan kepulauan Togeang sekitar 60.000 ton, Luwuk dan kepulauan Banggai 12.000 ton, Donggala dan sekitarnya 16.000 ton sedangkan Tolitoli tambah Kwandang berkisar 16.000 ton yaitu di tahun 1939. Harga kopra sangat tidak stabil; Januari 1932 harganya f.6,48 sedangkan akhir tahun itu turun sampai f.2,96 per kwintal. Pada tahun berikutnya harga Januari meningkat dibandingkan dengan harga Desember tahun sebelumnya yaitu f.5,88 tetapi akhir tahun 1933 itu turun seperti keadaan tahun lalu yakni f.2,96 per kwintal. Harga Januari 1934 lebih rendah dibandingkan dengan harga Desember sebelumnya yaitu hanya f.2,72 tapi di akhir tahun itu menunjukkan perbaikan sedikit dengan harga f.3,08 per kwintal. Tahun 1935 terlihat adanya perkembangan harga yang cukup menggembirakan walaupun belum mencapai tingkat harga Januari 1932. Harga kopra makin lama makin cerah yang mencapai puncaknya tahun 1937 di mana pada bulan Januari tercatat angka setinggi f.13,75. Tetapi harga itu dengan segera merosot lagi ke tingkat yang sangat kurang menguntungkan yaitu pada Desember 1937 tercatat setiap kwintal harganya hanya f.4,95 yang tidak pernah dapat diperbaiki lagi sampai tahun 1940 dengan harga terendah di bulan September yaitu f.1,53 saja. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7

**PERKEMBANGAN HARGA KOPRA DI KERESIDENAN
MANADO ANTARA TAHUN 1932 SAMPAI 1940
SETIAP BULAN PER KWINTAL**

BULAN	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940
Januari	6,48	5,88	2,72	3,60	6,40	13,35	4,90	3,55	3,37
Pebruari	7,56	5,60	2,48	4,72	5,24	10,70	4,30	4,42 ⁵	3,53
Maret	7,64	5,16	2,44	4,92	5,20	10,10	4,30	4,50	3,80
April	7,36	4,36	2,40	4,56	4,83	7, -	4,25	4,30	2,91
Mei	6,88	4,32	2,56	4,84	4,76	6,70	4,30	4,65	2,08
Juni	6,48	4,72	2,78	4,98	5,84	6,80	3,50	4,65	2,08
Juli	6,28	4,60	2,92	3,88	5,36	7,20	3,60	4,35	1,80
Agustus	6,72	4, -	2,64	3,84	6,20	6,25	3,77 ⁵	4, -	1,55
September	6,60	3,56	2,46	3,84	7,52	6,70	3,60	3,05	1,53
Oktober	4,68	2,80	2,88	4,16	7,52	6,25	3,10	3,70	1,65
Nopember	3, -	3, -	2,80	4,80	11,20	4,95	3,25	4,15	1,60
Desember	2,96	2,96	3,08	5,20	12, -	4,95	3,55	3,85	1,65

Sumber : M. van Rhijn, *op. cit.*, hal. 36, 37.

Lesunya perekonomian dunia mengakibatkan lesunya pula perdagangan ekspor impor di Keresidenan Manado ini termasuk perdagangan antar pulau. Angka-angka yang tercatat pada 13 pelabuhan di wilayah keresidenan ini menunjukkan hal tersebut. Dalam tiga tahun terakhir yaitu antara tahun 1938 sampai 1940, nilai barang impor dan antar pulau sangat menggelisahkan di mana tercatat di tahun 1938 bernilai hampir 39 juta gulden, tahun 1939 turun menjadi hampir 31 juta dan di tahun 1940 berkurang yaitu hanya sekitar 14 juta gulden saja. Hal ini dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 8

**NILAI BARANG IMPOR DAN ANTAR PULAU PADA
13 PELABUHAN KERESIDENAN MANADO
ANTARA 1938 - 1940**

PELABUHAN	1938	1939	1940
Manado	20.252.762,-	16.504.556,-	6.952.729,-
Amurang	2.174.721,-	1.400.246,-	810.720,-

Inobonto	660.708,—	747.749,—	12.100,—
Tagulandang	598.188,—	360.013,—	209.794,—
Ulu Siau	1.921.493,—	1.066.477,—	1.145.550,—
Taruna	1.245.834,—	1.029.495,—	421.567,—
Tamako	363.192,—	262.988,—	116.131,—
Petta	811.867,—	377.796,—	196.191,—
Gorontalo	8.110.820,—	6.636.829,—	2.137.480,—
Kwandang	162.892,—	60.005,—	30.376,—
Poso	38.133,—	9.200,—	1.600,—
Tolitoli	644.611,—	602.383,—	219.479,—
Donggala dan Palu	1.953.886,—	1.786.229,—	1.495.793,—
J U M L A H	38.939.101,—	30.843.371,—	14.063.210,—

Sumber : M. van Rhijn, op. cit., hal. 44, 45.

Sekarang ini pelabuhan Bitung merupakan pelabuhan yang utama di Sulawesi Utara. Pada masa itu pelabuhan Manado lah yang memegang peranan penting. Pengalihan kegiatan bongkar muat dari pelabuhan Manado ke pelabuhan samudera Bitung terjadi mulai tahun 1950-an dimulai pembangunannya dengan peletakan batu pertama tahun 1953 oleh Presiden Sukarno.²⁰⁵⁾

Untuk menanggulangi depresi tersebut maka pemerintah kolonial di Keresidenan Manado ini antara lain menjalankan langkah-langkah kebijaksanaan kependudukan dan perluasan areal pertanian (sawah dan ladang). Kebijakan transmigrasi dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dilakukan sejak tahun 1902, semakin digalakkan terutama mulai tahun 1930.

Di antara 18 Onderdistrik di Minahasa yang terdiri dari 6 distrik, maka yang terpadat penduduknya ialah Onderdistrik Tondano, Kawangkoan, Manado Selatan, Tomohon, Langowan, Manado Utara, menyusul Kakas, Airmadidi, Tombariri, Eris, Amurang, Tumpaan, Kauditan, Tompasso, Tatelu, kemudian Tombatu, Tenga' dan Ratahan. Mulai tahun 1930 diadakan pemindahan penduduk dalam 14 gelombang, terbanyak dari Onderdistrik Tondano, Eris dan Kakas. Tempat pemindahan itu terbanyak di Tompasso Baru dan Modinding (Minahasa Selatan).²⁰⁶⁾

205) Badan Pengusahaan Pelabuhan Bitung, *Penuntun Singkat Pelabuhan Bitung-Manado*, Bitung, 1973, hal. 3.

206) M. van Rhijn, op. cit., hal. 570 - 572.

Di tempat-tempat tersebut sekarang ini merupakan lumbung beras di luar daerah sekitar danau Tondano.

Kalau pada abad ke-6 – 18 wilayah ini merupakan wilayah perdagangan beras, maka mulai abad 20 sebaliknya menjadi pengimpor beras. Dengan kebijaksanaan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah maka perlahan-lahan impor beras dapat ditekan. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa pada tahun 1928 diimpor beras sebanyak 32.000 ton, 1929 sebanyak 29.000 ton, 1930 menurun jadi 26.000 ton dan di tahun 1931 diimpor 24.000 ton. Dan tahun 1937 terlihat angka impor beras sebanyak 46.000 ton, 1938 turun terus yaitu mulai 39.000 ton, 31.000 ton dan 14.000 ton pada tahun 1939 dan di tahun 1940. ²⁰⁷⁾ Kemungkinan besar hal ini dikarenakan adanya perluasan areal persawahan dan perladangan termasuk tegalan sebagai nyata di tabel berikut ini.

Tabel 9

LUAS AREAL SAWAH DAN LADANG/TEGALAN
DI KERESIDENAN MANADO ANTARA 1939 – 1940

DAERAH	1939/HA		1940/HA		TADAHAN/HA	
	Sawah	Ladang	Sawah	Ladang	Sawah	Ladang
Minahasa	10056	23540	10536	26440	520	2900
Bolaang-Mongondow	3000	10850	3300	14850	300	4000
Gorontalo	4275	b)	4480	b)	205	b)
Sangir Talaud	a)	b)	a)	b)	a)	b)
Buol	250	700	450	5000	200	4300
Poso-Tentena	2250	7000	2525	7000	275	--
Donggala	786	7040	1120	8410	334	1370
Palu	4500	3900	4650	4175	150	275
Parigi	509	3100	799	4335	290	1235
Toli-toli	2374	1128	4978	2283	2604	1155

Catatan : a) tidak ada sawah; b) tidak ada data.

Sumber : diolah dari M. van Rhijn, op. cit., hal. 46.

207) M. van Rhijn, op. cit., hal. 40.

Oleh karena terjadinya penyebaran penduduk, maka dapat dijamin bahwa hal itulah yang antara lain telah menyebabkan turunnya impor beras dalam periode 1928 sampai 1940 walaupun ada kenaikan menyolok di tahun 1937.

C. INTERAKSI TERHADAP KEGIATAN PARTAI/ORGANISASI

Tahun-tahun antara 1908 – 1927 merupakan tahun-tahun persiapan untuk memperkembangkan pergerakan nasional selanjutnya. Sejak itu lahirlah nasionalisme revolusioner dengan cita-citanya yang tegas ke arah emansipasi politik dengan jalan kerja sendiri secara aktif dengan bersenjatakan ideologi kesatuan Indonesia. Pelopor gerakan ini ialah *Indische Vereeniging*, yang kemudian bernama Perhimpunan Indonesia (PI), didirikan tahun 1908 di Nederland, yang kemudian mewujudkan Partai Nasional Indonesia (PNI) setelah beberapa pemimpinnya kembali ke Indonesia. Udara kemerdekaan di Eropa yang mereka hirup, semangat nasionalisme bangsa-bangsa terjajah sedunia yang merasuk alam pikiran mereka, menggugah hati mereka untuk memperjuangkan nasib bangsanya sendiri yang berada di bawah penjajahan Belanda.

Pandangan politik demikian itu sejalan dengan gagasan nasionalisme modern di Indonesia yang memberikan jalan ke arah terbentuknya satu gerakan yang bercorak nasional murni dan bersifat radikal. Pengambil inisiatif gerakan ini ialah Ir. Sukarno bersama beberapa rekannya mendirikan organisasi PNI 4 Juli 1927 di Bandung. Hubungan organisasi ini dengan PI di Nederland sangat erat. PNI mulai mengadakan propaganda yang intensif baik dengan lisan maupun dengan tulisan demi memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia. PNI berusaha keras memadu kekuatan nasional dengan trilogi yang disebut trilogi *nationale geest – nationale wil – nationale daad*. Pemerintah mulai membayangkan pecahnya lagi pemberontakan lalu menangkap para pimpinan PNI di mana dilakukan lebih dari 400 penangkapan di seluruh Indonesia. Seluruh pergerakan mengajukan protes demikian juga partai buruh dan komunis di Nederland.

Penangkapan-penangkapan itu membawa para pimpinan PNI ke depan sidang pengadilan kolonial. Tanpa gentar sedikit pun juga diajukan pembelaan diri dengan berkata bahwasanya kini telah menjadi jelas bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukanlah buatan kaum intelektual dan komunis saja, tetapi merupakan

reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinnya telah merdeka. Revolusi Indonesia adalah revolusinya jaman sekarang bukannya revolusinya kelompok-kelompok kecil kaum intelektual, tetapi revolusinya bagian terbesar rakyat dunia yang terbelakang dan diperbodoh. ²⁰⁸⁾

Timbul tenggelamnya partai-partai, pemikiran yang teoritis dan etis, dilengkapi dengan bentuk-bentuk dan metode perjuangan, secara silih berganti saling melengkapi berjuang bagi kepentingan rakyat terjajah. Di bawah tekanan politik reaksioner Gubernur Jenderal de Jonge, politik dan taktik non koperasi menjadi lumpuh, merintis jalan tampilnya kaum kooperator, yang diwakili oleh Partai Indonesia Raya disingkat Parindra, yaitu tahun 1935. Organisasi politik ini merupakan peleburan dari Budi Utomo, Partai Bangsa Indonesia, Serikat Selebes, Serikat Sumatera, Serikat Ambon, dan lain-lain. Partai ini bergerak di lapangan perburuhan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah non koperasi dan koperasi sejak semula ternyata sangat mempengaruhi perkembangan PSII yang mengakibatkan adanya perpecahan di kalangan organisasi itu, yaitu dengan munculnya Barisan Penyedar PSII di bawah H.A. Salim di tahun 1935. Tapi baik PSII maupun Barisan Penyedar PSII tidak sanggup menggerakkan pengikutnya mengisi perjuangan, sehingga segolongan lain mendirikan Partai Islam Indonesia, disingkat PII. PII yang baru dibentuk ini disokong oleh Muhammadiyah suatu gerakan pembaharuan yang sejak semula bergerak di lapangan sosial ekonomi.

Pergeseran tujuan pergerakan nasional di Indonesia terlihat pula dari adanya usul yang dikenal sebagai Petisi Sutardjo yaitu usul di tahun 1936 ditandatangani beberapa tokoh yaitu Sutardjo Kartohadikusumo, DR. G.S.S.J. Ratulangi, Kasimo, Datuk Tumenggung, KO Kwat Tiong dan Alatas. Petisi ini dapat dianggap merupakan manifestasi politik koperasi kaum pergerakan nasional. Petisi itu menuntut diadakannya suatu konperensi kerajaan di mana kedudukan wakil-wakil Indonesia dan Nederland sederajat untuk menyusun suatu bentuk pemerintahan bagi Indonesia dalam jangka waktu sepuluh tahun. Tetapi pandangan yang kolonialistis

208) Drs. Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Pergerakan Nasional*, SESPPU, Jakarta, 1968, hal. 11 - 14.

dari pemerintah Belanda menyebabkan petisi ini ditolak di tahun 1938.

Penolakan ini menyebabkan lahirnya suatu federasi politik yang menamakan dirinya Gabungan Politik Indonesia disingkat GAPI. Federasi ini merupakan gabungan dari Parindra, Garindo dan PSII, didukung oleh Persatuan Minahasa, Pasundan serta PII yang bertujuan untuk mempersatukan semua partai politik di Indonesia guna membentuk Parlemen Indonesia. GAPI memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri, kesatuan dan persatuan nasional, demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan kesatuan aksi. Untuk mencapai tujuan itu maka dibentuklah Kongres Rakyat Indonesia di akhir Desember 1939 terdiri dari para wakil 90 organisasi politik serta 24 organisasi lainnya yang menunggu pengesahan keanggotaannya di Kongres itu. Belum sempat perjuangan GAPI tercapai, pada bulan Mei 1940 Negeri Belanda diduduki Jerman, disusul tahun berikutnya yaitu 7 Desember 1941 pecahnya Perang Pasifik yang menyeret Indonesia ke tengah kancah peperangan melawan Jepang. Dengan demikian maka Kongres Rakyat Indonesia atau Majelis Rakyat Indonesia itu tidak sempat beraksi membentuk Parlemen untuk Indonesia.²⁰⁹⁾

1. PNI Baru

PNI sebagai suatu organisasi politik, dibawa masuk ke Sulawesi Utara oleh G.E. Dauhan tahun 1928 dan kemudian oleh Max Linuh. Dari Jakarta Dauhan terus langsung ke Siau sambil membawa mandat pembentukan PNI Cabang VI di sana. Begitu tiba ia segera mengumpulkan rakyat dan terdaftarlah jumlah anggota pertama sebanyak 50 orang. Kemudian Dauhan memberikan mandat kepada seorang guru gubernemen A.N. Bawengan, untuk membentuk ranting di Ondong di mana tercatat anggota pertamanya sebanyak 40 orang. Semangat kebangsaan yang dibawakan oleh PNI ke Siau dan Ondong, mulai nampak dengan terbentuknya perkumpulan-perkumpulan sosial dan olah raga di desa-desa. Di desa Mala Siau umpamanya berdiri perkumpulan Sepak Bola Radikal dan Koperasi Marhaen yang dipimpin oleh A.T. Gandaria dan S. Pande. Di desa Karalung ada perkumpulan Sepak Bola Nasional dan Koperasi Persatuan, dipimpin oleh Papude Salekede.

Ketika pemerintah kolonial mengadakan aksi penangkapan tokoh-tokoh PNI seluruh Indonesia tahun 1929, maka kantor PNI

209) A.K. Pringgodigdo S.H. *op. cit.*, hal. 143.

di Ulu Siau dan Ondong digeledah, G.E. Dauhan serta A.N. Bawengan ditangkap. Aksi itu mengakibatkan bubarnya PNI Cabang VI Ulu Siau, tapi semangat perjuangannya tetap berlanjut. Setelah keluar dari penahanan, maka G.E. Dauhan pergi ke Manado dan menerbitkan surat kabar Menara, sedangkan seorang tokoh lainnya yaitu A.T. Gandaria pergi ke Surabaya dan menerbitkan Harian Tjatur.

Ketika Gandaria kembali lagi ke Siau tahun 1935, bersama-sama para bekas anggota PNI, mereka mendirikan organisasi baru sebagai partai lokal yaitu Persatuan Rakyat Sangihe Talaud disingkat PERKASAT, di mana ada beberapa pamong desa masuk jadi anggotanya. Para pamong desa yang masuk jadi anggota PERKASAT dipanggil menghadap Raja P.F. Parengkuan pada waktu itu memerintah menggantikan Raja A. Janis. Pejabat kerajaan itu meminta agar mereka tetap bekerja terus sebagai pamong desa atau dipecaf karena memilih keanggotaan dalam PERKASAT. Dengan keluarnya para pamong desa dari PERKASAT maka organisasi ini bubar. Salah seorang pemimpinnya bernama J. Wilhelmus meneruskan cita-cita PERKASAT (melanjutkan cita-cita PNI itu) dengan mengadakan propaganda di mana-mana tahun 1940 ia berada di Bitung dan mengadakan rapat raksasa atas restu Hukum Tua (Kepala Desa) Langelo. Propagandanya dalam rapat tersebut menyebabkan ia dihadapkan ke hadapan pengadilan/Magistraat di mana ia dihukum penjara 4 bulan.

Selain PERKASAT, ada pula beberapa organisasi yang muncul setelah dibubarkannya PNI. Mereka yang pernah jadi anggota PNI di Sangir Talaud mengorganisasi beberapa organisasi untuk memelihara semangat perjuangan PNI di sana, antara lain ialah:

- a. Komite Gerakan Indonesia (KGI) pada bulan Maret 1933 dipimpin oleh Ketua Frederik Hermanus, Wakil Ketua Andries David, Panitera I Gustaaf Paparang, Panitera II Reins Lalela bersama beberapa anggota antaranya Salindeho, H.B. Elias, L.V. Jacobus, Mengadakan rapat umum di Ulu Siau, Beong dan Ondong, dalam bulan Maret 1933.
- b. Pendidikan Masehi Siau (PMS) didirikan oleh Tjie Soen Kho dan Junus Sambentiro, merupakan gereja terpisah dari organisasi gereja yang ada pada tahun 1933 yang dipusatkan di Tatahadeng.
- c. Kebenaran Agama Pengharapan (KAP) dipimpin oleh orang-

orang yang dahulunya aktivis PNI di Beong.

- d. Serikat Ondong Muda (SOM) sebagai wadah tempat menampung para pemuda yang melanjutkan cita-cita dan perjuangannya PNI setelah dibubarkan, dipimpin oleh Ketua H.D. Elias, Wakil Ketua L.V. Jacobus dan panitera A. Jacobus, yang tetap memelihara tradisi mengadakan rapat tertutup sambil mendengarkan pidato dan petunjuk A.N. Bawengan, tokoh PNI yang pernah turut ditangkap bersama G.E. Dauhan.

2. Partai Indonesia (Partindo)

Setelah PNI dibubarkan, maka beberapa bekas tokohnya mendirikan organisasi politik baru yang dinamakan Partai Indonesia pada bulan April 1931 di bawah pimpinan Mr. Sartono. Pada tahun itu juga Partindo masuk ke Sulawesi Utara atas inisiatif dari Mr. Iszaak. Cabang-cabangnya dibuka di Manado, Amurang, Tompaso, Leilem, Kolongan Atas dan Tondano.

3. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)

Partai ini masuk ke Sulawesi Utara melalui propaganda yang dilakukan oleh Abdul Muis selaku Wakil Ketua Sentral Serikat Islam pada pertengahan tahun 1919, kemudian atas inisiatif Dahlan dan Makmur Lubis, didirikanlah pengurus cabangnya. Tahun 1930 pengurus cabangnya terdiri dari beberapa orang antara lain Makmur Lubis, O.N. Pakaja, Jakin Intan Permata dan Abudi Junus.

Di Daerah Bolaang Mongondow PSII berpusat di desa Molinow di tempat mana didirikan lembaga yang mengelola pendidikan dan pengajaran yang dinamakan Balai Pendidikan dan Pengajaran Islamiyah disingkat BPPI, BPPI ini merencanakan pembukaan HIS untuk kelanjutan studi para lulusan Sekolah Rakyat yang juga diasuhkannya. Sekolah rakyat ini dibuka di hampir semua desa di Bolaang Mongondow dengan staf guru kebanyakan dikirimkan oleh pengurus pusat PSII di Yogyakarta.

Ketika meresmikan berdirinya HIS milik BPPI itu, pimpinannya mengundang para pejabat pemerintah antara lain Raja Laurens Cornelis Manoppo dari Kerajaan Bolaang Mongondow serta beberapa tokoh masyarakat antara lain. H.D. Manoppo (baru pulang menyelesaikan studi AMS di Jawa) serta Antor C. Manoppo

(lulusan sekolah tinggi hukum di Jawa). Pejabat Belanda diwakili oleh *Adspirant Controleur* berhubung *Kontrolur* berhalangan hadir. Para anggota PSII bersama ribuan anak Sekolah Rakyat dan calon murid HIS memenuhi gedung dan halamannya. Dalam upacara peresmian tersebut, untuk pertama kalinya dinyanyikan lagu Indonesia Raya hasil karya W.R. Soepratman. Yang mengajarkan lagu itu ialah Zakaria Imban (pemuda Bolaang Mongondow yang dikirimkan pimpinan cabang untuk menempuh pendidikan di Jawa dan kembali tahun 1931) beserta seorang guru dikirimkan ke Bolaang Mongondow oleh PSII bernama Ramelan Djojoadiguno. Semua hadirin mengikutinya dengan bersemangat dalam menyanyikan lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan itu.

Antara tanggal 17 – 24 Agustus 1933, PSII adakan kongres yang dinamakan Celebes *Nationale Congres* di Bolaang Mongondow di mana hadir beberapa orang pengurus dari pusat yaitu HOS. Tjokroaminoto, Akis dan A.M. Sangadji. Dari Manado, Makmur Lubis, O.N. Pakaja dan Jakin Intan Permata. Pengurus cabang Bolaang Mongondow waktu itu terdiri dari Adampe Dolot, Johan Damopolii, Zakaria Imban, Husen Raupu, Frans T. Manoppo dan Hadji Saleh Mustafa. Kongres ini mengeluarkan program-program dalam bidang perekonomian, intensifikasi pertanian dan pembentukan koperasi.²¹⁰⁾ Hal ini adalah sejalan dengan Kongres Nasional PSII yang diadakan pada bulan Maret tahun itu.²¹¹⁾

Sebagai tindak lanjut dari Gerakan non koperasi maka hal ini dapat dilihat dari program hasil kongres di Bolaang Mongondow itu. Sesuai hasil kongres maka PSII Bolaang Mongondow membentuk organisasi yang dinamakan Koperasi Hazanatullah berpusat di Molinow dan dipimpin oleh Hadji Djihamid dan Salam Detu. Cara-cara mengorganisir koperasi sudah diajarkan lebih dahulu oleh guru Ramelan Djojoadiguno. Dalam waktu singkat didirikanlah cabang sebanyak 31 buah di sana. Modal diperoleh dari saham f.5,- per anggota ditambah iuran f.0,25 setiap bulannya. Dengan modal yang ada diadakan pembelian kopi anggota dan bersama-sama kopi yang ditanam organisasi di tahun 1923, dijual ke

210) Wawancara dengan Samin Imbah, 25-9-1978.

211) A.K. Pringgodigdo S.H. *op. cit.*, hal. 120.

Manado. Juga kopra anggota ditampung untuk dijual pula baik kepada pedagang maupun langsung ke Manado. Mulai saat itu para petani kelapa tidak mau lagi menjual kopra kepada *Het Coprafonds* (milik pemerintah kolonial) tapi kepada koperasi milik mereka sendiri. Modal koperasi semakin bertambah dan hasil usaha berupa keuntungan dikembalikan kepada para anggota dan sebagian disisihkan untuk kepentingan organisasi PSII dan BPPI. Dengan keuntungan yang ada para guru yang didatangkan dari Jawa diberikan gaji sesuai kemampuan kas BPPI. Berkat bantuan keuangan koperasi maka PSII mencatat kemajuan pesat lagi yaitu dibukanya *Kweekschool* yang pertama milik BPPI. Guru-gurunya didatangkan lagi dari Jawa antaranya Sumarjo Surjopranoto, Sukirman, Sarwoko, A.S. Bahaluan ditambah seorang guru asal daerah bernama Agogo A. Manoppo. Selanjutnya koperasi memperluas usaha dengan mendirikan pabrik sabun untuk kepentingan para anggota serta rakyat Bolaang Mongondow pada umumnya.²¹²⁾

Pengurus Cabang PSII Manado pada tahun 1930 memberikan mandat kepada Ali Adariku untuk mendirikan ranting di Kendahe, daerah Sangir Talaud. Pada waktu itu ranting Kendahe dipimpin Ketua Ali Adariku, Wakil Ketua Rudino dan Sekretaris Lahade. Dari Kendahe dibentuk beberapa ranting antaranya di Talawid, Bahu dan kemudian Petta. Talawid dipimpin oleh Ketua Abdulkahar Ratundelang, Wakil Ketua Idris Mananunga dan Sekretaris Polodame Adilang. Ranting Bahu dipimpin oleh Ketua Mobiring Tompo, Wakil Ketua Abdurrachman Tompo dan Sekretaris Sahmudin. Pada tahun 1935 setelah memiliki cukup banyak anggota, maka PSII Cabang Manado, dibentuk PSII Cabang Sangir Talaud dengan pimpinannya Ketua Ali Adariku, Wakil Ketua Rudino dan Sekretaris Umum Lahade.²¹³⁾

PSII bersama PNI dan Parindra yang dibentuk kemudian, adalah partai-partai politik yang kegiatannya jelas terlihat di daerah Sangir Talaud dalam periode ini.²¹⁴⁾

Bersamaan dengan itu tahun 1935 di daerah Sangir Talaud terbentuk organisasi Muhammadiyah di Petta dipimpin oleh Bomban Makaminang. Berbeda dengan PSII yang sangat menen-

212) Wawancara dengan Samin Imbah, 25-9-1978.

213) Wawancara dengan Ali Adariku, 28-9-1978.

214) Wawancara dengan H.E. Yuda, 5-10-1978 dan dengan Anton Liotohe, 29-9-1978.

tang Belanda, Muhammadiyah dianggap merupakan alat pemerintah Belanda untuk menentang partai-partai politik yang memusuhi Belanda termasuk PSII.

Akibat tindakan-tindakan PSII memusuhi pemerintah Belanda maka pemimpin-pemimpinnya banyak diasingkan atau dibuang dan dipenjarakan. Antaranya Ali Adariku pada tahun 1935 dihukum penjara dan dibuang berturut-turut ke Surabaya, Kalisosok dan Nusakambangan. Sesudah lepas penjara, ia kembali lagi ke Sangir Talaud memimpin PSII di sana. Tapi pada tahun 1939 ia ditangkap lagi dan dihukum penjara satu tahun di Manado. Lepas penjara tahun berikutnya dipenjarakan lagi oleh Kontrolur di Tahuna, karena memimpin pemberontakan melawan Belanda di Kendhar. Ketika dilepaskan dari penjara tahun 1943 (masa Pendudukan Jepang), tahun 1946 dibuang lagi ke Morotai ²¹⁵) yaitu pada masa kembalinya pemerintahan Belanda.

Di daerah Gorontalo, PSII tetap menjalankan asas non koperasi menentang pemerintahan kolonial. Pimpinan PSII di Gorontalo waktu itu ialah Abdullah, Achmad Hippy dan seorang lainnya Gafar Usup.

Di pihak lain, Muhammadiyah sebagai suatu organisasi Islam yang bergerak di lapangan sosial ekonomi, turut berusaha meluaskan pengaruhnya sampai ke Sulawesi Utara. Walaupun kemudian bersama-sama pecahan dari PSII berjuang di bawah panji-panji PII, namun ciri khasnya sebagai suatu organisasi yang bergerak di lapangan sosial ekonomi tidak dilepaskannya.

Muhammadiyah masuk ke Sulawesi Utara sekitar tahun 1930 dan terbentuklah pengurusnya yang pertama di bawah pimpinan Ibrahim Katjou, memegang jabatan itu sampai sekitar tahun 1932. Lama kelamaan usaha-usahanya surut sehingga pengurus besar menguasai kepada Tom Olli untuk membentuk pengurus baru. Muhammadiyah dalam programnya antara lain memperjuangkan revolusi dalam agama di mana apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selalu disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Pengurus baru terbentuk atas inisiatif Tom Olli di tahun 1934, terdiri dari Ketua Jusuf Harisah, Hadji Salim Dunggio sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris ialah Raden van Gobel, dibantu oleh Adurrachman Wakid. Anggota pada waktu itu baru berjumlah 17

215) Wawancara dengan Ali Adariku, 20-9-1978.

orang. Sebagai pelindung diangkat Awat Wakid, kakak dari Abdurachman Wakid. ²¹⁶⁾

Para pemimpin Muhammadiyah lainnya tersebar di beberapa tempat baik dalam kota Manado maupun di luarnya. Dalam kota Manado Aldjazi Poli di Sario, Abdullah Saro dan Hadji Bakkari Darise di Kampung Islam, Abdullah Lahilote di Kampung Arab. Abdurrachman Latada di Komo Luar, Ibrahim Pakaja dan Jabela Talib di Komo Dalam, dan Nusi Tutju di Kampung Ketang. Tapi ada juga dua orang tokohnya yang pindah masuk menjadi anggota PSII. ²¹⁷⁾

Muhammadiyah yang masuk ke Sulawesi Utara dikenal sebagai Muhammadiyah Tersiar yang maksudnya di mana saja seorang anggotanya berada, kewajibannya untuk menyebarluaskan maksud-maksud organisasi itu. Dengan demikian, walaupun pengurusnya ada di Manado, ada juga ditempat-tempat lainnya. Misalnya ada yang di Ratatotok (Minahasa Selatan) bahkan ada juga di pulau Bunaken bernama Aminullah Paransa. Di Amurang dipelopori oleh Salim Bachdim dan Ali Bachdim yang mengangkat Mohamad Dochmi sebagai penasehat mereka di sana. ²¹⁸⁾

Dalam hal keanggotaan maka yang hendak masuk Muhammadiyah diberikan masa percobaan selama satu tahun baru sesudah itu didaftarkan sebagai anggota penuh. Usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah di Manado antara lain pada tahun 1934 mendirikan semacam madrasah yang dinamakan Diniyah Muhammadiyah bertempat di Kampung Arab menyewa rumah Tan Beng Hok, dekat jembatan Megawati (Singkil). Pada tahun 1935 perjuangan berhasil diberikan tanah untuk tempat mendirikan sekolah Diniyah Muhammadiyah yang letaknya juga di Kampung Arab sehingga tidak menyewa milik Cina lagi. Sebagai kepala sekolah ialah Mohamad Dahlan Al-Monggoni dan staf gurunya didatangkan dari Jawa antara lain R. Himam. Sekolah dihancurkan oleh bom Sekutu di tahun 1942 setelah Manado diduduki Jepang. Di tahun 1946 ketika van der Plas berkunjung ke Manado, ia menawarkan gedung baru sebagai pengganti yang hancur oleh Sekutu, tapi ditolak oleh kepala sekolah Tahir Rungkalui. ²¹⁹⁾

216) Wawancara dengan Hadji Salim Dunggio, 10-10-1978.

217) Wawancara dengan Hadji Salim Dunggio, 10-10-1978.

218) Wawancara dengan Hadji Salim Dunggio, 10-10-1978.

219) Wawancara dengan Hadji Salim Dunggio, 10-10-1978.

Kepanduan Hizbul Wathon dari Muhammadiyah didirikan di tahun 1934 dipimpin oleh Raden Van Gobel dan Tahir Rungkalui. Kepanduan SIAP milik PSII waktu itu dipimpin oleh Adam Angio dan Makmur Lubis. Menurut keterangan kedua kepanduan itu didirikan sama-sama di tahun 1934 dan hidup terus sampai tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang, baik SIAP maupun Hizbul Wathon bubar.

Sebuah organisasi Islam lainnya yaitu Jong Islamieten Bond (JIB) masuk ke Sulawesi Utara sekitar tahun 1934, Organisasi Pemuda Islam ini didirikan di Yogyakarta pada sekitar tahun 1925 sebagai pecahan dari *Jong Java*. Sebagai Ketua JIB waktu itu ialah R. Sam sedangkan Hadji Agus Salim diangkat sebagai penasehat. Ketika didirikan Organisasi ini mempunyai tujuh cabang dan seribu anggota di mana Cabang Jakarta dan Bandung memiliki bagian wanitanya.²²⁰⁾

Yang masuk ke Sulawesi Utara ialah JIB Dames *Afdeeling* dipelopori oleh Jusuf Samah datang berpropaganda dari Jawa. Tahun 1934 itu terbentuklah pengurusnya sebagai Ketua Ra'iyah Mongay, Sekretaris Kanon Alelengo dengan anggota yang belum begitu banyak. Kanon Alelengo adalah istri Jusuf Taha yang pernah dibuang ke Digul oleh Belanda. Selain membawa masuk JIB, Jusuf Samah ini juga anggota PSII Cabang Manado pimpinan Jakin Intan Permata (Ketua), Abudi Junus (Sekretaris) serta Habupatah bin Hamid dan B. Hasan sebagai anggota pimpinan pada waktu itu.²²¹⁾

Sebagai Ketua JIB Dames *Afdeeling*, maka Ra'iyah Mongay melakukan kegiatan tabliq dan dakwah di mana-mana, misalnya di Kampung Ketang, Kampung Islam, Kampung Arab, Kampung Kodo, di tempat-tempat yang banyak berpenduduk Islam. Pada waktu itu ia adalah satu-satunya wanita Islam yang pernah naik mimbar untuk berpidato membawakan program-program organisasinya sehingga menarik banyak simpati rakyat yang beragama Islam, juga kalau ia berpidato atas nama PSII dan Muhammadiyah untuk kepentingan propaganda mereka.

4. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Parindra lahir bulan Desember 1935 sebagai hasil fusi antara

220) A.K. Pringgodigdo SH, *op. cit.*, hal. 101.

221) Wawancara dengan Ra'iyah Mongay, 14-10-1978.

Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dalam Kongres di Solo 24 – 26 Desember 1935, bertujuan terwujudnya Indonesia Raya dengan mengokohkan semangat persatuan kebangsaan, menjalankan aksi politik untuk memperoleh hak-hak lengkap dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme sambil memajukan peri kehidupan rakyat Indonesia. Parindra berkedudukan di Surabaya, dengan Ketuanya Dr. Sutomo.

Begitu terbentuk pada tahun itu Parindra melebarkan sayapnya ke Sulawesi Utara. Dengan giatnya para pemimpin organisasi ini berpropaganda ke seluruh pelosok Minahasa, dipimpin oleh C.P. Hermanses; H.M. Taulu ke Kawangkoan, I. Langkay, J. Piay dan Ch. Wala ke Motoling, dan yang ke Tombatu oleh P. Mongula.

Di daerah Sangir Talaud, Parindra disebarkan tahun 1939 oleh Frederik Sanger, Ketua I Pendeta Lantemona, Panitera Lemus Palit dengan pembantu-pembantunya Paulus Tamarindang, Gered Maniku dan Anton Liotohe.²²²⁾ Partai inilah yang memelopori pemberontakan di Tahuna. Dengan F. Sanger sebagai Ketua Organik dan Anton Liotohe sebagai Komandan Pasukan, bersama-sama PSII yang di bawah pimpinan dari Ali Adariku melakukan kudeta itu. Mereka menahan *Controleur* Belanda bernama Krams serta aparatur pemerintah lainnya antara lain Jaksa setempat yang bernama Medelu. Jaksa Medelu inilah yang membakar gudang kopra di Tahuna tahun 1942 menjelang kedatangan Jepang.²²³⁾

Mengenai kapan masuknya Parindra ke daerah Bolaang Mongondow tidak diketahui lagi. Di tahun 1939 yang menjadi Ketua ialah R. Muaja pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pos di Kotamobagu. Parindra dan PSII yang ada di daerah itu kelak bersama-sama membentuk dan mengaktifkan GAPI Cabang Bolaang Mongondow di bawah pimpinan Adampe Dolot dari PSII.²²⁴⁾ Di daerah lainnya yaitu di Gorontalo, partai ini masuk di tahun 1940. Pada waktu itu pimpinannya antara lain Sun Bone, Abdullah Uno, Dr. A. Sabu dan John Jasin.²²⁵⁾

222) Wawancara dengan Anton Liotohe, 29-9-1978.

223) Wawancara dengan Anton Liotohe, 29-9-1968.

224) Wawancara dengan Samin Imban, 25-9-1978.

225) Wawancara dengan Sun Bone, 4-10-1978.

5. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Akibat kemunduran dari PPPKI maka pada tahun 1939 lahirlah Gabungan Politik Indonesia disingkat GAPI yang bertujuan untuk mempersatukan semua partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam satu wadah politik baru. Dalam Kongresnya 19 – 20 Desember 1939 diputuskan antara lain bahwa semua anggota GAPI tidak bertindak sendiri-sendiri. Gapi kemudian menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia 23 – 25 Desember 1939 dihadiri juga oleh organisasi-organisasi yang tadinya bukan organisasi politik. Kongres yang diselenggarakan GAPI ini memutuskan untuk mengadakan aksi Indonesia berparlemen. Selain itu diputuskan untuk mengakui bendera Merah Putih. Bulan Agustus 1940 GAPI mendesak pemerintah kolonial untuk segera membentuk parlemen dengan mengubah sama sekali Volksraad yang ada pada waktu itu dengan mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia. Pimpinan GAPI pada waktu itu ialah Abikusno Tjokrosujoso dari PSII, A.K. Gani dari Gerindo, Sukardjo Wirjopranoto, DR. G.S.S.J. Ratulangi dari Persatuan Minahasa, Mr. Sartono dari Gerindo dan M.H. Thamrin dari Parindra. ²²⁶⁾

GAPI masuk ke Sulawesi Utara dengan propaganda dari Abikusno Tjokrosujoso akhir tahun 1939. Dengan demikian maka beberapa partai politik di daerah ini segera menyesuaikan diri dengan pengurus pusat masing-masing untuk bergabung dalam GAPI. Di Bolaang Mongondow, R. Muaja dari Parindra datang menghubungi PSII yang dipimpin oleh Adampe Dolot untuk membentuk GAPI Cabang di sana. Mulai saat ini terbentuklah GAPI Cabang Bolaang Mongondow dengan Adampe Dolot dari PSII sebagai ketuanya. ²²⁷⁾

6. Gerakan Indonesia Berparlemen

Aksi atau gerakan Indonesia berparlemen ini adalah hasil keputusan Kongres Rakyat Indonesia yang diselenggarakan GAPI 23 – 25 Desember 1939. Kongres itu memutuskan untuk mendesak pemerintah kolonial Belanda agar segera membentuk suatu Badan Perwakilan Rakyat untuk menggantikan Volksraad.

226) A.K. Pringgodigdo S.H. *op. cit.*, hal. 140.

227) Wawancara dengan Samin Imban, 25-9-1978.

Di Bolaang Mongondow gerakan ini mendapat sambutan hangat sekali. Parindra dan PSII yang sudah tergabung dalam GAPI melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan rapat umum di Molinow dengan mempergunakan gedung Sekolah Rakyat BPPI milik PSII di tempat itu. Massa yang hadir sekitar 5.000 orang baik anggota PSII, Parindra, Muhammadiyah dan PII yang datang dari seluruh pelosok daerah itu. Pada waktu itu diadakan pembagian lencana Merah Putih di mana massa berebut-rebutan untuk memperolehnya dan dengan bangga dipancang di dada masing-masing. Untuk pertama kalinya rakyat melihat bendera Merah Putih, yang dipasang di belakang meja pimpinan rapat umum yang dilatarbelakangi dengan spanduk bertuliskan mosi Tjokroaminoto tahun 1917 tentang tuntutan aksi perlementer kepada pemerintah kolonial waktu itu.

Dalam rapat umum dibacakan suatu teks pidato pimpinan pusat GAPI kemudian disambung dengan pidato dari para pemimpin dari Cabang Bolaang Mongondow antara lain dibawakan oleh John Damopolii, Kinömpol Imban, Andung S. Sugeha dan Adampe Dolot. Pada dasarnya semua isi pidato yaitu membangkit-bangkitkan semangat rakyat untuk dengan gigih mendukung tuntutan GAPI kepada pemerintah kolonial. Selain itu dengan pedas mereka memberberkan kepincangan-kepincangan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial di daerah Bolaang Mongondow selama ini. ²²⁸⁾

Reaksi pemerintah kolonial di sana sangat cepat dan keras. Komandan Polisi Belanda bernama Fischer bersama para anak buahnya mengadakan penangkapan di mana-mana terhadap para tokoh GAPI dan dijebloskan ke dalam tahanan. Mereka diadili oleh *Zelfbestuurrechtbank* dengan tuduhan hendak merampas kekuasaan raja, memberontak kepada pemerintah Belanda serta menghasut rakyat dan mengganggu ketenteraman umum. ²²⁹⁾ Para pimpinan yang dijatuhi hukuman yakni:

- a. Adampe Dolot, sampai akhir 1939 dipenjarakan di Katamobagu lalu dipindahkan ke Manado dan tahun 1942 dipenjara Sukamiskin Bandung, meninggal di sana sebelum masuknya Jepang.

228) Wawancara dengan Samin Imbah, 25-9-1978.

229) Wawancara dengan S.A. Sugeha dan M.J. Manoppo, 23-9-1978 dan dengan Samin Imbah, 25-9-1978.

- b. H. Tunggali, dibuang ke Pamekasan (Madura).
- c. Pepekow tinggal di Motoboi Besar, dibuang ke Nusakambangan.
- d. Matero dari Motoboi Besar, juga dibuang ke Nusakambangan.
- e. H. Masiondo dari Solimandungan, dibuang ke Nusakambangan sama-sama dengan Pepekow.

D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG

1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda

Pemerintah Hindia Belanda di daerah Sulawesi Utara dalam rangka menghadapi situasi dunia yang semakin gawat oleh pecahnya Perang Dunia II tahun 1939, mulai mengadakan beberapa tindakan di daerah ini yaitu mengadakan beberapa perubahan dalam susunan pemerintahan. Di daerah Bolaang Mongondow, Raja Laurens Cornelis Manoppo (1920 – 1938) diturunkan dari tahtanya karena dituduh menyalahgunakan keuangan daerah itu. Ia diganti oleh *Zelfbestuur Commissie* yang diketuai oleh Kontrolur sendiri dengan dua orang anggotanya yaitu Penghulu (Kepala Distrik) Bolaang H.D. Manoppo dan Penghulu Mongondow Max Makodompit. Pada waktu itu yang menjadi Controleur ialah A. van Wieren (1937 – 1941) yang kemudian diganti oleh Mr. Quick (1941), Mr. Smidt (1941) dan terakhir dijabat oleh Mr. de Wit selama kira-kira dua bulan yaitu sampai saatnya Jepang masuk Januari 1942.

Di daerah Sangir Talaud, ketika Raja Aling Janis (1930 – 1935) meninggal dunia tanpa putra mahkota, maka jabatan itu diambil alih oleh Kontrolur Dr. de Jong. Sebenarnya bekas raja L.N. Kansil (1920 – 1929) dan Raja Janis sendiri masing-masing mempunyai anak tetapi keduanya belum cukup umur sehingga pemerintah kolonial mengambil langkah di atas. Kemudian diangkat seorang Minahasa menjadi Raja di sana yaitu Raja P.F. Parengkuan (1936 – 1946) yang memegang jabatan itu sampai masuk Jepang. Raja ini giat membangun daerah itu dengan jalan-jalan baru serta mengusahakan pertanian rakyat yaitu menganjurkan penanaman bahan-bahan makanan seperti menanam ubi kayu serta mengadakan pembelian 6.000 karung padi untuk cadangan

di masa itu. ²³⁰⁾

Daerah Minahasa pada waktu itu diperintah oleh Asisten Residen Hoekstra yang membagi Minahasa atas enam distrik yaitu:

- a. Distrik Manado di bawah Mayor F. Ompi;
- b. Distrik Toulour di bawah Mayor E.J.S. Lumanauw;
- c. Distrik Tonsea di bawah Mayor E.H.W. Pelengkahu;
- d. Distrik Kawangkoan di bawah Hukum Besar C.A. Waworuntu;
- e. Distrik Amurang di bawah Hukum Besar D.A. Th. Gerungan;
- f. Distrik Ratahan di bawah Hukum Besar Momuat. ²³¹⁾

Di bawah keenam distrik itu terdapat 16 distrik bawahan yang masing-masing dikepalai seorang Hukum Kedua yaitu Distrik Bawahan (*Onderdistrict*) Manado Utara, Manado Selatan, Tomohon, Tombariri, Airmadidi, Tatelu, Kauditan, Tondano, Kakas, Eris, Kawangkoan, Langowan, Tumpaan, Amurang, Tenga', Tompaso, Ratahan dan Tombatu. ²³²⁾

Keresidenan Manado pada waktu itu di bawah Residen Belanda A. Hirschman. Kantor Residen terletak sekarang ini di jalan Sam Ratulangi depan Markas Angkatan Laut Daerah 6. Kantor *Minahasaraad* sekarang ini masih dipergunakan sebagai Markas Angkatan Laut di atas, sedangkan rumah residen sekarang ini kompleksnya dijadikan Markas Kodam XIII/Merdeka.

2. Keadaan Masyarakat

Dalam bidang perekonomian, maka pencaharian dari rakyat yang terutama ialah bertani. Pertanian yang diusahakan rakyat ialah perkebunan kelapa, kopi, cengkeh, pala, serta mengolah sawah dan ladang untuk menanam padi, jagung sayur-sayuran dan sebagainya. Selain itu di tepi-tepi pantai dan terutama di Sangir Talaud, rakyat mengusahakan penangkapan ikan, sedangkan di daerah pedalaman Minahasa Bolaang Mongondow dan Gorontalo, rakyat mengusahakan pengumpulan hasil hutan seperti kayu-kayuan, rotan, damar dan sebagainya.

Luas areal persawahan sekitar tahun 1941 yaitu kurang lebih 18.500 hektar sedangkan areal perladangan sekitar 50 ribu hektar. Sampai tahun itu jumlah pohon kelapa kira-kira 10 juta pohon

230) H.B. Alias, *op. cit.*, hal. 121 - 122.

232) S.U. Marunduh, *op. cit.*, hal. 31.

dengan hasil di tahun 1939 yaitu 110.000 ton. Harganya terlalu rendah yaitu hanya f.1,65 dibandingkan dengan f.13,75 di tahun 1937 untuk tiap kwintal, menyebabkan timbulnya kelesuan bagi petani untuk mengusahakannya. Kopi yang mulai ditanam tahun 1796, tahun ini diperkirakan jumlahnya lima juta pohon. Tahun 1935 harganya f.14,— sepikul, tapi tahun 1941 hanya f.4,— di pasaran. Cengkeh yang ditanam mulai 1878, tahun 1940 sudah sebanyak 300 ribu pohon di Minahasa, dengan harga 1938 f.25,— tahun 1940 turun menjadi f.15,— sepikul. Jagung hasilnya sangat melimpah di mana setiap seribu tongkol hanya dijual dengan harga f.2,50 sedangkan padi sepikul harganya f.6,50 di pasaran.

Di bidang sosial, pemerintah mengusahakan pendirian rumah-sakit-rumah sakit antara lain di Minahasa *Koningin Wilhelmina Ziekenhuis* 1936 (sekarang Rumah Sakit Umum Gunung Wenang Manado), *Leprozerie* tahun 1925 di Tumumpa dipindahkan ke Malalayang 1934 disempurnakan tahun 1939. *Koningin Emma Sanatorium* Di Noongon Langowan kira-kira tahun 1930 disempurnakan pada tahun 1933. Rumah Sakit yang diusahakan swasta antaranya *RK Ziekeninrichting Marien Heuvel* (sekarang Rumah Sakit Gunung Maria) di Tomohon Pebruari 1930. *Protestantsch Ziekenhuis Bestheda* dibuka mulai 1929. Di Amurang ialah *Hulp-ziekenhuis* mulai 1931. Di Lembean *RK Hulp Ziekenhuis Hermana* Pebruari 1940. Di Kotamobagu Bolaang Mongondow dibuka. *Landschaps-Ziekenhuis* tahun 1936. Di Gorontalo yaitu *Gouvernements Burgerlijke Ziekeninrichting* sebelum tahun 1940. Di Sangir Talaud yaitu *Zending-ziekenhuis* Tahuna mulai Januari 1933. ²³³⁾

Dalam bidang pendidikan di wilayah Keresidenan Manado, seluruhnya terdapat 555 lembaga pendidikan terdiri dari 437 *Volksscholen*, 93 *Vervolgscholen*, 1 *Kleinhandelsschool*, 7 *Curssussen tot opleiding van Volksonderwijzers*, 1 *Normaalschool*, 3 MULO, dan 13 HIS. Badan-badan yang mengusahakan Sekolah Rakyat di wilayah Sulawesi Utara yaitu:

- a. Sangir en Talaud Comite sebanyak 123 sekolah di daerah Sangir Talaud;
- b. *Minahassische Protestantsce Kerk* 165 sekolah di Minahasa;
- c. *RK Missie* 30 sekolah di Minahasa;

233) M. van Rhijn, op. cit., hal. 141 - 155.

- d. *Ned. Zend. Gen. Noord Celebes* 24 sekolah di Bol. Mongondow;
- e. Belum termasuk yang diusahakan oleh Muhammadiyah, Rekso Suryo, PSII (BPPI), dan sebagainya.

Dalam bidang kebudayaan dan agama, tidak mengalami perubahan yang berarti. Adat istiadat yang ada sebelumnya tetap dipelihara dan dijalankan dengan baik. Demikian pula dalam bidang keagamaan, masing-masing golongan agama memantapkan pelayanan kerohanian kepada jemaatnya.

Bidang lainnya yang perlu dikemukakan ialah dibentuknya *Adriani-Kruyt-Instituut* oleh pemerintah pada tahun 1937 yang biaya pertamanya disediakan oleh kas *landschap*, *Gemeente* dan *Minahasaraad*. Program utama institut ini ialah mengadakan penelitian kebudayaan dan suku bangsa di seluruh Keresidenan Manado. Institut ini mengusahakan tersedianya satu perpustakaan, pengumpulan benda-benda etnografis, pencatatan seni musik dan seni tari, penerbitan-penerbitan dan sebagainya.

Institut ini memiliki pimpinan sendiri di mana Residen Manado bertindak selaku Ketua Dewan Kurabatnya, merangkap sebagai Ketua. Institut ini memiliki seorang Sekretaris dan tiga anggota. Ketiga anggotanya yaitu walikota Manado, Ketua Minahasaraad dan Pemegang Kas Kerajaan-kerajaan. ²³⁴⁾

3. Sikap masyarakat terhadap Pemerintah Hindia Belanda

Sikap masyarakat di daerah Sulawesi Utara terhadap pemerintah Belanda berbeda-beda dari satu ke lain daerah. Di daerah Minahasa misalnya, sikap masyarakat yang mulanya selalu mengajukan berbagai-bagai tuntutan, agak diredakan tindakan pemerintah memenuhinya. Berturut-turut rakyat diredakan oleh perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan berbagai cabang ilmu pengetahuan mulai dari sekolah dasar sampai banyak yang mencapai prestasi gemilang di tingkat pendidikan tinggi (dokter-dokter, sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teologia, pendidikan, pelayaran, pemerintahan, kemiliteran dan kepolisian dan sebagainya). Ph. F.L. Sigar diangkat sebagai Sekretaris Residen suatu jabatan yang sebenarnya tidak dapat dipegang orang pribumi

234) *Ibid.*, hal. 21.

dari tahun 1923 – 1926, Dr. A.B. Andu diangkat sebagai Wakil Walikota antara 1930 – 1939 dan Ketua Dewan Minahasa serta orang-orang Minahasa lainnya yang dipercayakan memegang jabatan-jabatan yang dulunya tertutup bagi orang pribumi. Selain itu bagi rakyat Minahasa dibentuk *Minahasaraad* dan *Gemeente-raad* sebagai tempat menyalurkan suaranya, lembaga-lembaga mana tidak pernah dibentuk di daerah-daerah lainnya di Sulawesi Utara. Dalam bidang kerohanian, rakyat Minahasa mulai diberikan hak untuk mengurus gerejanya sendiri di tahun 1934 yaitu dengan didirikannya GMIM oleh izin istimewa dari raja Belanda yang merupakan gereja pribumi yang pertama didirikan dalam lingkungan Indische Kerk pada masa itu.

Dengan langkah-langkah politik di atas maka pemerintah kolonial berharap dapat menarik simpati rakyat Minahasa terhadap mereka. Diadakan pendaftaran calon-calon militer dan banyaknya pemuda-pemuda Minahasa masuk untuk dididik. Hal ini tiap tahun diadakan oleh pemerintah. Di tiap-tiap desa ada petugas-petugas pendaftaran tentara yang disebut *Werpen* dan kepada pemuda yang diterima, diberikan *aangeld* (uang muka) masing-masing f.60,— sudah termasuk f.10,— yang dipotong untuk petugas pendaftaran (*werpen*). Para pemuda yang masuk dinas militer itu dikumpulkan di benteng Amsterdam di Manado seterusnya diberangkatkan ke Bandung dengan kapal laut untuk dididik di sana. ²³⁵⁾

Pada tahun 1938 pemerintah kolonial membentuk wilayah-wilayah yang kira-kira setingkat propinsi administratif yaitu *Gouvernement Sumatera*, *Gouvernement Borneo* dan *Gouvernement Timur Besar* yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Wilayah Indonesia Timur termasuk dalam wilayah *Gouvernement Timur Besar* dengan ibukota Makasar. Pada bulan Oktober 1940, wilayah Keresidenan Manado dimasukkan dalam jaringan penerbangan KNILM dengan kapal terbang jenis amfibi yang pangkalannya di Tasuka Danau Tondano. Lapangan terbang di Mapanget mulai diusahakan pembuatannya tetapi tidak sempat selesai sampai kedatangan Jepang.

Sikap masyarakat terhadap Belanda di daerah Sangir Talaud pada masa itu kurang begitu terlihat karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akibat dibubarkannya PNI dan dilarangnya

235) Wawancara dengan S. Parangkuan, 27-9-1978.

rakyat di sana melakukan kegiatan-kegiatan politik. Berbeda halnya dengan di daerah Gorontalo di mana rakyat menyatakan sikapnya melalui Komite Indonesia Berparlemen yang dibentuk oleh tokoh-tokoh masyarakat dan politik di sana, dengan R.M. Kusno Dhanupojo dan Nani Wartabone sebagai pemimpinya. Organisasi itu menuntut perbaikan nasib dalam segala bidang bagi rakyat di Gorontalo, tetapi ditolak oleh pemerintah kolonial di sana.

Akibat penolakan itu, terlebih-lebih sudah tersiar berita bahwa Negeri Belanda diduduki Jerman, maka pada tanggal 10 Mei 1940 atas inisiatif dari Nani Wartabone, beberapa tokoh politik diundang berkumpul di Suwawa di mana dalam rapat itu terbentuklah Komite 12 yang menyampaikan sikapnya kepada pemerintah Belanda. Komite 12 ini tidak menyetujui rencana Belanda untuk mengadakan penghancuran-penghancuran dan aksi bumi hangus apabila perang itu menjalar sampai ke sana. Rapat Komite 12 selanjutnya mempersiapkan rencana menyusun kekuatan untuk mengadakan perebutan kekuasaan dari tangan pemerintah kolonial apabila kesempatan yang baik untuk itu telah tiba. Rencana tersebut baru berhasil dijalankan yaitu pada tanggal 23 Januari 1942, setelah tentara Jepang sudah mendarat di Minahasa.

4. Keadaan Pemerintah Hindia Belanda di daerah pada saat terakhir

Ketika Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Utara mendengar tentang kemajuan-kemajuan tentara Jepang di front Pasifik, maka mereka mulai mempengaruhi masyarakat agar mau membantu melawan Jepang. Salah satu usaha ialah memanggil dan mengaktifkan kembali para pensiunan KNIL, mengadakan pembentukan milisi pribumi dengan memberikan janji gaji yang cukup tinggi kepada yang datang memenuhi panggilan itu. Sejalan dengan itu mereka mengadakan propaganda bahwa semua barang buatan Jepang cepat rusak. Kalau Jepang sudah mendarat maka mereka akan memperlakukan wanita tidak sewajarnya, dan sebagainya. ²³⁶⁾

Tetapi giatnya pemerintah Hindia Belanda untuk mempengaruhi masyarakat itu diimbangi dengan giatnya pula kaum pergerakan di Minahasa untuk menentang Belanda. Mereka meng-

236) S.U. Marunduh, *op. cit.*, hal. 43.

adakan rapat-rapat gelap dipimpin oleh G.E. Dauhan, Prits Kumontoy, Ch. Hermanses, dr. A.B. Andu dan lain-lain. Untuk membatasi kegiatan kaum pergerakan ini, Belanda mengerahkan banyak reserse untuk memata-matai usaha-usaha perjuangan dan rapat-rapat gelap yang mereka adakan. Pada tanggal 10 Desember 1941, Beberapa pemimpin kaum pergerakan ditangkap. Mereka yang ditangkap antara lain G.E. Dauhan, O.H. Pantow, J. Piay, Max Tumbel dan lain-lain. Mereka ditahan di Manado lalu dipindahkan ke Gorontalo. Mulai saat itu pemerintah melarang setiap bentuk kegiatan politik sehingga kaum pergerakan terpaksa melakukan gerakan di bawah tanah. 237)

Di pihak lain, mulai terjadi pengungsian besar-besaran di kalangan orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Anggota-anggota keluarga mereka antara lain istri dan anak-anak mulai diungsikan ke tempat lain sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang diperoleh Jepang di front Pasifik. Para pejabat pemerintahan kolonial bangsa Belanda dipersenjatai mulai dari Residen sampai kepada petugasnya di tingkat Onderafdeeling.

Pada waktu itu mulai timbul kepanikan di kalangan rakyat Sulawesi Utara. Orang-orang Jepang mulai ditangkapi dan dijebloskan ke dalam tahanan. Hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya mulai sulit terutama dengan kapal laut. Makanan mulai sukar didapat juga obat-obatan. Barang-barang mulai hilang dari pasaran.

Walaupun kegiatan politik sudah dilarang, tetapi rakyat menganggap situasi dunia pada waktu itu dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan, misalnya di daerah Sangir Talaud di mana pada bulan Desember 1941 dibentuk Komite Nasional Siau. Komite ini dipimpin oleh Ketua W.A. Kansil, Wakil Ketua M. Hermanses, Panitera I H.B. Elias, Panitera II C. Ponto dengan anggota-anggota pimpinan J. Mangary, P. Bogar dan H. Bawana. Maksud Komite ialah merebut kekuasaan dari tangan Belanda, membentuk pemerintahan darurat, menemui Jepang untuk membicarakan soal kemerdekaan. Ketika Komite ini berhasil merebut kekuasaan di Siau P.F. Parengkuan, maka bertepatan dengan itu terdengar kabar bahwa Jepang sudah siap-siap untuk datang mendarat di Sulawesi Utara. 238)

237) Ibid., hal. 43.

238) H.B. Elias, op. cit., hal. 145 - 146.

E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG

Di depan sudah dikemukakan bahwa sejak pecahnya Perang Pasifik, semua aparatatur-pemerintahan sipil bangsa Belanda mulai dari Residen sampai Kontrolur dan pejabat-pejabat penting mereka, sudah dipersenjatai. Hal ini sejalan dengan diadakannya pembentukan kesatuan-kesatuan milisi, baik milisi maupun milisi bumiputera. Dibentuk regu-regu atau ditunjuk orang-orang yang dipersiapkan dan disumpah untuk melakukan aksi-aksi bumi hangus obyek-obyek vital misalnya pelabuhan-pelabuhan dan tangki-tangki bahan bakar serta gudang-gudang dengan maksud supaya tidak dapat dipergunakan musuh. Juga ada yang disumpah untuk melakukan aksi penghancuran jembatan-jembatan dengan maksud menghalangi gerak maju pasukan Jepang.

Sejak tahun 1937 sudah ditempatkan satu kompi KNIL dan satu kompi KL yang disebut *Beroepsmilitair*. Pasukan itu ditempatkan di Minahasa karena rupanya pertahanan Belanda hanya dipusatkan di situ saja dan tidak ada maksud untuk mempertahankan daerah-daerah lainnya terutama Sangir Talaud. Di samping itu semua bekas KNIL diaktifkan kembali sebagai *Reserve Corps*. Milisi-milisi didaftarkan lalu dilatih berperang di Kotamabagu. Daerah Gorontalo dipersiapkan sebagai batu loncatan untuk mengundurkan diri apabila tidak sanggup menahan pasukan Jepang.

Karena ternyata Belanda bermaksud bertahan di Minahasa maka di sana terlihat adanya persiapan-persiapan kemiliteran. Selain berusaha membentuk pasukan tempur, juga dipersiapkan kubu-kubu pertahanan di tempat-tempat yang strategis antara lain dibuat banyak tempat-tempat persembunyian di Manado, Kema, Airmadidi, Tinoor, lapangan terbang Kalawiran, pangkalan air Tasuka. Menurut keterangan, kubu-kubu itu dibangun sejak tahun 1938 dengan biaya pemerintah yang mengerahkan tenaga dari rakyat untuk membuatnya. Selain itu ditempat-tempat yang strategis lainnya dibangun *loopgraf* sebagai tempat perlindungan bahaya udara yang dibangun pada tahun 1941. ²³⁹⁾

1. Propaganda Jepang yang terasa di daerah

Sejak tahun 1920-an, terutama di tahun 1930-an, sudah

239) S.U. Marunduh, op. cit., hal. 44 - 45.

banyak orang Jepang yang mengusahakan berbagai kegiatan di daerah ini misalnya perdagangan, penangkapan ikan, pertambangan, pertanian bahkan sampai usaha kecil-kecilan seperti membuka warung, toko, tukang sepatu, penggilingan padi, angkutan umum dan sebagainya. Mereka bersikap ramah tamah kepada rakyat dan bergaul dengan rakyat, bahkan ada yang kawin dengan wanita-wanita di sini secara baik-baik.

Dalam pada itu, berita-berita tentang perang mulai mengisi acara-acara siaran radio. Tapi terhubung listrik hanya terdapat di kota-kota maka rakyat di pedesaan tidak dapat mengikuti perkembangan situasi dunia apalagi karena pada waktu itu belum ada radio jenis transistor. Di tempat-tempat terpencil hanya orang-orang Belanda dan pejabat pemerintah saja yang mampu memiliki pesawat radio yang mempergunakan baterai mobil (*accu*), misalnya di daerah Bolaang Mongondow, di daerah pedalaman hanya Raja Bolaang Uki Arie Hasan Gobol yang memiliki radio yang dengannya ia dapat tiap malam mengikuti perkembangan yang ada. ²⁴⁰⁾

Di daerah Bolaang Mongondow ini banyak orang Jepang yang mengusahakan perkebunan-perkebunan, penggilingan padi dan sebagainya, antaranya Mori di Modayag, Kurimoto di Kotamobagu, Fuyisaki di Madayag, Gentaro Miai di Babo Sangtombolang, Hasabe di Kotamobagu, Arimura di Bolaang Uki, Koku di Ayong Sangtombolang dan lain-lain. ²⁴¹⁾ Salah seorang di antara mereka yaitu Kurimoto mau mempengaruhi seorang bekas Polisi di Kotamobagu. Mulai saat itu bertepatan dengan situasi yang semakin gawat akibat ancaman perang dari Jepang, maka semua orang Jepang di daerah itu ditangkap lalu dibawa ke Manado. ²⁴²⁾

Sebelum itu ada seorang pengusaha perkebunan di Distrik Kotabunan mengadakan pesta perpisahan karena katanya ia mau pulang ke Jepang. Orang itu bernama Arimura dan mengundang Kepala Distrik Kotabunan A.W.A. van Gobel untuk hadir dalam pestanya. Rupanya orang-orang Jepang mulai dicurigai sehingga ketika Gobel pulang, ia dipanggil menghadap Kontrolur di Kotamobagu lalu diberhentikan dari jabatannya. ²⁴³⁾

240) Wawancara dengan Arie Hasan Gobol, 25-9-1978.

241) Wawancara dengan M.J. Manoppo dan S.A. Sugeha, 23-9-1978.

242) Wawancara dengan F. Karouwan, 25-9-1978.

243) Wawancara dengan A.J.U. Zulhadji, 26-9-1978.

2. Waktu kedatangan pasukan Jepang

Pendudukan Jepang di Sulawesi Utara tidak dilakukan secara serentak dengan melakukan serangan di semua daerah tetapi serangan mereka hanya ditujukan ke Minahasa. Hal ini karena di Minahasa lah pusat pemerintahan dan terdapat basis-basis pertahanan yang dipertahankan oleh:

- a. Milisi Eropa dan *Reserve Corps* di kota Manado;
- b. *Reserve Corps* yang mempertahankan kubu-kubu di Manado, Kema, Airmadidi, Likupang, Wori, Tinoor, Tomohon, Kawangkoan, Langowan, Kakas, Kalawiran, Tasuka, Tondano dan Amurang.

Tetapi pemusatan pasukan Belanda hanya dilakukan di Kema, Airmadidi, Manado, Tinoor dan Kalawiran. Komandan militer Belanda pada waktu itu ialah Mayor Schilmuller dengan pasukan berjumlah kurang lebih dua bataliyon.²⁴⁴⁾

Rakyat Minahasa melihat persiapan-persiapan perang yang dilakukan Belanda, ditambah santernya berita-berita bahwa Jepang tidak lama lagi akan mendarat dan diperkuat lagi oleh serangan bom atas lapangan air Tasuka, mulai menyingkir ke perkebunan-perkebunan karena takut. Terjadi pengungsian besar-besaran di mana-mana di mana kota-kota dan desa-desa mulai dikosongkan karena rakyatnya lari menyingkir. Menurut laporan pemerintah menginstruksikan kepada semua kantor dan Rumah Sakit serta sekolah-sekolah untuk menyediakan lobang-lobang perlindungan bahaya serangan udara. Juga pada waktu malam, rakyat harus menjaga agar sinar lampu tidak kelihatan dari luar.²⁴⁵⁾

Tidak antara lama kemudian, pasukan Jepang mulai mengadakan pendaratan serentak di pantai Kema dan Manado pada pagi hari sedangkan di Kalawiran pada siangya yaitu Tanggal 11 Januari 1942.²⁴⁶⁾ Belanda mengadakan aksi bumi hangus yaitu dengan membakar tangki-tangki minyak di tepi pantai Manado sedangkan kota Manado sendiri kemudian segera dikosongkan. Pertempuran di pantai Manado tidak berlangsung lama di mana

244) S.U. Marunduh, *op. cit.*, hal. 46 - 47.

245) R.F.J. Palit, *Tomohon Dalam lintasan Sejarah Perang Pasifik*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978, hal. 20.

246) S.U. Marunduh, *op. cit.*, hal. 54; lihat R.F.J. Palit, *op. cit.*, hal. 27-28.

pasukan Belanda segera mengundurkan diri untuk bertahan di Tinoor dan Tomohon, demikian juga di Kema dan Airmadidi. Pasukan Jepang yang datang mendarat 11 Januari 1942 itu jumlahnya kira-kira satu setengah divisi yang diangkut dengan lebih 40 kapal laut.²⁴⁷⁾ Setelah semua pertahanan Belanda dapat dipatahkan Jepang, maka banyak orang Belanda baik militer maupun sipil melarikan diri menuju daerah Gorontalo melalui daerah Bolaang Mongondow. Barulah setelah Jepang berhasil menguasai seluruh Minahasa maka mulailah mereka mengatur langkah-langkah seperlunya untuk memantapkan pemerintahan militer baik di Minahasa maupun di Sangir Talaud, Bolaang Mongondow, Gorontalo bahkan sampai ke seluruh wilayah Keresidenan Manado sampai ke Sulawesi Tengah.

Begitu Jepang berhasil mendarat di Minahasa dan kemudian menguasai seluruh wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, mereka mulai mengusahakan hubungan yang baik dengan rakyat. Semboyan-semboyan seperti "*Indonesia Nippon Joto*" mulai terdengar di mana-mana. Karena melihat bahwa sikap Jepang yang baik yang berbeda dengan desas desus sebelum mereka datang, maka rakyat mulai hilang takutnya. Mereka menganggap bahwa benar-benar Jepang telah datang sebagai pembebas. Bendera Merah Putih tidak dilarang dikibarkan rakyat misalnya tanggal 10 Januari di Tahuna di bawah pimpinan F. Sanger dan kawan-kawannya, juga di Gorontalo di bawah pimpinan dari R.M. Kusno Dhanu-poyo dan Nani Wartabone tanggal 23 Januari 1942, atau di daerah Sulawesi Tengah di bawah pimpinan Eddy Mondong dan kawan-kawannya.²⁴⁸⁾ Di Bolaang Mongondow, rakyat menangkapi tentara Belanda yang lari lalu menyerahkannya kepada pihak Jepang.²⁴⁹⁾ Komite Nasional Siau mengutus pimpinannya untuk menemui Jepang serta membantu Jepang mengangkut para tahanan Belanda ke Manado, lalu kembali untuk mengibarkan bendera Merah Putih di sana.²⁵⁰⁾

247) M. Stigster, *Pelajaran 50 tahun MSC di Sulawesi 1920 - 1970*, Tomohon, 1970, hal. 112; lihat H.V. Quispel, *Nederlandsch-Indie in den Tweeden Wereldoorlog*, The Nederland Publishing Company Limited, Kensington, London, 1945, hal. 12, 13.

248) *Ibid.*, hal. 41; lihat H.M.L. Legoh, *14 Pebruari 1946 Mengisi Lembaran Sejarah Indonesia*, Manado, hal. 8.

249) Wawancara dengan S.A. Sugeha, 23-9-1978.

250) H.B. Alias, *op. cit.*, hal. 147.

3. Sikap Jepang terhadap Aparatur Pemerintah Hindia Belanda

Setelah tentara Jepang berhasil menguasai Minahasa, maka pada tanggal 15 Januari 1942, keluarlah Pengumuman resmi dari pemerintah militer yang isinya agar supaya para anggota militer Belanda yang masih bersembunyi segera menyerahkan diri lengkap dengan persenjataannya. Pengumuman ini disampaikan melalui para Kepala Distrik dan Kepala Desa. Dengan demikian maka semua orang Belanda yang dulunya memegang jabatan sipil maupun militer, termasuk seluruh orang lain kulit putih lainnya ditawan di beberapa tempat antara lain di Manado, Tomohon, Airmadidi dan Tondano.²⁵¹⁾ Bukan saja pejabat sipil atau militer, para rohaniawan Katolik dan Protestan turut ditangkap juga yaitu mereka yang berkulit putih.²⁵²⁾

Dengan ditangkapnya semua pejabat kulit putih (Belanda) maka untuk mengisi lowongan dalam pemerintahan sipil beberapa orang Indonesia diangkat Jepang menggantikan mereka. Tetapi tidak lama kemudian jabatan itu diambil alih lalu langsung dipegang oleh pejabat militer Jepang, misalnya yang terjadi di Sangir Talaud. Ketika Ketua Komite Nasional Siau W.A. Kansil menghadap Jepang di Manado, maka ia diangkat jadi Koordinator Pemerintahan Sangir Talaud, tetapi kemudian diturunkan jadi wakil Raja Manganitu.²⁵³⁾

Sikap Jepang kepada aparatur pemerintahan sipil Belanda berbeda dengan sikap mereka kepada aparatur pemerintahan sipil pribumi. Pejabat-pejabat Belanda semuanya ditangkap. Setelah mereka berhasil menguasai keadaan, maka keluarlah pengumuman resmi sekitar akhir Januari 1942 yang memerintahkan kepada para pejabat setingkat Raja dan pembantu-pembantu utamanya segera datang melaporkan diri di Langowan kepada Letnan Kolonel Horiuchi, Panglima Tentara Pendudukan yang bermarkas di sana. Oleh sebab itu maka untuk memenuhi perintah, berduyun-duyunlah mereka pergi ke Langowan untuk datang melapor. Para Raja diharuskan menyerahkan Korte *Verklaring* yang pernah dibuatnya dengan pemerintah Belanda kemudian mereka diangkat lagi dalam jabatannya itu dengan gelar *Suco*, lalu diberi tanda pengenal untuk

251) S.U. Marunduh, *op. cit.*, hal. 60, 62.

252) R.F.J. Palit, *op. cit.*, hal. 37.

253) H.B. Elias, *op. cit.*, hal. 147.

dikenakan di tangan kiri. ²⁵⁴⁾

Sulawesi Utara termasuk dalam wilayah kekuasaan *kaigun* (Angkatan Laut Jepang) yang berpusat di Makasar (sekarang Ujungpandang). Organisasi pemerintahannya bernama *Minseifu* yang dikepalai oleh pejabat setingkat Inspektur Jenderal yang disebut *Sokan*. Di bawah *Minseifu* ini ada *Minsei-minsei* yaitu *Minsei* Kalimantan, *Minsei* Sulawesi dan *Minsei* Seram. ²⁵⁵⁾ Wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah (bekas wilayah Keresidenan Manado) diperintah oleh pejabat yang nama jabatannya mula-mula *Syucosyoco*, mulai September 1942 disebut *Sibuco* dan sejak 1943 disebut *Syuciji*. Keresiden Manado pada masa Jepang disebut Manado-Syu sedangkan kantornya disebut *Minseibu*. ²⁵⁶⁾

Untuk memantapkan kekuasaan sipilnya, maka Jepang mengatur susunan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Keresidenan Manado disebut Manado *Syu* dan kepalanya yaitu *Syuco* (setingkat Residen masa Belanda);
- b. Wilayah bekas Asisten Residen disebut *Ken*, kepalanya disebut *Bunkenkanrikan*;
- c. Wilayah Distrik disebut *Gun*, kepalanya disebut *Gunco*;
- d. Wilayah Distrik Bawahan disebut *Fukugun*, kepalanya disebut *Fukugunco*;
- e. Desa disebut *son* dan kepalanya ialah *Sonco*.
- f. Kepala jaga disebut *Kuco* dan wilayahnya disebut *Ku*;
- g. Meweteng yaitu pembantu Kepala Jaga disebut *Kumico*. ²⁵⁷⁾

Demikianlah tindak lanjut yang diambil Jepang setelah berhasil menguasai Sulawesi Utara. Struktur pemerintahan sipil ini berlaku terus sampai Jepang menyerah kepada Sekutu.

4. Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia

Pada saat-saat pertama ketika mereka baru saja mendarat

256) R.F.J. Palit, *op. cit.*, hal. 47.

257) S.U. Marunduh, *op. cit.*, hal. 64.

254) Wawancara dengan bekas raja A.H. Gobol, 25-9-1978.

255) Drs. O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Djepang*, Sinar Jaya, Jakarta, 1962, hal. 71.

dan memenangkan perang dengan Belanda, Jepang menunjukkan sikap yang ramah tamah terhadap rakyat, untuk memberikan kesan bahwa mereka datang sebagai pembebas. Mereka mendobrak toko-toko lalu menyuruh rakyat mengambil apa yang dibutuhkan. ²⁵⁸⁾ Mereka katakan bahwa Jepang dan Indonesia adalah berketurunan sama dan karena itu rakyat Indonesia harus berdam-pingan dengan Jepang memenangkan perang melawan kaum penjajah. Bendera Merah Putih pada mulanya diperkenankan untuk dikibarkan oleh rakyat.

Tetapi lama-kelamaan sikap mereka berubah. Orang-orang yang pernah diperkenankan mengambil isi toko-toko mulai dicari-cari untuk dihukum. Bendera Merah Putih dilarang dikibarkan dan sebagai gantinya harus mengibarkan bendera Hinomaru. Rakyat dikerahkan mengerjakan kebun-kebun tapi hasilnya harus disera-rahkan kepada Jepang. Gereja-gereja diambil alih dan ditutup karena dianggap sebagai harta-benda musuh, walaupun kemudian diizinkan buka dengan syarat tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan politik.

Dan untuk mendukung tujuan-tujuan perangnya, rakyat dikerahkan membantu melalui pembentukan barisan-barisan keamanan. Pemuda ditampung dalam Bogodang dan kemudian namanya diubah menjadi *Keibodan*. Tugas-tugas keamanan lainnya diserahkan kepada *Seinendan* yang terdiri dari para pemuda desa. Para pemudinya ditampung dalam *Fujinkai*. Jepang membentuk pula Heiho yaitu prajurit pembantu dan ada yang dikirimkan sampai ke Sulawesi Selatan. ²⁵⁹⁾

Semua sekolah, baik sekolah gubernemen maupun sekolah-sekolah yang diusahakan swasta diambil alih dan dijadikan sekolah pemerintah dengan mata pelajaran wajib yaitu bahasa Jepang. Dididik pula pemuda-pemuda dalam bidang pertanian di sekolah yang disebut *Nomindoyo Gakko*. Selain itu Jepang juga membuka *Cu Gakko* (setingkat MULO Belanda), *Syi Sang Gakko* (sekolah guru), *Suisan Gakko* (sekolah perikanan), *Meisen Unkookai* sekolah pelayaran) dan sebagainya sebagai tempat mendidik para pemuda di sini. ²⁶⁰⁾

Di pihak lainnya Jepang mewajibkan setiap desa membentuk

258) R.F.J. Palit, *op. cit.*, hal. 35.

259) *Ibid.*, halaman 64. Wawancara dengan A.W. Kum 14-10-1978.

260) S.U. Marunduh, *op. cit.*, halaman 73-74.

kelompok-kelompok pekerja seperti *Rumusha* yang di Minahasa disebut kelompok giliran di setiap desa tetapi tidak dikirimkan bekerja di luar Manado *Syu*. Kelompok-kelompok ini dikerahkan untuk mengerjakan jalan-jalan, lapangan terbang, dan kubu-kubu pertahanan termasuk lubang-lubang tempat menyimpan perbekalan amunisi maupun makanan. Dengan kata lain, rakyat harus memeras tenaga habis-habisan bagi kepentingan Jepang, tanpa imbalan sebagaimana mestinya dalam hal kebutuhan makanan sebagai kebutuhan pokok bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya. Banyak yang harus mengorbankan jiwa-raganya karena dipaksa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat tanpa jaminan secukupnya, dan banyak pula yang harus mengorbankan jiwa-raganya karena membangkang perintah yang tidak sanggup lagi dijalankannya.

5. Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Jepang

Yang paling berat dirasakan serta paling menyakitkan hati rakyat ialah berlakunya pembatasan-pembatasan bagi rakyat untuk menikmati hasil jerih-payahnya sendiri dalam mengolah kebun-kebun, karena hasilnya harus diserahkan seluruhnya untuk kepentingan ekonomi Jepang. Rakyat hanya boleh memakan ubi, pisang, dan sebagainya tapi tidak boleh makan nasi, karena beras harus diserahkan kepada Jepang. Untuk menjaga agar rakyat menaati peraturan itu, maka di Bolaang Mongondow misalnya, semua lesung tempat menumbuk padi didaftarkan dan lubangnya disegel dengan cap dari *Nantaku*. Bagi yang kedapatan menumbuk padi segera diberikan hukuman yang berat yaitu dipukul babak-beluk kadang-kadang sampai pingsan.²⁶¹⁾

Tindakan Jepang itu menimbulkan penderitaan bagi rakyat maka mulailah timbul reaksi-reaksi yang tidak mereka harapkan. Misalnya di daerah Gorontalo yaitu di Lomboto, Jepang melarang rakyat mengeluarkan padi atau beras dari desa yang satu ke desa lain. Tahun 1943, ada lima orang yang kedapatan polisi membawa beras. Mereka diperlakukan kasar sekali, dianiaya dan berasnya dirampas. Kelima orang itu serentak mencabut kerisnya lalu menikam tiga orang polisi Jepang yang menghadang mereka, seorang di antaranya tewas dan dua orang lainnya luka-luka. Jepang segera menangkap kelima orang itu dan kepalanya dipancung.

261) Wawancara dengan Samin Imban, 25-9-1978

Di daerah Sangir Talaud, terjadi pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan rakyat Makalehi. Mereka berontak karena diancam bahaya mati kelaparan akibat Jepang tidak lagi mengirimkan bahan makanan padahal Makalehi adalah sebuah pulau yang penduduk seluruhnya nelayan dan tidak ada tempat untuk berkebun. Pada tahun 1944 itu, rakyat mengirim utusan kepada Jogugu Ondong E. Marthing tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Awal 1945, sebuah kapal Sekutu singgah di pulau itu yang membangkitkan kemauan dan keberanian mereka untuk berontak, karena dijanjikan senjata untuk itu. 262)

Bulan Maret 1945 mereka mengadakan rapat serta memutuskan tidak mau lagi mengakui pemerintahan Jepang. Untuk menyongsong datangnya Sekutu, di tepi pantai mereka mengibarkan bendera Belanda sedangkan di tengah pulau mereka menaikkan Bendera Merah Putih di tepi danau. Mereka mengangkat Salmon Labaeng untuk membentuk pasukan dan menyusun pertahanan dengan rintangan-rintangan batang kelapa agar pasukan Jepang yang mungkin dikirim ke sana terhambat gerakannya. Tindakan Jepang yang pertama ialah menangkap Jogugu E. Marthing, dihukum pancung kepala atas tuduhan bahwa dialah yang merencanakan pemberontakan itu. Tanggal 12 Juni 1945, Jepang mengarahkan pasukan dari Manado untuk menindas pemberontakan di Makalehi. Perlawanan tanggal 15 Juni hanya berlangsung dua jam lamanya dan sebagai akibatnya, 16 Juni 1945, tiga puluh dua orang pemimpin pemberontakan itu dipenggal kepalanya di Ondong. 263)

Wilayah Sulawesi Utara dalam masa pendudukan Jepang dikuasai oleh angkatan laut (*Kaigun*). Namun walaupun begitu, ada juga pasukan-pasukan angkatan darat (*Rikugun*) yang ditugaskan di wilayah ini tetapi di bawah taktis dari Kaigun. Menjelang kealahannya, mulai terlihat pasukan-pasukan yang ditempatkan di daerah ini, karena rupanya Jepang bermaksud mempertahankan daerah ini. Hal ini karena terlihat adanya persiapan-persiapan perang misalnya pembuatan lapangan terbang baru atau memperbaiki yang belum selesai dikerjakan Belanda.

Misalnya lapangan terbang Mapanget (sekarang dinamakan lapangan terbang Sam Ratulangi) pembuatan diteruskan oleh Je-

262) H.B. Elias, *op. cit.*, halaman 147-150.

263) *Ibid*, halaman 150-151

264) R.F.J. Palit., *op. cit.*, halaman 61, 62.

pang dengan mengerahkan tenaga rakyat dan selesai pada tahun 1943. Bulan Oktober tahun itu mereka mengarahkan rakyat mengerjakan lapangan terbang Tawaang. Bulan berikutnya yaitu bulan Nopember 1943 penyelesaian lapangan terbang Kalawiran. Selain itu mereka meneruskan penyelesaian pusat tenaga listrik di Tonsea Lama (sekarang termasuk Kecamatan Airmadidi).²⁶⁴⁾ Untuk menangkis serangan udara Sekutu, Jepang membangun kubu-kubu baik di tepi pantai maupun di dekat lapangan terbang dan sekitar kota-kota. Dalam membangun semua obyek vital dan militer tersebut di atas, rakyat dikerahkan dengan sistem giliran semacam romusha yang dikenal di Pulau Jawa. Demikianlah kondisi pertahanan Jepang menjelang saat-saat terakhir kekalahannya melawan Sekutu.

Ketika Jepang menyerah, Sekutu menawan delapan ribu orang Jepang baik sipil maupun militer di Sulawesi Utara. Pada Bulan Juni 1946, mereka diangkut kembali ke tanah airnya.²⁶⁵⁾

265) *Ibid.*, halaman 95-96.

BAB V

PENUTUP

Sebagai rangkuman atau ringkasan maka dapat dikemukakan bahwa naskah ini memperlihatkan bagaimana kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia yang diam di Sulawesi Utara ini selama masa penjajahan Belanda khususnya antara tahun 1900-1942 dan kemudian masa singkat penjajahan Jepang Januari 1942 sampai Agustus 1945. Penjajahan mana terjadi sebagai akibat yang kurang menguntungkan dengan bangsa-bangsa Barat khusus kaum Kolonialis Belanda.

Hubungan itu sendiri berlangsung ratusan tahun lamanya, merugikan posisi bangsa kita sehingga terpaksa kita harus prihatin atas keunggulan kaum penjajah itu. Dalam situasi ini maka tidak terelakkan lagi, masuklah pengaruh-pengaruh yang kurang menguntungkan dalam semua sendi kehidupan dan penghidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun di dalam bidang-bidang lainnya.

Namun demikian, identitas sebagai bangsa yang merdeka tidak pernah punah. Masa antara 1900-1942 yang disebut sebagai **ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL** memperlihatkan bagaimana rakyat Indonesia yang diam di Sulawesi Utara ini, sesuai kata-kata seorang tokoh pergerakan di depan sidang pengadilan Kolonial, bahwa walaupun pada lahirnya mereka masih dijajah namun batinnya telah merdeka.

Enyahnya Belanda dan datangnya Jepang, tidak melemahkan semangat yang bernyala-nyala untuk menjemput kemerdekaan dan kebebasan yang didambakan.

DAFTAR KATA

A

Adriani - Kruyt - Instituut
Agama in datu
Aksi bumi hangus
Ambachtschool
Ambsressort
Amsterdam, benteng
Andu, Dr. A.B.

B

Bachdim, Salim,
Badan Pekabaran Injil
Balai pendidikan dan Pengajaran Islamiyah (BPPI)
Bate-bate
Batu Pinawetengan
Bawengan, A.N.
Beo, ibukota
Berita Gereja
Beroepsmilitair
Bintauna, Kerajaan
Bitung, kota administratif
Bitung, pelabuhan
Bogar, A.J.K. Raja
Bolaang, ibukota
Bolaang, pelabuhan
Bolaang Itang, ibukota kerajaan
Bolaang Mongondow, Kerajaan Onderafdeeling
Bolaang Uki, Kerajaan
Bolango, Kerajaan
Boroko, ibukota
Bruno, Dr. Slotemaker de

C

Cakalele, tari
Capellen, Dr. v.d. Valde de
Chairun, Sultan
Crommelin, Ds.

D

Daerah Pekabaran Injil
Datu Binangkang
Datunsolang, Muhamad Turadju, Raja Pattilima, Raja
Dauhan, G.E.J.B.
Dewan Kota Manado
Dhanupojo – R.M. Kusno
Diniyah Muhammadiyah
Dolot, Adampe
Domein Verklaring

E

Alias, H.B.
Endt, A. van der
Europees Bestuursambtenaar
Europeesche Lagere School
Eyato, Raja

F

Fadjar Asia, surat kabar
Fantayo, ibukota
Franz Ferdinand, Pangeran

G

Gandaria, A.T.
GAPI – Cabang Bolaang Mongondow
Gentuma
Geredja Katolik, bulanan
Gerakan Majelis Gereja Indische Kerk
Geredja Masehi Injili Minahasa (GMIM)
Gezaghebber
Gobel, A.W.A. van – Raden van
Gobol, Arie Hasan, Raja Hasan Iskandar Raja
Gorontalo, Afdeeling Kotapradja
Goropai, gedung Gereja
Graaafland, N, Pendeta
Grohe, Pendeta
Gunde, tari

H

Hadjuh alias Ti Ka Tju
Hari Koperasi
Harisah Jusuf
Henrique de Sa, Panglima
Hermanses, Ch.
Hermanses, Cp.
Hermanses, M.
Hermanus, frederik
Hirschman, A., Residen
Hizbul Wathon
Hoekstra, Asisten Residen
Holandsch Chineze School
Hontinimbang
Hoofdenschool
Hukum Besar
Hukum Kedua
Hukum Tua
Hulp en Spaarbank

I

Imban, Zakaria
Indische Kerk.
Indonesia, bulanan
Indonesia Studieclub Surabaja
Inlanda Leraarbond
Iskandar Bija, Raja
 Olii, Raja
Islam Biangkali
Islam Hadung
Islam Makung

J

Jacobus II, Sultan
Jakim Intan Permata
Java China Japan Rijn
Java Pacific Rijn
Jogugu
Jong Islamieten Bond (JIB)
Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling

Junus, Abudi

K

kabasaran, tari
Kaidipang, Kerajaan

Kalawiran, Lapangan terbang
Kansil, W.A.
Kapala Balak
Kapiten Laut
Katjou, Ibrahim
Kebenaran Agama Pengharapan
Kebijaksanaan transmigrasi
Kegiatan tabliq dan dakwah
Kelling, pendeta
Kema, pantai
Kendahe-Tahuna, Kerajaan
Kendhar, Kerajaan
Kong Hwa Poo, mingguan
Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM)
Kerk Bestuur
Kesatuan milisi
Ketua Dewan Kurator
Kewajiban rodi
Kinalang, golongan
Karineot, musik
Kobar, koperasi
kohongian, golongan
Komite Gerakan Indonesia
Komite
Komite Indonesia Berparlemen
Komite Nasional Siau
Kolopita, Luther, pendeta
Kongres Koperasi
Kongres Rakyat Indonesia
Korte Verklaring
Kotamobagu, ibukota
Kotobangon, ibukota
Krams, Controleur
Kumpulan Wanita Maria Martha

Kweekschool

L

Lahai, Raja
Landraad
Lange, A. de
Limboto, Kerajaan

Limburg Stirum, Graaf van
Linuh, Max

M

Magelhaes, Diogo de
Majelis Umum, majalah
Makmur Lubis
Manado Courant
Manado Distrik
Manado Kotamadya
Manado Keresidenan
Manado pantai
Mangindaan, Ds. L.,
Manoppo Anthon C.,
Manoppo Laurens Cornelis
Manoppo Riedel Manuel
Mapanget, lapangan terbang
Maria Walanda Maramis
Marsaoleh
Maupu-upusan, majalah
Meisjeskopschool
Melayu Manado, bahasa
Menara, mingguan
Merur, koperasi
Mohuyula
Mokoagow, Loloda, Raja
Mokodongan, Unta
Mokoginta, A.P. Jogugu
Muhammadiyah - Tersiar
Muis, Abdul

N

Nationale daad
Nationale geest
Nationale wil
Nendu, guru
Neutraal Volkschool
Nederlandsch Indische Handels Bank
Nippon Boyeki Kaisha

O

Olii, Tom
Opo
Opo Emung
Opo Lao

P

Padtbrugge R., Gubernur
Pandean, Ny. S.K.
Pangkal Setia - Surat Kabar
Parengkuan Paul Frederik, Mayor
Parengkuan P. F. Raja
Paroko, golongan
Partai Indonesia - Raya
Partai Nasional Indonesia (PNI)
Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)
Perhimpunan Indonesia
Perkumpulan Sepak Bola Nasional Radikal
Persatuan Minahasa
Pewarta Manado, mingguan
Pogogutat
Polopalo
Ponto, Christian Raja
Quadrille
Que, K.D.

Quadrille
Que, K.D.

R

Rapat Adat

Rakangkang ne Lotak Amian
Ratahan, distrik
Ratulangi, DR. G.S.S.J.
Regeringsreglement
Rekso Sulyo
Reserve Corps
Residentie gerecht
Riedel, Ds. J.G.F.
Ruanganna
Rukun Tani

S

Salekede, Papude
Salo, tari
Samagenang, koperasi
Sangir en Talaud Comite
Santiago, Raja
Sarapil, Raja
Sarapung
Schilmuller, Mayor
Sekolah Rumah Tangga
Serikat Islam Afdeeling Pandu (SIAP)
Serikat Islam Angkatan Pandu (SIAP)
Serikat Ondong Muda
Sigar Ph. F.L.
Sinar Baru
Sinar Budi
Suluh Penghidupan

T

Tabukan, kerajaan
Tabukan Lama, ibu kota
Tadohe, Raja
Tahuna, ibukota
Tahuna, Kerajaan
Talaud, Kerajaan
Talhatu, paderi
Taman Ibu, majalah
Tamawiwu J., Raja

Tanam Paksa
Tanjung Pengharapan
Tasuka, lapangan air
Tatengkeng, J.E.
Taudaa
Ternate, Kesultanan
Tjahaja Sijang, surat kabar
Tondano, perang
Tonsea, distrik
Toulour, distrik
Towidjojo, Miden
Tuanku Imam Bonjol
Tuerah Thomas
Tungkagi, Ibrahim
Tuokono, perkumpulan

U

Ulu, ibu kota
Uno, Abdullah
Upase, tari

V

Veenhuyzen, Anthon Cornelis
Velsen SJ, A.P.F., Pastor
Vervolkschool
Veteran Perintis Kemerdekaan
Vini Vidi Vici, mingguan
Viol
Volksbank Tonsea
Volkschool
Volksraad

W

Waworuntu, A.L. Hukum Besar
Wederkerig hulpbetoon
Winsulangi, Raja
Wuu

Y

Yanis, E.G.
Yokohama Fisch Oil Compagnie
Yustisi - 26

Z

Zamrah, tari
Zelfbestuurs Commissie
Zelfbestuursrechtbank
Zelfbestuursregelen
Zelfpolitie
Zelfrechtspraak
Zelfuitvoering
Zelfwetgeving

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adam L., *Pemerintahan di Minahasa*, Bhratara, Jakarta, 1975.
- Adriaan, D.B., *Renungan Kisah Kepulauan Sangihe Talaud*, Jilid I, Tabukan, 1968.
- Adriani, Dr. "De Landbouw in het Heidendom der Indonesische Volken" artikel dalam *Verzamelde Geschriften, deel I*, Erven F. Bohn NV, Haarlem, 1932.
- Arsip Nasional RI, *Laporan Politik Tahun 1837 (Staatskundige Overzicht van Nederlandsch Indie 1837)*, Jakarta, 1971.
- Bagian Bahasa Jawatan Kebudayaan Kem. PPK, *Medan Bahasa memuat hal ihwal bahasa Indonesia*, Nomor 9 Tahun VI, Jakarta, 1956.
- Badan Pengusahaan Pelabuhan Bitung, *Penuntun Singkat Pelabuhan Bitung-Manado*, Bitung, 1973.
- Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Jilid I*, Jakarta, 1974.
- Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Utara, *Mengenal Pahlawan-pahlawan/Kesuma Bangsa Indonesia*, Manado, 1976.
- Brosur "Peringatan 35 Tahun Peristiwa Patriotisme 23 Januari 1942 di Gorontalo dan Dua Tahun Yayasan 23 Januari 1942", Jakarta, 1977.
- Brouwer, Dr. M., *Bestuurstelsel en Bestuursvormen in de Minahasa*, H. Veenman & Zonen, Wagenigen, 1936.
- Bujung BA, R. Es., *Peristiwa 14 Pebruari 1946 Dalam Rangka Revolusi Kemerdekaan di Sulawesi Utara*, Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Utara, Manado, 1971.
- Bupati KDH Tingkat II Bolaang Mongondow, *Esensi Laporan Bupati KDH Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow kepada Bapak Gubernur KDH Daerah Tingkat I Sulawesi Utara pada Perkunjungan pertama di Kabupaten Bolaang Mongondow 1 Agustus 1978*, Kotamobagu, 1978.

- Bupati KDH Tingkat II Bolaang Mongondow, *Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow*, Kotamobagu, 1978.
- Bupati KDH Tingkat II Bolaang Mongondow, *Selayang Pandang Tentang Perkembangan Tata Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara*, Kotamobagu, 1977.
- Burger D.H. et al., *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I, PN Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Dimiyati, Muhammad, *Sejarah Perjuangan Indonesia*, Wijaya, Jakarta, 1951.
- Dunnebie W., *Mengenai Raja-raja dari Bolaang Mongondow*, naskah tulisan tangan, tanpa tahun.
- Dunnebie W., *Pemberitaan Pendek Atas Beberapa Tanggal Tentang Pekerjaan Kerapatan atau Genotskap di Bolaang Mongondow*, Den Haag, 1954.
- Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow, *Pandangan Beberapa Waktu Secara Kronologis dari Sejarah Gereja di Bolaang Mongondow*, Kotamobagu, 1967.
- Haga G.J., "De Lima Pahalaa (Gorontalo)", *Volksordening adatrecht en bestuurspolitiek*" artikel dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, en Volkenkunde*, LXXI, 1931.
- Inspeksi Daerah Kebudayaan Sulawesi Utara, *Brosur Tentang Minahasa*, Manado, tanpa tahun.
- Kantor Wilayah P dan K Propinsi Sulawesi Utara, Fakultas Sastra Unsrat, PKSS IKIP Manado, *Struktur Bahasa Melayu Manado*, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sulawesi Utara Departemen P dan K, Manado, 1976/1977.
- Kleintjes, Prof. Mr. Ph., *Wetten en Verordingen betreffende de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie*, J.H. de Bussy, Amsterdam, 1927.
- Koagouw, Drs. P.H. dan Drs. Fendy E.W. Parengkuan, *Letak Pine-leng sebagai Tempat Pemakaman Pahlawan Tuanku Imam Bonjol*, hasil Penelitian, Proyek Pengembangan Media Kebu-

- dayaan Departemen P dan K, Manado, 1978.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1974.
- Lembaga Pers & Pendapat Umum (LPPU) Cabang Manado, *Sejarah Pers di Daerah Sulawesi Utara*, Manado, 1977.
- Lapian A.B., *Cahaya Siyang – Surat Kabar Minahasa Yang Pertama*, Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial dan Pengabdian Masyarakat, 14-20 Nopember, Manado, 1977.
- Liputo M.H. *Sejarah Gorontalo Dua Lima Pohalaa*, Jilid I-XIII, Percetakan Rakyat, Gorontalo, 1950.
- Manus L.Th., *Gagasan DR. G.S.S.J. Ratulangi Tentang Kemajuan Indonesia*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1973.
- Manoppo, H.C. *Tuturan Bangsa Rāḡa Keḡājaan Bolang Mongondow*, naskah ketikan, tanpa tahun.
- Marle, Ir. V.J. van, *Verslag Spoorwegonderzoek Manado*, Weltevreden, 1922.
- Marunduh, S.U., *Pendaratan Jepang di Minahasa, tesis Sarjana*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- Meijier, J.E. de, *De Minahasa en Noord Celebes Indische Cids 1908*, J.H. de Bussy, Amsterdam, 1909.
- Notebaart J.C. *Buku Peringatan Dua Puluh Tahun Perserikatan Normal School (PNS) Kort overzicht van de Geschiedenis van het Inlandesch Onderwijs in de Tegenwoordige Residentie Manado*, Buitenzorgsche Drukkerij, 1940.
- Palit R.F.J., *Tomohon Dalam Lintasan Sejarah Perang Pasifik* tesis Sarjana, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- Panitia Seminar Adat-Istiadat Daerah Gorontalo, *Himpunan Bahan-bahan Seminar Adat Daerah Gorontalo*, Limboto, September 1971.
- Parengkuan Drs. Fendy E.W. "Mengenal Pertanian Tradisional Orang Minahasa" artikel dalam majalah tak berkala *Duta Budaya* Nomor 03 Tahun VIII, Lembaga Penelitian Sastra Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, Juli 1978.

- Parengkuan Drs. Fendy E.W. *Sejarah Daerah Bolaang Mongondow*, Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- Parengkuan E.W., "Suatu Tinjauan Sejarah Tentang Peranan KG-PM Dalam Sejarah Pergerakan Nasional di Minahasa" artikel dalam majalah tak berkala *Duta Budaya* Nomor 01 Tahun I, Lembaga Penelitian Sastra Fakultas Sastra Unsrat, Manado, 1971.
- Piagam Perjanjian (Korte Verklaring) antara Raja Elijah Datun-solang dari Kerajaan Bintauna dengan Residen Manado tertanggal 24-9-1857 yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 22-2-1858.
- Pondaag W.S.T., *Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputra DR. G.S.S.J. Ratulangie Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Yayasan Penerbitan DR. G.S.S.J. Ratulangie, Surabaya, 1966.
- Pringgodigdo, SH, A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* Dian Rakyat, Jakarta, 1967.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) Sulawesi Utara, *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, Manado, 1977.
- Quispel; H.V., *Nederlandsch-Indie in den Tweeden Wereldoorlog*, The Nederland Publishing Company Ltd., Kensington, London, 1945.
- Rhijn, M. van *Memorie van Overgave het Bestuur van den aftreden den Resident van Manado*, Manado, 1941.
- Salilo Theodorus, *Suatu Tinjauan Tentang Hak Sejarah Indonesia Atas Pulau Miangas*, Skripsi Sarjana Fakultas Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1974.
- Sihombing, Drs. O.D.P., *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*, Sinar Jaya, Jakarta, 1962.
- Stigster M., *Pelayanan Lima Puluh Tahun MSC di Sulawesi 1920-1970*, Tomohon, 1970.
- Sukotjo, Wahyu, "Sejarah Perkembangan Permasalahan dan Peranan Koperasi" artikel dalam majalah *Prisma* Nomor 6 Tahun VII, Jakarta, Juli 1978.
- Surjomihardjo, Drs. Abdurrahman, *Sejarah Pergerakan Nasional*,

- SESPPU, Jakarta, 1968.
- Tatimu, Ef., *Himpunan Cerita Rakyat Daerah Sangihe Talaud*, naskah ketikan, Tahuna, 1977.
- Tatimu, Ef., *Kepulauan Sangihe Talaud*, Kantor Departemen P&K Kabupaten Sangir Talaud, Tahuna, 1975.
- Taulu H.M., *Sejarah Ringkas Masuknya Agama Islam di Sulawesi Utara dengan perkembangannya dalam Ikatan Kebudayaan dan Hukum Adat Daerah Terutama Minahasa (1525-1977)*, Yayasan Manguni Rondor, Manado, 1977.
- Taulu H.M., *Sejarah Minahasa*, Membangun, Tomohon, 1950.
- Tim Peneliti Fakultas Sastra Unsrat, *Struktur Bahasa Minahasa* (Tombulu, Tonsea, Tondano), Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sulawesi Utara, Manado, 1977/1978.
- Tirtoprodjo, SH, Drs. Susanto, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1970.
- Tumenggung Sis, Drs. Maulud, "Beberapa Analisa Perbandingan *Mapalus* dan *Gotong Royong*" artikel dalam majalah tak berkala *Duta Budaya* Nomor 02 Tahun III, Lembaga Penelitian Sastra Unsrat, Manado, 1973.
- Vikariat Apostolik Manado, *Buku Peringatan Lima Puluh Tahun Pendidikan Guru Katolik di Vikariat Manado*, Tomohon, 1953.
- Winter F., *Kisah Kaum Cendekia Berasal Minahasa Sebelum Proklamasi 17-8-1945*, BPK Gunung Mulia, Manado, 1974.

DAFTAR INFORMAN

WAWANCARA (NAMA, TEMPAT, TANGGAL) :

1. Adariku, Ali, Tahuna, 28 - 9 - 1978
2. Bone, Sun, Siedeng, 3 - 10 - 1978
3. Buisan, G.A., Tahuna, 27 - 9 - 1978
4. Datunsolang, A.M., Mogolaing, 20/9 dan 22/9 - 1978
5. Gobol, Arie Hasan, Kotobangon, 25 - 9 - 1978
6. Hippy, Ilotidie, 5 - 10 - 1978
7. Imban, Samin, Molinow, 25 - 9 - 1978
8. Karouwan, Frits, Kotamobagu, 25 - 9 - 1978
9. Kartawinata, Winangun, 23 - 10 - 1978
10. Korompot, Lau Donggala, Mogolaing, 29 - 9 - 1978
11. Kum, A.W., Gorontalo, 14 - 10 - 1978
12. Lahindo, Z.M., Bungalawang, 1 - 10 - 1978
13. Legrans, H., Tahuna, 18 - 9 - 1978
14. Liotohe, Anton, Tahuna, 29 - 9 - 1978
15. Madonsa, D., Tahuna, 28 - 9 - 1978
16. Makahanap, Th., Tahuna, 27 - 9 - 1978
17. Mandik, N. Tahuna, 6 - 10 - 1978
18. Manoppo, Johanis Manuel, 14 - 10 - 1978
19. Manoppo, Marthin Jacobus, Kotobangon, 23 - 9 - 1978
20. Mongay, Ra'iyah, Manado, 14 - 10 - 1978
21. Parengkuan, Simon, Manado, 27/9 dan 14/14-1978
22. Poluan, L., Tomohon, 25 - 9 - 1978
23. Raupu, Husen, Malinow, 24 - 9 - 1978
24. Rompas, A., Tahuna, 27 - 9 - 1978
25. Salim Dunggio, Hadji, Manado, 10 - 10 - 1978
26. Sugeha, S.A. Kotobangon, 23 - 9 - 1978
27. Tompo, Ahmad, Tahuna, 6 - 10 - 1978
28. Umar, Ali, Pohe, 2 - 10 - 1978
29. Wantogia, Jusuf H., Suwawa, 1 - 10 - 1978
30. Wartabone, Nani, Suwawa, 10 - 10 - 1978
31. Yuda, H.E. m Tahuna, 5 - 10 - 1978
32. Zulhadji, A.J.U., Kotamobagu, 26 - 9 - 1978

LAMPIRAN

SULAWESI UTARA

SUMBER : BAPPEDA SULUT 1978

- KETERANGAN: - - - - Batas Negara
..... Batas Kabupaten
-.-.-.- Batas propinsi
□ Ibukota Propinsi
○ Ibukota Kabupaten/Kotamadya

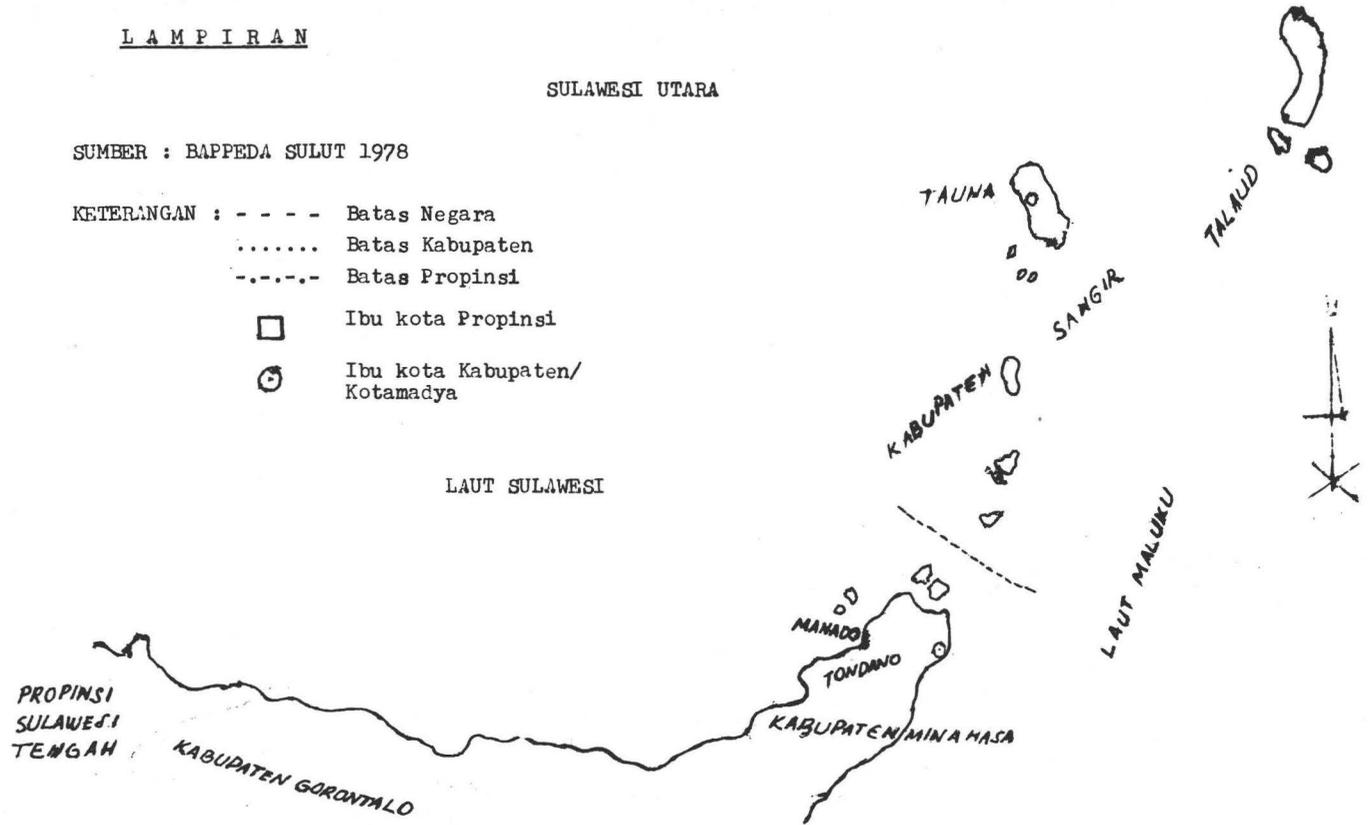
LAUT SULAWESI

L A M P I R A N

SULAWESI UTARA

SUMBER : BAPPEDA SULUT 1978

- KETERANGAN :
- - - - - Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - . - . - Batas Propinsi
 - Ibu kota Propinsi
 - ⊙ Ibu kota Kabupaten/
Kotamadya



003392.3



G3.2



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA